DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi 3
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5

BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 7

2.1 Kondisi Perekonomian 7
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 7
2.1.2 Inflasi 9
2.1.3 ICOR *(Incremental Capital Output Ratio)* 10
2.1.4 Ketenagakerjaan 12
2.1.5 Kemiskinan 13
2.1.6 Ketimpangan Regional 15
2.1.7 Ketimpangan Pendapatan 15
2.2 Kebijakan Keuangan, Strategi dan Prioritas APBD 17
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 17
2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2022 19
2.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 35

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 40

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 40
3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 40

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI 53

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah 53
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 53
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 54
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 80
4.5 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 84

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 86

5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 86
5.1.1 Pendapatan 86
5.1.2 Belanja 113
Surplus (Defisit) 161
5.1.3 Pembiayaan Netto 161
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 163
5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL 166
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 166
5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 166
5.2.3 Sisa Anggaran Lebih Akhir 167
5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca 167
5.3.1 Aset 167

5.3.2 Kewajiban 236
5.3.3 Ekuitas 251
5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 252
5.4.1 Pendapatan – LO 252
5.4.2 Beban 260
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional – LO 266
5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional – LO 266
Surplus/Defisit – LO 267
5.5 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 268
5.5.1 Ekuitas Awal 268
5.5.2 Surplus/Defisit – LO 269
5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan 270
Ekuitas Akhir 271
5.6 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas 272
5.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 272
5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 274
5.6.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 276
5.6.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris 276
5.6.5 Kenaikan Penurunan Kas 278
5.6.6 Saldo Akhir Kas 279

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..... 282

6.1 Pelaksanaan Dana Keistimewaan 282
6.2 Informasi Non Keuangan Lainnya 283

BAB 7 PENUTUP 287

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Entitas Akuntansi di DIY....5
Tabel 2. 1 Besarnya Investasi dan ICOR 11
Tabel 2. 2 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2018 – 2022 12
Tabel 2. 3 Kemiskinan di DIY Tahun 2018 - 2022 (September) 13
Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Triwulan II Tahun 2022.... 18
Tabel 2. 5 Sasaran Pembangunan Tahun 2022 35
Tabel 3. 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan....41
Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah.... 86
Tabel 5. 2 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah....87
Tabel 5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum.... 88
Tabel 5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha 89
Tabel 5. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah OPD 89
Tabel 5. 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan/villa OPD . 93
Tabel 5. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi usaha daerah OPD 94
Tabel 5. 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu.... 95
Tabel 5. 9 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 96
Tabel 5. 10 Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD 97
Tabel 5. 11 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 98
Tabel 5. 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.... 98
Tabel 5. 13 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan (Metode Lelang) 99
Tabel 5. 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 100
Tabel 5. 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Sewa BMD OPD 100
Tabel 5. 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD OPD 102
Tabel 5. 17 Rincian Realisasi Pengembalian Gaji dan Tunjangan.... 104
Tabel 5. 18 Rincian Realisasi Pengembalian Lain-lain 104
Tabel 5. 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD 106
Tabel 5. 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer 107
Tabel 5. 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 108
Tabel 5. 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil 108
Tabel 5. 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik.... 109
Tabel 5. 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 110
Tabel 5. 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS.... 110
Tabel 5. 26 Rincian setoran Yayasan KP3 DIY.... 112
Tabel 5. 27 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 112
Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja 114

Tabel 5. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OPD 115
Tabel 5. 30 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja 116
Tabel 5. 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per OPD 117
Tabel 5. 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang berdasarkan Sub Rincian Obyek 119
Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada OPD 120
Tabel 5. 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 120
Tabel 5. 35 Rincian Hibah yang Diterima BOSNAS Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta (BOSNAS) 121
Tabel 5. 36 Rincian Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan 121
Tabel 5. 37 Rincian Penerima Hibah Pada Dinas Sosial 122
Tabel 5. 38 Rincian Penerima Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 123
Tabel 5. 39 Rincian Hibah Uang pada Dinas Komunikasi dan Informatika 124
Tabel 5. 40 Rincian Hibah Uang oleh Biro Bina Mental Spiritual 124
Tabel 5. 41 Rincian Hibah uang oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat 125
Tabel 5. 42 Rincian Hibah Uang Biro Umum Humas dan Protokol 125
Tabel 5. 43 Rincian Penerima Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 126
Tabel 5. 44 Rincian Belanja Hibah Barang berdasarkan Sub Rincian Obyek 127
Tabel 5. 45 Rincian Belanja Hibah Barang pada OPD 128
Tabel 5. 46 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kesehatan 128
Tabel 5. 47 Rincian Belanja Hibah Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 129
Tabel 5. 48 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 130
Tabel 5. 49 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Sosial 133
Tabel 5. 50 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 133
Tabel 5. 51 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 134
Tabel 5. 52 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 136
Tabel 5. 53 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral 136
Tabel 5. 54 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 137
Tabel 5. 55 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kebudyaan 138
Tabel 5. 56 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan 139
Tabel 5. 57 Belanja Bantuan Sosial Uang pada Dinas Sosial 140
Tabel 5. 58 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang di rencanakan pada Individu 140
Tabel 5. 59 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 141
Tabel 5. 60 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 141
Tabel 5. 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah 142
Tabel 5. 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Per OPD 142

Tabel 5. 63 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143
Tabel 5. 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD 144
Tabel 5. 65 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 145
Tabel 5. 66 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD 146
Tabel 5. 67 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 147
Tabel 5. 68 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD 147
Tabel 5. 69 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 148
Tabel 5. 70 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD 148
Tabel 5. 71 Rincian SP2D LS Belanja Tidak Terduga Penanganan *Covid-19* 149
Tabel 5. 72 Rincian SP2D Belanja Tidak Terduga 150
Tabel 5. 73 Belanja Pencegahan Dan/Atau Penanganan Corona Virus Desease 19 (Covid-19) 151
Tabel 5. 74 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2022 154
Tabel 5. 75 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 157
Tabel 5. 76 Rincian Kekurangan Pembayaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kabuten/Kota 157
Tabel 5. 77 Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 158
Tabel 5. 78 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta 159
Tabel 5. 79 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul 159
Tabel 5. 80 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo 159
Tabel 5. 81 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul 160
Tabel 5. 82 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman 160
Tabel 5. 83 Rincian Bantuan Keuangan ke Desa 161
Tabel 5. 84 Surplus/Defisit 161
Tabel 5. 85 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 162
Tabel 5. 86 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 162
Tabel 5. 87 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 163
Tabel 5. 88 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 163
Tabel 5. 89 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD 165
Tabel 5. 90 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 167
Tabel 5. 91 Rincian Kas Di Kas Daerah 167
Tabel 5. 92 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 168
Tabel 5. 93 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 169
Tabel 5. 94 Rincian Kas di BLUD 169
Tabel 5. 95 Sisa Dana BOS Reguler Tahun 2022 di SMA/SMK/SLB Negeri 170
Tabel 5. 96 Sisa Dana BOS Kinerja Tahun 2022 di SMA/SMK/SLB Negeri 173
Tabel 5. 97 Rincian Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2022 174
Tabel 5. 98 Rincian Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2022 182
Tabel 5. 99 Rincian Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2022 185

Tabel 5. 100 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah 188
Tabel 5. 101 Kelompok Umur dan Kualitas Piutang 189
Tabel 5. 102 Data Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang Tahun 2022 189
Tabel 5. 103 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah 190
Tabel 5. 104 Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 190
Tabel 5. 105 Rincian Mutasi Piutang RS Ghrasia 191
Tabel 5. 106 Rincian Perhitungan Piutang Lainnya 193
Tabel 5. 107 Kelompok Umur dan Kualitas Piutang 193
Tabel 5. 108 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi 193
Tabel 5. 109 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 194
Tabel 5. 110 Rincian Beban Dibayar Dimuka (Asuransi) 195
Tabel 5. 111 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka 195
Tabel 5. 112 Rincian Persediaan pada OPD 196
Tabel 5. 113 Rincian Obyek Persediaan 197
Tabel 5. 114 Rincian Persediaan Cadangan Pangan Beras 197
Tabel 5. 115 Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras 198
Tabel 5. 116 Rincian Persediaan Obat Kedaluwarsa 198
Tabel 5. 117 Mutasi Dana Bergulir 204
Tabel 5. 118 Kelompok Umur Dana Bergulir 208
Tabel 5. 119 Perhitungan Penyertaan Modal 210
Tabel 5. 120 Rincian Obyek Tanah 213
Tabel 5. 121 Rincian Tanah pada OPD 213
Tabel 5. 122 Rincian Obyek Peralatan dan Mesin 214
Tabel 5. 123 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada OPD 215
Tabel 5. 124 Rincian Obyek Gedung dan Bangunan 215
Tabel 5. 125 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada OPD 216
Tabel 5. 126 Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan 216
Tabel 5. 127 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD 217
Tabel 5. 128 Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya 218
Tabel 5. 129 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada OPD 218
Tabel 5. 130 Rincian Data Aset Tetap Renovasi 219
Tabel 5. 131 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 219
Tabel 5. 132 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD 220
Tabel 5. 133 Rincian Akumulasi Penyusutan 221
Tabel 5. 134 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 222
Tabel 5. 135 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa 222
Tabel 5. 136 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga BPKA 223

Tabel 5. 137 Rincian Aset Tidak Berwujud 233
Tabel 5. 138 Aset Tidak Berwujud per OPD 233
Tabel 5. 139 Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD 234
Tabel 5. 140 Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per OPD 235
Tabel 5. 141 Akumulasi Penyusutan Dari Kemitraan Pihak Ketiga 236
Tabel 5. 142 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada OPD 237
Tabel 5. 143 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan 237
Tabel 5. 144 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Pariwisata 238
Tabel 5. 145 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Biro Umum Setda DIY 238
Tabel 5. 146 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Kesehatan 238
Tabel 5. 147 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA 239
Tabel 5. 148 Rincian Utang Belanja per OPD 248
Tabel 5. 149 Rincian Utang Belanja Menurut Jenis Utang Belanja 249
Tabel 5. 150 Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 251
Tabel 5. 151 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO 252
Tabel 5. 152 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO 252
Tabel 5. 153 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO 253
Tabel 5. 154 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO (Sub Rinci) 253
Tabel 5. 155 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO 254
Tabel 5. 156 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO 256
Tabel 5. 157 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 256
Tabel 5. 158 Rincian Pendapatan Hibah – LO 258
Tabel 5. 159 Rincian Beban – LO 260
Tabel 5. 160 Rincian Beban Operasi– LO 261
Tabel 5. 161 Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban 261
Tabel 5. 162 Rincian Beban Pegawai per SKPD 261
Tabel 5. 163 Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban 262
Tabel 5. 164 Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD 262
Tabel 5. 165 Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban 264
Tabel 5. 166 Rincian Beban Penyusutan per SKPD 265
Tabel 5. 167 Rincian Beban Transfer 265
Tabel 5. 168 Rincian Ekuitas Awal 268
Tabel 5. 169 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 270
Tabel 5. 170 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 273
Tabel 5. 171 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 273
Tabel 5. 172 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 274
Tabel 5. 173 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 274

Tabel 5. 174 Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2022 275
Tabel 5. 175 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 275
Tabel 5. 176 Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi 275
Tabel 5. 177 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 276
Tabel 5. 178 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 277
Tabel 5. 179 Rincian Perhitungan Sisa Kas 277
Tabel 5. 180 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris 278
Tabel 5. 181 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 278
Tabel 5. 182 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas 278
Tabel 5. 183 Rincian Kas Per 31 Desember 2022 279
Tabel 5. 184 Rincian Kas di BLUD 280

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2018 – 2022 7
Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2018 – 2022 8
Gambar 3 Pangsa dan Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, 2022 (c-to-c) 8
Gambar 4 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2018 – 2022 9
Gambar 5 Perbandingan Inflasi DIY dengan Inflasi Nasional (%), 2018-2022 10
Gambar 6 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2017 – 2021 11
Gambar 7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Perbandingannya dengan TPT Nasional 13
Gambar 8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di DIY (%) 14
Gambar 9 Tingkat Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan (%) 14
Gambar 10 Indeks Williamson DIY, Tahun 2017-2021 15
Gambar 11 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2017 - 2022 (September) 16
Gambar 12 Perkembangan Indeks Gini 16

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pela berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas, suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 124);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 64);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104).

1.3 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib Pelayanan Dasar, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan wajib meliputi:
   a. Pendidikan

b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Perumahan Rakyat Dan Permukiman
e. Ketentramman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
f. Sosial

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
   a. Tenaga Kerja
   b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   c. Pangan
   d. Pertanahan
   e. Lingkungan Hidup
   f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
   g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   i. perhubungan
   j. Komuminkasi dan Informatika
   k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
   l. Penanaman Modal
   m. Kepemudaan dan Olahraga
   n. Statistic
   o. Persandian
   p. Kebudayaan
   q. Perpustakaan
   r. Kearsipan
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
   a. Kelautan dan Perikanan
   b. Pariwisata
   c. Pertanian
   d. Kehutanan
   e. Energy dan Sumber Daya Mineral
   f. Perdagangan
   g. Perindustrian
   h. Ketransmigrasian
4. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang
   a. Sekretaris Daerah
   b. Sekretariat DPRD
   c. Inspektorat
   d. Perencanaan
   e. Keuangan
   f. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
   g. Penelitian dan Pengembangan
5. Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Otonomi Khusus)
   a. Kelembagaan
   b. Kebudayaan
   c. Tata Ruang
   d. Pertanahan

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY Tahun 2021 mengacu pada Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Entitas akuntansi pada Pemda DIY Tahun 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) Pengguna Anggaran. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda DIY dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Adapun rincian entitas akuntansi Pemda DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Entitas Akuntansi di DIY

1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Dinas Sosial
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10.	Dinas Perhubungan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13.	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
14.	Dinas Kebudayaan
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan
17.	Dinas Pariwisata
18.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21.	Sekretariat Daerah
22.	Sekretariat DPRD
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
25.	Badan Kepegawaian Daerah
26.	Badan Pendidikan dan Pelatihan
27.	Badan Penghubung Daerah
28.	Inspektorat
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30.	Paniradya Kaistimewan

Setiap entitas akuntansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola dalam bentuk laporan keuangan. Entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset akan melakukan konsolitasi semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran dan PPKD**.**

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
I.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
II.1. Ekonomi Makro
II.2. Kebijakan Keuangan
II.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
III.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
IV.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
IV.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
IV.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kententuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
V.1.1. Pendapatan-LRA
V.1.2. Belanja
V.1.3. Transfer
V.1.4. Pembiayaan Netto
V.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
V.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
V.1.1. Aset
V.3.2. Kewajiban
V.3.3. Ekuitas
V.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
V.4.1. Pendapatan-LO
V.4.2. Beban
V.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
V.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
V.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
V.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
V.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
V.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
V.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan
Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII. Penutup

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang positif, setelah status kasus pandemi covid-19 yang dinyatakan semakin melandai dan bersiap menuju endemi. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, saat menjelang akhir tahun 2022 juga turut mendorong pemulihan ekonomi secara nasional dengan mencabut secara resmi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut didasari oleh pengendalian pandemic covid-19 dan stabilitas ekonomi yang dapat dijaga dengan baik. Kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut terdampak dan membaik dengan adanya pertumbuhan ekonomi secara positif yaitu sebesar 5,15%, meskipun secara c-to-c pertumbuhannya agak melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) yaitu sebesar 5,58%. Akan tetapi, secara *y-on-y* pada triwulan IV di tahun 2022, kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan provinsi lain se-Pulau Jawa yaitu sebesar 5,53%. Pada Tahun 2021, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 adalah sebesar Rp107,308 triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp149,369 triliun, dan meningkat di Tahun 2022 menjadi Rp112,898 triliun (ADHK) dan Rp165,690 triliun (ADHB).

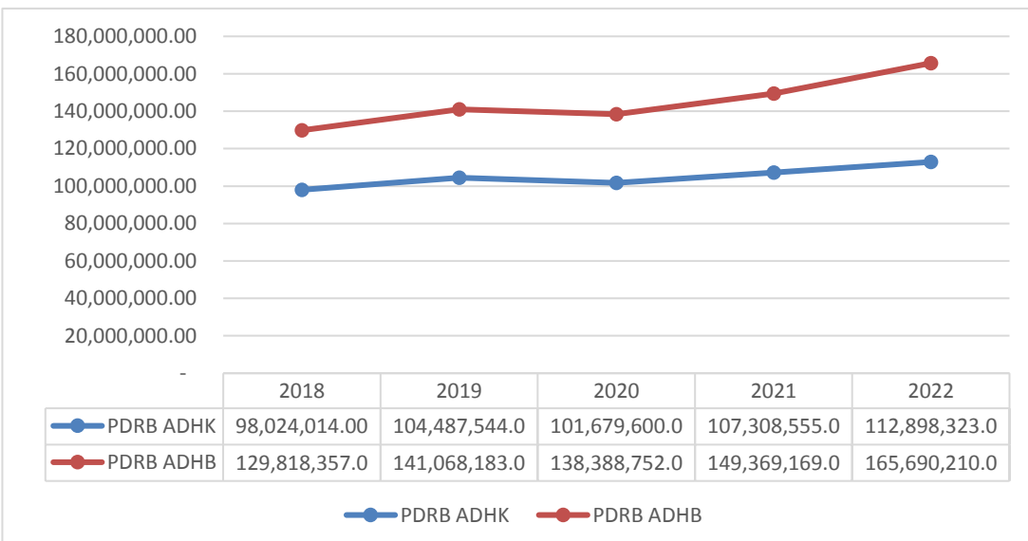

	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHK	98,024,014.00	104,487,544.0	101,679,600.0	107,308,555.0	112,898,323.0
PDRB ADHB	129,818,357.0	141,068,183.0	138,388,752.0	149,369,169.0	165,690,210.0

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (data diolah)

Gambar 1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2018 – 2022

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi DIY selama tahun 2022 agak melambat (menurun) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021), akan tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2016 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,60% sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah ada pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,69%. Pada Triwulan IV- 2022, secara y-on-y pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,53% yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%, sedangkan secara C-to-C pertumbuhan ekonomi DIY adalah sebesar 5,15% , lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3%.

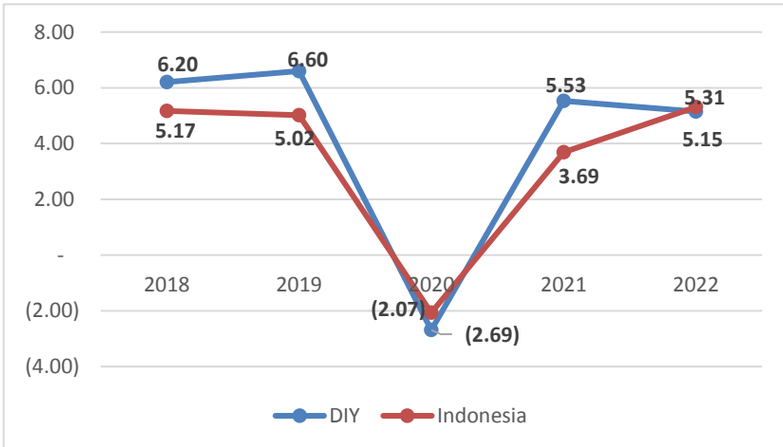

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2018 – 2022

Pertumbuhan ekonomi pada Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2022 didukung oleh sektor lapangan usaha dengan capaian tertinggi berasal dari sektor transportasi dan pergudangan (18,26%). Selain itu juga ada yang berasal dari jasa lainnya (15,04%) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (12,40%). Terdapat tiga sektor pertumbuhan ekonomi yang sangat kecil yaitu jasa Pendidikan (0,98%), Pertambangan dan Penggalian (1,72%) dan Industri pengolahan (1,75%),

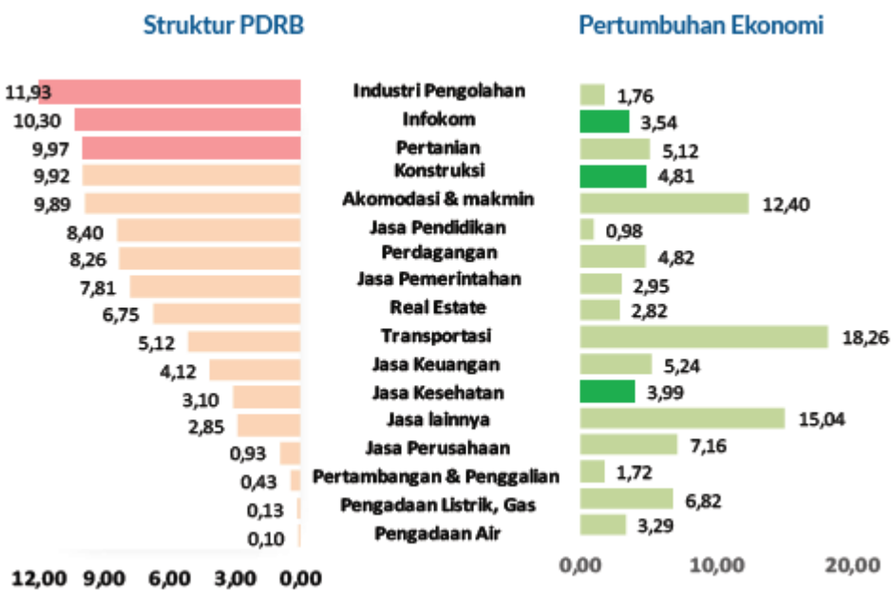

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 3 Pangsa dan Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, 2022 (c-to-c)

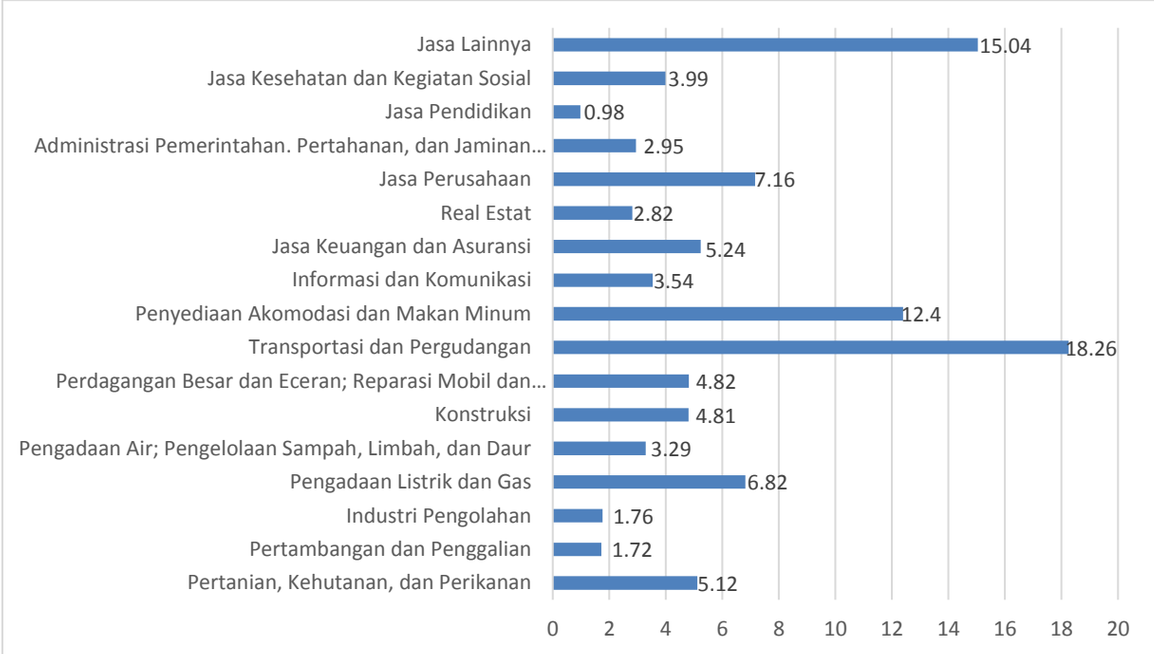

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 4 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2022

2.1.2 Inflasi

Besaran inflasi di Daerah Istimewa Yogyakrta dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 kecenderungannya mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi pada Tahun 2022 dengan angka inflasi sebesar 6,49% dan capaian terendah pada tahun 2020 dengan angka inflasi sebesar 1,4%. Angka inflasi yang relatif rendah ini dimungkinkan bukan karena perekonomian telah berjalan dengan baik, tetapi mungkin lebih ke permintaan domestik yang menurun karena adanya pandemi. Tahun 2021 inflasi kembali meningkat menjadi 2,29% dan di tahun 2022 menjadi 6,49% seiring dengan pulihnya perekonomian masyarakat yang berdampak pada meningkatnya daya beli.

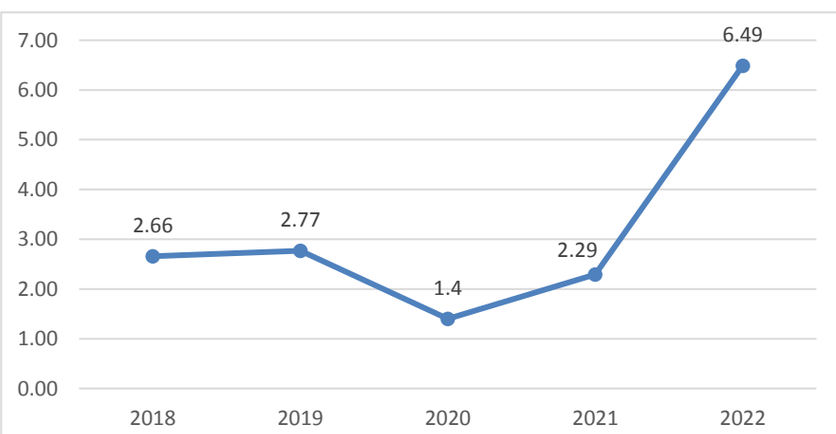

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 4 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2018 – 2022

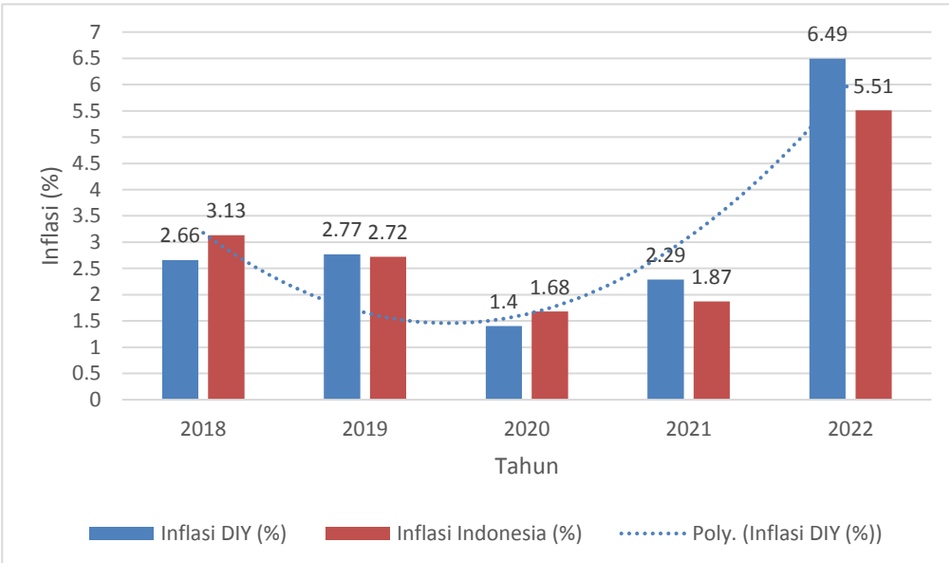

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 5 Perbandingan Inflasi DIY dengan Inflasi Nasional (%), 2018-2022

Peningkatan ini jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional, maka besaran inflasi di DIY pada tahun 2022 lebih tinggi. Namun demikian, selama periode lima tahun tersebut tingginya inflasi masih dapat dikatakan berada pada tingkat yang diharapkan.

2.1.3 ICOR *(Incremental Capital Output Ratio*)

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan indicator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi. Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. ICOR digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan ouput tercermin pada indikator makroekonomi yang dikenal sebagai ICOR. Besarnya tabungan di dalam suatu wilayah/daerah pada dasarnya sering tidak cukup untuk membiayai besarnya investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Kondisi perekonomian yang kondusif sangat dibutuhkan untuk mengundang masuknya investasi di suatu wilayah/daerah. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah dapat digunakan oleh investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Dalam kurun waktu 2017-2019, baik inventori maupun komponen investasi fisik (Pembentukan Modal tetap Bruto/PMTB) mengalami peningkatan. Tahun 2020 baik PMTB dan inventori mengalami penurunan, dan Tahun 2021 mulai meningkat kembali meskipun dengan angka yang tidaklah besar. Pertumbuhan PMTB merupakan indikator peningkatan investasi di DIY. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan ada upaya yang cukup keras untuk meningkatkan laju pertumbuhan PMTB pada level 6-7 persen.

Tabel 2. 1
Besarnya Investasi dan ICOR

Uraian (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
1. PMTB (juta rupiah)	24.791,86	27.327,86	30.021,48	25.995,23	28.127,84
Share thd. PDRB (%)	26,86	27,88	28,73	25,56	26,21
2. Perubahan Inventori (juta rupiah)	1.066,31	1.104,09	1.137,67	1.208,61	1.312,91
Share thd. PDRB (%)	1,16	1,13	1,09	1,19	1,22
3. PMTB + Perubahan Inventori (juta rp)	25.858,17	28.431,95	31.159,15	27.203,84	29.440,75
persentase	28,02	29,00	29,82	26,75	27,43
4. ICOR, Investasi = PMTB (lag 0)	5,37	4,77	4,64	-9,25	5,00
5. ICOR, Investasi = PMTB + Perubahan Inventori (lag 0)	5,60	4,97	4,82	-9,70	5,23

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan dalam hal investasi adalah ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau nilainya relatif besar dapat dikatakan bahwa terjadi *innefficiency* dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukan perkembangan dengan tren yang menurun pada periode 2016-2019. ICOR di Tahun 2020 menunjukkan nilai negatif karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Nilai ICOR turun dari 5.86 di Tahun 2016 menjadi 4,81 di Tahun 2019 yang menunjukkan terdapat peningkatan efisiensi proses produksi selama periode 2016 – 2019. Pada Tahun 2020, ICOR bernilai negatif karena perekonomian DIY mengalami kontraksi dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Pada Tahun 2021, ICOR kembali meningkat menjadi 5,32.

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 dan Bappeda DIY, 2022

Gambar 6 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2017 – 2021

2.1.4 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY Tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di Tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali di Tahun 2021 dan tahun 2022. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren fluktuatif selama 2018-2021 namun sempat menurun di Tahun 2019 kemudian pada masa pandemi Tahun 2020-2021 jumlah pengangguran terbuka meningkat kembali.

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan Kenaikan yang cukup signifikan pada jumlah pengangguran terbuka. Hal ini dimungkinkan adanya kontraksi ekonomi yang diakibatkan oleh Kebijakan Pembatasan Sosial dalam Skala Besar (PSBB). Kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan, memaksa dunia usaha untuk mengurangi kapasitas produksinya dan juga jam kerja karyawan. Bahkan juga terjadi pengurangan tenaga kerja. Meskipun pemerintah sudah berupaya keras untuk mengantisipasinya dengan berbagai program di masyarakat, tetapi guncangan ekonomi yang dialami oleh perekonomian terlalu kuat, sehingga banyak sekali penyesuaian yang dilakukan di masyarakat.

Tabel 2. 2
Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2.226.280	2.246.190	2.228.160	2.334.960	2.336.076
Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa)	75.030	71.480	101.850	106.430	94.945
TPT (%)	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Angkatan kerja di Tahun 2022 berjumlah 2.336.076 orang dan meningkat sebanyak 1.116 orang dari 2.334.960 orang dari tahun sebelumya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan penurunan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 9.844 orang pada Tahun 2022 dari 106.30 orang di tahun sebelumnya.

Tahun 2022 angka pengangguran terbuka mengalami penurunan yang berarti. Kondisi ini berada di bawah bilang dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Pemerintah DIY telah mengupayakan melalui berbagai macam aneka program dan kegiatan demi mencapai target penurunan angka pengangguran. Dorongan pemerintah terhadap dunia kerja menjadi salah satu upaya agar angka pengangguran terbuka ini dapat dikendalikan jangan sampai meningkat kembali. Mayoritas masyarakat DIY yang berada di sektor informal merupakan salah satu pertimbangan yang menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan kebijakannya.

Selama periode lima tahun, perbandingan tingkat pengangguran terbuka (TPT) DIY jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional. Rata-rata perbedaan antara tingkat pengangguran DIY dan nasional kurang lebih sekitar 2%. Pada Tahun 2022 ini, tingkat pengangguran nasional mencapai 5,86%.

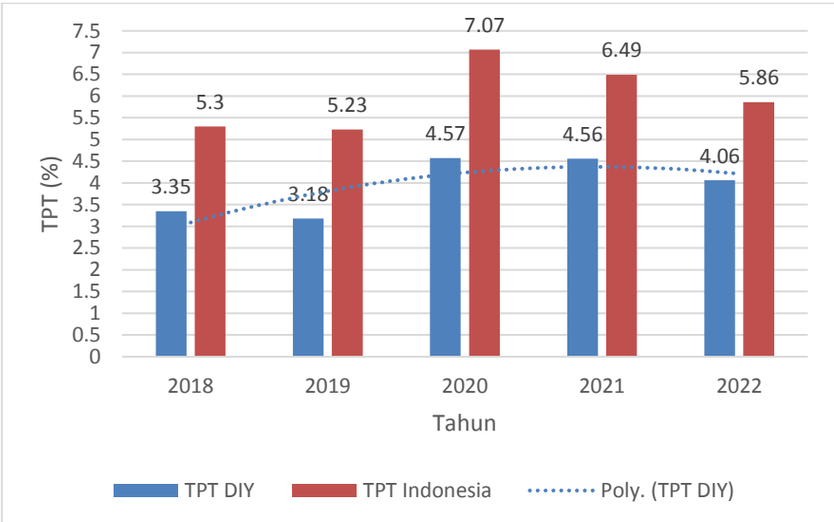

Sumber: BPS DIY (2023)

Gambar 7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Perbandingannya dengan TPT Nasional

2.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp551.342,00. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 3.322.727 jiwa dan 11,49% diantaranya masuk dalam persentase penduduk miskin atau 463.630 jiwa. Melalui berbagai rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mentargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 7,00% . Dalam periode 2018-2019 jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun dan telah berkurang sebanyak 9.360 penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Tahun 2020 berada di puncak sebanyak 27.260 orang akibat pandemi dengan jumlah total orang miskin sebanyak 503.140 orang namun kemudian menurun menjadi 463.630 orang di Tahun 2022.

Tabel 2. 3
Kemiskinan di DIY Tahun 2018 - 2022 (September)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	450,25	440,89	503,14	474,49	463.630
Tingkat Kemiskinan (%)	11,81	11,44	12,80	11,91	11,49

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Pada Tahun 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 11,44% yang menurun dibandigkan dengan tahun 2018 sebesar 11,81%. Akan tetapi, tingkat kemiskinan menjadi meningkat pada tahun 2020 sebesar 12,80 karena pandemic covid-19 dan kemudian menurun kembali menjadi 11,92% di Tahun 2021 dan semakin menurun di tahun 2022 sebesar 11,49%.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu sebab meningkatnya angka kemiskinan di DIY. Penerapan kebijakan ini jelas sangat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian DIY. Salah satunya adalah dari sisi tenaga kerja. Penurunan jumlah pekerja di beberapa sektor akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Berikut adalah

perkembangan besarnya angka kemiskinan DIY Tahun 2018- 2022. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional maka angka kemiskinan di DIY rata-rata lebih tinggi.

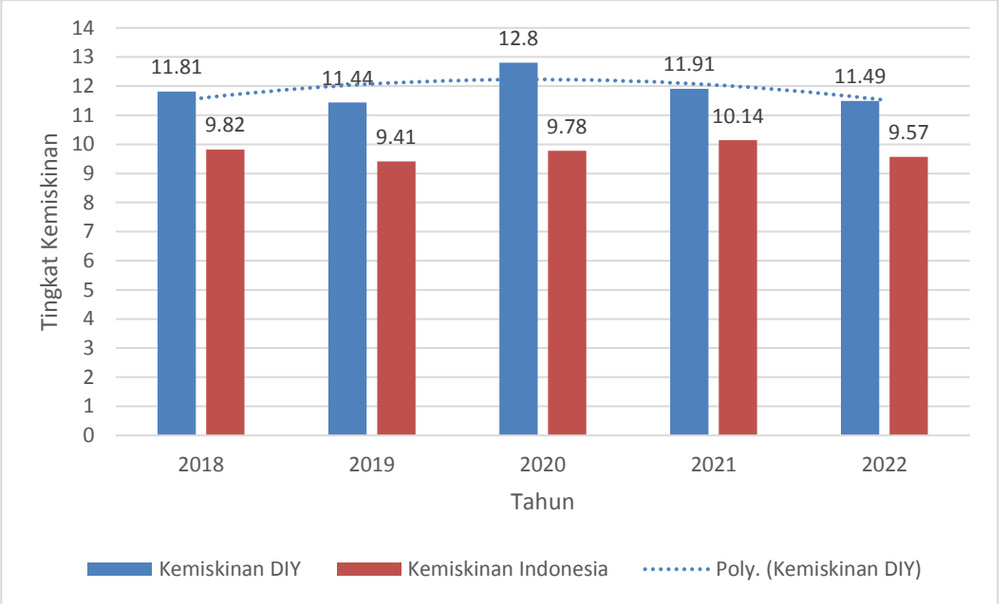

Sumber: BPS DIY (2023), diolah

Gambar 8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di DIY (%)

Apabila dibandingkan angka kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah perdesaan terlihat masih lebih tinggi. Apabila dicermati lebih jauh peningkatan angka kemiskinan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 dan dari Tahun 2020 ke Tahun 2021, kenaikan persentase penduduk miskin lebih besar di perkotaan daripada di pedesaan. Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar adalah sektor-sektor yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan (di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, sektor jasa-jasa lainnya, sektor konstruksi dan sektor jasa perusahaan). Sehingga cukup beralasan mengapa angka kemiskinan perkotaan lebih tinggi kenaikannya dibanding dengan angka kemiskinan di desa. Dengan demikian perlu usaha yang terpadu dan tepat sasaran serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Karakteristik antara perdesaan dan perkotaan dapat menjadi landasan dalam menyusun program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan.

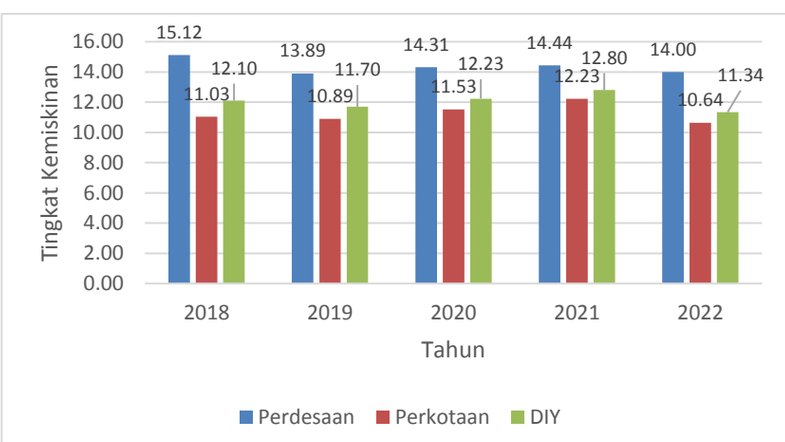

Sumber: BPS DIY (2023), diolah

Gambar 9 Tingkat Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan (%)

2.1.6 Ketimpangan Regional

Ketimpangan adalah kondisi ketidakmerataan dalam masyarakat. Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah dapat diukur menggunakan Koefisien Gini Indeks Williamson (IW). Nilai IW berkisar antara 0 (kondisi distribusi kekayaan sama rata) sampai dengan 1 (kondisi dimana kekayaan betul-betul timpang karena didominasi oleh salah satu pihak) dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Nilai IW DIY Tahun 2016-2020 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin merata. Pada Tahun 2021, ketimpangan regional sama dengan Tahun 2020 yaitu 0,4504.

Sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, besarnya indeks Williamson di DIY mengalami penurunan, meskipun penurunan ini tidaklah signifikan hanya berkisar antara 0 sampai dengan 0,1. Angka indeks Williamson yang berada di atas 0,45 masih berada di tingkat ketimpangan sedang (di bawah 0,5). Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi ini di masa yang akan datang, tampaknya perlu mendapat perhatian khusus. Strategi alokasi anggaran harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi propinsi, di sisi lain juga menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan wilayah di bawahnya. Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan merata di semua wilayah menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang relatif merata di setiap daerah. Dengan demikian ketimpangan antar daerah semakin teratasi. Ketimpangan ekonomi antar wilayah di DIY menunjukkan fluktuasi, tetapi tingkat ketimpangan di akhir periode menurun dibandingkan awal periode. Indeks Williamson tahun 2018 adalah 0,4591 yang kemudian menurun menjadi 0,4504 di tahun 2021, selanjutnya tahun 2022 angka belum rilis sehingga menggunakan tahun 2021.

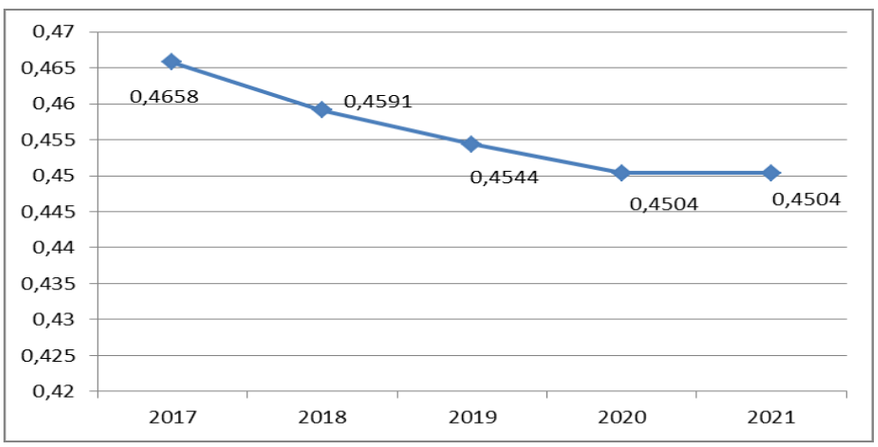

Sumber: BPS Provinsi DIY 2021, Jogja Dataku diakses 10 April 2023

Gambar 10 Indeks Williamson DIY, Tahun 2017-2021

2.1.7 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Pada tahun 2022, Rasio Gini DIY adalah 0,439 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 0,441. Akan tetapi, Rasio Gini DIY masih lebih tinggi dibandingkan dengan Rasio Gini Indonesia yaitu sebesar 0,384.

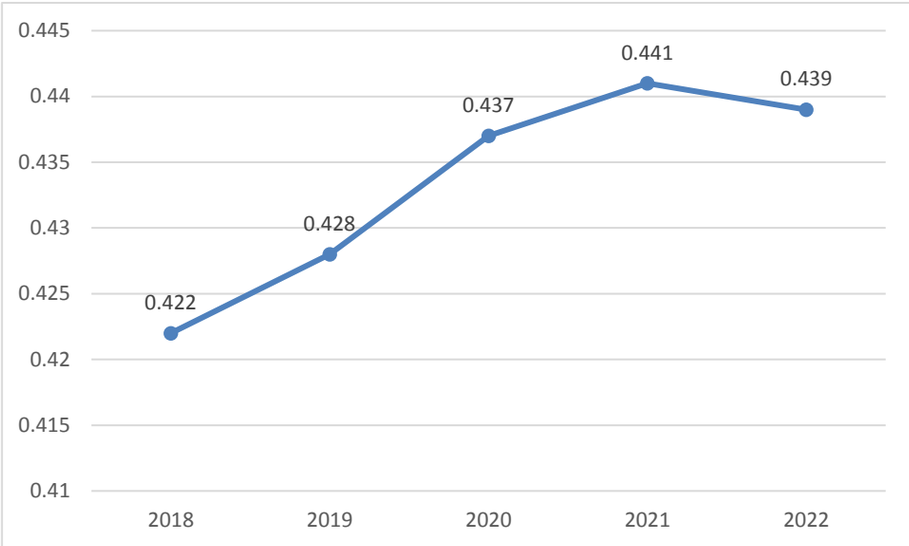

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 11 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2017 - 2022 (September)

Koefisien Gini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang tidak signifikan. Perubahan dari waktu ke waktu hanya berkisar sebesar 0-0,01. Dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 DIY tetap konsisten berada pada kategori ketimpangan "moderat". Perkembangan kondisi perekonomian terkini, memerlukan kerja keras dari pemerintah untuk menahan laju besarnya indeks Gini supaya tidak meningkat. Kesenjangan pertumbuhan antar sektor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu besarnya ketimpanganpendapatan yang semakin melebar. Apabila dibandingkan dengan indeks gini nasional maka indeks gini DIY berada pada posisi lebih tinggi dan menunjukkan bahwa ketimpangan DIY jauh lebih besar dibanding ketimpangan pendapatan di tingkat nasional.

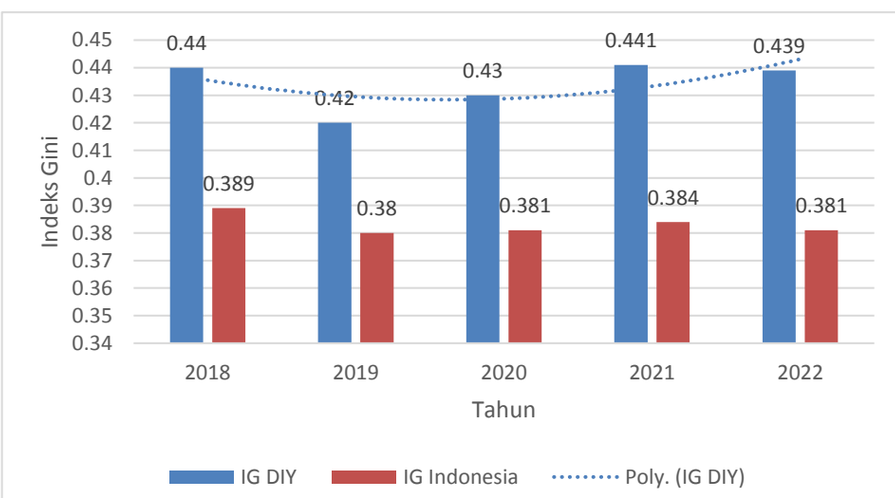

Sumber: BPS DIY (2023), diolah

Gambar 12 Perkembangan Indeks Gini

2.2 Kebijakan Keuangan, Strategi dan Prioritas APBD

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (RPJPD DIY Tahun 2005-2025). Adapun Tema Pembanguna Tahun 2022 adalah **"Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta."** Pilihan tema pembangunan DIY 2022 memperhatikan aspek kewenangan keistimewaan DIY, mempedomani RKP 2022, memperhatikan fokus tematik, konteks identifikasi masalah maupun evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Tema Pembangunan 2022 disusun dengan asumsi bahwa:

1) Pandemi Covid-19 akan berakhir pada Tahun 2021;
2) Pasca Pandemi Covid-19 berkurang dilakukan Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi di Tahun 2022;
3) Proyek Infrastruktur Nasional tetap masuk di Tahun 2022.

Pemda DIY Tahun 2022 memiliki 5 prioritas daerah yakni:

1. Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi);
2. Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial;
4. Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Kondisi transisi pandemi Covid-19 menuju transisi endemi dan upaya-upaya pemulihan sosial ekonomi yang mengikuti menjadi konteks perubahan tersebut.

Konteks lain yang yang menjadi perhatian adalah upaya pemenuhan target kinerja sasaran Pemda pada 14 indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda DIY sesuai RPJMD DIY 2017- 2022. Berdasarkan data sementara yang diperoleh sampai dengan triwulan II, Tahun 2022 dan refleksi kondisi capaian di tahun sebelumnya (2021), terdapat beberapa indikator sasaran strategis pemerintah daerah yang perlu menjadi perhatian lebih yakni :

1. Sasaran 1 - Meningkatnya Derajat Kualitas SDM pada indikator Indeks Pembangunan Manusia
2. Sasaran 2 - Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat pada indikator Indeks Gini dan Persentase Angka Kemiskinan
3. Sasaran 4 - Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan - pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
4. Sasaran 8 - Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa pada indikator Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi Untuk Dikelola serta Dimanfaatkan

Kinerja indikator-indikator pada sasaran tersebut sampai dengan triwulan II, 2022 dapat disampaikan sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81.68	81.3	80.22*	BPS : Data Final Tahun 2021; LKPJ AMJ 2022
2	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat Indeks Gini Indeks	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70.32	70.32	76.57*	sumber : LKPJ AMJ 2022
		Persentase angka kemiskinan	Persen	7	11	11,34	s.d Mar 2022 BRS 15 Juli 2022
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi	Persen	12.04	12.04	12.22*	LKPJ AMJ 2022
4	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.34	5.53	5.2	Semester I, year on year; y on y, BPS DIY, 5 Agustus 2022
		IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka Indeks	66.15	66.15	59,43*	LKPJ AMJ 202
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	82.5	82.5	82.53*	LKPJ AMJ 2022
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	persen	54.44	54.44	57.92*	LKPJ AMJ 2022
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Wiliamson	Indeks	0.4489	0.4575	0.4504*	LKPJ AMJ 2022
6	Meningkatnya kapasitas tata	Opini BPK (WTP=1;	WTP	WTP	WTP	WTP*	BPK RI, 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	Keterangan
	kelola pemerintahan	WDP=2; Disclaimer=3)					
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	Nilai AKIP	A	AA	AA*	Kemenpan RB, 2022
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	persen	91.3	91.3	92.31*	LKPJ AMJ 2022
8	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Bidang	21877	21877	15850*	LKPJ AMJ 2022

2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2022

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dilakukan secara utuh dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan APBD tersebut mengacu pada pedoman pennyusunan

APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

2.2.2.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari :

(a) Pendapatan Asli Daerah;
(b) Pendapatan Transfer;
(c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:
   1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
   2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

   Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi. Jasa–jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokan sebagai berikut:
   1) Retribusi yang dikenakan jasa umum;
   2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha;
   3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.

   Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Retribusi yang menjadi kewenangan provinsi yaitu :
   1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
   2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
   3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
   4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah dan Bagian Laba Lembaga Keuangan non Bank.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama

Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

B. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat yang ada di Pemda DIY terdiri atas :
   1) Dana Perimbangan;
   2) Dana Insentif Daerah;
   3) Dana Keistimewaaan; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer antar-daerah pada Pemda DIY terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer, Dealer Otomotif, dan PT. Jasa Raharja.

2.2.2.1.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD DIY, penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar bagi DIY. Mengingat dampak pajak daerah yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan perubahan Tahun 2022 adalah:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce* (*e-commerce*);

7. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
9. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
10. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
    a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
    b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas online pembayaran pajak, one-stop service, samsat keliling, samsat *payment point*, samsat desa, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
    c. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi info pkb diy yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui website;
    d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
    e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
    f. Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
    g. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY, adalah sebagai berikut :

1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY meliputi Dana Transfer Umum, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Transfer Khusus.

A. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otsus. DTU didorong untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pelindungan sosial, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan dan SDM Pendidikan. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan. Arah Kebijakan DBH Tahun 2022 yang merupakan bagiah dari DTU sama dengan kebijakan penggunaan DTU, kecuali DBHCHT yang diatur dengan PMK Nomor

215/PMK.07/2021 yaitu perluasan kegiatan, perluasan penerima manfaat dan perubahan persentase penggunaan. Program yang dibiayai dengan DBHCHT yaitu:

1) Peningkatan kualitas bahan baku;
2) Pembinaan Industri;
3) Pembinaan Lingkungan Sosial;
4) Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai; dan/atau
5) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dasar penganggaran Dana Alokasi Umum adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU pada masa pandemi difokuskan untuk penyelamatan, percepatan penanganan Covid-19 dan recovery, serta menjaga momentum untuk reformasi penguatan fondasi (Recovery and Reform policy). Arah kebijakan DAU Tahun 2022 adalah menganggarkan dukungan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya. Minimal sebesar 8% dari alokasi DAU yang dapat berupa:

1) Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2) Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3) Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) ke fasilitas kesehatan; dan
4) Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat pemotongan DAU oleh pemerintah pusat yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021. Pemotongan DAU berjumlah Rp5.928.786.815,00, karena terdapat sisa dana BOKT TA 2020 sebesar Rp116.825.211,00 dan sisa dana BOS TA 2019 sebesar Rp5.811.961.604,00.

B. Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik.

a. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan DTK yang bertujuan membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Dasar kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Fokus Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik pada Tahun 2022 adalah:

1) Mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19.
2) Meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah.
3) Refokusing menu pada kegiatan bernilai signifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah
4) Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional.
5) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Dasar kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Prinsip Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yaitu:

1) Membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah.
2) Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Dana Transfer Khusus dapat berupa pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah.

Secara umum arah kebijakan pengalokasian DTK Tahun Anggaran 2022 adalah:

a) Memperkuat penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada perekonomian pasca bencana di daerah;
b) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan konektivitas**.**

C. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan Dana Insentif Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pemberian insentif fiskal

yang dikaitkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan untuk kategori atau kinerja yang sudah ditentukan.

Adapun tujuan disalurkannya DID adalah untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana Insentif Daerah (DID) digunakan untuk:

a. Bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
b. Bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
c. Penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
d. Perlindungan sosial.

D. Dana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kewenangan Pemerintahan Umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga mengamanatkan tambahan kewenangan dalam urusan keistimewaan. Kewenangan keistimewaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Tata cara pengisian jabatan kedudukan tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c. Kebudayaan;
d. Pertanahan; dan
a. Tata Ruang.

Dalam rangka mendukung implementasi urusan keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi Dana Keistimewaan dari Pemerintah pusat. Alokasi dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan bahwa dana keistimewaan merupakan penerimaan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mengoptimalkan pengaturan Keistimewaan DIY yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal.

Arah kebijakan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 adalah:

1) Meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
2) Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana; serta
3) Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

2.2.2.1.2 Strategi Peningkatan Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

A. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;

3. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan nonbank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
4. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling, pembayaran Pajak melalui ATM, dan sistem online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini (E-Posti), serta Samsat Desa untuk mendekatkan pelayanan;
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
6. Penerapan digitalisasi transaksi pembayaran penerimaan daerah dengan menambah kanal-kanal pembayaran PAD di objek-objek pendapatan seperti pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) serta bekerjasama dengan e-commerce yang ada untuk kemudahan pembayaran transaksi penerimaan pendapaatan daerah;
7. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini;
8. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
9. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
10. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak.

B. Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

a) Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku;
b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
c) Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu;
d) Pelaporan penggunaan DAU dan DAK secara tepat waktu.

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut :

a) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

2.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau *stimulant* terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat .

Arah kebijakan belanja daerah Tahun 2022 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya dalam penggunaan DAU dan DBH yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dan belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19, penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga teknis, penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja. Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY, yaitu:

1) Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat, yaitu:
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022;

b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;
d. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022; dan
e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
f. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-masing Daerah;
g. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
h. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 165/P/2022 tentang Besaran Alokasi dan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2022; dan
i. Berita Acara Pembahasan Pemetaan DAK Non Fisik Jenis Kesehatan Tahun 2022 tanggal 15 November Tahun 2021.

2) Adanya penyesuaian belanja terkait penanganan COVID-19 di DIY sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529).
3) Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari DBH CHT sebagai tindak lanjut atas kebijakan dari Pusat, yaitu:
   a. Berita Acara Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemda DIY Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Februari 2022; dan
   b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
4) Adanya penyesuaian belanja terkait penanganan masalah persampahan pada Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan
5) Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 dan 26 April 2022 pada Urusan/Kewenangan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Urusan/ Kewenangan Kelembagaan, Urusan/ Kewenangan Kebudayaan, Urusan/ Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/ Kewenangan Tata Ruang serta dapat dilaksanakannya optimalisasi anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022.

6) Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Jumlah belanja daerah berdasarkan APBD DIY Tahun Anggaran 2022 (Murni) sebesar Rp5.761.351.132.197,00, sedangkan pada Perubahan Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp5.771.805.381.456,00 atau naik sebesar Rp10.454.249.259,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

2.2.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2) Belanja barang dan jasa berupa pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
3) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
4) Belanja subsidi berupa alokasi anggaran yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang digunakan oleh BUMN, BUMD dan/atauBUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjangkau oleh masyarakat
5) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
6) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Jumlah belanja operasi pada APBD DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.722.282.846.320,00, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp3.728.152.310.226,00 atau naik sebesar Rp5.869.463.906,00. Rincian perubahan belanja operasi tersebut adalah sebagai berikut.

A. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat

sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain

C. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkanoleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

D. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2.2.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Belanja Modal meliputi:

1) Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investasi kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah seat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai.
5) Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Jumlah belanja modal pada APBD DIY Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp668.953.701.335,00, sedangkan pada perubahan Tahun 2022 menjadi sebesar Rp723.515.507.108,00 atau naik sebesar Rp54.561.805.773,00. Rincian perubahan belanja modal adalah sebagai berikut;

A. Belanja Tanah

Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

B. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

C. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

D. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

E. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2.2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.2.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer meliputi:

1. Belanja Bagi hasil Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota yang penganggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan merupakan belanja yang dianggarkan untuk diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu terlaksananya urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Jumlah belanja transfer dianggarkan sebesar Rp1.275.350.089.983,00 dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2022, sedangkan dalam Perubahan Tahun 2022 berkurang sebesar Rp1.794.578.205,00 menjadi Rp1.273.555.511.778,00. Rincian dari belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut:

A. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

B. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 bagi dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial maupun upaya penguatan perekonomian daerah.
c. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, pengendalian dan penegakan hukum serta penanggulangan bencana dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.
d. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
e. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

2.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat investasi berupa penyertaan modal kepada BUMD dan pinjaman

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦤꦶꦠꦃꦢꦸꦤꦂꦢꦸꦤꦂꦢꦸꦱꦺꦴꦩꦶꦤꦶꦱꦠꦺꦴꦩꦶꦱꦺꦴꦩꦶꦱꦺꦴꦩꦶꦱ

No	Sasaran	Indikator	Target 2022
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi (%)	12,04
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40
		2. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	66,15
		3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	82.5
		4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan (%)	54,44
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,4575
6	Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan	1. Opini BPK	WTP
		2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	A
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan (%)	91,30
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	21.877

sumber: RKPD DIY 2022

2.2.3.2 Target Kinerja Pendapatan APBD 2022

Rencana Pendapatan

Target Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.364.614.634.680,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar 5.489.017.061.741,00 atau bertambah sebesar Rp124.402.427.061,00, adapun rincian dari Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:

2.2.3.2.1 Rencana Pendapatan Asli Daerah 2022

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.045.838.352.190,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp149.038.122.209,00 menjadi sebesar Rp2.194.876.474.399,00. Rincian pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.831.695.736.270,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.924.613.524.517,00 atau naik sebesar Rp92.917.788.247,00;

b. Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.049.773.075,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp36.120.490.654,00 atau naik sebesar Rp3.070.717.579,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp104.889.783.509,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp106.108.775.113,00 atau naik sebesar Rp1.218.991.604,00; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.203.059.336,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp128.033.684.115,00 atau naik sebesar Rp51.830.624.779,00.

2.2.3.2.2 Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Salah satu komponen dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan DTK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang menjadi urusan Daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Target penerimaan Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.310.328.489.000,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 berkurang sebesar Rp23.428.401.658,00 menjadi sebesar Rp3.286.900.087.342,00.

a. Transfer Pemerintah Pusat

Target penerimaan dari transfer pemerintah pusat pada APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.309.457.195.510,00 sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.286.028.793.852,00 atau turun sebesar Rp23.428.401.658,00.

b. Transfer Antar Daerah

Target penerimaan dari transfer antar daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp871.293.490,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan tidak ada perubahan, sehingga anggaran tetap sebesar Rp871.293.490,00.

2.2.3.2.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.576.500.000,00, dan mengalami penurunan saat Perubahan hingga menjadi Rp7.240.500.000,00, ata mengalami penurunana sebesar Rp336.000.000,00.

2.2.3.3 Target Kinerja Belanja APBD 2022

Belanja Daerah

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Belanja di Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.761.351.132.197,00 dan menjadi sebesar Rp5.879.828.899.155,00 pada saat Perubahan atau

naik sebesar Rp118.477.766.958,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

2.2.3.3.1 Belanja Operasi

Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.722.282.846.320,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.758.580.237.442,00 atau naik sebesar Rp36.297.391.122,00. Rincian perubahan belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.732.843.897.779,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.673.619.630.998,00 atau turun sebesar Rp59.224.266.781,00;
2) Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.349.690.564.780,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.469.555.928.220,00 atau naik sebesar Rp119.865.363.440,00;
3) Belanja Subsidi pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp78.451.861.160,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran dari anggaran murni.
4) Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp530.131.511.051,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp502.164.697.064,00 atau turun sebesar Rp27.966.813.987,00; dan
5) Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.165.011.550,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp34.788.120.000,00 atau naik sebesar Rp3.623.108.450,00.

2.2.3.3.2 Belanja Modal

Jumlah belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp668.953.701.335,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp742.798.152.703,00 atau naik sebesar Rp73.844.451.368,00. Rincian perubahan belanja modal diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp124.611.548.435,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp160.094.957.821,00 atau naik sebesar Rp35.483.409.386,00;
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp148.089.677.972,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp182.732.772.410,00 atau naik sebesar Rp34.643.094.438,00;
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp218.388.060.207,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp220.101.185.387,00 atau naik sebesar Rp1.713.125.180,00;
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp162.733.333.000,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp165.392.750.723,00 atau naik sebesar Rp2.659.417.723,00; dan
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.131.081.721,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp14.476.486.362,00 atau turun sebesar Rp654.595.359,00.

2.2.3.3.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp94.764.494.559,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp62.545.932.869,00 atau turun sebesar Rp32.218.561.690,00.

2.2.3.3.4 Belanja Transfer

Jumlah belanja transfer pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.275.350.089.983,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 naik sebesar Rp40.554.486.158,00 menjadi Rp1.315.904.576.141,00. Rincian dari perubahan belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut:

1) Belanja Bagi Hasil pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp743.441.355.389,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp839.016.298.042,00 atau naik sebesar Rp95.574.942.653,00; dan
2) Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp531.908.734.594,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp476.888.278.099,00 atau turun sebesar Rp55.020.456.495,00.

2.2.3.4 Target Kinerja Pembiayaan APBD 2022

2.2.3.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) adalah sebesar Rp570.412.054.517,00 Pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp564.487.394.414,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.924.660.103,00.

2.2.3.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD tahun 2022 Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp173.675.557.000,00 yang bersumber dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp173.675.557.000,00. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan tidak mengalami perubahan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022.

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp5.489.017.061.741,00 terdiri Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.194.876.474.399,00, Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp3.286.900.087.342,00, dan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.240.500.000,00. Untuk Anggaran Belanja dan Transfer ditetapkan sebesar Rp5.879.828.899.155,00 dengan rincian Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp3.758.580.237.442,00, Anggaran Belanja Modal sebesar Rp742.798.152.703,00, Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp62.545.932.869,00, dan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp1.315.904.576.141,00. Untuk perubahan kebijakan belanja dalam APBD Perubahan 2022 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
2. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
3. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
4. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2022 dan prognosis;
5. Adanya kegiatan yang bertujuan untuk penanganan dan pencegahan dampak Pandemi Covid-19;
6. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik; dan
7. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2022.

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp5.879.828.899.155,00, turun sebesar Rp167.020.849.673,00 dibandingkan anggaran belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.046.849.748.828,00.

Kinerja keuangan Tahun Anggaran 2022 dari sisi Pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.489.017.061.741,00 dapat direalisasikan sebesar Rp5.531.194.851.402,30 atau 100,77% dibandingkan dengan target pendapatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.263.431.316.669,58 atau 103,12% dari target setelah perubahan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.257.721.489.974,00 atau 99,11% dari target setelah perubahan, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp10.042.044.758,72 atau 138,69% dari target setelah perubahan.

Kinerja keuangan Tahun Anggaran 2022 dari sisi belanja dianggarkan sebesar Rp5.879.828.899.155,00 dapat direalisasikan sebesar Rp5.449.935.625.661,56 atau 92,69% dibandingkan dengan target belanja setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian

realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.445.986.585.280,31 atau 91,68% dibandingkan dengan target belanja setelah perubahan, realisasi Belanja Modal sebesar Rp704.882.049.066,74 atau 94,90% dari target belanja setelah perubahan, realisasi belanja Tak Terduga sebesar Rp5.735.041.553,00 atau 9,17% dari target belanja setelah perubahan, dan belanja Transfer sebesar Rp1.293.331.949.761,51 dari target belanja setelah perubahan.

Kinerja keuangan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp564.487.394.414,00 dan realisasi sebesar Rp554.687.337.214,50 atau 98,26% dengan rincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp554.487.394.414,50 atau 100% dari target setelah perubahan dan Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp199.942.800,00 atau 2,00%. Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp173.675.557.000,00 dan realisasi sebesarRp173.675.000.000,00 atau 100,00% untuk Penyertaan Modal Kepada PT Bank BPD DIY.

Berdasarkan kinerja keuangan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2022 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp462.271.562.955,24 dan secara rinci realisasi belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	PENDIDIKAN				
1	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**				
	PENDAPATAN DAERAH	**4.525.842.300,00**	**6.159.027.259,00**	**1.633.184.959,00**	**136,09**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**4.525.842.300,00**	**6.159.027.259,00**	**1.633.184.959,00**	**136,09**
	Retribusi Daerah	1.433.385.000,00	2.396.784.434,00	963.399.434,00	167,21
	Lain-lain PAD yang Sah	3.092.457.300,00	3.762.242.825,00	669.785.525,00	121,66
	BELANJA DAERAH	**1.617.640.471.426,00**	**1.532.244.775.867,00**	**(85.395.695.559,00)**	**94,72**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	977.139.373.525,00	923.309.321.843,00	(53.830.051.682,00)	94,49
	Program Pengelolaan Pendidikan	567.596.068.251,00	540.368.601.367,00	(27.227.466.884,00)	95,20
	Program Pengembangan Kurikulum	1.571.369.750,00	1.571.037.750,00	(332.000,00)	99,98
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	106.024.000,00	98.975.000,00	(7.049.000,00)	93,35
	Program Pegendalian Perijinan Pendidikan	14.570.000,00	8.540.000,00	(6.030.000,00)	58,61
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tataruang	190.000.000,00	182.217.250,00	(7.782.750,00)	95,90
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.882.254.500,00	4.197.116.555,00	(685.137.945,00)	85,97
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	26.197.173.000,00	24.683.791.264,00	(1.513.381.736,00)	94,22
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	38.943.638.400,00	36.825.174.838,00	(2.118.463.562,00)	94,56
	KESEHATAN				
2	**DINAS KESEHATAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**39.413.700.000,00**	**50.843.281.983,39**	**11.429.581.983,39**	**129,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**39.413.700.000,00**	**50.843.281.983,39**	**11.429.581.983,39**	**129,00**
	Lain-lain PAD yang Sah	39.413.700.000,00	50.843.281.983,39	11.429.581.983,39	129,00

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	BELANJA DAERAH	**327.362.270.188,00**	**230.392.828.846,91**	**(96.969.441.341,09)**	**70,38**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	196.638.548.491,00	158.700.524.163,91	(37.938.024.327,09)	80,71
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	129.957.229.197,00	71.008.703.905,00	(58.948.525.292,00)	54,64
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	232.168.500,00	186.303.750,00	(45.864.750,00)	80,25
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	1.958.000,00	1.891.750,00	(66.250,00)	96,62
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	532.366.000,00	495.405.278,00	(36.960.722,00)	93,06
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
3	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**				
	BELANJA DAERAH	**26.450.154.467,00**	**25.479.188.215,00**	**(970.966.252,00)**	**96,33**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.800.173.182,00	10.373.129.529,00	(427.043.653,00)	96,05
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	988.124.000,00	984.613.060,00	(3.510.940,00)	99,64
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	7.249.316.500,00	6.993.113.427,00	(256.203.073,00)	96,47
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	34.400.000,00	34.157.000,00	(243.000,00)	99,29
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	7.378.140.785,00	7.094.175.199,00	(283.965.586,00)	96,15
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**				
	PENDAPATAN DAERAH	**1.326.681.100,00**	**1.546.230.900,00**	**219.549.800,00**	**116,55**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.326.681.100,00**	**1.546.230.900,00**	**219.549.800,00**	**116,55**
	Retribusi Daerah	1.301.571.900,00	1.505.772.700,00	204.200.800,00	115,69
	Lain-lain PAD yang Sah	25.109.200,00	40.458.200,00	15.349.000,00	161,13
	BELANJA DAERAH	**506.903.316.891,00**	**467.053.705.933,00**	**(39.849.610.958,00)**	**92,14**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53.501.171.838,00	51.539.251.431,00	(1.961.920.407,00)	96,33
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	40.873.860.807,00	33.897.968.419,00	(6.975.892.388,00)	82,93
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.832.960.000,00	2.743.265.180,00	(1.089.694.820,00)	71,57
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	50.302.958.435,00	43.753.075.440,00	(6.549.882.995,00)	86,98
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.080.810.450,00	6.453.217.535,00	(627.592.915,00)	91,14
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	383.677.000,00	369.235.142,00	(14.441.858,00)	96,24
	Program Penyelenggaraan Jalan	54.940.094.650,00	49.884.055.110,00	(5.056.039.540,00)	90,80
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.948.137.050,00	1.896.766.952,00	(51.370.098,00)	97,36
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	170.623.365.061,00	164.732.582.758,00	(5.890.782.303,00)	96,55
	Program Pengembangan Perumahan	399.700.000,00	399.144.410,00	(555.590,00)	99,86
	Program Kawasan Permukiman	25.164.593.600,00	23.921.719.168,00	(1.242.874.432,00)	95,06
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	86.994.500.000,00	78.206.564.051,00	(8.787.935.949,00)	89,90
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	5.578.362.000,00	5.511.910.610,00	(66.451.390,00)	98,81
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	649.417.700,00	641.359.289,00	(8.058.411,00)	98,76
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	704.446.000,00	697.174.029,00	(7.271.971,00)	98,97
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	388.972.300,00	385.462.000,00	(3.510.300,00)	99,10
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	3.536.290.000,00	2.020.954.409,00	(1.515.335.591,00)	57,15

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				
	PENDAPATAN DAERAH	**10.240.000,00**	**28.854.000,00**	**18.614.000,00**	**281,78**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**10.240.000,00**	**28.854.000,00**	**18.614.000,00**	**281,78**
	Lain-lain PAD yang Sah	10.240.000,00	28.854.000,00	18.614.000,00	281,78
	BELANJA DAERAH	**33.497.419.640,00**	**32.548.782.839,00**	**(948.636.801,00)**	**97,17**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.687.775.464,00	16.102.940.750,00	(584.834.714,00)	96,50
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.760.817.785,00	4.708.102.467,00	(52.715.318,00)	98,89
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	12.048.826.391,00	11.737.739.622,00	(311.086.769,00)	97,42
6	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				
	BELANJA DAERAH	**26.306.663.572,00**	**24.921.956.599,00**	**(1.384.706.973,00)**	**94,74**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.716.297.768,00	13.145.843.647,00	(570.454.121,00)	95,84
	Program Penanggulangan Bencana	11.618.397.004,00	10.850.284.938,00	(768.112.066,00)	93,39
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	971.968.800,00	925.828.014,00	(46.140.786,00)	95,25
	SOSIAL				
7	**DINAS SOSIAL**				
	PENDAPATAN DAERAH	**484.200.000,00**	**484.200.000,00**	**-**	**100,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**484.200.000,00**	**484.200.000,00**	**-**	**100,00**
	Retribusi Daerah	484.200.000,00	484.200.000,00	-	100,00
	BELANJA DAERAH	**128.135.177.242,00**	**114.920.064.002,00**	**(13.215.113.240,00)**	**89,69**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	74.357.552.442,00	68.632.313.297,00	(5.725.239.145,00)	92,30
	Program Pemberdayaan Sosial	2.632.059.000,00	2.576.902.300,00	(55.156.700,00)	97,90
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	12.000.000,00	11.300.000,00	(700.000,00)	94,17
	Program Rehabilitasi Sosial	30.655.190.300,00	26.896.225.062,00	(3.758.965.238,00)	87,74
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.633.456.000,00	6.893.456.128,00	(739.999.872,00)	90,31
	Program Penanganan Bencana	6.660.048.000,00	4.078.544.945,00	(2.581.503.055,00)	61,24
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	6.184.871.500,00	5.831.322.270,00	(353.549.230,00)	94,28
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
8	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**				
	BELANJA DAERAH	**18.333.667.152,00**	**17.602.053.095,20**	**(731.614.056,80)**	**96,01**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.403.333.652,00	9.984.570.626,00	(418.763.026,00)	95,97
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.082.909.000,00	1.024.623.950,00	(58.285.050,00)	94,62
	Program Perlindungan Perempuan	1.004.581.000,00	1.003.413.400,00	(1.167.600,00)	99,88
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	593.333.000,00	582.512.647,20	(10.820.352,80)	98,18
	Program Pengelolaan sistem Data Gender dan Anak	178.601.000,00	172.019.250,00	(6.581.750,00)	96,31
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	359.685.000,00	322.467.799,00	(37.217.201,00)	89,65
	Program Perlindungan Khusus Anak	137.028.000,00	136.199.250,00	(828.750,00)	99,40

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Pengendalian Penduduk	125.329.000,00	122.168.800,00	(3.160.200,00)	97,48
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	238.900.000,00	212.877.028,00	(26.022.972,00)	89,11
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	293.270.000,00	288.515.500,00	(4.754.500,00)	98,38
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	3.916.697.500,00	3.752.684.845,00	(164.012.655,00)	95,81
	LINGKUNGAN HIDUP				
9	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**20.119.701.759,00**	**19.984.196.170,00**	**(135.505.589,00)**	**99,33**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**20.119.701.759,00**	**19.984.196.170,00**	**(135.505.589,00)**	**99,33**
	Retribusi Daerah	18.456.603.959,00	17.926.587.968,00	(530.015.991,00)	97,13
	Lain-lain PAD yang Sah	1.663.097.800,00	2.057.608.202,00	394.510.402,00	123,72
	BELANJA DAERAH	**96.440.771.956,00**	**89.747.845.786,83**	**(6.692.926.169,17)**	**93,06**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	285.000.000,00	269.732.927,00	(15.267.073,00)	94,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.288.419.697,00	46.663.674.079,60	(1.624.745.617,40)	96,64
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	137.500.000,00	119.577.317,00	(17.922.683,00)	86,97
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.174.915.990,00	2.010.957.750,00	(163.958.240,00)	92,46
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.084.149.200,00	951.767.915,00	(132.381.285,00)	87,79
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	303.884.000,00	291.273.971,00	(12.610.029,00)	95,85
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	452.009.000,00	442.094.892,00	(9.914.108,00)	97,81
	Program Pengelolaan Persampahan	28.520.338.278,00	25.237.942.974,00	(3.282.395.304,00)	88,49
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	3.303.424.750,00	3.178.379.910,59	(125.044.839,41)	96,21
	Program Pengelolaan Hutan	9.868.080.041,00	8.801.385.043,64	(1.066.694.997,36)	89,19
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	548.008.000,00	544.244.677,00	(3.763.323,00)	99,31
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.475.043.000,00	1.236.814.330,00	(238.228.670,00)	83,85
	PERHUBUNGAN				
10	**DINAS PERHUBUNGAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**1.738.246.800,00**	**2.408.176.800,00**	**669.930.000,00**	**138,54**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.738.246.800,00**	**2.408.176.800,00**	**669.930.000,00**	**138,54**
	Retribusi Daerah	1.731.996.800,00	2.040.976.800,00	308.980.000,00	117,84
	Lain-lain PAD yang Sah	6.250.000,00	367.200.000,00	360.950.000,00	5.875,20
	BELANJA DAERAH	**123.773.493.768,00**	**113.296.233.308,90**	**(10.477.260.459,10)**	**91,54**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	6.213.932.565,00	6.067.085.608,00	(146.846.957,00)	97,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.570.001.356,00	20.977.942.739,16	(592.058.616,84)	97,26
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	95.598.893.147,00	85.902.389.726,74	(9.696.503.420,26)	89,86
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	292.666.700,00	251.081.955,00	(41.584.745,00)	85,79
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	98.000.000,00	97.733.280,00	(266.720,00)	99,73
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
11	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
	PENDAPATAN DAERAH	**1.800.000,00**	**2.300.000,00**	**500.000,00**	**127,78**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.800.000,00**	**2.300.000,00**	**500.000,00**	**127,78**
	Retribusi Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah		500.000,00	500.000,00	
	BELANJA DAERAH	**35.227.685.684,00**	**34.737.243.652,00**	**(490.442.032,00)**	**98,61**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.228.464.371,00	9.826.989.549,00	(401.474.822,00)	96,07
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.080.299.000,00	2.067.373.868,00	(12.925.132,00)	99,38
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	745.105.600,00	743.593.043,00	(1.512.557,00)	99,80
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.089.240.000,00	1.082.273.824,00	(6.966.176,00)	99,36
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	21.084.576.713,00	21.017.013.368,00	(67.563.345,00)	99,68
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
12	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**				
	PENDAPATAN DAERAH	**822.633.653,00**	**1.655.338.732,00**	**832.705.079,00**	**201,22**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**822.633.653,00**	**1.655.338.732,00**	**832.705.079,00**	**201,22**
	Retribusi Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	818.433.653,00	1.651.138.732,00	832.705.079,00	201,74
	BELANJA DAERAH	**120.936.389.406,00**	**118.628.351.853,00**	**(2.308.037.553,00)**	**98,09**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.523.305.904,00	10.232.168.214,00	(291.137.690,00)	97,23
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	227.000.000,00	214.406.000,00	(12.594.000,00)	94,45
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	19.300.000,00	18.662.000,00	(638.000,00)	96,69
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	4.933.303.000,00	4.792.215.477,00	(141.087.523,00)	97,14
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.072.243.400,00	964.423.000,00	(107.820.400,00)	89,94
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	5.474.505.000,00	5.450.658.305,00	(23.846.695,00)	99,56
	Program Pengembangan UMKM	4.839.492.000,00	4.712.683.200,00	(126.808.800,00)	97,38
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	93.847.240.102,00	92.243.135.657,00	(1.604.104.445,00)	98,29
	PENANAMAN MODAL				
13	**DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL**				
	PENDAPATAN DAERAH	**87.900.000,00**	**20.240.000,00**	**(67.660.000,00)**	**23,03**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**87.900.000,00**	**20.240.000,00**	**(67.660.000,00)**	**23,03**
	Retribusi Daerah	87.420.000,00	19.760.000,00	(67.660.000,00)	22,60
	Lain-lain PAD yang Sah	480.000,00	480.000,00	-	100,00
	BELANJA DAERAH	**13.618.565.258,00**	**13.068.378.067,00**	**(550.187.191,00)**	**95,96**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.249.103.758,00	10.855.606.408,00	(393.497.350,00)	96,50
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	308.387.000,00	284.899.000,00	(23.488.000,00)	92,38
	Program Promosi Penanaman Modal	553.393.000,00	522.710.900,00	(30.682.100,00)	94,46
	Program Pelayanan Penanaman Modal	538.525.000,00	506.782.412,00	(31.742.588,00)	94,11
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	735.969.000,00	667.023.047,00	(68.945.953,00)	90,63
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	233.187.500,00	231.356.300,00	(1.831.200,00)	99,21
	KEBUDAYAAN				
14	**DINAS KEBUDAYAAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**954.500.000,00**	**1.707.005.000,00**	**752.505.000,00**	**178,84**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**954.500.000,00**	**1.707.005.000,00**	**752.505.000,00**	**178,84**
	Retribusi Daerah	945.410.000,00	1.675.247.500,00	729.837.500,00	177,20
	Lain-lain PAD yang Sah	9.090.000,00	31.757.500,00	22.667.500,00	349,37
	BELANJA DAERAH	**363.829.414.728,00**	**350.570.316.778,95**	**(13.259.097.949,05)**	**96,36**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.787.911.636,00	30.454.182.717,00	(1.333.728.919,00)	95,80
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	332.041.503.092,00	320.116.134.061,95	(11.925.369.030,05)	96,41
	PERPUSTAKAAN				
15	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**				
	PENDAPATAN DAERAH	**112.200.000,00**	**290.801.324,00**	**178.601.324,00**	**259,18**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**112.200.000,00**	**290.801.324,00**	**178.601.324,00**	**259,18**
	Retribusi Daerah	112.200.000,00	183.932.800,00	71.732.800,00	163,93
	Lain-lain PAD yang Sah		106.868.524,00	106.868.524,00	
	BELANJA DAERAH	**47.416.886.994,00**	**45.533.279.282,00**	**(1.883.607.712,00)**	**96,03**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	5.771.902.011,00	5.534.386.488,00	(237.515.523,00)	95,88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.247.516.847,00	27.326.953.788,00	(920.563.059,00)	96,74
	Program Pembinaan Perpustakaan	10.758.445.136,00	10.116.774.845,00	(641.670.291,00)	94,04
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1.198.508.000,00	1.155.878.854,00	(42.629.146,00)	96,44
	Program Pengelolaan Arsip	1.440.515.000,00	1.399.285.307,00	(41.229.693,00)	97,14
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
16	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**1.092.330.000,00**	**1.115.351.025,00**	**23.021.025,00**	**102,11**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.092.330.000,00**	**1.115.351.025,00**	**23.021.025,00**	**102,11**
	Retribusi Daerah	1.087.330.000,00	1.111.906.300,00	24.576.300,00	102,26
	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000,00	3.444.725,00	(1.555.275,00)	68,89
	BELANJA DAERAH	**149.418.425.684,00**	**148.012.182.816,00**	**(1.406.242.868,00)**	**99,06**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	125.000.000,00	124.428.285,00	(571.715,00)	99,54
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	116.450.680.790,00	116.178.423.954,00	(272.256.836,00)	99,77
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.084.043.164,00	23.380.295.655,00	(703.747.509,00)	97,08
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	386.379.900,00	383.691.170,00	(2.688.730,00)	99,30
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	159.463.000,00	152.906.785,00	(6.556.215,00)	95,89
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.103.641.230,00	5.728.187.420,00	(375.453.810,00)	93,85
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	169.424.800,00	164.345.200,00	(5.079.600,00)	97,00
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.939.792.800,00	1.899.904.347,00	(39.888.453,00)	97,94
	PARIWISATA				
17	**DINAS PARIWISATA**				
	PENDAPATAN DAERAH	**516.534.260,00**	**528.200.926,00**	**11.666.666,00**	**102,26**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**516.534.260,00**	**528.200.926,00**	**11.666.666,00**	**102,26**
	Lain-lain PAD yang Sah	516.534.260,00	528.200.926,00	11.666.666,00	102,26
	BELANJA DAERAH	**39.336.350.770,00**	**37.886.286.085,00**	**(1.450.064.685,00)**	**96,31**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	18.635.779.750,00	18.129.523.637,00	(506.256.113,00)	97,28

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.717.739.270,00	10.273.747.135,00	(443.992.135,00)	95,86
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.746.190.000,00	4.530.089.738,00	(216.100.262,00)	95,45
	Program Pemasaran Pariwisata	2.065.950.750,00	1.814.209.275,00	(251.741.475,00)	87,81
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.170.691.000,00	3.138.716.300,00	(31.974.700,00)	98,99
	PERTANIAN				
18	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**1.598.625.820,00**	**2.042.663.349,00**	**444.037.529,00**	**127,78**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.598.625.820,00**	**2.042.663.349,00**	**444.037.529,00**	**127,78**
	Retribusi Daerah	1.449.910.420,00	1.613.250.714,00	163.340.294,00	111,27
	Lain-lain PAD yang Sah	148.715.400,00	429.412.635,00	280.697.235,00	288,75
	BELANJA DAERAH	**104.367.380.364,00**	**98.944.053.222,00**	**(5.423.327.142,00)**	**94,80**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruanag	859.704.000,00	676.455.474,00	(183.248.526,00)	78,68
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.431.755.500,00	1.385.021.550,00	(46.733.950,00)	96,74
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	95.892.000,00	93.702.535,00	(2.189.465,00)	97,72
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	142.327.250,00	141.939.665,00	(387.585,00)	99,73
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4.894.144.200,00	4.760.888.776,00	(133.255.424,00)	97,28
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	54.728.526.506,00	52.992.482.368,00	(1.736.044.138,00)	96,83
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	30.196.870.750,00	27.712.223.966,00	(2.484.646.784,00)	91,77
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.258.126.064,00	4.861.684.187,00	(396.441.877,00)	92,46
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.137.700.094,00	3.101.824.541,00	(35.875.553,00)	98,86
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	65.500.000,00	65.114.000,00	(386.000,00)	99,41
	Program Penyuluhan Pertanian	3.556.834.000,00	3.152.716.160,00	(404.117.840,00)	88,64
	PERINDUSTRIAN				
19	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**247.200.000,00**	**275.793.610,00**	**28.593.610,00**	**111,57**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**247.200.000,00**	**275.793.610,00**	**28.593.610,00**	**111,57**
	Retribusi Daerah	222.200.000,00	249.222.457,00	27.022.457,00	112,16
	Lain-lain PAD yang Sah	25.000.000,00	26.571.153,00	1.571.153,00	106,28
	BELANJA DAERAH	**57.782.850.716,00**	**52.140.845.170,00**	**(5.642.005.546,00)**	**90,24**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	218.220.000,00	216.204.000,00	(2.016.000,00)	99,08
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	17.067.629.500,00	15.540.353.786,00	(1.527.275.714,00)	91,05
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.380.312.266,00	18.924.759.744,00	(455.552.522,00)	97,65
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	11.192.297.400,00	10.897.472.551,00	(294.824.849,00)	97,37
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	46.483.000,00	45.566.586,00	(916.414,00)	98,03
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4.650.364.750,00	2.233.671.750,00	(2.416.693.000,00)	48,03
	Program Pengembangan ekspor	2.666.005.800,00	1.867.567.950,00	(798.437.850,00)	70,05
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	719.969.000,00	715.659.853,00	(4.309.147,00)	99,40
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.606.452.250,00	1.466.000.450,00	(140.451.800,00)	91,26

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	235.116.750,00	233.588.500,00	(1.528.250,00)	99,35
	TRANSMIGRASI				
20	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**				
	PENDAPATAN DAERAH	**1.768.900.000,00**	**2.005.052.000,00**	**236.152.000,00**	**113,35**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.768.900.000,00**	**2.005.052.000,00**	**236.152.000,00**	**113,35**
	Retribusi Daerah	1.576.025.000,00	1.809.577.000,00	233.552.000,00	114,82
	Lain-lain PAD yang Sah	192.875.000,00	195.475.000,00	2.600.000,00	101,35
	BELANJA DAERAH	**61.437.385.586,00**	**58.704.631.684,00**	**(2.732.753.902,00)**	**95,55**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	6.372.225.000,00	6.283.622.493,00	(88.602.507,00)	98,61
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.539.371.774,00	33.190.285.857,00	(1.349.085.917,00)	96,09
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	200.940.000,00	186.515.600,00	(14.424.400,00)	92,82
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	14.894.873.812,00	13.783.837.477,00	(1.111.036.335,00)	92,54
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.419.312.400,00	1.377.342.331,00	(41.970.069,00)	97,04
	Program Hubungan Industrial	592.636.500,00	566.088.172,00	(26.548.328,00)	95,52
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.003.528.100,00	2.906.045.528,00	(97.482.572,00)	96,75
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	414.498.000,00	410.894.226,00	(3.603.774,00)	99,13
D	**UNSUR PENDUKUNG**				
	SEKRETARIAT DAERAH				
21	**SEKRETARIAT DAERAH**				
	PENDAPATAN DAERAH	**481.200.000,00**	**318.900.000,00**	**(162.300.000,00)**	**66,27**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**481.200.000,00**	**318.900.000,00**	**(162.300.000,00)**	**66,27**
	Retribusi Daerah	418.500.000,00	268.500.000,00	(150.000.000,00)	64,16
	Lain-lain PAD yang Sah	62.700.000,00	50.400.000,00	(12.300.000,00)	80,38
	BELANJA DAERAH	**163.555.879.472,00**	**148.878.559.875,00**	**(14.677.319.597,00)**	**91,03**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	278.113.400,00	277.487.060,00	(626.340,00)	99,77
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	992.472.000,00	811.234.370,00	(181.237.630,00)	81,74
	Program Pendaftaran Penduduk	18.752.000,00	18.064.000,00	(688.000,00)	96,33
	Program Pencatatan Sipil	150.181.000,00	139.003.000,00	(11.178.000,00)	92,56
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	193.451.000,00	186.296.000,00	(7.155.000,00)	96,30
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	206.948.000,00	135.827.937,00	(71.120.063,00)	65,63
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	4.129.525.388,00	3.647.909.211,00	(481.616.177,00)	88,34
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	89.263.092.002,00	82.540.045.371,00	(6.723.046.631,00)	92,47
	Program Penataan Organisasi	367.731.000,00	327.154.658,00	(40.576.342,00)	88,97
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.464.724.000,00	1.302.159.164,00	(162.564.836,00)	88,90
	Program Kesejahteraan Rakyat	49.354.267.000,00	43.411.341.252,00	(5.942.925.748,00)	87,96
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.006.708.682,00	3.969.703.052,00	(37.005.630,00)	99,08
	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.279.746.000,00	2.145.062.300,00	(134.683.700,00)	94,09
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	283.508.500,00	264.992.334,00	(18.516.166,00)	93,47
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	947.258.500,00	918.887.900,00	(28.370.600,00)	97,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	5.861.940.000,00	5.372.735.168,00	(489.204.832,00)	91,65
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tatacara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gub dan Wagub	3.757.461.000,00	3.410.657.098,00	(346.803.902,00)	90,77

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	SEKRETARIAT DPRD				
22	**SEKRETARIAT DPRD**				
	BELANJA DAERAH	**138.178.307.336,00**	**113.374.108.695,00**	**(24.804.198.641,00)**	**82,05**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	64.556.978.336,00	61.470.440.332,00	(3.086.538.004,00)	95,22
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	70.941.586.000,00	49.755.768.590,00	(21.185.817.410,00)	70,14
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tatacara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gub dan Wagub	2.679.743.000,00	2.147.899.773,00	(531.843.227,00)	80,15
E	**UNSUR PENUNJANG**				
	PERENCANAAN				
23	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				
	BELANJA DAERAH	**28.464.020.472,00**	**26.943.899.300,00**	**(1.520.121.172,00)**	**94,66**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.325.442.432,00	19.439.970.074,00	(885.472.358,00)	95,64
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.900.378.750,00	4.412.151.205,00	(488.227.545,00)	90,04
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.699.832.500,00	1.610.325.773,00	(89.506.727,00)	94,73
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	229.968.240,00	205.835.860,00	(24.132.380,00)	89,51
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	389.387.350,00	382.730.688,00	(6.656.662,00)	98,29
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	217.181.000,00	204.007.500,00	(13.173.500,00)	93,93
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tatacara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gub dan Wagub	701.830.200,00	688.878.200,00	(12.952.000,00)	98,15
	KEUANGAN				
24	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**				
	PENDAPATAN DAERAH	**5.407.663.603.049,00**	**5.433.638.565.323,91**	**25.974.962.274,91**	**100,48**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**2.113.523.015.707,00**	**2.165.875.030.591,19**	**52.352.014.884,19**	**102,48**
	Pajak Daerah	1.924.613.524.517,00	1.951.266.436.219,31	26.652.911.702,31	101,38
	Retribusi Daerah	874.194.575,00	870.571.800,00	(3.622.775,00)	99,59
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	106.108.775.113,00	108.239.513.315,87	2.130.738.202,87	102,01
	Lain-lain PAD yang Sah	81.926.521.502,00	105.498.509.256,01	23.571.987.754,01	128,77
	PENDAPATAN TRANSFER	**3.286.900.087.342,00**	**3.257.721.489.974,00**	**(29.178.597.368,00)**	**99,11**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.286.028.793.852,00	3.256.850.196.484,00	(29.178.597.368,00)	99,11
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490,00	871.293.490,00	-	100,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**7.240.500.000,00**	**10.042.044.758,72**	**2.801.544.758,72**	**138,69**
	Pendapatan Hibah	7.240.500.000,00	7.484.595.000,00	244.095.000,00	103,37
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		2.557.449.758,72	2.557.449.758,72	
	BELANJA DAERAH	**1.500.550.634.235,00**	**1.414.087.131.358,51**	**(86.463.502.876,49)**	**94,24**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.298.485.389,00	95.506.235.624,00	(4.792.249.765,00)	95,22
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.385.130.562.010,00	1.304.661.344.290,51	(80.469.217.719,49)	94,19
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.545.127.500,00	3.963.731.956,00	(581.395.544,00)	87,21
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.576.459.336,00	9.955.819.488,00	(620.639.848,00)	94,13
	KEPEGAWAIAN				
25	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**				
	PENDAPATAN DAERAH	**668.530.000,00**	**652.150.000,00**	**(16.380.000,00)**	**97,55**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**668.530.000,00**	**652.150.000,00**	**(16.380.000,00)**	**97,55**
	Retribusi Daerah	551.050.000,00	598.750.000,00	47.700.000,00	108,66
	Lain-lain PAD yang Sah	117.480.000,00	53.400.000,00	(64.080.000,00)	45,45
	BELANJA DAERAH	**31.713.477.434,00**	**29.582.124.701,00**	**(2.131.352.733,00)**	**93,28**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.474.152.934,00	18.895.799.708,00	(578.353.226,00)	97,03
	Program Kepegawaian Daerah	11.156.614.500,00	9.631.676.793,00	(1.524.937.707,00)	86,33
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.082.710.000,00	1.054.648.200,00	(28.061.800,00)	97,41
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
26	**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**5.039.123.000,00**	**5.045.063.000,00**	**5.940.000,00**	**100,12**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**5.039.123.000,00**	**5.045.063.000,00**	**5.940.000,00**	**100,12**
	Retribusi Daerah	5.039.123.000,00	5.045.063.000,00	5.940.000,00	100,12
	Lain-lain PAD yang Sah				
	BELANJA DAERAH	**29.468.038.717,00**	**25.028.676.778,26**	**(4.439.361.938,74)**	**84,93**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.507.670.747,00	15.488.098.507,26	(1.019.572.239,74)	93,82
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.980.122.970,00	7.840.643.135,00	(3.139.479.835,00)	71,41
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.980.245.000,00	1.699.935.136,00	(280.309.864,00)	85,84
	PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH				
27	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**				
	PENDAPATAN DAERAH	**343.370.000,00**	**443.460.000,00**	**100.090.000,00**	**129,15**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**343.370.000,00**	**443.460.000,00**	**100.090.000,00**	**129,15**
	Retribusi Daerah	343.370.000,00	443.460.000,00	100.090.000,00	129,15
	BELANJA DAERAH	**11.486.856.663,00**	**11.199.383.125,00**	**(287.473.538,00)**	**97,50**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4.117.563.800,00	3.987.809.306,00	(129.754.494,00)	96,85
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.725.970.863,00	6.607.251.665,00	(118.719.198,00)	98,23
	Program Pelayanan Penghubung	643.322.000,00	604.322.154,00	(38.999.846,00)	93,94
F	**UNSUR PENGAWAS**				
	INSPEKTORAT				
28	**INSPEKTORAT**				
	BELANJA DAERAH	**29.011.657.600,00**	**26.807.728.357,00**	**(2.203.929.243,00)**	**92,40**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.868.747.350,00	20.032.275.518,00	(1.836.471.832,00)	91,60
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.469.788.250,00	6.124.075.991,00	(345.712.259,00)	94,66
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	673.122.000,00	651.376.848,00	(21.745.152,00)	96,77
G	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
29	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
	BELANJA DAERAH	**21.764.723.454,00**	**20.838.358.882,00**	**(926.364.572,00)**	**95,74**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	3.237.089.000,00	2.928.012.850,00	(309.076.150,00)	90,45
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.433.464.954,00	9.020.319.526,00	(413.145.428,00)	95,62
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	610.794.000,00	595.686.185,00	(15.107.815,00)	97,53

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	3.817.200.000,00	3.768.924.968,00	(48.275.032,00)	98,74
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.480.674.500,00	1.413.129.500,00	(67.545.000,00)	95,44
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.907.295.500,00	2.853.733.974,00	(53.561.526,00)	98,16
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	278.205.500,00	258.551.879,00	(19.653.621,00)	92,94
H	**UNSUR KEKHUSUSAN**				
	KEISTIMEWAAN DIY				
30	**PANIRADYA KAISTIMEWAN**				
	BELANJA DAERAH	**27.420.562.280,00**	**26.762.651.487,00**	**(657.910.793,00)**	**97,60**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.956.530.806,00	6.890.049.016,00	(66.481.790,00)	99,04
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	20.464.031.474,00	19.872.602.471,00	(591.429.003,00)	97,11
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.489.017.061.741,00**	**5.531.194.851.402,30**	**42.177.789.661,30**	**100,77**
	JUMLAH BELANJA	**5.879.828.899.155,00**	**5.449.935.625.661,56**	**(429.893.273.493,44)**	**92,69**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(390.811.837.414,00)**	**81.259.225.740,74**	**472.071.063.154,74**	**(20,79)**

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.2.1 Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan

a. Permasalahan

Target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka memacu peningkatan pendapatan dilakukan identifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah berpendapatan. Kendala tersebut antara lain:

1) Kurangnya channel pembayaran pajak online dalam pembayaran pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2) Pandemi Covid-19 berdampak di semua sektor baik itu di bidang Ekonomi, Pariwisata dan Transportasi sehingga menyebabkan penurunan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaran Bermotor serta menurunnya penerimaan dari pendapatan Retribusi.
3) Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berkurang karena refocusing Anggaran akibat dari adanya Pandemi Covid-19.

b. Solusi

Berdasarkan kendala tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:

1) Menambah kanal pembayaran pajak online dengan cara bekerjasama dengan beberapa bank dan layanan pembayaran online.
2) Membebaskan denda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, untuk meringankan beban masyarakat.
3) Memberi keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi dalam periode tertentu.
4) Melakukan penataan Anggaran terkait pengeluaran Belanja yang bersumber dari dana Bagi Hasil dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

5) Memberi keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara diangsur bagi perusahaan-perusahaan persewaan kendaraan ataupun perusahaan pariwisata.
6) Melakukan kegiatan sosialisasi melalui media sosial, radio serta iklan tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor.
7) Melakukan pemberitahuan jatuh tempo pajak melalui WA ataupun SMS reminder untuk mengingatkan wajib pajak agar segera membayar pajak Kendaraan Bermotor**.**

3.2.2 Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Belanja

a. ermasalahan

Adanya kebijakan Pemerintah berkaitan dengan penggunanaan dana transfer yang pemanfaatannya sudah diarahkan, serta dikeluarkan dalam masa pelaksanaan APBD mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian belanja dalam proses pelaksanaan anggaran. Serta adanya keperluan mendesak dalam masa pelaksanaan APBD yang belum dapat diantisipasi dalam proses perencanaan berakibat perlu dilakukan penyesuaian belanja dalam proses pelaksanaan anggaran.

b. Solusi

Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang terintergrasi dengan baik.

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pelaporan Keuangan Tahun 2022 mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemda DIY yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat perubahan kebijakan akuntansi sebagai dampak diterbitkannya peraturan baru oleh Pemerintah maka dalam pelaksanaannya mengikuti aturan yang lebih tinggi sepanjang perubahan tersebut belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021. Perubahan tersebut antara lain klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta penatausahaan dan pelaporan Pendapatan dan Belanja BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.

Berkaitan adanya pandemi *Covid-19* yang masih berlanjut hingga Tahun 2022 dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemda DIY mengacu juga Surat Keputusan Gubernur Nomor 427/KEP/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Dalam Rangka Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan.

Adapun secara rinci kebijakan akuntansi Pemda DIY dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
   a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
   b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
   c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
   d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
   e) Pengakuan Pendapatan Transfer BOS dilakukan saat pengesahan SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) oleh BUD yang berasal dari Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.
   f) Pengakuan Pendapatan Hibah yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam penanganan pandemi *Covid*-19 dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD.
3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau Rekening BLUD atau Rekening BOS atau Rekening Sumbangan Masyarakat Dalam Penanganan Pandemi *Covid*-19 yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2) Belanja diakui pada saat:
   a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun SKPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
   b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
   c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
   d) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari BOS maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Belanja BOS dan Surat Pengesahan Belanja Hibah disahkan oleh BUD.

e) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis, maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD.

3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
4) Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran, sedangkan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Transfer

1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pembiayaan

1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah danPengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pendapatan-LO

1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Opersional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2) Beban diakui pada saat:
   a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
   b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
   c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Kas dan Setara Kas

1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan laporan arus kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Lainnya.

2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Piutang

1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
   a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
   b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
   c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, ~~dan~~ Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah.
5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).
8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
9) Penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

Lancar	a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Wajib pajak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak likuid, dan/atau e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Diragukan	a. Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
Macet	a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau e. Wajib pajak mengalami musibah *(force majeur).*

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Lancar	a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang
1.	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	100% (seratus persen)

12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

i. Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:
   a) Belanja Bahan
   b) Belanja Suku Cadang
   c) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
   d) Belanja Obat-obatan
   e) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
   f) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
   g) Belanja Natura dan Pakan
   h) Belanja Persediaan Penelitian
   i) Belanja Persediaan dalam Proses
   j) Belanja Komponen
   k) Belanja Pipa
   l) Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas
3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.

4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan dicatat maksimal setiap semester.
5) Persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
6) Persediaan diukur sebagai berikut:
   a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
   b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
   c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
   d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangbiakkan
   e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lainnya.

j. Investasi

1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Investasi diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhanakan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan

atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
    a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
    b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
    c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut:
    a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
    b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
    c) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Keterangan
Lancar	a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir kooperatif.
Kurang Lancar	a. Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
Diragukan	a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
Macet	a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau

Kualitas Piutang	Keterangan
	c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeur).

16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
Diragukan	50% (lima puluh persen)
Macet	100% (seratus persen)

17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.
18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.
19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:
    a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
    b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
    c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
        - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
        - Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
        - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil

pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dariInvestasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam InvestasiNonpermanen dan Investasi Permanen.

k. Aset Tetap

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
   a) Berwujud.
   b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
   c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
   d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
   e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
   f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
   g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasiaset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
   a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukkannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦤꦶꦠꦃꦢꦸꦤꦂꦢꦸꦤꦂꦢꦺꦱꦃꦄꦤꦶꦱꦺꦴꦩꦲꦶꦱꦺꦴꦩꦲꦶꦱꦺꦴꦩꦲ

17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeologicalsites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
    a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
    b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
    c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
    d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

I. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
    a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
    b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
    c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak

konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
5) DED yang merupakan bagian dari Belanja Modal dan sudah terealisasi sedangkan konstruksi aset tetap belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan jika DED dihasilkan dari Belanja Jasa Konsultasi, dan konstruksinya dari Belanja Modal namun belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan.
6) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
   b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
   c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namunBerita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
   e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
   g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
   h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.
   i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum dilakukan usulan penghapusan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak bisa dilanjutkan pembangunan konstruksinya, perlu dilakukan kajian atas Konstruksi Dalam Pengerjaan oleh SKPD yang mengusulkan.

m. Dana Cadangan

1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
   a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
   d) Sumber dana cadangan; dan
   e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
3) Dana cadangan diakui pada saat penerbitan SP2D LS dan terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

n. Aset Lainnya

1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
   a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
   b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
   c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
   d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
   e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
   f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
   g) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan

kembali, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah.

h) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.

4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:

a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal darikontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.

d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.

e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.

f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

o. Aset Tak Berwujud

1) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).

3) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tesebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.

4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaituATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas,

harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.

5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan frenchise, Hak Cipta, Paten, Software, Kajian, Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, dan Aset Tidak Berwujud Lainnya.
6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
   a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
   b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
      - Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
      - Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
        - Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
        - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
        - Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
        - Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
        - Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;
        - Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
      - Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
        - Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
        - Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
        - Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
        - Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
   c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.
   d) *Software* diakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
   e) *Software* program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan *hardware* tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila

software yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

7) Pengukuran Aset Tak Berwujud

a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitudengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajarmasing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.

e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak

ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage asets)* tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensialyang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadapsuatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapatdiatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapatdikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* computerharus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.

9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas
Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.

b) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas
ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus,Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saatdilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yangdiharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

    Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

    Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan

dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

p. Kewajiban

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
   a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
   b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Utang kepada Masyarakat.
3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
   b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
   c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diakui pada saat Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan perjanjian Pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
   d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yangakan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neracapada setiap akhir periode akuntansi.
   e) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
   f) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

g) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
h) Utang kepada Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
i) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
j) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
k) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diukur sebesar pinjaman yang diterima di Kas Daerah.
d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
e) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
f) Utang Belanja diukur sebesar sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
g) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
h) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diukur sebesar nilai transfer yang tercantum dalam Surat Keputusan tentang kekurangan transfer bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota
i) Utang Kepada Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
j) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
k) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang

dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

l) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diukur sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah.

5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.

6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaiakan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.

b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

q. Koreksi Kesalahan

1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.

2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:
   a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
      Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
   b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan
      - Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
      - Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun aset yang bersangkutan.
      - Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
      - Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
      - Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah mauun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
      - Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
      - Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
      - Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
      - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat.Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yan berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

s. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

t. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

u. Laporan Keuangan Konsolidasian

1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencara menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
   a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
      - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
      - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
   b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
      - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
   c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
      - Pengadaan tanah
      - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
      - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
   a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
   b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
   c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
   d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
   e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
   f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait

dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
   a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
   b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
   c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
   a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
   b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
   a) Pengadaan/pembelian tanah
   b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
   c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah
1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas ase tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikans sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.

3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tidak Terduga
   1) Belanja Tidak Terduga diakui pada saat SP2D LS dicairkan oleh PPKD atau saat pengesahan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pencairan SP2D TU.
   2) Belanja Tidak Terduga diukur sebesar nilai SP2D LS atau sebesar nilai SP2D TU dikurangi dengan nilai setoran pengembalian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
   3) Pengungkapan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 mengungkapkan informasi-informasi berkaitan dengan penetapan status tanggap darurat Bencana *Covid*-19, mekanisme kerja Gugus Tugas Penanganan *Covid*-19, penganggaran, penggunaan dan pelaporan Belanja Tidak Terduga.
b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran, Output Belanja Tidak Terduga dan Beban Tidak Terduga atas Realisasi Belanja Tidak Terduga

1) Pengukuran Beban Tidak Terduga sebesar realisasi Belanja Tidak Terduga dikurangi dengan saldo akhir out put Belanja Tidak Terduga berupa persediaan dan aset tetap/aset lainnya.
2) Persediaan dan aset tetap/lainnya disajikan dalam Neraca BPBD yang merupakan kompilasi dari output Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan oleh Sekretariat Pelaksana dan Bidang-Bidang dalam Gugus Tugas *COVID*-19

c. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Uang untuk Penanganan Pandemi *Covid*-19
   1) Pendapatan dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dicatat sebagai Pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan LO
   2) Pendapatan dan belanja daerah dari sumbangan masyarakat atau pihak/sejenis dalam bentuk uang diakui pada saat diterbitkan SP2B oleh BUD.
   3) Pendapatan Hibah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BPBD
   4) Pendapatan sumbangan dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Operasional BPBD
   5) Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya yang berasal dari Belanja yang bersumber dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis disajikan dalam Neraca BPBD.

d. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Barang untuk Penanganan Pandemi *Covid*-19
   1) Pendapatan yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diakui setelah SPSB disahkan oleh BUD.
   2) Pengukuran sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diukur sebesar nilai perolehan yang dimuat dalam BAST atau dokumen lain yang dipersamakan atau jika nilai perolehan tidak dapat diperoleh maka persediaan dan aset tetap dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar saat diperoleh.
   3) Pendapatan yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang disajikan dalam Laporan Operasional BPBD.
   4) Saldo Persediaan dan Aset Tetap pada akhir periode pelaporan yang berasal dari penerimaan sumbangan masyakarat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang untuk penanganan pandemi Covid-19 disajikan dalam Neraca BPBD.

BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1 Pendapatan	**Rp5.531.194.851.402,30**	**Rp5.703.100.309.342,23**

Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.489.017.061.741,00 realisasi sebesar Rp5.531.194.851.402,30 atau 100,77%. Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp171.905.457.939,93 atau 3,01% dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp5.703.100.309.342,23. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	**Rp2.263.431.316.669,58**	**Rp1.900.923.074.881,46**

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.194.876.474.399,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diakui secara kas sebesar Rp2.263.431.316.669,58 atau 103,12%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp362.508.241.788,12 atau 19,07% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.900.923.074.881,46 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1.1.1 Pajak Daerah	**Rp1.951.267.446.232,85**	**Rp1.688.443.843.923,00**

Pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.924.613.524.517,00 dan realisasi sebesar Rp1.951.267.446.232,85 atau 101,38%. Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp262.823.602.309,85 atau 15,57% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.688.443.843.923,00. Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	**Pajak Daerah**				
a	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	933.917.926.448,00	953.422.127.400,00	102,09	874.731.430.750,00
b	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	397.829.181.500,00	404.968.406.500,00	101,79	362.977.665.400,00
c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	302.160.938.052,00	302.161.948.065,85	100,00	232.244.843.244,00
d	Pajak Air Permukaan	1.113.998.226,00	1.123.483.976,00	100,85	1.301.742.775,00
e	Pajak rokok	289.591.480.291,00	289.591.480.291,00	100,00	217.188.161.754,00
Jumlah		**1.924.613.524.517,00**	**1.951.267.446.232,85**	**101,38**	**1.688.443.843.923,00**

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari total realisasi pendapatan pajak daerah telah mencapai target yaitu 101,38%. Kenaikan realisasi pajak daerah tahun anggaran 2022 dibandingkan tahun anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp953.422.127.400,00, mengalami kenaikan sebesar Rp78.690.696.650,00 atau 9,00% dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp874.731.430.750,00. Hal ini di sebabkan karena pada tahun anggaran 2022 Pemda DIY melaksanakan proses pendataan dan penagihan secara maksimal seiring dengan melandainya pandemi covid-19, serta melakukan banyak inovasi serta sosialisasi baik melalui media cetak dan elektronik.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp404.968.406.500,00, mengalami kenaikan sebesar Rp41.990.741.100,00 atau 11,57% dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp362.977.665.400,00. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah DIY selalu melakukan komunikasi intensif dengan dealer otomotif serta pulihnya perekonomian di DIY.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp302.161.948.065,85 mengalami kenaikan sebesar Rp69.917.104.821,85 atau 30,10%. dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp232.244.843.244,00 Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan mobilitas penduduk serta kenaikan harga BBM

d. Pajak Air Permukaan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.123.483.976,00, mengalami penurunan sebesar Rp178.258.799,00 atau 13,69% dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.301.742.775,00. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian perhitungan nilai air permukaan dengan peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2017 tentang tata cara perhitungan besaran nilai perolehan air permukaan.

e. Pajak Rokok realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp289.591.480.291,00, mengalami kenaikan sebesar Rp72.403.318.537,00 atau 33,34% dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp217.188.161.754,00. Hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah penduduk penerima cukai hasil tembakau.

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah	**Rp38.249.563.473,00**	**Rp38.512.949.895,00**

Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp36.120.490.654,00 dan realisasi sebesar Rp38.249.563.473,00 atau 105,89%. Realisasi Retribusi Daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp263.386.422,00 atau 0,68% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp38.512.949.895,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
2	**Retribusi Daerah**				
a	Retribusi Jasa Umum	12.657.228.459,00	13.073.617.018,00	103,29	13.410.600.459,00
b	Retribusi Jasa Usaha	23.375.842.195,00	25.156.186.455,00	107,62	24.887.724.436,00
c	Retribusi Perijinan Tertentu	87.420.000,00	19.760.000,00	22,60	214.625.000,00
Jumlah		**36.120.490.654,00**	**38.249.563.473,00**	**105,89**	**38.512.949.895,00**

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp12.657.228.459,00 dan realisasi sebesar Rp13.073.617.018,00 atau 103,29%. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
a	**Retribusi Jasa Umum**				
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	44.500.000,00	116.301.000,00	261,35	25.713.000,00
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.259.415.459,00	6.550.337.018,00	104,65	6.259.415.459,00
c	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	835.200.000,00	874.466.000,00	104,70	866.984.000,00
d	Retribusi Pelayanan Pendidikan	5.518.113.000,00	5.532.513.000,00	100,26	6.258.488.000,00
Jumlah		**12.657.228.459,00**	**13.073.617.018,00**	**103,29**	**13.410.600.459,00**

Penjelasan:

Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp44.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp116.301.000,00 atau 261,35% merupakan pendapatan dari pelayanan cek laboratorium untuk tenaga kerja perusahaan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja (Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Realisasi retribusi pelayanan kesehatan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp90.588.000,00 atau 352,30% dibanding tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp 25.713.000,00. Hal ini disebabkan permohonan melakukan uji meningkat karena angka covid-19 menurun.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp6.259.415.459,00 dan realisasi sebesar Rp6.550.337.018,00 atau 104,65%. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp290.921.559,00 atau 4,65% dibandingkan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp6.259.415.459,00. Hal ini disebabkan karena banyaknya aktivitas di DIY yang mengakibatkan produksi sampah meningkat dan penambahan layanan yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp835.200.00,00 dan realisasi sebesar Rp.874.466.000,00 atau 104,70%. Realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.482.000,00 atau 0,86% dibanding tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp866.984.000,00.

Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp5.518.113.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.532.513.000,00 atau 100,26%. Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp725.975.000,00 atau 11,60% dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.258.488.000,00. Retribusi Pelayanan Pendidikan tahun anggaran 2022 berasal dari:

1) Badan Pendidikan dan Pelatihan, dianggarkan sebesar Rp4.998.743.000,00, dan realisasi sebesar Rp4.998.743.000,00 atau 100,00%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp516.295.000,00 atau 9,36% dibanding tahun anggaran 2021 yaitu sebesar

Rp5.515.038.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan tarif sebagai akibat dari metode pelatihan yang berubah dari metode klasikal ke metode *blended learning*.

2) Badan Kepegawaian Daerah, dianggarkan sebesar Rp519.370.000,00, dan realisasi sebesar Rp533.770.000,00 atau 102,77%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp99.980.000,00 atau 15,78% dibanding tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp633.750.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya pembangunan Gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah, sehingga untuk *assessment center* metode kompleks menginap tidak dapat dilayani.

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp23.375.842.195,00 dan realisasi sebesar Rp25.156.186.455,00 atau 107,62% terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
b	**Retribusi Jasa Usaha**				
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.752.385.195,00	8.330.645.905,00	123,37	5.746.160.687,00
b	Retribusi Terminal	384.980.000,00	423.996.000,00	110,13	670.109.000,00
c	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.268.580.000,00	1.537.264.000,00	121,18	681.189.000,00
d	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	416.580.000,00	572.105.000,00	137,33	340.880.000,00
e	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	96.590.000,00	120.232.350,00	124,48	98.709.200,00
f	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	412.392.000,00	957.759.500,00	232,24	74.130.500,00
g	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	14.044.362.000,00	13.214.183.700,00	94,09	17.276.546.049,00
Jumlah		**23.375.842.195,00**	**25.156.186.455,00**	**107,62**	**24.887.724.436,00**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.752.358.195,00 dan realisasi sebesar Rp8.330.645.905,00 atau 123,37%. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.584.485.218,00 atau 44,98% dibandingkan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp5.746.160.687,00. Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp8.330.645.905,00 dianggarkan dan direalisasikan pada 18 (delapan belas) OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah OPD

No	SKPD	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Badan Kepegawaian Daerah	31.680.000,00	64.980.000,00	205,11	4.650.000,00
2	Badan Pendidikan dan Pelatihan	40.380.000,00	46.320.000,00	114,71	62.220.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	874.194.575,00	870.571.800,00	99,59	1.020.834.115,00
4	Badan Penghubung Daerah	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	49.000.000,00
5	Dinas Kebudayaan	555.000.000,00	744.500.000,00	134,14	180.000.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.540.000,00	30.922.500,00	92,20	30.400.000,00

No	SKPD	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
8	Dinas Koperasi dan UKM	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	4.200.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	322.237.000,00	462.532.000,00	143,54	237.561.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	411.421.900,00	528.246.700,00	128,40	437.576.500,00
11	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.423.800.000,00	2.385.849.434,00	167,57	857.752.183,00
12	Dinas Perhubungan	78.436.800,00	79.716.800,00	101,63	81.136.800,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	192.200.000,00	212.722.457,00	110,68	158.535.966,00
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	, 112.200.00000	183.932.800,00	163,93	128.930.600,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	224.117.920,00	260.195.414,00	116,10	312.079.468,00
16	Dinas Sosial	484.200.000,00	484.200.000,00	100,00	388.200.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.521.650.000,00	1.678.656.000,00	110,32	1.749.283.555,00
18	Sekretariat Daerah	418.500.000,00	268.500.000,00	64,16	42.000.000,00
Jumlah		**6.752.358.195,00**	**8.330.645.905,00**	**123,37**	**5.746.160.687,00**

Penjelasan:

1) Badan Kepegawaian Daerah dianggarkan sebesar Rp31.680.000,00, realisasi sebesar Rp64.980.000,00 atau 205,11%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp60.330.000,00 atau 1297.40% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.650.000,00. Hal ini disebabkan ada pendapatan dari sewa kamar, sewar ruang LGD, ruang simulasi dan cctv pada ruang assesment oleh mitra diluar Pemda DIY.

2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp40.380.000,00, realisasi sebesar Rp46.320.000,00 atau 114,71%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp15.900.000,00 atau 25,55% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp62.220.000,00. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian jadwal diklat di tahun anggaran 2022.

3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset dianggarkan sebesar Rp874.194.575,00, realisasi sebesar Rp870.571.800,00 atau 99,59%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp150.262.315,00 atau 14.72% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.020.834.115,00. Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2022 ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan keringanan tarif sewa, selain itu ada beberapa barang milk daerah yang berubah frungsi menjadi pinjam pakai dengan OPD untuk menunjang tugas fungsi.

4) Badan Penghubung Daerah dianggarkan sebesar Rp22.800.000,00, realisasi sebesar Rp22.800.000,00 atau 100,00%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.200.000,00 atau 53.47% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp49.000.000,00. Hal ini disebabkan terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 35/KEP/2022 tentang pemberian keringanan pembayaran retribusi Penyewa BMD, yang menyebabkan realisasi pendapatan penyewaan bangunan tahun anggaran 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

5) Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp555.000.000,00, realisasi sebesar Rp744.500.000,00 atau 134,14%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp564.500.000,00 atau 313.61% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar

Rp180.000.000,00. Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2022 penggunaan Gedung meningkat disebabkan adanya pelonggaran PPKM.

6) Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp33.540.000,00, realisasi sebesar Rp30.922.000,00 atau 92,20%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp522.500,00 atau 1.72% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp30.400.000,00.

7) Dinas Komunikasi dan Informasi dianggarkan sebesar Rp1.800.000,00, realisasi sebesar Rp1.800.000,00 atau 100,00%.

8) Dinas Koperasi dan UKM dianggarkan sebesar Rp4.200.000,00, realisasi sebesar Rp4.200.000,00 atau 100,00%.

9) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp322.237.000,00, realisasi sebesar R462.532.000,00 atau 143,54%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp224.970.500,00 atau 94.70% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp237.561.500,00. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pelanggan baru dari unsur akademisi (penelitian), Rumah Sakit, Hotel dan Perusahaan yang mengujikan sampel nya di Balai Laboratorium lingkungan, pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab Sleman dilakukan pengukuran Debit sungai dengan tarif Rp. 200.000,-/titik sebanyak 60 titik pantau, terdapat kegiatan uji emisi kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DIY sebanyak 1.209 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda 2 dan 4 senilai Rp. 42.100.000,- . Dengan penambahan jumlah pelanggan baru dan kegiatan baru tersebut, sehingga pada tahun 2022 terdapat peningkatan pendapatan Balai Laboratorium Lingkungan yang melebihi target pendapatan tahun 2022 dan peningkatan pendapatan dibanding tahun 2021.

10) Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM dianggarkan sebesar Rp411.421.900,00, realisasi sebesar Rp528.246.700,00 atau 128,40%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp90.670.200,00 atau 20.72% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp437.576.500,00. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengujian di laboratorium tersebut, karena harga relative murah dan sudah terakreditasi dan bersertifikasi.

11) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp1.423.800.000,00, realisasi sebesar Rp2.385.849.434,00 atau 167,57%. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.528.097.251,00 atau 178,15% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp857.752.183,00. Hal ini disebabkan karena ada event internasional yang diselenggarakan di Yogyakarta antara lain event pertandingan sepakbola U20, dan pertandingan badminton *challenge*.

12) Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp78.436.800,00, realisasi sebesar Rp79.719.800,00 atau 101,63%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.420.000,00 atau 1,75% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp81.136.800,00.

13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp192.200.000,00, realisasi sebesar Rp212.722.457,00 atau 110,68%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp54.186.491,00 atau 34.18% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp158.535.966,00. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang sudah mulai membaik setelah pandemic Covid-19.

14) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dianggarkan sebesar Rp112.200.000,00, realisasi sebesar Rp183.932.800,00 atau 163,93%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp55.002.200,00 atau 42.66% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp128.930.600,00. Hal ini disebabkan kenaikan sewa ruangan dan pemutaran film 6 (enam) dimensi

15) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp224.117.920,00, realisasi sebesar Rp260.195.414,00 atau 116,10%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp51.884.054,00 atau 16.63% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp312.079.468,00. Hal ini disebabkan adanya pengujian laboratorium yang berpindah pengujiannya ke BBVet Kementrian Pertanian di wates karena harga tarif yang lebih murah, pullorum dan RBT pengujiannya pindah ke Gunungkidul karena laboratorium yang sudah ter akreditasi.

16) Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp484.200.000,00, realisasi sebesar Rp484.200.000,00 atau 100,00%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp96.000.000,00 atau 24.73% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp388.200.000,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 beberapa pasien panti tidak menginap karena Covid-19.

17) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp1.521.650.000,00, realisasi sebesar Rp1.678.656.000,00 atau 110,32%. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp70.627.555,00 atau 4.04% dibanding tahun 2021 sebesar Rp1.749.283.555,00. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 tahun 2020 terkait dengan ketugasan pemeriksaan uji peralatan, dan adanya pegawai pengawas spesialis dilantik ke pejabat struktural , sehingga penguji berkurang.

18) Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp418.500.000,00, realisasi sebesar Rp268.500.000,00 atau 64,16%. Hal ini dikarenakan perencanaan sewa penguat sinyal oleh PT MAC yang direncanakan sewa selama 5 (lima) tahun, ternyata hanya disewa selama 3 (tiga) tahun. Realisasi Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp226.500.000,00 atau 539.29% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp42.000.000,00.

Retribusi Terminal dianggarkan sebesar Rp384.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp423.996.000,00 atau 110,13%. Realisasi Retribusi Terminal Tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp246.113.000,00 atau 58,05% dibandingkan Tahun anggaran 2021 sebesar Rp670.109.000,00. Hal ini dikarenakan reklasifikasi kode rekening dari retribusi terminal ke retribusi tempat khusus parkir.

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp1.268.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.537.264.000,00 atau 121,19%. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp856.075.000,00 atau 125,67% dibandingkan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp681.189.000,00. Kenaikan retribusi tempat khusus parkir karena ada reklasifikasi dari retribusi terminal.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp416.580.00,00 dan realisasi sebesar Rp572.105.000,00 atau 137,33%. Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp231.225.000,00 atau 67,83% dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp340.880.000,00. Pemungutan Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggarahan/Villa sebesar Rp570.620.000,00 dilaksanakan oleh beberapa OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan/villa OPD

No	SKPD	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	9.585.000,00	10.935.000,00	114,08	12.375.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	54.950.000,00	103.060.000,00	187,55	22.940.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.600.000,00	19.800.000,00	106,45	6.900.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	3.030.000,00	101,00	-
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.875.000,00	14.620.000,00	148,05	4.950.000,00
6	Badan Penghubung Daerah	320.570.000,00	420.660.000,00	131,22	293.715.000,00
Jumlah		**416.580.000,00**	**572.105.000,00**	**137,33**	**340.880.000,00**

Penjelasan:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp9.585.000,00, realisasi sebesar Rp10.935.000,00 atau 114,08%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.440.000,00 atau 11.64% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.375.000,00.

2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp54.950.000,00, realisasi sebesar Rp103.060.000,00 atau 187,55%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp80.120.000,00 atau 349,26% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp22.940.000,00. Hal ini disebabkan sudah tidak ada pembatasan sehingga wisatawan meningkat.

3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp18.600.000,00, realisasi sebesar Rp19.800.000,00 atau 106,45%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp12.900.000,00 atau 186,96% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.900.000,00. Hal ini disebabkan karena pasca pandemic Covid-19 banyak wisatawan yang menginap di wisma Erlangga.

4) Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00, realisasi sebesar Rp3.030.000,00 atau 101,00%.

5) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp9.875.000,00, realisasi sebesar Rp14.620.000,00 atau 148,05%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.670.000,00 atau 195,35% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.950.000,00. Hal ini disebabkan karena banyak wisatawan yang menginap di Balai istirahat Pegawai dan Balai Istirahat Karyawan Kaliurang

6) Badan Penghubung Daerah dianggarkan sebesar Rp320.570.000,00, realisasi sebesar Rp420.660.000,00 atau 131,22%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp126.945.000,00 atau 43,22% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp293.715.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya pelonggaran kegiatan masyarakat sehingga penginapan ramai oleh pengunjung baik perorangan maupun rombongan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan sebesar Rp96.590.000,00 dan realisasi sebesar Rp120.232.350,00 atau 124,48% yang merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Pantai). Realisasi Retribusi Pelayanan

Kepelabuhan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp21.523.150,00 atau 21,80% dibandingkan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp98.709.200,00.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp412.392.000,00 dan realisasi sebesar Rp957.759.500,00 atau 232,24%. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp883.629.000,00 atau 1.191,99% dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp74.130.500,00. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilaksanakan pada:

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp21.982.000,00, realisasi sebesar Rp27.012.000,00 atau 122,88%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.915.000,00 atau 106,25% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp13.097.000,00.

2) Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp390.410.000,00, realisasi sebesar Rp930.747.500,00 atau 238,40%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp869.714.000,00 atau 1.424,98% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp61.033.000,00. Hal ini disebabkan karena sudah tidak ada pembatasan kegiatan sehingga banyak pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertunjukan.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp14.044.362.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.214.183.700,00 atau 94,09%. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dianggarkan pada 4 (empat) OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi usaha daerah OPD

No	SKPD	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	1.353.416.850,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.834.369.500,00	10.866.906.950,00	91,82	12.578.819.349,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	954.200.000,00	957.721.450,00	100,37	1.481.993.000,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.225.792.500,00	1.353.055.300,00	110,38	1.830.416.850,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000,00	36.500.000,00	121,67	31.900.000,00
Jumlah		**14.044.362.000,00**	**13.214.183.700,00**	**94,09**	**17.276.546.049,00**

Penjelasan:

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp11.834.369.500,00, realisasi sebesar Rp10.866.906.950,00 atau 91,82%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.711.912.399,00 atau 13,61% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.578.819.349,00. Hal ini disebabkan karena terjadinya kerusakan mesin, pengaruh alam dan cuaca, sarana prasarana yang kurang mendukung, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

2) Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp954.200.000,00, realisasi sebesar Rp957.721.450,00 atau 100,37%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp524.271.550,00 atau 35,38% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.481.993.000,00. Hal ini disebabkan karena kolam ikan yang kondisinya sudah tidak layak dan perlu perbaikan

3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp1.225.792.500,00, realisasi sebesar Rp1.353.055.300,00 atau 110,38%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp477.361.550,00 atau 26,08% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar

Rp1.830.416.850,00. Hal ini disebabkan karena adanya gagal panen yang disebabkan karena hama, cuaca serta ada pengurangan luasan lahan.

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00, realisasi sebesar Rp36.500.000,00 atau 121,67%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.600.000,00 atau 14,42% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp31.900.000,00.

C. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan pada Dinas Perijinan dan Penanaman modal sebesar Rp87.420.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.760.000,00 atau 22,60% terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
c	**Retribusi Perijinan Tertentu**				
a	Retribusi Ijin Trayek	84.720.000,00	16.860.000,00	19,90	27.260.000,00
b	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	2.700.000,00	2.900.000,00	107,41	525.000,00
c	Retribusi Perpanjangan IMTA	-	-	-	186.840.000,00
Jumlah		**87.420.000,00**	**19.760.000,00**	**22,60**	**214.625.000,00**

Rincian penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu tahun anggaran 2022 lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp84.720.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.860.000,00 atau 19,90%. Hal dikarenakan dampak dari angkutan sewa khusus (ASK) banyak ditarik oleh pihak *leasing* atau di jual ke pihak lain, dan kebijakan kenaikan BBM. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.400.000,00 atau sebesar 38,15% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp27.260.000,00.

2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp2.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.900.000,00 atau sebesar 107,41%. Retribusi Ijin Usaha Perikanan tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.375.000,00 atau 452,38% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar Rp525.000,00.

3) Retribusi Perpanjangan IMTA tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan karena terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Rekening pembayaran di aplikasi TKA sudah dialihkan ke rekening pusat.

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**Rp108.239.513.315,87**	**Rp96.338.516.913,54**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp106.108.775.113,00 dan realisasi sebesar Rp108.239.513.315,87 atau 102,01% meliputi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMN, Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.900.996.402,33 atau 12,35% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar

Rp96.338.516.913,54. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 9
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
d	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**				
a	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	179.079.443,00	179.079.443,00	100,00	110.733.653,00
b	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	105.929.695.670,00	108.060.433.872,87	102,01	89.837.573.863,22
c	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	6.390.209.397,32
Jumlah		**106.108.775.113,00**	**108.239.513.315,87**	**102,01**	**96.338.516.913,54**

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp179.079.443,00 dan realisasi sebesar 100% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA). Realisasi penerimaan atas penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp68.345.790,00 atau 61,72% dari realisasi penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2021 yaitu sebesar Rp110.733.653,00. Hal ini disebabkan kinerja BUMD yang sudah membaik dibanding kinerja tahun sebelumnya akibat dampak pandemi Covid-19.

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp105.929.695.670,00 dan realisasi sebesar Rp108.060.433.872,87 atau 102,01%. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga Keuangan) yang berasal dari Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.630.738.202,58 atau 160,88%. Pada Tahun Anggaran 2021 bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal melalui Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) direalisasikan pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Realisasi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp759.471.194,74 atau 11,88% dibanding realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada BUKP tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp6.390.209.397,32. Hal ini disebabkan karena kriteria pemberian bunga dan penghitungan laba BUKP karena menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga Keuangan) yang berasal dari PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp95.761.065.417,00 dan terealisasi sebesar Rp95.761.065.417,29 atau 100,00%. Realisasi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp10.805.225.543,29 atau 12,79% dibanding realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp84.955.839.874,00. Hal ini disebabkan karena kinerja yang semakin membaik antara lain dengan

adanya kebijakan restrukturisasi pinjaman dan telah selesainya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) dari PT. Anindya Mitra Internasional dianggarkan sebesar Rp1.229.058.069,00, dan realisasi sebesar Rp1.229,058.069,00 atau 100%. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT AMI mengalami kenaikan sebesar Rp184.886.369,00 atau 17,71% dibanding dengan realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT AMI tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.044.171.700,00. Hal ini disebabkan karena adanya pelonggaran PPKM yang mengakibatkan peningkatan jumlah penumpang Trans Jogja.

4) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) dari PT. Tarumartani dianggarkan sebesar Rp5.439.572.184,00, dan realisasi sebesar Rp5.439,572.184,00 atau 100%. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT Tarumartani mengalami kenaikan sebesar Rp1.602.009.895,00 atau 41,75% dibanding dengan realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT Tarumartani tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.837.562.289,00. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penjualan tembakau iris serta peningkatan usaha restoran.

5) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta tahun anggaran 2022 dianggarkan dan direalisasikan pada sub rincian obyek bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Tabel 5. 10
Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
a	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	3.500.000.000,00	5.630.738.202,58	160,88	-
b	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Bank BPD DIY	95.761.065.417,00	95.761.065.417,29	100,00	84.955.839.874,00
c	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT AMI	1.229.058.069,00	1.229.058.069,00	100,00	1.044.171.700,00
d	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Tarumartani	5.439.572.184,00	5.439.572.184,00	100,00	3.837.562.289,00
Jumlah		**105.929.695.670,00**	**108.060.433.872,87**	**102,01**	**89.837.573.863,22**

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	**Rp165.674.793.647,86**	**Rp77.627.764.149,92**

Lain-lain PAD Yang Sah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp128.033.684.115,00 dan realisasi sebesar Rp165.674.793.647,86 atau 129,40%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp88.047.029.497,94 atau 113,42% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran 2021 sebesar Rp77.627.764.149,92. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 Pemda DIY sudah tidak menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sampai dengan bulan September tahun 2022. Kemudian ditetapkan kembali Peraturan Gubernur Nomor 58

tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor selama 2 (dua) bulan yaitu bulan oktober tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2022, sehingga terdapat realisasi dari pendapatan denda pajak daerah sampai dengan bulan September 2022. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 11
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**				
a	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	1.103.286.899,00	2.090.399.509,00	189,47	1.399.579.436,00
b	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	8.426.254.913,00	18.655.194.886,00	221,39	6.585.610.680,00
c	Jasa Giro	9.467.350.348,00	10.360.056.324,00	109,43	20.126.803.195,96
d	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	335.793.183,00	7.750.000,00	2,31	590.688.235,01
e	Pendapatan Bunga	13.250.000.000,00	14.749.999.992,00	111,32	3.214.611.877,48
f	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.317.264,00	9.250.000,00	214,26	3.500.000,00
g	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	18.497.245,00	310.727.434,00	1.679,86	760.577.134,00
h	Pendapatan Denda Pajak Daerah	52.467.122.896,00	64.068.059.100,00	122,11	-
i	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	33.349.130,00	38.245.553,00	114,68	86.793.688,00
j	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	46.210.000,00	61.721.413,00	133,57	103.297.987,00
k	Pendapatan dari Pengembalian	471.104.937,00	960.617.908,47	203,91	3.321.753.943,25
l	Pendapatan BLUD	42.400.157.300,00	54.333.917.528.39	128,15	41.384.343.973,22
m	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.240.000,00	28.854.000,00	281,78	50.204.000,00
Jumlah		**128.033.684.115,00**	**165.674.793.647,86**	**129,40**	**77.627.764.149,92**

A. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.103.286.899,00 dan realisasi sebesar Rp2.090.399.509,00 atau 189,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
a	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	541.666.000,00	1.150.079.126,00	212,32	136.200.000,00
b	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	207.576.999,00	207.576.999,00	100,00	330.534.999,00
c	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	244.240.900,00	317.338.135,00	129,93	154.940.400,00
d	Hasil Penjualan Aset Lainya	109.803.000,00	415.405.249,00	998,59	777.904.037,00
Jumlah		**1.103.286.899,00**	**2.090.399.509,00**	**189,47**	**1.399.579.436,00**

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah merupakan barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. Penjualan barang milik daerah dilakukan dengan metode pelelangan terbuka dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan dihadapan pejabat lelang.

Rician Barang milik daerah yang dijual dengan metode pelelangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 13
Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan (Metode Lelang)

NO	URAIAN KEGIATAN PENJUALAN	TANGGAL	HASIL PENJUALAN	PEMENANG
1	Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada SMA, SMK, dan Balai Dikmen di Lingkungan Pemda DIY	21 Februari 2022	466.666.000	Moh Senin
2	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada BPRSW Dinas Sosial DIY	20 April 2022	35.199.999	Nuriman
3	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Instalasi Permanen dan Bangunan Rumah Sakit Jiwa pada RS Jiwa Grhasia	27 Mei 2022	32.500.000	Dulpani
4	Pemusnahan BMD berupa Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran, dan Barang Persediaan Berbahan Kertas)	09 Juni 2022	70.713.000	-
5	Penjualan BMD berupa Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya di Jl. Panembahan No. 20 Panembahan Kraton Yogyakarta	13 Juni 2022	127.777.000	T. Salfanus
6	Penjualan BMD berupa Hewan Ternak Domba (11 ekor)	04 Juli 2022	12.750.000	Agus SM
7	Penjualan BMD berupa Hewan Ternak Sapi (4 ekor)	06 Juli 2022	82.775.500	Suharto
8	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen pada SMAN 1 Dlingo	25 Juli 2022	12.100.000	Maulidi
9	Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan	7 November 2022	329.709.000	Saipudin
10	Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional	21 Desember 2022	683.413.126	KPKNL Yogyakarta
JUMLAH			**1.853.603.625**	

Penjelasan:

a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp541.666.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.150.079.126,00 atau 212,32%. Realisasi hasil penjualan peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 meningkat sebesar Rp1.013.879.126,00 atau 744,40% dari realisasi hasil penjualan peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp136.200.000,00. Hasil penjualan peralatan dan mesin merupakan penjualan peralatan dan mesin semua OPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat atau usang dan telah diusulkan penghapusan. Hasil penjualan peralatan dan mesin berupa Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada SMA, SMK, dan Balai Dikmen di Lingkungan Pemda DIY direalisasikan sebesar Rp466.666.000,00, dan Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas direalisasikan sebesar Rp683.413.126,00. Proses penjualan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp207.576.999,00 dan realisasi sebesar Rp207.576.999,00 atau 100,00% merupakan hasil lelang bekas bongkaran bangunan semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Hasil penjualan Gedung dan bangunan berupa Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Pernanen pada BPRSW Dinas Sosial DIY sebesar Rp35.199.999,00, Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Instalasi Permanen dan Bangunan Rumah Sakit Jiwa pada RS Jiwa Grhasia sebesar Rp32.500.000,00, Penjualan BMD berupa Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya di Jl. Panembahan No. 20 Panembahan Kraton Yogyakarta sebesar Rp127.000.000,00, Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen pada SMAN 1 Dlingo sebesar Rp12.100.000,00. Proses penjualan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

c. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp244.240.900,00 dan terealisasi sebesar Rp317.338.135,00 atau 129,93%. Hasil penjualan aset tetap lainnya merupakan penjualan hewan dan tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp148.715.400,00, realisasi sebesar Rp221.812.635,00 atau 149,15%. Sedangkan hasil penjualan aset tetap lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa penjualan hewan yang telah diusulkan penghapusan dianggarkan sebesar Rp95.525.500,00, realisasi sebesar Rp95.525.500,00 atau 100%.

d. Hasil Penjualan Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp109.803.000,00 dan terealisasi sebesar Rp415.405.249,00. Hasil penjualan aset lainnya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset dianggarkan sebesar Rp95.713.000,00, realisasi sebesar Rp400.422.000,00 atau 418,36%, hasil penjualan aset lainnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.444.725,00 atau 68,89%, hasil penjualan aset lainnya oleh dinas Kebudayaan dianggarkan sebesaar Rp9.090.000,00 realisasi sebesar Rp11.130.000,00 atau 122,44%.

B. Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp8.426.254.913,00 dan realisasi sebesar Rp18.655.194.886,00 atau 221,39%. Hasil dari pemanfaatan BMD tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 14
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
a	Hasil Sewa BMD	5.753.806.173,00	14.827.306.992,00	257,70	4.283.551.729,00
b	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	1.839.448.740,00	2.994.887.894,00	162,81	1.468.658.951,00
c	Hasil dari Bangun Guna Serah	833.000.000,00	833.000.000,00	100,00	833.000.000,00
Jumlah		**8.426.254.913,00**	**18.655.194.886,00**	**221,39**	**6.585.610.680,00**

Hasil sewa Barang Milik Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan pada beberapa OPD sebesar Rp5.753.806.173,00 dan realisasi sebesar Rp14.827.306.992,00 atau 257,70%. Hasil sewa barang milik daerah tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Sewa BMD OPD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
a	Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga	100.000.000,00	166.792.500,00	166,79	67.250.000,00
b	Dinas Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.200.000,00
c	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	25.109.200,00	40.458.200,00	161,13	11.700.000,00
d	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	45.545.000,00	-	-
e	Dinas Perhubungan	6.250.000,00	367.200.000,00	5.875,20	-
f	Dinas Komunikasi dan informatika	-	500.000,00	-	-
g	Dinas Koperasi dan UKM	671.616.973,00	671.616.973,00	100,00	128.158.036,00
h	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	480.000,00	480.000,00	100,00	536.000,00
i	Dinas Kebudayaan	-	20.627.500,00	-	-
j	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	106.460.000,00	-	-
k	Dinas Pariwisata	512.000.000,00	523.666.666,00	102,28	35.000.000,00
l	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	207.600.000,00	-	-
m	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	26.571.153,00	-	23.986.183,00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
n	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	192.875.000,00	195.475.000,00	101,35	-
o	Sekretariat Daerah	62.700.000,00	45.900.000,00	73,21	9.591.510,00
p	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4.059.295.000,00	12.349.014.000,00	304,22	3.996.380.000,00
q	Badan Kepegawaian Daerah	117.480.000,00	53.400.000,00	45,45	-
r	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	6.750.000,00
Jumlah		**5.753.806.173,00**	**14.827.306.992,00**	**257,70**	**4.283.551.729,00**

Penjelasan:

a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp166.792.500.000,00 atau 166,79%. Pendapatan ini berasal dari sewa lapangan kenari oleh pengguna baru untuk kegiatan olah raga *Gateball.*

b. Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 realisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau 100%

c. Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral dianggarkan sebesar Rp25.109.200,00 realisasi sebesar Rp40.458.200,00 atau 161,13%

d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp45.545.000,00. Pendapatan ini berasal dari sewa laboratorium mutu lingkungan.

e. Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp6.250.000,00 realisasi sebesar Rp367.200.000,00 atau 5.875,20%. Pendapatan ini berasal dari sewa lahan parkir di Abubakar Ali karena pengelolaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang diserahkan ke Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Perhubungan

f. Dinas Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp500.000,00

g. Dinas Koperasi dan UKM dianggarkan sebesar Rp671.616.973,00 realisasi sebesar Rp671.616.913,00 atau 100,00%

h. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp480.000,00 realisasi sebesar Rp480.000,00 atau 100,00%

i. Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp20.627.500,00. Pendapatan ini berasal dari sewa tanah eks STIEKER untuk event pasar malam.

j. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp106.460.000,00. Pendapatan ini berasal dari Diorama arsip.

k. Dinas Pariwisata dianggarkan sebesar Rp512.000.000,00 realisasi sebesar Rp523.666.666,00 atau 102,28%

l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp207.600.000,00. Pendapatan sewa barang milik daerah ini berasal dari sewa ulen sentalu yang disewa pada tahun 2022.

m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp26.571.153,00. Hal ini karena terdapat kesalahan penganggaran di tahun 2022 pada sub rincian obyek hasil Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah, seharusnya pada sub rincian obyek hasil sewa barang milik daerah.

n. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp192.875.000,00 realisasi sebesar Rp195.475.000,00 atau 101,35%. Pendapatan hasil sewa barang milik daerah ini merupakan obyek baru pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis berupa pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi dokter, paramedis dan teknis secara online.

o. Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp62.700.000,00 realisasi sebesar Rp45.900.000,00 atau 73,21%

p. Badan Pengelola Keuangan dan Aset dianggarkan sebesar Rp4.059.295.000,00 realisasi sebesar Rp12.349.014.000,00 atau 304,22%. Pendapatan sewa barang milih daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2022 berupa sewa Malioboro mall dan sewa Jogja expo center.

q. Badan Kepegawaian Daerah dianggarkan sebesar Rp117.480.000,00 realisasi sebesar Rp53.400.000,00 atau 45,45%

r. Badan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 tidak dianggarkan dikarenakan pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat penyewa laboratorium komputer.

Hasil Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.839.448.740,00 realisasi sebesar Rp2.994.887.894,00 atau 162,81%. Hasil Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah tahun anggaran 2022 pada OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 16
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD OPD

No		Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
	a	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.663.097.800,00	2.010.831.875,00	120,91	1.043.337.375,00
	b	Dinas Koperasi dan UKM	146.816.680,00	979.521.759,00	667,17	406.485.356,00
	c	Dinas Pariwisata	4.534.260,00	4.534.260,00	100,00	18.836.220,00
	d	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000,00	-	-	-
Jumlah			**1.839.448.740,00**	**2.994.887.894,00**	**162,81**	**1.468.658.951,00**

Penjelasan:

a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp1.663.097.800,00 realisasi sebesar Rp2.010.831.875,00 atau 120,91%. Pendapatan ini berasal dari pengelolaan hutan dengan Perjanjian Kerjasama

b. Dinas Koperasi dan UKM dianggarkan sebesar Rp146.816.680,00 realisasi sebesar Rp979.521.759,00 atau 667,17%. Pendapatan hasil Kerjasama pemanfaatan ini berasal dari hasil Kerjasama penjualan di Bandara YIA yang pada tahun 2022 ada perubahan mekanisme pembayaran hasil Kerjasama.

c. Dinas Pariwisata dianggarkan sebesar Rp4.534.260,00 realisasi sebesar Rp4.534.260,00 atau 100,00%. Pendapatan hasil Kerjasama pemanfaatan ini berasal dari bagi hasil tempat parkir ratu boko.

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan karena kesalahan penganggaran di tahun anggaran 2022, seharusnya dianggarkan pada Hasil sewa Barang Milik Daerah sesuai dengan realisasi tahun anggaran 2022 dan realisasi tahun anggaran 2021.

C. Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp9.467.350.348,00 dan realisasinya sebesar Rp10.360.056.324,00 atau 109,43% meliputi penerimaan jasa giro Rekening Kas Daerah pada Bank BPD DIY sebesar Rp9.997.862.819,00, jasa giro Rekening Bendahara Pengeluaran OPD yang sudah dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp351.737.999,00, dan jasa giro pada rekening dana BOS sebesar Rp10.455.506,00.

D. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp335.793.183,00 dan realisasinya sebesar Rp7.750.000,00 atau 2,31%. Pendapatan Hasil pengelolaan dana bergulir tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp582.938.235,01 atau 98,69% dibanding pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp590.688.235,01. Hal ini di sebabkan pada tahun anggaran 2021 masih mengakui realisasi pendapatan dari jasa produksi dan dana pembinaan BUKP, untuk tahun anggaran 2022 realisasi jasa produksi dan dana pembinaan diakui pada Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan.

E. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga berasal dari penempatan uang pemerintah daerah berupa deposito pada PT Bank Pembangunan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp13.250.000.000,00 realisasi sebesar Rp14.749.999.992,00 atau 111,32%. Pendapatan Bunga tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.535.388.114,52 atau 127,87% dibanding pendapatan bunga tahun anggaran 2022.

F. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.317.264,00 realisasi sebesar Rp9.250.000,00 atau 214,26%, merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pengawai Negeri Sipil atas kelalaian yang dilakukan. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.750.000,00 atau 160,87% dibanding Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2021.

G. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp18.497.245,00 realisasi sebesar Rp310.727.434,00 atau 1.679,86%. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp449.849.700,00 atau 59,15% dibanding Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2021 sebesar Rp760.577.234,00. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dianggarkan dan direalisasikan pada BPKA. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan pada kegiatan semua Organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik.

H. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan denda pajak daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp52.467.122.896 dan realisasi sebesar Rp64.068.059.100,00 atau 122,11%. Pendapatan denda pajak berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pendapatan denda pajak daerah tahun anggaran 2021 tidak terealisasi dikarenakan ada penghapusan denda pajak.

I. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp33.349.130,00 dan realisasi sebesar Rp38.245.553,00 atau 114,68%. Pendapatan Denda Retribusi daerah berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum dan denda retribusi jasa usaha. Pendapatan denda Retribusi daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp48.548.135,00 atau 55,94% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp86.793.688,00.

J. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan berasal dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa dianggarkan sebesar Rp46.210.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp61.721.413,00. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp41.576.574,00 atau 148,45% dibanding Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan tahun anggaran 2021. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dianggarkan dan direalisasikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan merupakan pendapatan dari jaminan atas pelaksanaan pekerjaan pada semua Organisasi Perangkat Daerah baik fisik maupun non fisik.

K. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp471.104.937,00 dan direalisasikan sebesar Rp960.617.908,47 atau 203,91%. Pendapatan dari pengembalian berasal dari pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Rincian pendapatan dari pengembalian adalah sebagai berikut:

1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran gaji dan tunjangan dianggarkan sebesar Rp444.723.937,00 dan direalisasikan sebesar Rp924.410.133,47 atau 207,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 17
Rincian Realisasi Pengembalian Gaji dan Tunjangan

No	Uraian	Tahun 2022 Realisasi (Rp)
a	Pengembalian Gaji dan Tunjangan	79,328,347.00
b	Pengembalian temuan inspektorat	154,669,232.00
c	Pengembalian temuan BPK	151,648,801.85
d	Pengembalian BOS	146,738,080.00
e	Pengembalian lain-lain	392,025,672.62
Jumlah		**924,410,133.47**

Pengembalian lain-lain sebesar Rp392.025.672,62 adalah penerimaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 18
Rincian Realisasi Pengembalian Lain-lain

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Setoran penerimaan dari AGNES KHARISMAYANTI	16- Februari- 2022	1.770.200,00
2	Kelebihan setor Belanja makanan dan minuman rapat TA 2022 setor 107,500, seharusnya 107,000. kelebihan 500 Disperindag	15- Februari- 2022	500,00
3	Belanja modal bangunan gedung kantor, Biro UHP	24- Februari- 2022	9.643.000,00
4	Diskop UKM -Belanja honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan	11- Maret- 2022	480.000,00
5	Diskominfo-Belanja jasa iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	28- Maret- 2022	2.250.105,00

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
7	SMKN 1 SEWON, Belanja modal Mebel	1-Apr-22	9.000.000,00
8	SMKN 1 SEWON, Belanja pemeliharaan bangunan gedung-banguan gedung tempa tkerja-bangunan gedung tempat pendidikan	4-Apr-22	15.121.350,00
9	Pengembalian BKK DAIS Kalurahan Jambidan Banguntapan bantul	4-Apr-22	36.000,00
12	BALAI DIKMEN KULON PROGO, Belanja jasa tenaga keamanan	5-Apr-22	281.592,00
13	BALAI DIKMEN KULON PROGO, Belanja jasa tenaga keamanan	5-Apr-22	281.592,00
14	DISKES, Belanja sewa sound 2021	6-Apr-22	4.500.000,00
15	Disperindag, Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja	8-Apr-22	3.148.600,00
16	Disperindag, Belanja pembangunan gedung workshop gamelan BPTTG sesuai SP2D No.09351/LS/3.31.02/12/2021	13-Apr-22	14.291.400,00
17	Setoran pengembalian insentif GTY/PTY SLB. SMA/SMK Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY tahun 2021	18-Apr-22	19.350.000,00
18	Diskop UKM, Belanja honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan	18-Apr-22	35.000,00
20	Biro Umum UHP, Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	18-Apr-22	1.494.694,00
21	Biro Umum UHP, Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	18-Apr-22	1.524.000,00
22	Biro Umum UHP, Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	18-Apr-22	3.122.373,00
23	Biro Umum UHP, Belanja modal bangunan gedung kantor	18-Apr-22	56.991.000,00
24	SMK N 2 GEDANGSARI, Pengembalian pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur	28-Apr-22	1.805.100,00
25	BALAI DIKMEN KAB SLEMAN, Belanja Jasa kebersihan kantor dan jasa keamanan kantor 2021	13-May-22	1.827.360,00
26	Setoran iuran BPJS Kesehatan Jasa Tenaga Keamanan bulan Jan sd Des 2021 pada PT Indi Karya SMA N 1 Pakem	17-May-22	1.827.360,00
28	BALAI DIKMEN KAB SLEMAN, Pengembalian kelebihan pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan danJasa Tenaga Keamanan SMK N 1 Godean 2021	25-May-22	8.223.120,00
30	Setoran BPJS Kesehatan Belanja jasa tenaga kebersihan dan tenaga keamanan bulan Jan sd Des 2021 PT Indi Karya SMA N 1 Cangkringan	2- Juni- 2022	1.827.360,00
33	BIRO TAPEM, Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan	27- Juni- 2022	10.500.000,00
34	Setoran Pelimpahan penerimaan 001.111.001777, BPTPB	28- Juni- 2022	1,00
35	DISLAUTKAN, Honorariumm Narasumber FGD	5- Juli- 2022	340.000,00
36	BPBD, Pegembalian kelebihan dana TPP Juni Disnakertrans	7- Juli- 2022	21.777.938,00
37	Setoran Pelimpahan penerimaan 001.111.001777, BPTPB	19- Juli- 2022	3.602,00
38	BPBD, Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	21- Juli- 2022	3.890.000,00
39	BPBD, Belanja makanan dan minuman rapat	21- Juli- 2022	2.025.000,00
40	Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor TA 2021	21- Juli- 2022	1.774.329,92
41	DLHK DIY, Pelimpahan penerimaan 001.111.001765 LEBIH SETOR 100	25- Juli- 2022	100,00
42	BIRO ORGANISASI, Belanja pemeliharaan bangunan gedung	25- Juli- 2022	6.831.073,20
43	BANDIKLAT, Belanja pemeliharaan bangunanan gedung	2- Agustus- 2022	33.461.642,50
44	Dispar, Pelimpahan penerimaan 001.111.001780	9- Agustus- 2022	1.800.000,00
45	DISPAR, Pengembalian belanja pemeliharaan tahun anggaran 2021	11- Agustus- 2022	1.850.000,00

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
46	Transfer via bank BPD Jateng,SUDARMANTO	16- Agustus- 2022	33.331.200,00
47	Pelimpahan penerimaan 001.111.001785, YANPUS	29- Agustus- 2022	150.000,00
49	DISDIKPORA, Setoran pembayaran TPG PNS	14-Sep-22	10.667.835,00
51	Pelimpahan penerimaan 001.111.001785, YANPUS	30-Sep-22	150.000,00
52	BPIPJK-pengembalian BPJS kesehatan januari - juli 2022 jasa keamanan KELEBIHAN 840	30-Sep-22	840,00
54	setoran dari kalurahan sabdodadi bantul (via CMS)	29-Oct-22	12.665.612,00
55	SISA DANAIS/KALURAHAN TRIDADI	29-Oct-22	16.149.000,00
56	Pengembalian BKK COVID kalurahan srimartani via CMS	11-Nop-2022	4.364.000,00
58	Pengembalian BKK Danais kalurahan bantul	29-Nop-2022	16.897.405,00
60	Pengembalian BKK Dais kelurahan umbulmartani	1-Desember-2022	50.000.000,00
61	PENGEMBALIAN DANAIS KALURAHAN SENDANGSARI VIA CMS	19-Desember-2022	4.229.500,00
62	PAPARTI PERTAMA PT PRIMA, Setoran penerimaan	26-Desember-2022	90.000,00
63	PAPARTI PERTAMA PT PRIMA, Setoran penerimaan	26-Desember-2022	227.588,00
64	BPIPJK-Pengembalian sisa uang persediaan	27-Desember-2022	14.000,00
65	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya PLL	27-Desember-2022	2.900,00
66	DLHK-Belanja makanan dan minuman rapat PLL	27-Desember-2022	400,00
Jumlah			**392,025,672.62**

2) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp26.381.000,00 direalisasikan sebesar Rp36.207.775,00 atau 137,25%

L. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp42.400.157.300,00 dan realisasi sebesar Rp54.333.917.528,39 atau 128,15%. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp12.949.573.555,17 atau 31,29% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp41.384.343.973,22. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 19
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Balai Latihan Pendidikan Tehnik	1.836.400.000,00	1.822.892.069,00	99,26	1.520.463.776,00
2	Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	-	-	-	73.627.830,00
3	Balai Pelatihan Kesehatan	3.000.000.000,00	4.034.582.399,00	134,49	1.984.688.386,00
4	RS Jiwa Grhasia	20.500.000.000,00	23.631.733.885,39	115,28	21.097.212.549,22
5	RS Paru Respira	10.957.700.000,00	16.631.854.533,00	151,78	10.079.115.317,00
6	Balai Laboratorium Kesehatan	4.950.000.000,00	6.539.111.166,00	132,10	5.502.952.660,00
7	SMKN 6 Yogyakarta	682.807.300,00	1.108.901.607,00	162,40	771.523.291,00
8	SMKN 1 Sewon Bantul	400.500.000,00	478.016.412,00	119,35	328.254.612,00
9	SMKN 3 Wonosari	72.750.000,00	86.825.457,00	119,35	26.505.552,00
Jumlah		**42.400.157.300,00**	**54.333.917.528,39**	**128,15**	**41.384.343.973,22**

M. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah berada pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp10.240.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.854.000,00 atau 281,78%. Pendapatan dari Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun anggaran 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp21.350.000,00 atau 42,53% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp50.204.000,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	**Rp3.257.721.489.974,00**	**Rp3.794.855.660.531,00**

Anggaran Pendapatan Transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.286.900.087.342,00 dan realisasi yang diterima secara kas sebesar Rp3.257.721.489.974,00 atau 99,11%. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp3.257.721.489.974,00 mengalami penurunan sebesar Rp537.134.170.557,00 atau sebesar 14,15% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.794.855.660.531,00. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**				
a	Dana Bagi Hasil	94.793.652.000,00	107.696.079.891,00	113,61	132.615.520.738,00
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.218.923.700.185,00	1.218.923.700.185,00	100,00	1.224.852.487.000,00
c	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	140.379.049.000,00	137.529.856.469,00	97,97	135.901.240.001,00
d	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	508.332.739.184,00	469.100.906.456,00	92,28	943.515.205.403,00
e	Dana Insentif Daerah (DID)	64.312.676.000,00	64.312.676.000,00	100,00	77.593.507.000,00
f	Dana Keistimewaan	1.259.286.977.483,00	1.259.286.977.483,00	100,00	1.279.572.655.079,00
	Jumlah	**3.286.028.793.852,00**	**3.256.850.196.484,00**	**99,11**	**3.794.050.615.221,00**
2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**				
a	Bantuan Keuangan	871.293.490,00	871.293.490,00	100,00	805.045.310,00
	Jumlah	**871.293.490,00**	**871.293.490,00**	**100,00**	**805.045.310,00**
Jumlah		**3.286.900.087.342,00**	**3.257.721.489.974,00**	**99,11**	**3.794.855.660.531,00**

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp3.286.028.793.852,00 dan realisasi sebesar Rp3.256.850.196.484,00 atau 99,11%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp537.200.418.737,00 atau 14,16% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.794.050.615.221,00. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 21
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**				
a	Dana Bagi Hasil	94.793.652.000,00	107.696.079.891,00	113,61	132.615.520.738,00
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.218.923.700.185,00	1.218.923.700.185,00	100,00	1.224.852.487.000,00
c	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	140.379.049.000,00	137.529.856.469,00	97,97	135.901.240.001,00
d	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	508.332.739.184,00	469.100.906.456,00	92,28	943.515.205.403,00
e	Dana Insentif Daerah (DID)	64.312.676.000,00	64.312.676.000,00	100,00	77.593.507.000,00
f	Dana Keistimewaan	1.259.286.977.483,00	1.259.286.977.483,00	100,00	1.279.572.655.079,00
Jumlah		**3.286.028.793.852,00**	**3.256.850.196.484,00**	**99,11**	**3.794.050.615.221,00**

Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp94.793.652.000,00 dan realisasi sebesar Rp107.696.079.891,00 atau 113,61%. Penerimaan Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp24.919.440.847,00 atau 18,79% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp132.615.520.738,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 22
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.584.098.000,00	1.598.273.053,00	100,89	2.004.593.113,00
b	DBH PPh Pasal 21	79.718.878.000,00	89.564.604.474,00	112,35	111.564.934.565,00
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.813.440.000,00	12.941.735.130,00	131,88	15.258.212.745,00
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.595.623.000,00	3.491.522.040,00	97,10	3.633.404.911,00
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	21.209.000,00	33.043.585,00	155,50	-
f	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	20.719.000,00	27.216.609,00	131,36	48.890.004,00
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	39.685.000,00	39.685.000,00	100,00	105.485.400,00
Jumlah		**94.793.652.000,00**	**107.696.079.891,00**	**113,61**	**132.615.520.738,00**

a. Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp 1.584.098.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.598.273.053,00 atau 100,89%.
b. Pendapatan DBH PPh Pasal 21 dianggarkan sebesar Rp79.718.878.000,00 dan realisasinya sebesar Rp89.564.604.474,00 atau 112,35%.
c. Pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dianggarkan sebesar Rp9.813.440.000,00 dan realisasinya sebesar Rp12.941.735.130,00 atau 131,88%.
d. Pendapatan DBH Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sebesar Rp3.595.623.000,00 dan realisasinya sebesar Rp3.491.522.040,00 atau 97,10%.
e. Pendapatan Bagi Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dianggarkan sebesar Rp21.209.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 33.043.585,00 atau 155,50%.
f. Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minerba dan Batubara-Royalty dianggarkan sebesar Rp20.719.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.216.609,00 atau 131,36%.

g. Pendapatan dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dianggarkan sebesar Rp39.685.000,00 dan realisasi sebesar Rp39.685.000,00 atau sebesar 100,00%.

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.218.923.700.185,00 dan realisasi sebesar Rp1.218.923.700.185,00 atau 100,00%. Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.928.786.815,00 atau 0,48% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.224.852.487.000,00.

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Fisik (DAK Fisik) tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp140.379.049.000,00 dan realisasi sebesar Rp137.529.856.469,00, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp2.849.192.531,00 atau 97,97%.

Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Dana alokasi khusus non fisik tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp508.332.739.184,00 dan realisasi sebesar Rp469.100.906.456,00 atau 92,28%. Pendapatan dana alokasi khusus non fisik tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp474.414.298.947,00 atau 50,28% dibandingkan dengan pendapatan dana alokasi khusus non fisik tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp943.515.205.403,00. Hal itu dikarenakan pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 dalam lampiran V, dana alokasi khusus non fisik -BOS Reguler dialokasikan di masing-masing kabupaten/kota, sehingga pengakuan dan pencatatan berada pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus fisik tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 23
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	**Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)**				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	24.811.863.000,00	24.597.385.500,00	99,14	12.412.346.386,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	2.411.212.000,00	2.408.323.830,00	99,88	1.871.668.820,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	516.480.000,00	417.903.000,00	80,91	265.100.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	6.327.091.552,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.275.231.000,00	2.275.088.041,00	99,99	-
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	2.095.280.786,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-	-	-	1.988.950.000,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.355.438.000,00	4.718.691.650,00	88,81	10.490.542.500,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.161.203.000,00	7.941.574.500,00	97,31	23.303.194.900,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.077.173.000,00	4.180.340.288,00	82,34	13.483.387.000,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	-	-	1.930.720.000,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	824.530.000,00	630.751.750,00	76,52	2.895.054.163,00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	90.946.196.000,00	90.359.797.910,00	99,36	56.477.533.894,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-	-	2.360.370.000,00
Jumlah		**140.379.049.000,00**	**137.529.856.469,00**	**97,97**	**135.901.240.000,00**

Tabel 5. 24
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)**				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	254.336.475.199,00	247.147.428.275,00	97.17	666,583,167,000.00
	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	-	-	-	-
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.595.000.000.00	3.595.000.000.00	100,00	5,970,000,000.00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	242.743.045.000.00	210.804.036.196.00	88.84	262,327,807,000.00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.377.000.000.00	1.273.223.000.00	92.46	609,000,000.00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.584.485.830.00	1.584.485.830.00	100.00	1,820,863,043.00
	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.615.800.715.00	3.615.800.715.00	100.00	3,556,274,059.00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi	-	-	-	910,043,301.00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	-	-	-	962,578,000.00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal	799.012.440.00	799.012.440.00	100.00	500,021,000.00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	281.920.000.00	281.920.000.00	100.00	275,452,000.00
Jumlah		**508,332,739,184.00**	**469,100,906,456.00**	**92.28**	**943,515,205,403.00**

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan sebesar Rp508.332.739.184,00 dan realisasi sebesar Rp469.100.906.456,00 atau 92,28%. Pendapatan Dana alokasi khusus non fisik dari Bantuan Operasional Sekolah yang terdiri dari BOS Reguler dianggaran sebesar Rp254.336.475.199,00, dan realisasi sebesar Rp247.147.428.275,00 atau 97,17%, BOS Kinerja dengan anggaran sebesar Rp3.595.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.595.000.000,00 atau 100%. Realisasi Dana BOS disalurkan langsung ke sekolah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik BOS sebesar Rp250.742.428.275,00 diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer BOS yang disampaikan oleh sekolah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 25
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS

NO	URAIAN	TOTAL
1	SMA Negeri	66,942,016,530.00
	SMA Swasta	23,592,792,702.00
2	SMK Negeri	79,358,073,721.00
	SMK Swasta	59,712,496,940.00
3	SLB Negeri	4,527,770,506.00
	SLB Swasta	16,609,277,876.00
JUMLAH		**250,742,428,275.00**

Dana Keistimewaan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.259.286.977.483,00 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 (Lampiran V) sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2021 sebesar Rp60.713.022.516,95 sehingga menjadi sebesar Rp1.259.286.977.483,00. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.259.286.977.483,00 atau sebesar 100% dari anggaran.

Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp64.312.676.000,00 dan realisasi sebesar Rp64.312.676.000,00 atau 100%. Penerimaan Dana Penyesuaian tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp13.280.831.000,00 atau 17,12% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp77.593.507.000,00.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp871.293.490,00 dan realisasi sebesar 100%. Penerimaan Bantuan Keuangan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp66.248.180,00 atau 8,23 % dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp805.045.310,00. Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp871.293.490,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp99.707.090,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp133.034.510,00 (100%), dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp638.551.890,00 (100%).

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**Rp10.042.044.758,72**	**Rp7.321.573.929,77**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022 merupakan pendapatan dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pendapatan atas pengembalian hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia tahun sebelumnya.

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp7.240.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.042.044.758,72 atau 138,69%. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.720.470.828,95 atau 37,16% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp7.321.573.929,77. Pendapatan hibah tahun anggaran 2022 terdiri dari:

Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri dianggarkan sebesar Rp7.240.500.000,00, realisasi sebesar Rp7.484.595.000,00 atau 103,37%. Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri tahun anggaran 2022 terdiri dari Dealer Otomotif dianggarkan sebesar Rp3.300.000.000,00, realisasi sebesar Rp3.542.595.000,00 atau 107,35%, Main Dealer dianggarkan sebesar Rp25.500.000,00, realisasi sebesar Rp27.000.000,00 atau 105,88%, dan Jasa raharja dianggarkan sebesar Rp3.915.000.000,00 realisasi sebesar 100%.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pendapatan atas pengembalian hibah Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp2.557.449.758,72. Pendapatan sebesar Rp2.557.449.758,72 berasal dari setoran oleh Yayasan kesejahteraan pekerja dan pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang semula Bernama Yayasan Dana Jaminan hari tua bagi pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1971 Jis Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 192/1971 Jo Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 181/1973tentang Perubahan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 192/1971 tentang Pendirian Yayasan Dana Jaaminan Hari Tua Bagi Pekerja Harian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maksud dan tujuan membantu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2007 yayasan mendirikan usaha perkreditan. Yayasan telah menerima hibah dari pemda DIY tahun 2003 sebesar Rp471.000.000,00 dan pada tahun 2008 sebesar Rp1.850.000.000,00, dan terakhir pada tahun 2009 sebesar Rp500.000.000,00. Pada tahun 2020 usaha perkreditan diberhentikan, dan pada tahun 2022 semua kekayaan Yayasan dan pendapatan Yayasan setelah dikurangi biaya operasional Yayasan disetorkan ke kas daerah dan Yayasan dilikuidasi. Total setoran yang telah disetorkan ke kas daerah adalah sebesar Rp2.557.449.758,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 26
Rincian setoran Yayasan KP3 DIY

NO	URAIAN	NOMINAL
1	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - FEB 2022	1,063,207,200.00
2	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - MAR 2022	537,518,585.00
3	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - APR 2022	34,493,687.50
4	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - MEI 2022	527,092,425.00
5	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - JUN 2022	27,016,938.00
6	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - JUL 2022	34,725,000.00
7	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - AGS 2022	15,055,438.00
8	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - SEP 2022	24,513,425.00
9	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - OKT 2022	56,294,187.50
10	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - NOV 2022	37,814,085.00
11	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - DES 2022	199,718,787.72
JUMLAH		**2,557,449,758.72**

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2022 sesuai dengan subrincian obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 27
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri**	**7,240,500,000.00**	**7,484,595,000.00**	**103.37**	**7,141,630,000.00**
a	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	7,240,500,000.00	7,484,595,000.00	103.37	-
b	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	7,141,630,000.00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**-**	**2,557,449,758.72**	**-**	**179,943,929.77**
a	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	-	-	-	148,103,131.77
b	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	-	2,557,449,758.72	-	31,840,798.00
Jumlah		**7,240,500,000.00**	**10,042,044,758.72**	**138.69**	**7,321,573,929.77**

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2 Belanja	**Rp5.449.935.625.661,56**	**Rp5.530.173.461.667,19**

Anggaran belanja perubahan tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp5.879.828.899.155,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp5.449.935.625.661,56 atau 92,69%. Realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.449.935.625.661,56 mengalami penurunan sebesar Rp80.237.836.005,63 atau 1,45% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp5.530.173.461.667,19. Penurunan realisasi belanja disebabkan adanya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya program dan kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, infrastruktur, penangangan Covid-19, serta penanganan dampak inflasi daerah. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.1 Belanja Operasi	**Rp3.445.986.585.280,31**	**Rp3.575.258.030.927,29**

Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.758.580.237.442,00 dan realisasi sebesar Rp3.445.986.585.280,31 atau 91,68%. Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.445.986.585.280,31 mengalami penurunan sebesar Rp129.271.445.646,98 atau 3,62% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp3.575.258.030.927,29. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	**Rp1.604.664.380.912,64**	**Rp1.561.540.552.725,00**

Belanja pegawai pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.673.619.630.998,00 dan realisasi sebesar Rp1.604.664.380.912,64 atau 95,88%. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.604.664.380.912,64 mengalami kenaikan sebesar Rp43.123.828.187,64 atau 2,76% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.561.540.552.725,00. Rincian realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 28
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**				
a	Belanja Gaji Pokok ASN	652,044,873,509.00	645,337,051,115.00	98.97	673,948,915,314.00
b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50,090,433,369.00	48,090,976,702.00	96.01	50,751,991,757.00
c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10,383,405,000.00	9,899,810,000.00	95.34	10,010,849,220.00
d	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36,722,676,411.00	32,516,764,000.00	88.55	33,487,914,080.00
e	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9,583,001,225.00	9,378,344,000.00	97.86	9,998,225,540.00
f	Belanja Tunjangan Beras ASN	28,958,500,997.00	27,885,764,197.00	96.30	29,191,223,981.00
g	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,002,694,389.00	1,941,021,660.00	96.92	2,065,358,479.00
h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8,122,564.00	7,451,322.00	91.74	7,644,555.00
i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	53,289,979,790.00	44,107,872,038.00	82.77	46,959,622,450.00
j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,370,301,264.00	1,320,740,060.00	96.38	4,977,300,856.00
k	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4,073,263,995.00	3,562,680,563.00	87.47	-
l	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2,855,078,124.00	-	-	-
	Jumlah	**851,382,330,637.00**	**824,048,475,657.00**	**96.79**	**861,399,046,232.00**
II	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**				
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	227,330,392,032.00	225,340,421,388.00	99.12	-
b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	703,240,000.00
c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9,011,349,864.00	8,036,301,235.00	89.18	4,170,893,164.00
d	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4,191,213,876.00	3,948,641,735.00	94.21	55,200,000.00
e	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	204,347,500,458.00	202,244,625,862.00	98.97	344,520,002,597.00
	Jumlah	**444,880,456,230.00**	**439,569,990,220.00**	**98.81**	**349,449,335,761.00**
III	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**				
a	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	49,050,661,327.00	49,017,241,380.00	99.93	42,412,620,000.00
b	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,083,614,720.00	803,284,669.00	74.13	992,684,050.00
c	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	259,970,120,204.00	227,004,258,915.00	87.32	245,292,824,030.00
d	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1,377,277,000.00	1,268,000,000.00	92.07	973,500,000.00
c	Belanja Honorarium	3,151,130,000.00	3,054,290,000.00	96.93	2,854,504,250.00
d	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1,915,210,000.00	1,874,710,000.00	97.89	1,713,880,000.00
	Jumlah	**316,548,013,251.00**	**283,021,784,964.00**	**89.41**	**294,240,012,330.00**
IV	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**				
a	Belanja Uang Representasi DPRD	1,749,300,000.00	1,735,800,000.00	99.23	1,735,800,000.00
b	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	186,144,000.00	157,035,000.00	84.36	167,685,000.00
c	Belanja Tunjangan Beras DPRD	165,117,600.00	123,838,200.00	75.00	148,678,260.00
d	Belanja Uang Paket DPRD	149,940,000.00	148,815,000.00	99.25	148,590,000.00
e	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2,536,485,000.00	2,516,910,000.00	99.23	2,516,910,000.00
f	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	235,944,000.00	232,159,500.00	98.40	230,180,250.00
g	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	94,090,500.00	44,761,500.00	47.57	30,885,000.00
h	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9,900,000,000.00	9,825,000,000.00	99.24	9,810,000,000.00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
i	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2,475,000,000.00	2,460,000,000.00	99.39	2,445,000,000.00
j	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	384,651,000.00	88,600,999.00	23.03	74,505,689.00
k	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	14,098,293,240.00	13,813,200,740.00	97.98	13,786,869,540.00
l	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8,586,360,000.00	8,516,210,000.00	99.18	8,502,180,000.00
m	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	45,900,000.00	6,750,000.00	14.71	6,750,000.00
	Jumlah	**40,607,225,340.00**	**39,669,080,939.00**	**97.69**	**39,604,033,739.00**
V	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**				
a	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	76,545,000.00	75,600,000.00	98.77	75,600,000.00
b	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7,654,500.00	7,560,000.00	98.77	7,560,000.00
c	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136,080,000.00	136,080,000.00	100.00	136,080,000.00
d	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4,055,520.00	4,055,520.00	100.00	4,055,520.00
e	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4,545,149.00	4,489,036.00	98.77	4,489,036.00
f	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1,701.00	1,680.00	98.77	1,680.00
g	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7,847,378.00	7,516,800.00	95.79	7,516,800.00
h	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	157,464.00	155,520.00	98.77	622,080.00
i	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	472,392.00	466,560.00	98.77	-
	Jumlah	**237,359,104.00**	**235,925,116.00**	**99.40**	**235,925,116.00**
VI	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**				
a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360,000,000.00	360,000,000.00	100.00	360,000,000.00
b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3,188,504,450.00	2,799,125,000.00	87.79	2,760,000,000.00
	Jumlah	**3,548,504,450.00**	**3,159,125,000.00**	89.03	**3,120,000,000.00**
VII	**Belanja Pegawai BLUD**				
a	Belanja Pegawai BLUD	16,415,741,986.00	14,959,999,016.64	91.13	13,492,199,547.00
	Jumlah	**16,415,741,986.00**	**14,959,999,016.64**	91.13	**13,492,199,547.00**
Jumlah		**1,673,619,630,998.00**	**1,604,664,380,912.64**	**95.88**	**1,561,540,552,725.00**

Rincian Anggaran dan Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 29
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OPD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	932.276.347.862,00	884.405.186.827,00	94,87	858.712.815.101,00
2	Dinas Kesehatan	107.193.400.779,00	104.657.293.153,64	97,63	93.184.380.617,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	40.404.163.888,00	39.497.735.306,00	97,76	35.315.548.685,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	9.156.842.332,00	8.905.472.431,00	97,25	7.572.057.321,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.884.714.554,00	6.691.570.380,00	97,19	5.846.568.458,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.842.267.064,00	13.415.619.186,00	96,92	11.806.763.428,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.988.651.068,00	9.796.930.608,00	98,08	7.876.699.336,00
8	Dinas Sosial	40.972.283.804,00	39.900.047.351,00	97,38	35.638.179.721,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	8.003.029.702,00	7.735.603.330,00	96,66	6.110.195.450,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	42.296.439.811,00	41.075.417.872,00	97,11	36.295.054.538,00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
11	Dinas Perhubungan	14.160.973.606,00	13.829.201.673,00	97,66	12.609.010.248,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.760.224.571,00	8.490.907.003,00	96,93	7.906.838.314,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.198.666.584,00	6.992.975.314,00	97,14	5.998.259.589,00
14	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	8.231.788.165,00	7.897.736.572,00	95,94	7.071.087.287,00
15	Dinas Kebudayaan	23.276.732.446,00	22.785.375.662,00	97,89	18.956.786.076,00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.536.480.547,00	15.279.182.211,00	98,34	13.876.416.549,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.688.291.154,00	17.152.389.375,00	96,97	14.761.164.290,00
18	Dinas Pariwisata	8.640.329.753,00	8.526.175.295,00	98,68	7.352.161.330,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	48.800.961.213,00	47.232.999.808,00	96,79	43.098.461.504,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.648.658.724,00	15.385.671.179,00	98,32	13.809.925.115,00
21	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	28.095.885.866,00	27.266.310.213,00	97,05	24.178.743.500,00
22	Sekretariat Daerah	64.805.126.046,00	62.590.462.398,00	96,58	54.903.839.208,00
23	Sekretariat DPRD	50.777.115.733,00	49.505.521.805,00	97,50	48.813.452.735,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.352.547.582,00	16.872.794.336,00	97,24	14.504.850.109,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	81.163.193.644,00	77.685.513.435,00	95,72	129.044.649.565,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	15.047.416.234,00	14.632.055.984,00	97,24	14.399.164.239,00
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.475.638.397,00	10.181.070.918,00	97,19	9.000.787.004,00
28	Badan Penghubung Daerah	5.345.646.763,00	5.249.026.113,00	98,19	4.636.128.152,00
29	Inspektorat	15.076.403.350,00	14.560.444.958,00	96,58	12.528.294.824,00
30	Paniradya Kaistimewan	6.519.409.756,00	6.467.690.216,00	99,21	5.732.270.432,00
Jumlah		**1.673.619.630.998,00**	**1.604.664.380.912,64**	**95,88**	**1.561.540.552.725,00**

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp1.265.180.025.505,94**	**Rp1.039.417.892.655,29**

Belanja barang dan Jasa pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.469.555.928.220,00 dan realisasi sebesar Rp1.265.180.025.505,94 atau 86,09%. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.265.180.025.505,94 mengalami kenaikan sebesar Rp225.762.132.850,65 atau 21,72% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.039.417.892.655,29. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 30
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	**Belanja Barang**	**334,379,717,128.00**	**267,024,971,237.50**	**79.86**	**204,811,120,501.00**
1	Belanja Barang Pakai Habis	334,016,206,128.00	266,668,579,337.50	79.84	204,391,505,949.00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	363,511,000.00	356,391,900.00	98.04	419,614,552.00
II	**Belanja Jasa**	**664,270,903,937.00**	**604,974,129,625.80**	**91.07**	**518,299,290,354.00**
1	Belanja Jasa Kantor	480,306,771,952.00	449,335,682,623.80	93.55	365,272,517,550.00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	44,538,768,045.00	30,114,772,021.00	67.61	50,566,371,339.00
3	Belanja Sewa Tanah	1,567,735,162.00	1,402,073,640.00	89.43	1,411,563,539.00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32,325,884,100.00	27,662,123,992.00	85.57	16,396,748,026.00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	34,467,127,529.00	31,039,070,436.00	90.06	17,305,297,582.00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3,817,465,000.00	3,499,195,600.00	91.66	2,108,510,900.00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	19,878,035,347.00	17,709,534,166.00	89.09	20,305,640,759.00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	37,700,584,052.00	35,315,179,493.00	93.67	38,053,870,229.00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3,526,231,000.00	3,466,431,200.00	98.30	3,114,000,800.00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6,142,301,750.00	5,430,066,454.00	88.40	3,764,769,630.00
III	**Belanja Pemeliharaan**	**106,338,456,736.00**	**97,387,934,748.37**	**91.58**	**83,645,602,037.29**
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	1,866,791,000.00	1,493,193,268.00	79.99	826,882,340.00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19,043,917,687.00	18,044,202,190.00	94.75	17,138,789,996.00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47,043,615,232.00	42,906,747,490.37	91.27	34,189,542,217.29
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36,294,212,817.00	32,994,176,689.00	90.91	30,002,369,804.00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2,089,920,000.00	1,949,615,111.00	93.29	1,488,017,680.00
IV	**Belanja Perjalanan Dinas**	**128,316,187,616.00**	**96,679,102,149.00**	**75.34**	**58,435,665,973.00**
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111,914,596,966.00	88,589,605,617.00	79.16	55,224,023,177.00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	16,401,590,650.00	8,089,496,532.00	49.32	3,211,642,796.00
V	**Belanja Uang dan/atau jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**63,989,494,551.00**	**63,021,195,051.00**	**98.49**	**43,075,698,140.00**
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63,901,494,551.00	63,003,195,051.00	98.49	43,009,202,640.00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88,000,000.00	18,000,000.00	20.45	66,495,500.00
VI	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**112,946,559,495.00**	**110,754,251,012.00**	**98.06**	**110,577,958,025.00**
	Belanja Barang dan Jasa BOS	112,946,559,495.00	110,748,308,192.00	98.05	110,577,958,025.00
VII	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**59,314,608,757.00**	**25,344,384,502.27**	**42.73**	**20,572,557,625.00**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59,314,608,757.00	25,344,384,502.27	42.73	20,572,557,625.00
Jumlah		**1,469,555,928,220.00**	**1,265,180,025,505.94**	**86.09**	**1,039,417,892,655.29**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 31
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per OPD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	358,262,542,126.00	342,125,364,518.00	95.50	257,706,837,884.25
2	Dinas Kesehatan	182,313,404,378.00	90,638,045,574.27	49.72	121,556,476,124.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	82,013,852,499.00	74,380,867,957.00	90.69	13,334,528,685.00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	15,638,015,042.00	14,969,483,984.00	95.72	64,506,430,987.00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11,783,676,900.00	11,110,298,772.00	94.29	7,828,042,562.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	17,732,474,576.00	17,424,751,213.00	98.26	16,407,779,793.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,908,337,904.00	12,865,128,635.00	92.50	19,660,384,511.00
8	Dinas Sosial	61,833,407,414.00	53,813,470,492.00	87.03	44,935,913,478.04
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	9,076,236,450.00	8,645,889,220.20	95.26	7,519,154,460.00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	46,070,275,305.00	41,214,457,896.10	89.46	26,353,885,002.00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
11	Dinas Perhubungan	22,391,103,598.00	21,042,737,355.16	93.98	19,310,272,968.00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	19,922,682,780.00	19,705,063,388.00	98.91	19,106,531,243.00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	50,951,834,550.00	49,047,800,221.00	96.26	33,870,045,429.00
14	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	4,662,199,093.00	4,455,222,742.00	95.56	3,840,567,198.60
15	Dinas Kebudayaan	164,180,219,782.00	152,622,453,118.95	92.96	109,860,437,486.00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	26,819,649,947.00	25,326,295,768.00	94.43	15,997,779,605.00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	15,758,968,630.00	15,150,770,706.00	96.14	17,553,515,737.20
18	Dinas Pariwisata	30,461,828,017.00	29,142,673,791.00	95.67	20,518,587,721.00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	21,860,422,393.00	20,665,448,025.00	94.53	20,368,046,660.00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29,890,724,492.00	25,054,482,058.00	83.82	21,901,379,146.00
21	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	23,593,935,220.00	22,054,569,442.00	93.48	17,987,437,475.00
22	Sekretariat Daerah	59,046,562,488.00	47,777,547,245.00	80.92	35,557,396,641.00
23	Sekretariat DPRD	86,274,023,603.00	62,775,716,891.00	72.76	45,481,661,631.00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,217,157,890.00	9,225,246,066.00	90.29	6,369,223,137.00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	36,319,607,871.00	32,980,957,519.00	90.81	28,828,044,525.20
26	Badan Kepegawaian Daerah	16,580,994,200.00	14,869,569,717.00	89.68	12,601,159,692.00
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	17,991,833,720.00	13,871,487,110.26	77.10	6,867,436,421.00
28	Badan Penghubung Daerah	6,051,362,100.00	5,863,407,012.00	96.89	3,628,394,693.00
29	Inspektorat	9,653,166,250.00	8,657,554,649.00	89.69	6,895,088,685.00
30	Paniradya Kaistimewan	18,295,429,002.00	17,719,324,420.00	96.85	13,065,453,075.00
Jumlah		**1,469,555,928,220.00**	**1,265,180,025,505.94**	**86.09**	**1,039,417,892,655.29**

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.1.3	**Belanja Subsidi**	**Rp70.269.681.385,00**	**Rp73.315.381.521,00**

Belanja Subsidi tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp78.451.861.160,00 dan realisasi sebesar Rp72.269.681.385,00 atau sebesar 89,57%. Realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.045.700.136,00 atau 4,15% dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2021 sebesar Rp73.315.381.521,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum *(public service obligation)*.

Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi pada Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Servise*.

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.1.4 Belanja Hibah	**Rp474.277.634.446,73**	**Rp878.407.044.213,00**

Belanja hibah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp502.164.697.064,00 dan realisasi sebesar Rp474.277.634.446,73 atau 94,45% yang terdiri dari belanja hibah uang dan belanja hibah barang. Belanja hibah tahun anggaran 2022 sebesar Rp474.277.634.446,73 mengalami penurunan sebesar Rp404.129.409.766,27 atau 46,01% dibanding belanja hibah tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp878.407.044.213,00

Belanja hibah dalam bentuk uang tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp343.430.558.000,00 realisasi sebesar Rp328.772.971.686,00 atau 95,73%. Belanja hibah dalam bentuk uang tahun anggaran 2022 berdasarkan sub rincian obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 32
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang berdasarkan Sub Rincian Obyek

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	51.271.620.000,00	44.908.616.168,00	87,59	62.486.619.048,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	147.916.250.000,00	147.916.250.000,00	100,00	154.038.800.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	33.728.000.000,00	33.553.000.000,00	99,48	18.039.376.493,00
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	-	-	294.226.373.000,00
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	122.852.651.000,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	90.340.370.000,00	83.305.289.642,00	92,21	87.158.255.000,00
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	17.693.780.000,00	16.609.277.876,00	93,87	16.618.565.000,00
8	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.480.538.000,00	2.480.538.000,00	100,00	2.480.538.000,00
Jumlah		**343.430.558.000,00**	**328.772.971.686,00**	**95,73**	**757.901.177.541,00**

Belanja hibah uang terdiri dari belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp51.271.620.000,00 realisasi sebesar Rp44.908.616.168,00 atau 87,59%, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp147.916.250.000,000 realisasi sebesar Rp147.916.250.000,00 atau 100%, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar 33.728.000.000,00 realisasi sebesar Rp33.553.000.000,00 atau 99,48%, Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta dianggarkan sebesar Rp90.340.370.000,00 realisasi sebesar Rp83.305.289.642,00 atau 92,21%, Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta dianggarkan sebesar Rp17.693.780.000,00 realisasi sebesar Rp16.609.277.876,00 atau 93,87%, dan Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp2.480.538.000,00 realisasi sebesar Rp 2.480.538.000,00 atau 100%.

Belanja Hibah dalam bentuk uang pada tahun anggaran 2022 dianggarkan pada 8 (delapan) OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 33
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada OPD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	154.362.065.000,00	139.879.542.518,00	90,62	578.093.587.800,00
2	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	884.008.698,00
3	Dinas Pertanahan dan Tataruang	-	-		300.000.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.630.538.000,00	2.630.538.000,00	100,00	2.555.538.000,00
5	Dinas Sosial	586.600.000,00	561.600.000,00	95,74	508.600.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	845.500.000,00	845.500.000,00	100,00	714.000.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	736.605.000,00	736.541.168,00	99,99	738.266.550,00
8	Dinas Koperasi dan UKM	-	-		6.861.600.000,00
9	Dinas Kebudayaan	147.329.250.000,00	147.329.250.000,00	100,00	146.601.200.000,00
10	Dinas Pariwisata	-	-	-	4.854.376.493,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	330.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	35.940.000.000,00	35.790.000.000,00	99,58	15.460.000.000,00
Jumlah		**343.430.558.000,00**	**328.772.971.686,00**	**95,73**	**757.901.177.541,00**

Penjelasan Belanja Hibah dalam bentuk uang tahun anggaran 2022 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

1) Hibah oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Hibah dalam bentuk uang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagai OPD teknis dengan anggaran sebesar Rp154.362.065.000,00 dan realisasi sebesar Rp139.879.542.518,00 atau 90,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 34
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	BOSNAS DiKSM	90.340.370.000	83.305.289.642	92,21
2	BOSDA SM SWASTA (Sekolah)	22.220.115.000	16.329.285.000	73,49
3	BOSDA SLB (Sekolah)	4.867.800.000	4.645.690.000	95,44
4	BOSNAS DIKSUS SWASTA	17.693.780.000	16.609.277.876	93,87
	Kelembagaan			
5	Hibah untuk KONI DIY	11.000.000.000	11.000.000.000	100,00
6	Hibah untuk NPC DIY	6.000.000.000	6.000.000.000	100,00
7	Hibah untuk KWARDA DIY	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
8	PGRI	50.000.000	50.000.000	100,00
9	DEWAN PENGAWAS	350.000.000	350.000.000	100,00
10	LOTA	65.000.000	65.000.000	100,00
11	KNPI	250.000.000	-	-
12	KORMI	500.000.000	500.000.000	100,00
13	GOP TKI	25.000.000	25.000.000	100,00
	Total Hibah tahun 2022	**154.362.065.000**	**139.879.542.518**	**90,62**

Penjelasan:

Belanja hibah dana BOS merupakan hibah BOSNAS dari Pemerintah yang disalurkan langsung kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Swasta. Mekanisme penyaluran BOSNAS tahun anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke Rekening BOS di sekolah. Realisasi Belanja Hibah BOSNAS dilakukan berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah oleh PPKD Provinsi berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah dari sekolah. Belanja hibah dana BOS yang yang diterima oleh Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta dianggarkan sebesar Rp108.034.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.914.567.518,00 atau 92,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35
Rincian Hibah yang Diterima BOSNAS Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta (BOSNAS)

NO	URAIAN	TOTAL
1	**PROVINSI DIY**	
	SMA SWASTA	23,592,792,702.00
	SMK SWASTA	59,712,496,940.00
	SLB SWASTA	16,609,277,876.00
	JUMLAH	**99,914,567,518.00**

Hibah BOSDA sekolah menengah Swasta merupakan hibah BOS yang bersumber dari APBD DIY yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta dengan anggaran sebesar Rp22.220.115.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.329.285.000,00 atau 73,49%.

Hibah BOSDA SLB swasta dianggarkan sebesar Rp4.867.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.645.690.000,00 atau 95,44% diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh swasta

Hibah untuk Pembinaan Kelembagaan dianggarkan sebesar Rp19.240.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.990.000.000,00 untuk Lembaga Kwarda DIY, KONI DIY, NPC DIY, PGRI, Dewan Pengawas, LOTA, dan Kormi, dan GOP TKI. Sedangkan untuk hibah ke KNPI tidak direalisasikan.

2) Hibah oleh Dinas Kesehatan

Hibah berupa uang yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 36
Rincian Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Keterangan
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500,000,000.00	500,000,000.00	100,00	PMI
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00	KPAIDS
JUMLAH		**1,000,000,000.00**	**1.000,000,000.00**	**100.00**	

3) Hibah Oleh Dinas Sosial

Hibah berupa uang tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Dinas Sosial di anggarkan sebesar Rp586.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp561.600.000,00 atau 95,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 37
Rincian Penerima Hibah Pada Dinas Sosial

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**276,600,000.00**	**276,600,000.00**	**100.00**
I	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**276,600,000.00**	**276,600,000.00**	**100.00**
1	**Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta** - Jl. Sriti No 20 A, Demangan Baru, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman 55281	176,600,000.00	176,600,000.00	100.00
2	**Komda Lansia DIY** - Gedhong Indische, Kepatihan Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
	Jumlah	**276,600,000.00**	**276,600,000.00**	**100.00**
b	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**47,000,000.00**	**47,000,000.00**	**100.00**
I	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**47,000,000.00**	**47,000,000.00**	**100.00**
1	**Rumah Singgah Anak Mandiri** - Jl. Perintis Kemerdekaan No 33 B	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
2	**Yayasan Panti Asuhan Anak Balita Gotong Royong** - Jaranan RT 06 Panggungharjo Sewon Bantul	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
3	**Yayasan Sayap IBU** - Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condongcatur Depok Sleman	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
	Jumlah	**47,000,000.00**	**47,000,000.00**	**100.00**
c	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**263,000,000.00**	**238,000,000.00**	**90.49**
I	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**263,000,000.00**	**238,000,000.00**	**90.49**
1	**LKSA Yayasan Realino Seksi Pengabdian Masyarakat** - Jl. Mataram No. 66, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Yogyakarta 55213	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
2	**Rumah Anak Indonesia** - Ds. Kaliajir Lor RT. 07/ RW. 13 Kel. Kalitirto, Kec. Berbah, Sleman	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
3	**Rumah Singgah Ahmad Dahlan** - Jl. Sidobali UH II/ 396 Yogyakarta	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
4	**Rumah Singgah Diponegoro** - Tapan, Jl. Ambar Rejo, Denokan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
5	**Yayasan Hafara** - Gonjen RT. 005/ Tamantirto Kasihan Bantul	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
6	**Yayasan Indriya-Nati** - Pujokusuman MG I/382 Yogyakarta 55282	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
7	**Yayasan Lembaga Perlindungan Anak** - Jl. Kapas No. 11 Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
8	**Yayasan Rumah Impian** - Jl. Kenanga no 33 RT 04/ RW 01 Juwangen	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
9	**Yayasan Satu Nama** - Jl. Sambisari No. 99, Duwet, Sendangadi, Kec. Mlati , Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10	**LKKS "BK3S" Prov DIY** - Badran Gg Melati JT I/704 Jetis YK	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
11	**Karang Taruna DIY** - Jl. Timoho Regency Kav A-3 Muja Muju YK	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
12	**LK3 "Teratai" Provinsi DIY** - Jl. Lempuyangan No. 1 YK	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
13	**LKS Mugi Waras Sumbersari** - Blendung, Sumbersati Moyudan Sleman	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
14	**LKS Sekaringtyas** - Komplek Balai Kalurahan Banguntapan Jl. Gedong Kuning No. 170 Banguntapan Bantul	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
15	**Orsos As-Salaam** - Wirosutan, Srigading, Sanden, Bantul	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
16	**Orsos "Langgeng"** - Komplek Kalurahan Kebonrejo, Temon, Kulon Progo	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
17	**Orsos Mekar Sari** - Beji, Patuk, Gunungkidul	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
18	LKS Lembaga Orang Tua Asuh - Kompleks Kepatihan, Danurejan DIY	25,000,000.00	0.00	0.00
	Jumlah	**263,000,000.00**	**238,000,000.00**	**90.49**
	Jumlah Hibah Uang	**586,600,000.00**	**561,600,000.00**	**95.74**

4) Hibah Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Hibah berupa uang tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp845.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp845.500.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 38
Rincian Penerima Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
1	P2TPAKK "REKSO DYAH UTAMI" DIY	645.500.000,00	645.500.000,00	100,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				
2	Kelompok Desa Prima Kompak Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul,	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
3	Kelompok Desa Prima Tamara Kalurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
4	Kelompok Desa Prima Prima Jaya Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5	Kelompok Desa Prima Gayatri Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
6	Kelompok Desa Prima Wono Mandiri Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
7	Kelompok Desa Prima Giring Sentani Kalurahan Giring Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunung Kidul	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
8	Kelompok Desa Prima Mekarsari Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
9	Kelompok Desa Prima Kartini Mandiri Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul,	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
JUMLAH		**845.500.000,00**	**845.500.000,00**	**100,00**

5) Hibah Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Hibah berupa uang tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh OPD Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp736.605.000,00 dan realisasi sebesar Rp736.541.168,00 atau 99,99%. Belanja Hibah tersebut diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 39
Rincian Hibah Uang pada Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	**Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangn**			
	Anugrah Penyiaran DIY	115.635.000,00	115.635.000,00	100,00
	Talkshow Televisi	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
	Talkshow Radio	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00
	ILM di Televisi	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00
	ILM di Radio	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	26.334.000,00	26.334.000,00	100,00
	Honor Komisioner KPID	513.000.000,00	513.000.000,00	100,00
	Cetak	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00
	Operasional KPID DIY	49.826.000,00	49.762.168,00	99,87
	JUMLAH	**736.605.000,00**	**736.541.168,00**	**99,99**

6) Hibah oleh Sekretariat Daerah

Hibah Oleh Sekretariat Daerah tahun anggaran 2022 dikelola oleh Biro umum Humas dan Protokol, Biro Bina Mental dan Spiritual, dan Biro Pemberdayaan Masyarakat.

Realisasi Hibah dalam bentuk uang oleh Biro Bina Mental Spiritual tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp33.575.000,00, realisasi sebesar Rp33.425.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 40
Rincian Hibah Uang oleh Biro Bina Mental Spiritual

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
1	Hibah kepada rumah ibadah sejumlah: Masjid, Mushola, Gereja, Kapel, Pura (897/903)	22.575.000.000,00	22.425.000.000,00	99,34
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial (PGI, Walubi, PHDI, Kevikepan)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (PW NU, PW Muhammadiyah)	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (BAZNAS, MUI)	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
5	LPPD (Pesparawi Nasional)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
	Jumlah	**33.575.000.000,00**	**33.425.000.000,00**	**99,55**

Realisasi Hibah dalam bentuk uang oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.225.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.225.000.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 41
Rincian Hibah uang oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat

No.	Nama Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
1	TP PKK DIY	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100
2	LPMK Prenggan Kotagede Yogyakarta	75,000,000.00	75,000,000.00	100
	LPMK Prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta	75,000,000.00	75,000,000.00	100
	LPMK Gunungketur Pakualaman Yogyakarta	75,000,000.00	75,000,000.00	100
3	LPMK Bendung Semin Gunungkidul	75,000,000.00	75,000,000.00	100
	LPMK Nglanggeran Patuk Gunungkidul	75,000,000.00	75,000,000.00	100
	LPMK Kedungpoh Nglipar Gunungkidul	125,000,000.00	125,000,000.00	100
4	LPMK Guwosari Pajangan Bantul	75,000,000.00	75,000,000.00	100
	LPMK Terong Dlingo Bantul	75,000,000.00	75,000,000.00	100
	LPMK Girirejo Imogiri Bantul	75,000,000.00	75,000,000.00	100
5	LPMK Sidorejo Lendah Kulon Progo	75,000,000.00	75,000,000.00	100
	LPMK Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo	75,000,000.00	75,000,000.00	100
	LPMK Sidoharjo Samigaluh Kulon Progo	75,000,000.00	75,000,000.00	
6	LPMK Pandowoharjo Sleman	125,000,000.00	125,000,000.00	100
	LPMK Girikerto Turi Sleman	75,000,000.00	75,000,000.00	100
	LPMK Sendangadi Mlati Sleman	75,000,000.00	75,000,000.00	100
Jumlah		**2,225,000,000.00**	**2,225,000,000.00**	**100**

Hibah dalam bentuk uang oleh Biro Umum Humas dan Protokol tahun anggaran 2022 diberikan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dianggarkan sebesar Rp140.000.000,00, realisasi sebesar Rp140.000.000,00 atau 100%. Rincian belanja hibah kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 42
Rincian Hibah Uang Biro Umum Humas dan Protokol

No.	Nama Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
1	Uji Kompetensi wartawan (UKW)			
	Fullboard meeting	38,400,000.00	38,400,000.00	100
	Tiket pesawat	2,260,000.00	2,260,000.00	100
	hotel penguji	21,900,000.00	21,900,000.00	100
	honor penguji 3 hari	36,000,000.00	36,000,000.00	100
	honor moderator	500,000.00	500,000.00	100
	honor MC	700,000.00	700,000.00	100

No.	Nama Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
	seragam peserta dan panitia	9,000,000.00	9,000,000.00	100
	kertas HVS dan Folio	256,000.00	256,000.00	100
	backdrop	600,000.00	600,000.00	100
	sewa printer	1,800,000.00	1,800,000.00	100
	petugas administrasi	1,800,000.00	1,800,000.00	100
2	Karya Latih Wartawan			
	Fullboard meeting	7,800,000.00	7,800,000.00	100
	staterkit	4,800,000.00	4,800,000.00	100
	narasumber (eselonII)	2,400,000.00	2,400,000.00	100
	hoor MC	700,000.00	700,000.00	100
	FC berkas, bahan uji	427,500.00	427,500.00	100
	backdrop	600,000.00	600,000.00	100
6	AC (split 1 Pk)	4,497,000.00	4,497,000.00	100
	Lemari arsip	5,559,500.00	5,559,500.00	100
Jumlah		**140,000,000.00**	**140,000,000.00**	**100**

7) Hibah Oleh Dinas Kebudayaan

Hibah berupa uang tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp147.329.250,00 dan realisasi sebesar Rp147.329.250.000,00 atau 100.00% diberikan kepada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebesar Rp117.829.250.000,00, dan Kadipaten Pakualaman sebesar Rp29.500.000.000,00

8) Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Hibah uang tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp2.630.538.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.630.538.000,00 atau 100%. Belanja Hibah tersebut terdiri dari Belanja Hibah uang kepada Partai Politik dan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.480.538.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.480.538.000,00 atau 100%. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 realisasi 100%. Rincian hibah uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 43
Rincian Penerima Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hibah Kepada Partai Politik				
1	Partai Kebangkitan Bangsa	253,759,200.00	253,759,200.00	100.00
2	Partai Nasional Demokrat	161,514,000.00	161,514,000.00	100.00
3	Partai Keadilan Sejahtera	283,305,600.00	283,305,600.00	100.00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	785,576,400.00	785,576,400.00	100.00
5	Partai Golongan Karya	227,136,000.00	227,136,000.00	100.00

No	Uraian	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	269,019,600.00	269,019,600.00	100.00
7	Partai Demokrat	94,432,800.00	94,432,800.00	100.00
8	Partai Amanat Nasional	279,979,200.00	279,979,200.00	100.00
9	Partai Persatuan Pembangunan	74,612,400.00	74,612,400.00	100.00
10	Partai Solidaritas Indonesia	51,202,800.00	51,202,800.00	100.00
JUMLAH		**2,480,538,000.00**	**2,480,538,000.00**	**100.00**
Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.				
1	Yayasan Kampung Halaman	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
2	PWRI DIY	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
3	PIWPI DIY	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
4	Yayasan Trisakti Arum Lestari	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
5	Komite Independen Sadar Pemilu	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
6	Persaudaraan Mitra Tani Indonesia DIY	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
7	LVRI DIY	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
JUMLAH		**150,000,000.00**	**150,000,000.00**	**100.00**
TOTAL		**2,630,538,000.00**	**2,630,538,000.00**	**100.00**

Belanja Hibah dalam bentuk barang tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp158.734.139.064,00 realisasi sebesar Rp145.504.662.760,73 atau 91,67%. Belanja hibah dalam bentuk barang tahun anggaran 2022 berdasarkan sub rincian oyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 44
Rincian Belanja Hibah Barang berdasarkan Sub Rincian Obyek

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	181.578.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.513.700.000,00	1.177.062.650,00	77,76	16.026.634.077,00
3	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.861.394.000,00	20.710.280.900,00	99,28	39.347.017.395,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	136.359.045.064,00	123.617.319.210,73	90,66	63.724.414.560,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	-	-	-	1.226.222.640,00
Jumlah		**158.734.139.064,00**	**145.504.662.760,73**	**91,67**	**120.505.866.672,00**

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp1.513.700.000,00 realisasi sebesar Rp1.177.062.650,00 atau 77,76%, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp20.861.394.000,00 realisasi sebesar Rp20.710.280.900,00 atau 99,28%, Belanja Hibah

Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp136.359.045.064,00 realisasi sebesar Rp123.617.319.210,73 atau 90,66%. Rincian hibah barang tahun anggaran 2022 dianggarkan pada 12 (dua belas) OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 45
Rincian Belanja Hibah Barang pada OPD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	2,118,894,000.00	2,076,050,000.00	97.98	16,635,814,129.00
2	Dinas Kesehatan	46,400,000.00	45,530,000.00	98.13	181,578,000.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,131,110,000.00	1,988,007,363.00	93.29	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	95,240,803,050.00	85,760,896,018.00	90.05	52,257,895,025.00
5	Dinas Sosial	549,000,000.00	502,886,610.00	91.60	303,825,665.00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	-	-	193,239,000.00
7	Dinas Perhubungan	-	-	-	3,208,903,470.00
8	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	1,406,187,640.00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	831,300,000.00	675,479,022.73	81.26	2,760,320,500.00
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	100,000,000.00	99,000,000.00	99.00	-
11	Dinas Kebudayaan	19,878,200,000.00	19,483,887,650.00	98.02	15,364,494,745.00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,245,033,000.00	2,024,734,950.00	90.19	3,696,642,600.00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29,395,590,014.00	26,831,764,685.00	91.28	16,852,794,048.00
14	Dinas Perindustrian dan perdagangan	2,338,760,000.00	2,194,255,243.00	93.82	3,728,845,950.00
15	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	3,859,049,000.00	3,822,171,219.00	99.04	3,915,325,900.00
Jumlah		**158,734,139,064.00**	**145,504,662,760.73**	**91.67**	**120,505,866,672.00**

Penjelasan hibah dalam bentuk barang tahun anggaran 2022 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga tahun 2022 yaitu belanja hibah barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp2.118.894.000,00 direalisasikan sebesar Rp2.076.050.000,00 atau 97,98%. Hibah dalam bentuk barang sebesar Rp144.300.000,00 berupa laptop untuk pelatihan kketrampilan pemuda kantong kemiskinan, sedangkan hibah dalam bentuk barang sebesar Rp1.931.750.000,00 berupa laptop untuk npelatihan ketrampilan pemasaran online.

Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Kesehatan tahun anggaran 2022 yaitu belanja hibah barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp46.400.000,00, realisasi sebesar Rp45.530.000,00 atau 98,13%. Rincian Hibah Barang pada Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 46
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kesehatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	46,400,000.00	45,523,000.00	98.11
	Babyscale	-	34,800,000.00	-
	Timbangan Badan Digital	-	8,700,000.00	-
	Staturemeter	-	2,023,000.00	-
Total		**46,400,000.00**	**45,523,000.00**	**98.11**

Hibah dalam bentuk barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.131.110.000,00 realisasi sebesar Rp1.988.007.363,00 atau 93,29%. Rincian

belanja hibah dalam bentuk barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 47
Rincian Belanja Hibah Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
I	**Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)**	**600.000.000,00**	**585.213.090,00**	**97,54**
	Bank Sampah Ngudi Rejeki	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Donoharjo	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Petir	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Pilangrejo	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Trimulyo	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Kampung Baciro	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Karangwuni, Kriyan	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Margokaton	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Mertelu	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Pugeran, Semin	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Sidokarto	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Sidomoyo	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Sidomulyo	-	19.507.103,00	
	Forum Relawan Bencana Desa Sindumartani	-	19.507.103,00	
	FPRB Gilangharjo	-	19.507.103,00	
	Giyoso	-	19.507.103,00	
	Kampung Tangguh Bencana Jatimulyo	-	19.507.103,00	
	Komunitas Pemuda Tanggap Bencana Wukirsari	-	19.507.103,00	
	KTB Sorosutan	-	19.507.103,00	
	Laskar Petualang Kulon Progo Wates	-	19.507.103,00	
	Lembaga Penanggulangan Bencana MDMC Pakem	-	19.507.103,00	
	Maarif	-	19.507.103,00	
	MDMC Cangkringan	-	19.507.103,00	
	PAC Ansor Kalibawang	-	19.507.103,00	
	Panitia Tanggap Bencana Girikerto	-	19.507.103,00	
	Relawan Merdikorejo	-	19.507.103,00	
	Relawan Tanggap Bencana Tirtomartani	-	19.507.103,00	
	Sulistyo FPRB Sabdodadi	-	19.507.103,00	
	Unit Pelaksana Tanggap Darurat Bencana Gunung Api Merapi	-	19.507.103,00	
	URC (Umbulharjo Rescue Centre)	-	19.507.103,00	
II	**Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**180.350.000,00**	**178.000.000,00**	**98,70**
	LPM Padukuhan Balong (CP Pak Danang)	-	89.000.000,00	
	Sugeng Riyanto	-	89.000.000,00	
III	**Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana**	**1.350.760.000,00**	**1.224.794.273,00**	**90,67**
	AMPI SLEMAN; KTB PATEHAN; PCNU SLEMAN; YAYASAN SEMESTA UTAMA	-	61.605.000,00	
	AMPI SLEMAN; KTB PATEHAN; PCNU SLEMAN; YAYASAN SEMESTA UTAMA	-	128.400.000,00	

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
	FPRB TIRTOMULYO; GEJAWAN COMMUNITY; KOMUNITAS FREEKOM; KTB JOGOYUDAN; DESTANA PURWOMARTANI; RSC SUKODONO	-	129.270.000,00	
	FPRB CANDEN; DESTANA DONOKERTO; FPRB SRIHARJO; YAYASA SEMESTA UTAMA	-	166.844.100,00	
	AMPI SLEMAN; FPRB CANDEN; DESTANA DONOKERTO; FPRB SRIHARJO; KTB PATEHAN; PCNU SLEMAN; YAYASAN SEMESTA UTAMA; FPRB TIRTOMULYO; GEJAWAN COMMUNITY; KOMUNITAS FREEKOM; KTB JOGOYUDAN; DESTANA PURWOMARTANI; RSC SUKODONO	-	110.175.270,00	
	GEJAWAN COMMUNITY; FPRB TIRTOMULYO; KOMUNITAS FREEKOM; KTB JOGOYUDAN; RSC SUKODONO; DESTANA PURWOMARTANI	-	133.199.966,00	
	FPRB TIRTOMULYO; GEJAWAN COMMUNITY; KOMUNITAS FREEKOM; KTB JOGOYUDAN; DESTANA PURWOMARTANI; RSC SUKODONO	-	184.500.015,00	
	FPRB SRIHARJO; KTB PATEHAN; PCNU SLEMAN; YAYASAN SEMESTA UTAMA	-	155.399.961,00	
	AMPI SLEMAN; FPRB CANDEN; DESTANA DONOKERTO; FPRB SRIHARJO; YAYASAN SEMESTA UTAMA	-	155.399.961,00	
	JUMLAH	**2.131.110.000,00**	**1.988.007.363,00**	**93,285**

Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.859.049.000,00 realisasi sebesar Rp3.822.171.219,00 atau 99,04%. Rincian Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp3.915.325.900,00 sebagai berikut:

Tabel 5. 48
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%) Sisa Anggaran
1	**Pengadaan Belanja Hibah Peralatan Usaha Pembeklaan Kewirausahaan PMI Purna PMI Penempatan Pengolahan Makanan Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**				
	a. Kelompok KAMI	247,285,000.00	231,788,812.00	15,496,188.00	6.27
	b. Kelompok Perintis				
	c. Kelompok Solid				
	d. Kelompok Purna Becici				
	e. Kelompok Purna Sidosari				
2	**Pengadaan Belanja Hibah peralatan usaha aksus pengolahan makanan Sub kegiatan Perluasan kesempatan kerja**				
	a. Kelompok Sumber Abadi	198,260,000.00	195,776,000.00	2,484,000.00	1.25
	b. Kelompok Sumber Mandiri				
	c. Kelompok Sumber Rahayu				
	d. Kelompok Sumber Rezeki Baru				
	JUMLAH	**445,545,000.00**	**427,564,812.00**	**17,980,188.00**	
1	**Pelatihan Kewirausahaan Bagi Angkatan Kerja Baru di Desa Mandiri Budaya Tahun 2022**				
	Kelompok Karang Taruna Taman Bina Karya, Kalurahan Tamanmartani Kalasan Sleman	699,480,000.00	685,940,320.00	13,539,680.00	1.94
	Kelompok Sumber Mulyo, Kalurahan Sumberharjo Prambanan Sleman				
	Kelompok Giripeni Maju, Kalurahan Giripeni Wates Kulon Progo				
	Kelompok Tuksono Nyawiji, Kalurahan Tuksono Sentolo Kulon Progo				
	Kelompok Krida Usaha Lancar, Kalurahan Kepek, Wonosari Gunung Kidul				

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%) Sisa Anggaran
	Kelompok Mandiri Sambirejo, Kalurahan Sambirejo Ngawen Gunung Kidul				
	Kelompok Setu Legi, Kalurahan Argomulyo Sedayu Bantul				
	Kelompok Muntuk Maju Bersama, Kalurahan Muntuk, Dlingo Bantul				
	Kelompok Mangun Mandiri, Kalurahan Mangunan Dlingo Bantul				
	Kelompok Terong Berdikari, Kalurahan Terong, Dlingo Bantul				
	JUMLAH	**699,480,000.00**	**685,940,320.00**	**13,539,680.00**	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan: Toolkit untuk kegiatan usaha Pengolahan Makanan MTU					
1.	Kelompok Mitra Boga Anggrek	756,000,000.00	755,150,000.00	850,000.00	0.11
2.	Kelompok Rejo Nikmat				
3.	Kelompok KWT Melati				
4.	Kelompok KLK Jaya				
5.	Kelompok Paguyuban Gemar Memasak				
6.	Kelompok MJ Top				
7.	Kelompok Rampak Baciro				
8.	Kelompok WK Snack				
9.	Kelompok Sri Kuning Maju				
10.	Kelompok Mbironi				
11.	Kelompok Al Iman Boga				
12.	Kelompok Sekar Kemuning				
13.	Kelompok Pengolahan Pangan Jetak I				
14.	Kelompok UKM Banguntani				
15.	Kelompok Pengelolaan Desa Pasar Tradisional Majapahit				
16.	Kelompok Paguyuban Pengolahan Pangan Pirak Bulus				
17.	Kelompok Pengolahan Makanan Sidoarum				
18.	Kelompok Sendang Arum				
19.	Kelompok Kayu Manis				
20.	Kelompok Barokah				
21.	Kelompok Makmur Sejahtera Tahunan				
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan: Toolkit untuk kegiatan usaha Menjahit Dasar MTU					
1.	Kelompok WK Tailor	466,400,000.00	463,575,000.00	2,825,000.00	0.61
2.	Kelompok Anggrek bulan				
3.	Kelompok Mawar				
4.	Kelompok Purbayan Asri				
5.	Kelompok Demangan Desain				
6.	Kelompok Melati				
7.	Kelompok KWT Kemiri Endum				
8.	Kelompok Kube Sumade				
9.	Kelompok Jahit Gejawan				
10.	Kelompok Garjo Tailor				
11.	Kelompok Hutama Sejahtera				

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%) Sisa Anggaran
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan: Toolkit untuk kegiatan usaha Desain Grafis MTU					
1.	Kelompok Perwira Prenggan	895,556,000.00	895,319,087.00	236,913.00	0.03
2.	Kelompok Ledtu Digital				
3.	Kelompok Komunitas Konten Kreator Muda DIY				
4.	Kelompok Nopra Design				
5.	Kelompok Otak Kanan				
6.	Kelompok Sanggar Bocah Jetis				
7.	Kelompok Jemari Lentik				
8.	Kelompok Pemuda Manisrejo Maguwo				
9.	Kelompok Muda-Mudi Sorogenen Sidikan				
10.	Kelompok Hand On Menoreh Hill Design Creative				
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan: Toolkit untuk kegiatan usaha Tata Rias Kecantikan MTU					
1.	Kelompok Gandes Luwes	72,968,000.00	72,800,000.00	168,000.00	0.23
2.	Kelompok Kampung Tahunan				
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan: Toolkit untuk kegiatan usaha Otomotif MTU					
1.	Kelompok GTRY	180,400,000.00	179,950,000.00	450,000.00	0.25
2.	Kelompok Muda-Mudi Sorogenen RW 09				
3.	Kelompok PSBB				
4.	Kelompok Bangun Nusa PCNU				
5.	Kelompok Paguyuban Bengkel Pesisir				
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan: Toolkit untuk kegiatan usaha Las Listrik MTU					
1.	Kelompok Karya Muda Las	233,360,000.00	233,072,000.00	288,000.00	0.12
2.	Kelompok Berkah Wesi				
3.	Kelompok Permadiarum				
4.	Kelompok Welding Karto Manunggal				
5.	Kelompok Usaha Pemuda "SIDO MUKTI"				
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan: Peralatan Usaha Kuliner Frozzen DBHCHT					
1.	Kelompok PUK Cahaya Mulia Persada Nusa	108,800,000.00	108,000,000.00	800,000.00	0.74
2.	Kelompok PUK Mitra Adi Jaya				
3.	Kelompok PUK Putra Patria Adikarsa				
4.	Kelompok PUK Yogyakarta Tembakau Indonesia				
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan: MTU dan DBHCHT					
1.	Kej. Pengolahan Makanan	756,000,000.00	755,150,000.00	850,000.00	0.11
2.	Kej. Menjahit Dasar	466,400,000.00	463,575,000.00	2,825,000.00	0.61
3.	Kej. Desain Grafis	895,556,000.00	895,319,087.00	236,913.00	0.03
4.	Kej. Tata Rias Kecantikan	72,968,000.00	72,800,000.00	168,000.00	0.23
5.	Kej. Otomotif	180,400,000.00	179,950,000.00	450,000.00	0.25
6.	Kej. Las Listrik	233,360,000.00	233,072,000.00	288,000.00	0.12
7.	Kuliner Frozzen DBHCHT	108,800,000.00	108,800,000.00	-	-
JUMLAH		**2,713,484,000.00**	**2,708,666,087.00**	**4,817,913.00**	**0.18**
TOTAL		**3,858,509,000.00**	**3,822,171,219.00**	**36,337,781.00**	**0.94**

Hibah dalam bentuk Barang pada Dinas Sosial tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp549.000.000,00 realisasi sebesar Rp502.886.610,00 atau 91,60% merupakan hibah yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 49
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Sosial

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	KUBE Lestari Budaya Batik Ecoprint Ron Rinonce	36,600,000.00	35,930,700.00	98.17
2	Kube Lestari Budaya Batik Tulis Sekar Kawung Bangunkerto, Turi, Sleman	36,600,000.00	31,202,100.00	85.25
3	Kube Lestari Budaya Batik Tulis dan Shibori, Banyuraden, Gamping, Sleman	36,600,000.00	22,343,190.00	61.05
4	Kube Lestari Budaya Batik Tulis Pinilih, Tepus, Gunungkidul	36,600,000.00	35,181,450.00	96.12
5	Kube Lestari Budaya Batik Tulis Triwidadi, Pajangan, Bantul	36,600,000.00	36,297,000.00	99.17
6	Kube Lestari Budaya Jathilan Cipto Wiloho, Tamanmartani, Kalasan, Sleman	36,600,000.00	31,529,550.00	86.15
7	Kube Lestari Budaya Jathilan Tri Mudo Laras, Kaliagung, Sentolo, KP	36,600,000.00	36,563,400.00	99.90
8	Kube Lestari Budaya jathilan Turonggo Mudho Budhoyo, Panggungharjo, Sewon, Bantul	36,600,000.00	35,131,500.00	95.99
9	KUBE Lestari Budaya Kipo Kota Yogyakarta	36,600,000.00	33,913,830.00	92.66
10	Kube Lestari Budaya Makanan Tradisional Suko Mandiri, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman	36,600,000.00	29,079,780.00	79.45
11	Kube Lestari Budaya Pelepah Pisang, Ngepo, Nglindur, Girisubo, Gunungkidul	36,600,000.00	34,832,910.00	95.17
12	Kube Lestari Budaya Perak Purbo Makmur Sejahtera Kotagede	36,600,000.00	35,179,230.00	96.12
13	KUBE Lestari Budaya Sekar Arum Kepek, Semin, Gunung Kidul	36,600,000.00	35,187,000.00	96.14
14	KUBE Lestari Budaya Sekar Mudho Sembodo, Bunder 2, Banaran, Galur, KP	36,600,000.00	34,487,700.00	94.23
15	Kube Lestari Budaya Thiwul Manis Setia, Bleberan, GK	36,600,000.00	36,027,270.00	98.44
Jumlah		**549,000,000.00**	**502,886,610.00**	**91.60**

Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp831.300.000,00 realisasi sebesar Rp675.479.022,73 atau 81,26%. Rincian Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

Tabel 5. 50
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)-- (Kelompok Tani)	15,000,000.00	13,500,000.00	90.00
2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	816,300,000.00	661,479,022.73	81.10
JUMLAH		**831,300,000.00**	**675,479,022.73**	**81,26**

Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.338.760.000,00 realisasi sebesar Rp2.194.255.243,00 atau 93,82%. Rincian Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 5. 51
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	PAGU	REALISASI	%
1	Kelompok IKM Kayu Nawangsih	Dusun Purwa, Karangsari, Semin, Gunung Kidul	40,000,000.00	39,987,861.00	99.97
2	Kelompok Tukang Kayu	Dusun Nangsri, Srihardono, Pundong, Bantul	40,000,000.00	39,987,861.00	99.97
3	Kelompok Binangun Bambu Craft	Jl. Asem Gede RT 24 RW 9, Terbah, Pengasih, Kulonprogo	20,000,000.00	19,772,984.50	98.86
4	Kelompok Usaha Ruang Bambu	Taman KT 1/250 RT 41, RW 01 Patehan, Kraton, Yogyakarta	20,000,000.00	19,772,984.50	98.86
5	IKM MEKAR MELATI	Jl. Admosukarto,Blok H-3 Rw 03, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
6	NGUDI REJEKI	Panggungan Trihanggo Gamping Sleman	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
7	MULYA RASA	Brongkol Sidomulyo Godean Sleman	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
8	MUKTI JAYA GIWANGAN	Pamukti UH 7 675, Umbulharjo, Giwangan, Kota Yogyakarta	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
9	SAHABAT MANDIRI	Jipangan RT.004 Bangunjiwo Kasihan Bantul	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
10	MOBS LEZAT	Tampungan, 001/032, Sendangtirto Berbah Sleman	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
11	POKJA JAMBU	Kampung Gemblakan Atas, DN I/326, Suryatmajan, Danurejan Yogyakarta	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
12	BOGARASA	Kerdon Karangsari, Semin	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
13	MANIS ROSO	Jetisharjo JT 2 / 483 RT 029 RW 007 Cokrodiningratan jetis kota yogyakarta	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
14	CATERING MIRASA	Soka Tegal, RT 01 /RW 13 Merdikorejo, Tempel, Sleman	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
15	UMI BAROQAH	Murangan 7 RT 3 RW 22, Triharjo Sleman	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
16	NGUDI REJEKI	Glagahmalang, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
17	IKM DUSUN GANGGONG	Ganggong, Bangunkerto, Turi, Sleman	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
18	IKM KELUARGA SEJAHTERA	Dusun Krambilduwur, wiladeg,Karangmojo, Gunungkidul	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
19	SEDYA RUKUN	Wiladeg, Rt 03/08 Wiladeg Karangmojo, Gunungkidul	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
20	SRIKANDI MATARAM	Basen Rt 14/Rw 04 Purbayan Kotagede	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
21	SADAR WISATA WATUSIGAR	Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
22	ROSO MANUNGGAL	Kamijoro, Rt 01, Sendangsari, Pajangan , Bantul	20,000,000.00	19,998,390.00	99.99
23	GEMAH RIPAH	Gemahan, Rt 006, Ringinharjo, Bantul	20,000,000.00	19,998,390.00	99.99
24	AL BAROKAH	Siluk II Rt 2 Selopamioro Imogiri Bantul	65,000,000.00	64,879,500.00	99.81
25	NGUDI RAHARJO	Bendung RT/RW 002/001 Bendung Semin Gunungkidul	65,000,000.00	64,879,500.00	99.81
26	SIDO MULYO	Kalidadap I, Selopamioro, Imogiri, Bantul	65,000,000.00	64,879,500.00	99.81
	KELOMPOK IKM BIOFARMAKA				
27	IKM Biofarmaka Taman Herbal Hijau Daun	Papringan, Semin, Semin, Gunung Kidul	12,000,000.00	11,795,526.00	98.30
28	Kelompok Biofarmaka Mekar Rahayu	Girisekar, Panggang, GK	12,000,000.00	11,854,800.00	98.79
29	Kelompok Shibori Ecoprint Jogja (SEEJ)	Iromejan GK 3/759, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	17,000,000.00	16,794,300.00	98.79
30	Kelompok Sidoasih Craft	Gancahan VII, Sidomulyo, Godean, Sleman	17,000,000.00	16,794,300.00	98.79
31	Kelompok Wira Craft	Jl. Nogosari No.1 RT 35/RW 09 Patehan, Kraton, YK	17,000,000.00	16,642,008.00	97.89
32	Kelompok Avicennia Baros	Tirtohargo, Kretek, Bantul	17,000,000.00	16,794,300.00	98.79

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦤꦶꦠꦃꦢꦸꦫꦃꦢꦸꦫꦃꦢꦺꦱꦃꦄꦤꦶꦱꦤꦤꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	PAGU	REALISASI	%
6	Kelompok IKM Alas Kaki KOKMAS	Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	49,000,000.00	48,500,000.00	98.98
7	Kelompok IKM Tenun Mekar Arum	Pakelan, Sumberarum, Moyudan, Sleman	49,000,000.00	49,000,000.00	100.00
8	Kelompok IKM Tenun Wahyu Njono Lestari	Tancep, Ngawen, Gunungkidul	49,000,000.00	49,000,000.00	100.00
9	Kel SINAR JAYA	Tegalsari, Jatirejo, Lendah, Kulonprogo	40,000,000.00	39,998,589.00	100.00
JUMLAH			**2,338,760,000.00**	**2,194,255,243.00**	**93.82**

Belanja hibah dalam bentuk barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp99.000.000,00 atau 99,00%. Rincian Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 52
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Perpustakaan Pustaka Ilmu Kalurahan Bangunkerto, Turi, Sleman.	20,000,000.00	19,800,000.00	99.00
2	Perpustakaan Griya Baca Kalurahan Trimurti, Srandakan, Bantul.	20,000,000.00	19,800,000.00	99.00
3	Perpustakaan Panggungharjo Creative Library Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul.	20,000,000.00	19,800,000.00	99.00
4	Perpustakaan Ben Wasis Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul.	20,000,000.00	19,800,000.00	99.00
5	Perpustakaan Lestari Kalurahan Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo)	20,000,000.00	19,800,000.00	99.00
Jumlah		**100,000,000.00**	**99,000,000.00**	**99.00**

Belanja hibah dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp95.240.803.050,00 realisasi sebesar Rp85.760.896.018,00 atau 90,05%. Rincian Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 53
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral

No	Nomenklatur Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Kegiatan	Peruntukan
1	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.200.000.000	1.085.101.830	90,43	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	LPMK
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.396.103.050	6.742.274.930	91,16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	LPMK
3	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	86.294.700.000	77.622.413.208	89,95	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Masyarakat di 4 Kabupaten
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000	311.106.050	88,89	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kelompok Tani
	Total	**95.240.803.050**	**85.760.896.018**	**90,05**		

Belanja hibah dalam bentuk barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 29.395.590.014,00 realisasi sebesar Rp 26.831.764.685,00 atau 91,28%. Rincian Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 54
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jenis Hibah	Anggaran	Realisasi	%
5.1.05.05.01.0002 - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
SUB KEGIATAN PENGAWASAN SEBARAN PUPUK, PESTISIDA, ALSINTAN, DAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN			
[#] Fasilitasi Sarana Prasarana Komoditas Perkebunan (DBH-CHT)	48.000.000	38.827.500	80,89
5.1.05.05.02.0002 - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			
SUB KEGIATAN PENGAWASAN SEBARAN PUPUK, PESTISIDA, ALSINTAN, DAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN			
[#] Fasilitasi Sarana Prasarana Komoditas Perkebunan (DBH-CHT)	142.500.000	102.096.000	71,65
[#] Pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan	187.500.000	186.482.400	99,46
5.1.05.05.03.0002 - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			
SUB KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KARST GUNUNG SEWU			
[#] Fasilitasi Saprodi Rehabilitasi Tanaman Kakao	264.728.000	195.979.900	74,03
[#] Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kakao	190.000.000	187.940.902	98,92
[#] Sarana Pengolahan Kakao	104.720.000	104.720.000	100,00
Konsultansi karst	10.000.000	9.401.900	94,02
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG MATARAMAN			
[#] Pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan	460.000.000	448.147.077	97,42
[#] Budidaya Tanaman Sistem Sabuk Gunung	147.600.000	146.298.700	99,12
[#] Pengembangan Budidaya Tanaman Garut	150.000.000	148.140.600	98,76
[#] Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	180.000.000	179.509.866	99,73
[#] Gerakan Pengendalian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Rumah Burung Hantu)	33.000.000	32.890.000	99,67
[#] Memetri Lestarining Konco Tani	91.000.000	79.143.000	86,97
[#] Bangunan Lumbung Pangan Tradisional	255.000.000	247.015.000	96,87
[#] Sarana Penunjang Lumbung Pangan Tradisional	185.000.000	185.000.000	100,00
[#] Peningatan Cadangan Pangan Masyarakat	75.000.000	74.989.000	99,99
[#] Pengembangan Vanili	176.900.000	175.159.392	99,02
[#] Fasilitasi Sarana Pasca Panen Sayuran	35.000.000	34.965.000	99,90
konsultansi sprinkle	59.577.200	35.850.000	60,17
konsultansi lumbung mataram	34.460.000	34.098.015	98,95
SUB KEGIATAN PENGAWASAN SEBARAN PUPUK, PESTISIDA, ALSINTAN, DAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN			
[#] Corn Sheller	175.000.000	165.650.000	94,66
[#] Fasilitasi Pupuk Organik	75.000.000	65.250.000	87,00
[#] Hand Traktor Kecil	1.386.000.000	1.279.419.900	92,31
[#] Hand Traktor Rotary	1.287.000.000	1.230.448.600	95,61
[#] Pompa Air	240.000.000	162.014.000	67,51
[#] Power Threser Multiguna	884.000.000	836.350.000	94,61

Jenis Hibah	Anggaran	Realisasi	%
[#] Pengembangan Pengolahan Pupuk Organik	680.000.000	427.707.420	62,90
[#] Fasilitasi Sarana Prasarana Komoditas Perkebunan (DBH-CHT)	48.500.000	34.370.000	70,87
SUB KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN PENINGKATAN PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI			
[#] Pengembangan Ayam Lokal	1.305.000.000	1.202.688.600	92,16
[#] Pengembangan pakan komplit ruminansia	80.000.000	79.764.600	99,71
[#] Pengembangan Ternak Domba	1.110.200.000	1.091.407.730	98,31
[#] Pengembangan Ternak Itik	690.000.000	573.700.600	83,15
[#] Pengembangan Ternak Kambing Bligon	1.870.000.000	1.488.165.000	79,58
[#] Pengembangan Ternak Kambing Perah	2.132.000.000	2.129.766.730	99,90
[#] Pengembangan Ternak Sapi Potong	12.208.000.000	11.354.628.960	93,01
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN			
[#] Budidaya Hortikultura di Lahan Pekarangan	340.000.000	263.459.185	77,49
[#] Budidaya Tanaman Biofarmaka	100.000.000	99.530.339	99,53
[#] Budidaya Tanaman Buah	180.000.000	179.285.657	99,60
[#] Budidaya Tanaman Hias	190.000.000	188.163.850	99,03
[#] Budidaya Tanaman Sayur	270.000.000	237.855.500	88,09
[#] Diversifikasi Tanaman Tembakau ke Bawang Merah (Cukai)	194.834.814	192.638.800	98,87
[#] Luas Lahan yang Produktivitasnya Meningkat - Ubikayu	18.900.000	18.862.452	99,80
[#] Budidaya Tanaman Kelapa Genjah Kopyor	107.370.000	106.801.560	99,47
[#] Rehabilitasi Tanaman Teh	18.800.000	18.748.800	99,73
SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DI TINGKAT USAHA TANI			
[#] Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier	975.000.000	758.432.150	77,79
TOTAL	**29.395.590.014**	**26.831.764.685**	**91,28**

Belanja hibah dalam bentuk barang pada Dinas Kebudayaan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 19.878.200.000,00 realisasi sebesar Rp 19.483.887.650,00 atau 98,02%. Rincian Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Kebudayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 55
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kebudyaan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**1.465.700.000,00**	**1.138.235.150,00**	**77,66**
a.	Penataan Fasat Malioboro	217.300.000,00	215.009.000,00	98,95
b.	Penataan Fasat Ketandan	1.248.400.000,00	923.226.150,00	73,95
2.	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**18.412.500.000,00**	**18.345.652.500,00**	**99,64**
	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya			
a.	**Gamelan Perunggu Laras Pelog Slendro**	*7.700.000.000,00*	*7.647.087.000,00*	**99,31**
	- Kalurahan Ambar Ketawang	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Argodadi	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Gedongkiwo	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Karangrejek	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	- Kalurahan Kepek Saptosasri	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Muntuk	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Parangtritis	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Petir	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Sendangsari Pajangan	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Sidoluhur	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Srimulyo	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Tamanmartani	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Widodomartani	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
	- Kalurahan Wonosari	550.000.000,00	546.220.500,00	99,31
b.	**Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya**	*10.712.500.000,00*	*10.698.565.500,00*	**99,87**
	Gamelan Perunggu	1.650.000.000,00	1.645.519.500,00	99,73
	Gamelan Besi	8.704.000.000,00	8.696.096.000,00	99,91
	Pakaian Kesenian	194.000.000,00	194.000.000,00	100,00
	Alat Musik Kesenian	164.500.000,00	162.950.000,00	99,06
	JUMLAH	**19.878.200.000,00**	**19.483.887.650,00**	**98,02**

Belanja hibah dalam bentuk barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 2.245.033.000,00 realisasi sebesar Rp 2.024.734.950,00 atau 90,19%.

Tabel 5. 56
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KELOMPOK	ANGGARAN	REALISASI	%
	HIBAH SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA			
A	PEMBESARAN BUDIDAYA IKAN LELE TINGKAT REGULER	935.307.050	877,864,000	93,86
B	PEMBESARAN BUDIDAYA IKAN NILA TINGKAT REGULER	376.530.000	376,530,000	100,00
C	PEMBESARAN BUDIDAYA IKAN GURAMI TINGKAT REGULER	85.200.000	85,200,000	100,00
D	IKAN HIAS	111.020.000	111,020,000	100,00
E	PEMBENIHAN IKAN LELE	16.014.000	16,014,000	100,00
F	PEMBENIHAN IKAN NILA	21.710.000	21,710,000	100,00
G	PEMBENIHAN IKAN GURAMI	9.218.000	9,218,000	100,00
	Hibah Alat Pengolahan Produk Perikanan :			
A	Kelompok KWT Srikandi Sidikan, Umbulharjo, Pandeyan, Kota Yogyakarta	15.048.000	15,048,000	100,00
	Hibah ikan			
A	Kelompok Budidaya Ikan	611,000,000	448,145,000	73.35
	Hibah sarana Penangkap Ikan			
A	CV.LESTARI CAHAYA INDONESIA	63,985,950	63,985,950	100.00
	JUMLAH	**2,245,033,000**	**2.024.734.950**	**90.19**

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	**Rp31.594.863.030,00**	**Rp22.577.159.813,00**

Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp34.788.120.000,00 realisasi sebesar Rp31.594.863.030,00 atau 90,82%. Belanja bantuan sosial tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang.

Belanja bantuan Sosial dalam bentuk uang terdapat pada Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp7.140.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.625.400.000,00 atau 92,78%. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang pada Dinas Sosial terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan sebesar Rp3.554.400.000,00 realisasi sebesar Rp3.039.000.000,00 atau 85,50% dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dianggarkan sebesar Rp3.586.400.000,00 realisasi sebesar Rp3.586.400.000,00 atau 100%.

Tabel 5. 57
Belanja Bantuan Sosial Uang pada Dinas Sosial

No	Uraian	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.554.400.000,00	3.039.000.000,00	85,50
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.586.400.000,00	3.586.400.000,00	100,00
Jumlah Bansos Uang		**7.140.800.000,00**	**6.625.400.000,00**	**92,78**

Tabel 5. 58
Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang di rencanakan pada Individu

No	Nama Kab/ Kota	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Penerima	Satuan	Jumlah Bantuan Per Orang (Rp)	Total (Rp)
1	Sleman	PT. MITRA ADI JAYA	Berdomisili di Gedong Kuning km 6 , Kalitirto , Berbah, Sleman	378	Orang	600.000,00	226.800.000,00
2	Kulon Progo	PT. PUTRA PATRIA ADIKARSA	Jl. Pahlawan KM 01 No.74 Giripeni, Wates, Kulon Progo	426	Orang	600.000,00	255.600.000,00
3	Bantul	PT. YOGYAKARTA TEMBAKAU INDONESIA	Jl. Imogiri Barat No.KM.4, Wojo, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188	790	Orang	600.000,00	474.000.000,00
JUMLAH				**1.594**			**956.400.000,00**
Penerima Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi							
1	Sleman	Buruh, Peternak dan Petani/Perkebunan,UMKM,		715	Orang	900.000,00	643.500.000,00
2	Kulon Progo	Buruh, Peternak dan Petani/Perkebunan,UMKM, dan Nelayan		460	Orang	900.000,00	414.000.000,00
3	Bantul	Buruh, Peternak dan Petani/Perkebunan,UMKM, dan Nelayan		258	Orang	900.000,00	232.200.000,00
4	Gunungkidul	Buruh, Peternak dan Petani/Perkebunan,UMKM, dan Nelayan		776	Orang	900.000,00	698.400.000,00
5	Kota Yogyakarta			105	Orang	900.000,00	94.500.000,00
JUMLAH				**2314**			**2.082.600.000,00**
TOTAL							**3.039.000.000,00**

Tabel 5. 59
Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)			
I	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**			
a	Penyediaan Permakanan	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00
b	Penyediaan Sandang	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00
c	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00
d	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00
e	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00
	Jumlah	**140,000,000.00**	**140,000,000.00**	**100.00**
II	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**			
a	Penyediaan Makanan	360,000,000.00	360,000,000.00	100.00
b	Penyediaan Sandang	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00
c	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00
d	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00
e	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00
	Jumlah	**1,200,000,000.00**	**1,200,000,000.00**	**100.00**
III	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**			
a	Penyediaan Permakanan			
	Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00
	Bantuan Sosial Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care	491,400,000.00	491,400,000.00	100.00
b	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
	Bantuan Sosial Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care	420,000,000.00	420,000,000.00	100.00
c	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
	Bantuan Family Support bagi Lanjut Usia	135,000,000.00	135,000,000.00	100.00
	Jumlah	**2,246,400,000.00**	**2,246,400,000.00**	**100.00**
	Total	**3,586,400,000.00**	**3,586,400,000.00**	**100.00**

Bantuan Sosial dalam bentuk barang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan sebesar Rp27.647.320.000,00 realisasi sebesar Rp24.969.463.030,00 atau 90,31%. Rincian belanja bantuan sosial dalam bentuk barang tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 60
Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kotamadya Yogyakarta	24,352,420,000	23,188,504,630.00	95.22
2	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo	3,294,900,000	1,780,958,400.00	54.05
	JUMLAH	**27,647,320,000.00**	**24,969,463,030.00**	**90.31**

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.2	**Belanja Modal**	**Rp704.882.049.066,74**	**Rp654.839.728.747,39**

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp704.882.049.066,74 atau 94,90% dari anggaran sebesar Rp742.798.152.703,00. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp50.042.320.319,35 atau 7,64% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp654.839.728.747,39. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.2.1	**Belanja Modal Tanah**	**Rp152.171.680.772,00**	**Rp185.263.842.550,00**

Belanja modal tanah pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp160.094.957.821,00 dan realisasi sebesar Rp152.171.680.772,00 atau 95,05%. Belanja modal tanah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sub rincian obyek belanja modal adalah berupa belanja modal tanah persil dan belanja modal lapangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Belanja Modal Tanah Persil**	**87.487.508.286,00**	**87.125.296.860,00**	**99,59**	**6.010.438.200,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	86.223.108.286,00	85.910.509.940,00	99,64	-
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	-	-	-	6.010.438.200,00
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.264.400.000,00	1.214.786.920,00	96,08	-
2	**Belanja Modal Lapangan**	**72.607.449.535,00**	**65.054.973.912,00**	**89,60**	**179.253.404.350,00**
	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	-	-	-	6.138.000.000,00
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	48.524.058.600,00	44.585.772.050,00	91,88	144.392.593.210,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	3.190.000.000,00	2.139.603.212,00	67,07	27.734.731.140,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	20.399.758.435,00	17.932.408.650,00	87,91	180.480.000,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah	493.632.500,00	388.600.000,00	78,72	807.600.000,00
Jumlah		**160.094.957.821,00**	**152.171.680.772,00**	**95,05**	**185.263.842.550,00**

Belanja modal tanah tahun anggaran 2022 dianggarkan pada 3 (tiga) OPD seperti di dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 62
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Per OPD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	100,602,625,321.00	92,842,008,852.00	92.29	146,675,007,770.00
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	57,687,500,000.00	57,683,885,000.00	99.99	-
3	Dinas Kebudayaan	1,804,832,500.00	1,645,786,920.00	91.19	7,050,400,000.00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	25,527,996,580.00
5	Sekretariat Daerah	-	-	-	6,010,438,200.00
Jumlah		**160,094,957,821.00**	**152,171,680,772.00**	**95.06**	**185,263,842,550.00**

Penjelasan:

1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp100.602.625.321,00 dan realisasi sebesar Rp92.842.008.852,00 atau sebesar 92,29%, merupakan pengadaan tanah di ruas jalan Girijati, ruas jalan Saptosari, segmen congot ngremang, Beskalan, tanah untuk bak reservoir SPAM regional Kamijoro, dan TPA.

2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp57.687.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp57.683.885.000,00 atau sebesar 99,99%, yaitu pembelian tanah Ngupasan HGB Nomor :428/Ngupasan, surat ukur Nomor 24/Nps/1998 tanggal 4 September luas 1835 m2, dan HGB Nomor 429/Ngupasan, surat ukur Nomor 22/Nps/1998, tanggal 1 September 1998 luas 1269 m2.

3) Dinas Kebudayaan menganggarkan Belanja Modal pengadaan tanah sebesar Rp1.804.832.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.645.786.920,00 atau sebesar 91,19% merupakan Pengadaan Tanah di Pleret yaitu SHM 06870 seluas 212 m2, SHM 05086 seluas 560 m2, SHM 07917 seluas 63 m2.

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.2.2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**Rp174.540.050.841,74**	**Rp153.066.731.565,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp182.732.772.410,00 dan realisasi sebesar Rp174.540.050.841,74 atau 95,52%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp21.473.319.276,74 atau 14,03% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp153.066.731.565,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 63
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I	Belanja Modal Alat Besar Darat	8,175,663,000.00	7,937,395,400.00	97.09	5,741,745,652.00
2	Belanja Modal Alat Bantu	4,998,168,720.00	4,722,070,755.00	94.48	2,014,810,190.00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7,272,645,000.00	5,374,000,000.00	73.89	9,823,532,931.00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1,102,002,000.00	1,077,460,580.00	97.77	123,892,160.00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	111,000,000.00	111,000,000.00	100.00	63,305,000.00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	997,154,140.00	973,851,202.00	97.66	980,787,500.00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	786,897,000.00	773,997,325.00	98.36	175,584,150.00
9	Belanja Modal Alat Ukur	1,251,677,000.00	1,177,731,547.00	94.09	714,872,544.00
10	Belanja Modal Alat Pengolahan	813,899,950.00	754,982,935.00	92.76	216,683,750.00
11	Belanja Modal Alat Kantor	8,958,675,742.00	8,471,716,727.74	94.56	3,158,792,506.00
13	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20,215,132,913.00	19,360,320,010.00	95.77	22,313,547,106.00
14	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	114,548,000.00	113,484,700.00	99.07	864,183,600.00
16	Belanja Modal Alat Studio	7,940,621,519.00	7,348,999,959.00	92.55	3,934,784,485.00
17	Belanja Modal Alat Komunikasi	694,227,736.00	614,112,533.00	88.46	475,776,850.00
18	Belanja Modal Peralatan Pemancar	170,020,000.00	169,796,700.00	99.87	625,321,500.00

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
19	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	11,226,000.00	11,224,000.00	99.98	-
20	Belanja Modal Alat Kedokteran	2,045,316,640.00	1,814,907,068.00	88.73	3,274,169,743.00
21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	61,100,000.00	58,192,000.00	95.24	1,261,946,616.00
22	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	10,808,513,737.00	10,286,482,594.00	95.17	8,338,464,955.00
23	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	344,530,000.00	342,310,600.00	99.36	419,397,900.00
24	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	35,844,338,500.00	35,020,955,126.00	97.70	20,969,526,377.00
25	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	58,417,000.00	56,241,000.00	96.28	381,861,000.00
26	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	542,725,000.00	405,390,000.00	-	-
27	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	29,991,000.00	25,741,000.00	85.83	46,200,000.00
28	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	383,824,600.00	373,091,096.00	97.20	458,859,900.00
29	Belanja Modal Komputer Unit	22,182,395,285.00	21,726,825,849.00	97.95	20,763,956,521.00
30	Belanja Modal Peralatan Komputer	7,536,367,540.00	6,975,857,743.00	92.56	5,679,554,763.00
31	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	375,303,000.00	266,490,900.00	71.01	210,248,000.00
32	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	2,896,000.00	2,700,000.00	93.23	-
33	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	-	-	-	11,718,000.00
34	Belanja Modal Sumur	85,000,000.00	84,892,000.00	99.87	856,634,100.00
35	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	124,225,000.00
36	Belanja Modal Alat Deteksi	197,000,000.00	195,110,250.00	99.04	1,967,741,387.00
37	Belanja Modal Alat Pelindung	62,250,000.00	61,587,500.00	98.94	34,167,500.00
38	Belanja Modal Alat SAR	1,340,560,000.00	1,131,525,080.00	84.41	736,730,000.00
39	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	26,369,000.00	26,069,000.00	98.86	80,622,825.00
40	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	4,470,600.00
41	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3,239,534,154.00	3,151,263,207.00	97.28	177,556,873.00
42	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-	-	-	49,548,232.00
43	Belanja Modal Peralatan Olahraga	67,638,000.00	65,812,000.00	97.30	54,566,250.00
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	32,659,649,734.00	32,657,738,798.00	99,99	32,906,384,586.00
45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1,225,494,500.00	819,912,170.00	66.90	3,030,560,513.00
Jumlah		**182,732,772,410.00**	**174,540,050,841.74**	**95.52**	**153,066,731,565.00**

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2022 di anggarkan pada 30 (tiga puluh) OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	104,040,393,062.00	100,735,737,636.00	96.82	80,324,285,140.00
2	Dinas Kesehatan	9,010,269,640.00	8,170,685,911.00	90.68	12,864,728,314.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	376,746,000.00	367,271,180.00	97.49	509,176,880.00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1,227,493,500.00	1,178,635,000.00	96.02	243,285,800.00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	447,572,000.00	387,751,730.00	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1,922,678,000.00	1,708,412,440.00	88.86	3,060,441,000.00

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ᨿᨕᨿᨕᨿᨕ

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2022 dianggarkan pada 20 (dua puluh) OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 66
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	55,693,673,105.00	52,685,611,924.00	94.60	26,140,651,892.00
2	Dinas Kesehatan	27,574,310,800.00	25,671,831,958.00	93.10	5,799,492,249.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	1,631,687,300.00	1,228,212,761.00	75.27	462,087,740.00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	427,803,593.00	425,596,800.00	99.48	199,027,180.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja				875,475,775.00
6	Dinas Sosial	13,716,678,008.00	10,289,325,892.00	75.01	3,220,290,859.00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5,063,945,550.00	4,655,361,281.00	91.93	181,058,730.00
8	Dinas Perhubungan				91,277,498.00
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	637,276,193.00	630,165,148.00	98.88	290,560,547.00
10	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal				109,349,700.00
11	Dinas Kebudayaan	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90	2,640,252,080.00
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah				134,570,000.00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	112,554,701,900.00	112,540,061,785.00	99.99	2,143,084,812.54
14	Dinas Pariwisata	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	243,500,000.00	241,768,000.00	99.29	269,994,744.00
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	249,075,500.00	247,583,983.00	99.40	1,874,425,000.00
17	Sekretariat Daerah	563,818,438.00	560,335,411.00	99.38	4,443,821,938.00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	286,960,000.00	285,394,680.00	99.45	140,984,000.00
19	Inspektorat	1,133,755,000.00	674,446,000.00	59.49	17,755,880,600.00
20	Paniradya Kaistimewan	279,000,000.00	265,416,000.00	95.13	83,000,000.00
Jumlah		**220,101,185,387.00**	**210,446,091,623.00**	**95.61**	**66,855,285,344.54**

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.2.4	**Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**Rp153.970.963.843,00**	**Rp214.309.752.467,85**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp165.392.750.723,00 dan realisasi sebesar Rp153.970.963.843,00 atau 93,09%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 153.970.963.843,00 mengalami penurunan sebesar Rp60.338.788.624,85 atau 28,15% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp214.309.752.467,85. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2022 berdasaarkan rincian obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 67
Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	Belanja Modal Jalan	99,364,729,741.00	96,018,363,688.00	96.63	169,227,267,568.85
2	Belanja Modal Jembatan	14,050,000,000.00	14,017,952,000.00	99.77	17,903,433,260.00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	15,618,871,833.00	12,337,080,855.00	78.99	21,486,694,000.00
4	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	-	29,762,111.00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	-	-	-	200,066,000.00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3,565,637,000.00	3,229,474,387.00	90.57	1,603,365,300.00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	253,562,149.00	252,522,149.00	99.59	24,418,572.00
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1,207,700,000.00	954,512,304.00	79.04	-
9	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	26,000,000,000.00	22,268,765,694.00	85.65	-
10	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	553,200,000.00	461,585,152.00	83.44	-
11	Belanja Modal Instalasi Pengaman	54,000,000.00	52,815,000.00	97.81	43,857,000.00
12	Belanja Modal Instalasi Lain	65,000,000.00	64,527,940.00	99.27	-
13	Belanja Modal Jaringan Air Minum	50,000,000.00	49,500,000.00	99.00	104,513,542.00
14	Belanja Modal Jaringan Listrik	3,592,000,000.00	3,245,817,074.00	90.36	2,978,878,614.00
15	Belanja Modal Jaringan Telepon	1,018,050,000.00	1,018,047,600.00	100.00	707,496,500.00
Jumlah		**165,392,750,723.00**	**153,970,963,843.00**	**93.09**	**214,309,752,467.85**

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun anggaran 2022 dianggarkan pada 10 (sepuluh) OPD dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 5. 68
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	60,000,000.00	57,960,000.00	96.60	-
2	Dinas Kesehatan	27,000,000.00	26,815,000.00	99.31	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	158,986,118,833.00	148,007,250,829.00	93.09	210,182,665,450.85
4	Dinas Sosial	173,337,000.00	171,612,000.00	99.00	-
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	683,515,890.00	683,515,890.00	100.00	612,760,611.00
6	Dinas Perhubungan	3,995,200,000.00	3,557,956,594.00	89.06	2,260,372,000.00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,018,050,000.00	1,018,047,600.00	100.00	698,500,000.00
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	198,896,364.00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	199,191,000.00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	444,529,000.00	442,805,930.00	99.61	157,367,042.00
Jumlah		**165,392,750,723.00**	**153,970,963,843.00**	**93.09**	**214,309,752,467.85**

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.2.5	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**Rp13.753.261.987,00**	**Rp35.344.116.820,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp14.476.486.362,00 dan realisasi sebesar Rp13.753.261.987,00 atau 95,00%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp21.590.854.833,00 atau 61,09% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2021 yaitu

sebesar Rp35.344.116.820,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 69
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1,217,937,591.00	1,195,096,402.00	98.12	112,969,500.00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	131,644,000.00	120,967,525.00	91.89	-
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	-	-	-	39,930,000.00
4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	936,224,000.00	921,482,412.00	98.43	896,192,884.00
5	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	814,100,000.00	804,505,500.00	98.82	18,611,589,403.00
6	Belanja Modal Tanda Penghargaan	345,000.00	-	-	-
7	Belanja Modal Ternak	-	-	-	59,000,000.00
8	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	195,000,000.00	102,306,480.00	52.46	-
9	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	775,000,000.00	744,604,750.00	96.08	1,854,790,500.00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10,403,610,771.00	9,864,158,668.00	94.81	13,769,644,533.00
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2,625,000.00	140,250.00	5.34	-
Jumlah		**14,476,486,362.00**	**13,753,261,987.00**	**95.00**	**35,344,116,820.00**

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2022 dianggarkan pada 19 (Sembilan belas) OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 70
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	10,826,556,271.00	10,279,322,444.00	94.95	14,342,025,305.00
2	Dinas Kesehatan	197,484,591.00	182,627,250.00	92.48	943,510,000.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	20,000,000.00
4	Dinas Sosial	113,034,000.00	109,830,636.00	97.17	20,660,800.00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	-	-	6,050,000.00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	145,090,000.00
7	Dinas Perhubungan	345,000.00	-	-	-
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	13,270,000.00
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	950,667,500.00	942,343,402.00	99.12	18,489,209,903.00
10	Dinas Kebudayaan	1,177,310,000.00	1,073,090,980.00	91.15	397,910,812.00
11	Dinas Pariwisata	45,500,000.00	35,398,000.00	77.80	-
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	90,000,000.00	89,604,750.00	99.56	59,000,000.00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	740,535,000.00	707,200,000.00	95.50	-
14	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-	-	-	225,000.00
15	Sekretariat Daerah	72,396,000.00	71,418,525.00	98.65	3,650,000.00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	-	-	-	885,727,500.00
17	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	10,500,000.00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18,222,000.00	18,200,000.00	99.88	-
19	Paniradya Kaistimewan	244,436,000.00	244,226,000.00	99.91	7,287,500.00
Jumlah		**14,476,486,362.00**	**13,753,261,987.00**	**95.00**	**35,344,116,820.00**

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**Rp5.735.041.553,00**	**Rp53,316.587.701,00**

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp62.545.932.869,00 dengan realisasi sebesar Rp5.735.041.553,00 atau 9,17%. Realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penanganan pandemi *Covid-19* melalui Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 3/KEP/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir dirubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 32/KEP/2021. Selanjutnya mekanisme kerja Satuan Tugas mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Mekanisme Kerja Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar pengeluaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 dalam rangka penanganan *Covid-19* adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur DIY sebagai berikut:

- Keputusan Gubernur Nomor 29/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Satu Status Tanggap Daerurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlaku mulai tanggal 1 Februari 2022 - 28 Februari 2022.
- Keputusan Gubernur Nomor 55/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Dua Status Tanggap Daerurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlaku mulai tanggal 1 Maret 2022 – 31 Maret 2022.
- Keputusan Gubernur Nomor 76/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Tiga Status Tanggap Daerurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlaku mulai tanggal 1 April 2022 – 30 April 2022.

Dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* Tahun 2022 di terbitkan SP2D LS fase 1 (satu) sampai dengan fase 4 (empat) sebesar Rp5.871.069.000,00, dan realisasi sebesar Rp5.495.361.462,00, sehingga terdapat sisa SP2D sebesar Rp375.707.538,00. Sisa SP2D sebesar Rp375.707.538,00 telah disetorkan ke rekening kas umum daerah. Rincian SP2D LS dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 71
Rincian SP2D LS Belanja Tidak Terduga Penanganan *Covid-19*

NO	NOMOR SP2D	JUMLAH SP2D	REALISASI SPJ	SISA SP2D
1	04.00/04.0/000015/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P. 01/2/2022 Tanggal 21 Februari 2022	476,584,000.00	363,014,300.00	113,569,700.00
2	04.00/04.0/000040/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P. 01/2/2022 Tanggal 21 Februari 2022	387,135,000.00	376,203,571.00	10,931,429.00
3	04.00/04.0/000041/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P. 01/3/2022 Tanggal 1 Maret 2022	17,850,000.00	6,236,834.00	11,613,166.00
4	04.00/04.0/000539/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P. 02/4/2022 Tanggal 25 April 2022	4,989,500,000.00	4,749,906,757.00	239,593,243.00
	JUMLAH	**5,871,069,000.00**	**5,495,361,462.00**	**375,707,538.00**

Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 198/KEP/2022 tentang penetapan status siaga darurat penyakit mulut dan kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199/KEP/2022 tentang pembentukan satuan tugas penanganan penyakit mulut dan kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) tahun 2022 di terbitkan SP2D LS sebesar Rp236.589.000,00, dan realisasi sebesar Rp231.305.560,00, sehingga terdapat sisa SP2D sebesar Rp5.283.440,00. Sisa SP2D sebesar Rp5.283.440,00 telah disetorkan di rekening kas umum daerah.

Pengembalian Kelebihan Pendapatan setoran Laba BUKP tahun 2021 Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul karena terdapat kesalahan transfer ke rekening Kas umum Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan setoran laba BUKP tahun 2021 diterbitkan SP2D LS sebesar Rp8.374.531,00.

Rincian SP2D dan SPJ Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 72
Rincian SP2D Belanja Tidak Terduga

NO	NOMOR SP2D	JUMLAH SP2D	REALISASI SPJ	SISA SP2D
1	04.00/04.0/000015/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.01/2/2022 Tanggal 21 Februari 2022	476,584,000.00	363,014,300.00	113,569,700.00
2	04.00/04.0/000040/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.01/2/2022 Tanggal 21 Februari 2022	387,135,000.00	376,203,571.00	10,931,429.00
3	04.00/04.0/000041/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.01/3/2022 Tanggal 1 Maret 2022	17,850,000.00	6,236,834.00	11,613,166.00
4	04.00/04.0/000539/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.02/4/2022 Tanggal 25 April 2022	4,989,500,000.00	4,749,906,757.00	239,593,243.00
5	04.00/04.0/000736/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.02/7/2022 Tanggal 8 Juli 2022	236,589,000.00	231,305,560.00	5,283,440.00
6	04.00/08.0/000870/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.02/8/2022 Tanggal 30 Agustus2022	8,374,531.00	8,374,531.00	-
	JUMLAH	**6,116,032,531.00**	**5,735,041,553.00**	**380,990,978.00**

A. Belanja Penanganan Covid-19

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022, mengalokasikan anggaran untuk mendukung penanganan *pandemic Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sedikit meliputi: **a.** dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik; **b.** perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; **c.** dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*; **d.** dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* untuk pos komando tingkat kelurahan; **e.** insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan **f.** belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Belanja penanganan *Covid-19* selain menggunakan belanja tidak terduga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menganggarkan melalui

program dan kegiatan pada OPD dalam rangka penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Rincian belanja penanganan *Covid-19* tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 73
Belanja Pencegahan Dan/Atau Penanganan *Corona Virus Desease 19* (*Covid-19*)

No	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	2	3	4	5=4/3
I	**PENANGANAN KESEHATAN**			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	49.840.563.000,00	11.130.842.500,00	22,33
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	582.934.000,00	528.844.500,00	90,72
3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00
4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	41.600.000,00	41.600.000,00	100,00
5	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	242.748.000,00	174.360.415,00	71,83
6	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19	2.911.802.660,00	2.103.349.817,00	72,24
	a. Dokter Spesialis	606.803.016,00	445.714.303,00	73,45
	b. Dokter Umum & Dokter Gigi	314.063.946,00	314.063.946,00	100,00
	c. Bidan & Perawat	1.502.036.843,00	942.857.260,00	62,77
	d. Tenaga Kesehatan Lainnya	488.898.855,00	400.714.308,00	81,96
7	Dukungan Vaksinasi	2.713.247.000,00	1.926.864.047,00	71,02
	a. Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	2.713.247.000,00	1.926.864.047,00	71,02
8	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.751.506.000,00	1.772.464.645,00	47,25
9	Dukungan layanan operasional kesehatan (Belanja Tidak Terduga)	881.569.000,00	745.454.705,00	84,56
	TOTAL PENANGANAN KESEHATAN	**61.160.969.660,00**	**18.618.780.629,00**	**30,44**
II	**PENANGANAN DAMPAK EKONOMI**			
1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	153.690.000,00	153.690.000,00	100,00
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.256.422.000,00	2.229.771.621,00	98,82
3	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	2.676.881.000,00	2.562.443.856,00	95,72
4	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	658.583.000,00	658.583.000,00	100,00
5	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.026.823.000,00	1.026.823.000,00	100,00
6	Pengembangan Kewirausahaan Desa	21.987.760.982,00	21.987.760.982,00	100,00
7	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	44.557.000,00	44.556.000,00	100,00
8	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.205.807.750,00	2.189.115.750,00	99,24
9	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1.606.452.250,00	1.466.000.450,00	91,26
10	Pengembangan Industri kreatif	13.284.314.000,00	12.234.190.423,00	92,10
11	Gelar Seni Budaya Daerah	3.627.716.000,00	3.502.443.832,00	96,55
12	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	5.044.660.000,00	4.654.532.772,00	92,27
13	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	11.624.648.000,00	11.415.676.919,00	98,20
14	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	10.796.203.500,00	9.815.617.124,00	90,92
15	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	5.549.029.000,00	5.549.029.000,00	100,00

No	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	2	3	4	5=4/3
16	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	15.677.465.000,00	15.549.038.995,00	99,18
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.232.589.500,00	3.767.142.890,00	89,00
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	11.050.000.000,00	11.027.852.851,00	99,80
19	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	24.200.431.000,00	23.002.499.010,00	95,05
20	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	8.426.180.000,00	7.724.289.847,00	91,67
21	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	2.398.934.000,00	2.045.742.657,00	85,28
22	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.222.200.000,00	2.196.435.697,00	98,84
23	Festival Kebudayaan Yogyakarta	4.000.000.000,00	3.738.225.200,00	93,46
24	Gelar Budaya Yogyakarta	4.931.338.000,00	4.590.751.700,00	93,09
25	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	6.719.029.800,00	6.472.820.899,00	96,34
26	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	3.230.000.000,00	3.024.490.891,00	93,64
27	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	8.643.587.000,00	7.835.329.712,00	90,65
28	Selendang Sutera	2.039.500.000,00	1.895.548.222,00	92,94
29	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	3.283.480.000,00	3.283.480.000,00	100,00
30	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.706.804.000,00	1.181.116.990,00	69,20
31	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2.593.661.000,00	2.593.661.000,00	100,00
32	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	90.724.000,00	90.724.000,00	100,00
33	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	189.169.000,00	189.169.000,00	100,00
34	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	447.382.000,00	447.382.000,00	100,00
35	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1.730.000.000,00	1.722.105.000,00	99,54
36	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	276.559.000,00	125.059.000,00	45,22
37	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
38	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	11.326.847.700,00	11.326.847.700,00	100,00
39	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	3.930.636.000,00	3.883.764.000,00	98,81
40	Pelayanan Antar Kerja	113.083.000,00	106.726.475,00	94,38
41	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	60.500.500,00	59.850.822,00	98,93
42	Perluasan Kesempatan Kerja	782.495.400,00	767.441.150,00	98,08
43	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	321.448.000,00	305.325.151,00	94,98
44	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	12.894.000,00	12.894.000,00	100,00
45	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	104.235.000,00	102.088.384,00	97,94
46	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	6.372.225.000,00	6.283.622.493,00	98,61
47	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.002.544.000,00	4.649.080.120,00	92,93
48	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	19.733.278.000,00	18.246.241.746,00	92,46
49	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.899.238.000,00	1.899.238.000,00	100,00
50	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1.482.662.000,00	1.265.607.550,00	85,36
51	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	189.778.000,00	189.390.000,00	99,80
52	Pengembangan Lumbung Mataraman	4.894.144.200,00	4.780.867.733,00	97,69
53	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	308.387.000,00	284.899.000,00	92,38
54	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	31.214.000,00	30.504.500,00	97,73
55	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	500.979.000,00	486.212.904,00	97,05

No	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	2	3	4	5=4/3
56	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	206.680.000,00	206.680.000,00	100,00
57	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	43.377.000,00	43.377.000,00	100,00
58	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	558.352.800,00	558.352.800,00	100,00
59	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.919.990.000,00	1.841.691.125,00	95,92
60	Pengembangan Ekonomi Perempuan	649.435.000,00	649.435.000,00	100,00
61	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	481.508.000,00	481.508.000,00	100,00
62	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	82.400.000.000,00	82.240.052.768,00	99,81
63	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	2.349.498.050,00	2.141.288.950,00	91,14
64	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1.679.619.400,00	1.531.498.140,00	91,18
65	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.030.825.265,00	3.020.583.000,00	99,66
66	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.003.480.500,00	4.116.608.178,00	82,27
67	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	68.635.587.920,00	68.049.701.693,00	99,15
68	BKK Danais ke Kota Yogyakarta	34.618.248.279,00	33.819.808.016,00	97,69
69	BKK Danais ke Kabupaten Bantul	19.275.552.000,00	19.051.065.699,00	98,84
70	BKK Danais ke Kabupaten Kulon Progo	52.610.142.289,00	50.804.959.253,00	96,57
71	BKK Danais ke Kabupaten Gunungkidul	22.227.183.700,00	22.227.183.700,00	100,00
72	BKK Danais ke Kabupaten Sleman	15.221.125.469,00	14.953.049.339,00	98,24
73	Pengembangan Kewirausahaan Desa	309.360.000,00	307.460.000,00	99,39
74	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	859.704.000,00	678.114.572,00	78,88
75	BKK Danais ke Kabupaten Kulon Progo (Tata Ruang)	1.778.940.000,00	859.947.380,00	48,34
76	BKK Danais ke Kabupaten Sleman (Tata Ruang)	84.430.125.630,00	76.352.658.000,00	90,43
77	BKK Danais ke Kota Yogyakarta (Tata Ruang)	16.940.000.000,00	4.196.120.312,00	24,77
	TOTAL PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	**662.967.904.884,00**	**624.844.844.943,00**	**94,25**
III	**PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL**			
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	24.352.420.000,00	23.188.504.630,00	95,22
2	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.294.900.000,00	1.780.958.400,00	54,05
3	Pengembangan Lumbung Mataraman	5.578.362.000,00	5.511.910.610,00	98,81
4	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	74.157.517.771,00	74.157.517.771,00	100,00
5	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.428.437.000,00	3.383.931.000,00	98,70
6	Penyediaan Permakanan	499.930.000,00	499.930.000,00	100,00
7	Penyediaan Sandang	108.270.000,00	108.270.000,00	100,00
8	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	36.145.000,00	36.145.000,00	100,00
9	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.874.000,00	10.874.000,00	100,00
10	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	168.102.000,00	168.102.000,00	100,00
11	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	23.493.000,00	23.493.000,00	100,00
12	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	266.801.400,00	265.725.000,00	99,60
13	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
14	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00
15	Pemulangan Ke Daerah Asal	10.020.000,00	10.020.000,00	100,00

No	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	2	3	4	5=4/3
16	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1.593.900.500,00	1.593.900.500,00	100,00
17	Pembinaan Muatan Lokal	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	100,00
18	Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 (Belanja Tidak Terduga)	4.989.500.000,00	4.749.906.757,00	95,20
	TOTAL PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL	**141.027.072.671,00**	**137.997.588.668,00**	**97,85**
	TOTAL	**865.155.947.215,00**	**781.461.214.240,00**	**90,33**

	Tahun 2022	Tahun 2021
B. Belanja Dana Keistimewaan	**Rp1.272.217.709.160,46**	**Rp1.259.358.730.517,05**

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.879.828.899.155,00 dan realisasi sebesar Rp5.449.935.625.661,56, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan tahun anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 (Lampiran V) tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00. Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2022 sebesar Rp1.259.286.977.483,00 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan tahun anggaran 2021 sebesar Rp60.713.022.516,00.

Belanja Dana Keistimewaan tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemda DIY , Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan. Untuk Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke rekening Pemda Kabupaten/Kota dan rekening Pemerintah Kalurahan untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa Dana Keistimewaan pada Pemda Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY.

Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 telah terserap sebesar Rp1.272.217.709.160,46 atau 96,38%. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan tahun anggaran 2022 *audited* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 74
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
I	**KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH**				
1	KOTA YOGYAKARTA	212.786.250,00	195.623.689,00	17.162.561,00	91,93
2	KABUPATEN BANTUL	4.142.999.000,00	4.008.605.496,00	134.393.504,00	96,76
3	KABUPATEN KULON PROGO	3.438.368.500,00	3.202.274.033,00	236.094.467,00	93,13
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	2.602.953.600,00	2.523.924.574,00	79.029.026,00	96,96
5	KABUPATEN SLEMAN	1.795.195.700,00	1.728.733.587,00	66.462.113,00	96,30
6	BIRO ORGANISASI SETDA DIY	3.162.212.000,00	2.873.181.947,00	289.030.053,00	90,86

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
7	BIRO HUKUM	846.250.000,00	835.406.779,00	10.843.221,00	98,72
8	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	1.853.478.000,00	1.688.446.442,00	165.031.558,00	91,10
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.082.710.000,00	1.054.648.200,00	28.061.800,00	97,41
10	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.980.245.000,00	1.699.935.136,00	280.309.864,00	85,84
11	PANIRADYA KAISTIMEWAN	20.464.031.474,00	19.874.373.201,00	589.658.273,00	97,12
II	**KEBUDAYAAN**				
1	KOTA YOGYAKARTA	34.618.248.279,00	33.819.808.016,00	798.440.263,00	97,69
2	KABUPATEN BANTUL	20.143.302.000,00	19.338.815.699,00	804.486.301,00	96,01
3	KABUPATEN KULON PROGO	53.537.121.889,00	50.923.447.408,00	2.613.674.481,00	95,12
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	22.874.962.340,00	22.326.302.961,00	548.659.379,00	97,60
5	KABUPATEN SLEMAN	18.604.900.669,00	18.285.442.139,44	319.458.529,56	98,28
6	DINAS KEBUDAYAAN DIY	302.789.217.025,00	289.588.791.950,00	13.200.425.075,00	95,64
7	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	15.677.465.000,00	15.546.758.352,95	130.706.647,05	99,17
8	MUSEUM SONOBUDOYO YOGYAKARTA	13.574.821.067,00	13.171.185.704,00	403.635.363,00	97,03
9	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	38.943.638.400,00	37.004.623.605,00	1.939.014.795,00	95,02
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.084.576.713,00	21.000.513.368,00	84.063.345,00	99,60
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.067.629.500,00	15.478.358.183,00	1.589.271.317,00	90,69
12	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	4.117.563.800,00	3.703.024.338,00	414.539.462,00	89,93
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.237.089.000,00	3.008.408.200,00	228.680.800,00	92,94
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5.771.902.011,00	5.481.426.474,00	290.475.537,00	94,97
15	DINAS PARIWISATA DIY	18.635.779.750,00	17.799.327.487,00	836.452.263,00	95,51
16	DINAS KESEHATAN	532.366.000,00	508.639.953,00	23.726.047,00	95,54
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	3.916.697.500,00	3.768.866.845,00	147.830.655,00	96,23
19	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	93.847.240.102,00	91.503.660.796,00	2.343.579.306,00	97,50
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	4.894.144.200,00	4.266.622.110,00	627.522.090,00	87,18
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	116.450.680.790,00	116.152.552.222,00	298.128.568,00	99,74
22	DINAS SOSIAL	6.184.871.500,00	5.554.958.110,00	629.913.390,00	89,82
23	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY	747.000.000,00	723.649.717,00	23.350.283,00	96,87
24	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.303.424.750,00	3.047.055.372,00	256.369.378,00	92,24
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	971.968.800,00	692.632.000,00	279.336.800,00	71,26
26	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	848.108.000,00	805.488.076,00	42.619.924,00	94,97
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.372.225.000,00	6.321.121.493,00	51.103.507,00	99,20
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.048.826.391,00	11.737.739.622,00	311.086.769,00	97,42
29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL	5.578.362.000,00	5.513.970.610,00	64.391.390,00	98,85
30	DINAS PERHUBUNGAN	98.000.000,00	97.733.280,00	266.720,00	99,73
31	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY	580.265.838,00	565.559.437,00	14.706.401,00	97,47
32	BIRO ADM PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA DIY	163.658.750,00	159.408.750,00	4.250.000,00	97,40
33	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.790.492.800,00	1.396.515.831,00	393.976.969,00	78,00
32	BKK KALURAHAN				
	BKK KALURAHAN - DESA BALAI BUDAYA	6.880.800.000,00	6.879.148.614,00	1.651.386,00	99,98

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
	BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI BUDAYA	19.400.000.000,00	19.258.884.629,00	141.115.371,00	99,27
	BKK KALURAHAN - ARSITEKTUR	5.940.000.000,00	5.913.548.163,00	26.451.837,00	99,55
	BKK KALURAHAN - DESA BAHARI	4.740.294.000,00	4.543.605.729,00	196.688.271,00	95,85
	BKK KALURAHAN - DESA BUDAYA	8.750.000.000,00	8.648.194.646,00	101.805.354,00	98,84
	BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI PANGAN	1.500.000.000,00	1.498.951.000,00	1.049.000,00	99,93
	BKK KALURAHAN - DESA PRIMA	1.250.000.000,00	1.249.027.410,19	972.589,81	99,92
	BKK KALURAHAN - DESA PREUNEUR	4.000.000.000,00	3.985.563.522,00	14.436.478,00	99,64
	BKK KALURAHAN - DESA WISATA	7.000.000.000,00	6.994.068.644,00	5.931.356,00	99,92
	BKK KALURAHAN-PADAT KARYA	19.075.000.000,00	19.000.872.765,00	74.127.235,00	99,61
	BKK KALURAHAN - PAPAN PENANDA KEISTIMEWAAN	18.963.000.000,00	18.953.271.960,00	9.728.040,00	99,95
III	**PERTANAHAN**				
1	KOTA YOGYAKARTA	1.408.780.000,00	1.338.570.480,00	70.209.520,00	95,02
2	KABUPATEN BANTUL	5.767.883.000,00	4.473.355.750,00	1.294.527.250,00	77,56
3	KABUPATEN KULON PROGO	3.071.831.000,00	2.602.526.148,00	469.304.852,00	84,72
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	5.014.385.000,00	4.884.199.720,00	130.185.280,00	97,40
5	KABUPATEN SLEMAN	2.813.796.096,00	2.681.584.302,00	132.211.794,00	95,30
6	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	7.378.140.785,00	7.094.175.199,00	283.965.586,00	96,15
7	BIRO HUKUM SETDA DIY	452.472.000,00	441.286.650,00	11.185.350,00	97,53
8	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	285.000.000,00	269.732.927,00	15.267.073,00	94,64
9	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	540.000.000,00	369.947.630,00	170.052.370,00	68,51
10	BKK KALURAHAN - URUSAN PERTANAHAN	291.072.000,00	291.072.000,00	-	100,00
IV	**TATA RUANG**				
1	KOTA YOGYAKARTA	14.650.850.000,00	13.883.396.407,88	767.453.592,12	94,76
2	KABUPATEN BANTUL	406.646.650,00	406.646.650,00	-	100,00
3	KABUPATEN KULON PROGO	2.572.796.375,00	2.505.949.649,00	66.846.726,00	97,40
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	9.932.662.350,00	9.922.858.702,00	9.803.648,00	99,90
5	KABUPATEN SLEMAN	84.430.125.630,00	79.748.707.630,00	4.681.418.000,00	94,46
6	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	7.249.316.500,00	6.993.109.427,00	256.207.073,00	96,47
7	DINAS PERTANIAN	859.704.000,00	569.150.372,00	290.553.628,00	66,20
8	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY	133.160.800,00	133.131.800,00	29.000,00	99,98
9	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	170.623.365.061,00	164.724.632.967,00	5.898.732.094,00	96,54
10	DINAS PERHUBUNGAN DIY	6.213.932.565,00	6.067.085.608,00	146.846.957,00	97,64
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	125.000.000,00	122.567.285,00	2.432.715,00	98,05
12	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	144.952.600,00	144.355.260,00	597.340,00	99,59
13	BPTTG (DISPERINDAG)	218.220.000,00	217.286.000,00	934.000,00	99,57
14	BLPT (DIKPORA)	190.000.000,00	182.217.250,00	7.782.750,00	95,90
V	**TATA CARA**				
1	SEKRETARIAT DPRD	2.679.743.000,00	2.147.899.773,00	531.843.227,00	80,15
2	BIRO UMUM HUMAS DAN PROTOKOL	3.358.301.000,00	3.174.049.562,00	184.251.438,00	94,51
3	BIRO TATA PEMERINTAHAN	399.160.000,00	236.637.536,00	162.522.464,00	59,28
4	BAPPEDA	701.830.200,00	688.878.200,00	12.952.000,00	98,15
	JUMLAH	**1.320.000.000.000,00**	**1.272.217.709.160,46**	**47.782.290.839,54**	**96,38**

Realisasi penyerapan Dana Keistimewaan semula sebesar Rp1.272.725.809.223,58 dikoreksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp508.100.063,12, yang merupakan pengembalian BKK Dais Kota Yogyakarta sebesar Rp325.460.000,12, pengembalian BKK Dais Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp167.192.095,00 dan pengembalian BKK Dais di 4 (empat) Kalurahan sebesar Rp15.447.968,00 sehingga realisasi penyerapan Dana Keistimewaan menjadi sebesar Rp1.272.217.709.160,46.

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.4	**Belanja Transfer**	**Rp1.293.840.049.824,63**	**Rp1.246.759.114.291,51**

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.315.904.576.141,00 dan realisasi sebesar Rp1.293.840.049.824,63 atau 98,32%, dengan rincian sebagai berikut:

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.4.1.	**Belanja Bagi Hasil**	**Rp839.016.298.042,00**	**Rp713.118.316.167,00**

Belanja Bagi Hasil tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp839.016.298.042,00 dan realisasi sebesar Rp839.016.298.042,00 atau 100%. Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp125.897.981.875,00 atau 17,65% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp713.118.316.167,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil pajak daerah tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 75
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta	145,324,342,606.00	145,324,342,606.00	100	123,562,921,230.00
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	192,023,344,227.00	192,023,344,227.00	100	163,305,276,389.00
3	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	104,771,836,581.00	104,771,836,581.00	100	89,292,015,362.00
4	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	123,106,178,070.00	123,106,178,070.00	100	103,103,480,235.00
5	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman	273,790,596,558.00	273,790,596,558.00	100	233,854,622,951.00
Jumlah		**839,016,298,042.00**	**839,016,298,042.00**	**100**	**713,118,316,167.00**

Untuk Bagi Hasil Pajak atas kelebihan target penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2022, Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak tersebut akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Adapun kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.642.090.532,00 dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5. 76
Rincian Kekurangan Pembayaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kabuten/Kota

No	Uraian	Jumlah
1	Pemerintah Kota Yogyakarta	1.413.916.770,00
2	Pemerintah Kabupaten Bantul	1.745.092.380,00
3	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	918.048.470,00
4	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	833.114.942,00
5	Pemerintah Kabupaten Sleman	2.731.917.970,00
Jumlah		**7.642.090.532,00**

Kekurangan bayar Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2023 Tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar Tahun 2022 atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2023. Kekurangan bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun anggaran 2022 telah dicatat sebagai Utang Belanja Bagi Hasil pajak daerah pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.642.090.532,00.

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2.4.2.	**Belanja Bantuan Keuangan**	**Rp454.315.651.719,51**	**Rp533.640.798.124,51**

Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp476.888.278.099,00 dan realisasi sebesar Rp454.315.651.719,51 atau 95,27%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp79.325.146.405,00 atau 14,86% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp533.640.798.124,51. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2022 meliputi Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp370.669.592.099,00 dan realisasi sebesar Rp353.767.994.612,32 atau 95,44%, dan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dianggarkan sebesar Rp106.218.686.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.547.657.107,19 atau 94,66%, dengan rincian sebagai berikut:

		Tahun 2022	Tahun 2021
A.	**Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota**	**Rp353.767.994.612,32**	**Rp484.644.483.000,29**

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp370.669.592.099,00 dan realisasi sebesar Rp353.767.994.612,32 atau 95,44%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp130.876.488.387,97 atau 27,00% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp484.644.483.000,29. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota tersebut merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten kota dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00, dan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% digunakan untuk pemberian bantuan terkait musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur tahun berdasarkan surat Bupati Cianjur Nomor 900/8896/BKAD tanggal 28 November tahun 2022. Bantuan keuangan khusus daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp369.669.592.099,00 dan realisasinya sebesar Rp352.767.994.612,32 atau 95,43%, dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 77
Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan Ke Kota Yogyakarta	52,643,664,529.00	50,490,102,392.88	95,91	70,217,129,004.59
2	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Bantul	53,290,830,650.00	50,367,423,595.00	94.51	97,862,551,320.00
3	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Kulon Progo	69,135,117,764.00	65,249,197,238.00	94.38	45,022,230,908.00
4	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Gunung Kidul	74,213,586,061.00	72,072,803,728.00	97.12	51,170,009,531.20
5	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Sleman	120,386,393,095.00	114,588,467,658.44	95.18	220,372,562,236.50
7	Bantuan Keuangan Umum DIY Ke Kab Cianjur	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
Jumlah		**370,669,592,099.00**	**353,767,994,612.32**	**95.44**	**484,644,483,000.29**

Transfer Bantuan Keuangan khusus daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022 dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 78
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta

No	Uraian	Tahun 2022			%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/Kurang	
1	BKK Kunjungan Gubernur	500,000,000.00	-	500,000,000.00	
2	BKK UEP KUBE Pengembangan : 10 Paket	230,000,000.00	230,000,000.00	-	100.00
3	BKK UEP PKH Graduasi Pengembangan : 101 Orang	303,000,000.00	303,000,000.00	-	100.00
4	BKK UEP PKH Graduasi Penumbuhan : 60 Orang	180,000,000.00	180,000,000.00	-	100.00
5	Padat Karya Infrastruktur	540,000,000.00	539,703,800.00	296,200.00	99.95
6	Urusan Keistimewaan	50,890,664,529.00	49,237,398,592.88	1,653,265,936.12	96.75
Jumlah		**52,643,664,529.00**	**50,490,102,392.88**	**2,153,562,136.12**	**95.91**

Tabel 5. 79
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul

No	Uraian	Tahun 2022			%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/Kurang	
1	BKK Kunjungan Gubernur	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-
2	BKK UEP KUBE Pengembangan : 10 Paket	230,000,000.00	230,000,000.00	-	100.00
3	BKK UEP PKH Graduasi Pengembangan : 105 Orang	315,000,000.00	315,000,000.00	-	100.00
4	BKK UEP PKH Graduasi Penumbuhan : 175 Orang	525,000,000.00	525,000,000.00	-	100.00
5	Jambanisasi : 40 unit	200,000,000.00	190,000,000.00	10,000,000.00	95.00
6	Padat Karya Infrastruktur	21,060,000,000.00	20,880,000,000.00	180,000,000.00	99.15
7	Urusan Keistimewaan	30,460,830,650.00	28,227,423,595.00	2,233,407,055.00	92.67
Jumlah		**53,290,830,650.00**	**50,367,423,595.00**	**2,923,407,055.00**	**94.51**

Tabel 5. 80
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo

No	Uraian	Tahun 2022			%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/Kurang	
1	BKK Kunjungan Gubernur	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-
2	BKK UEP KUBE Pengembangan : 10 Paket	230,000,000.00	230,000,000.00	-	100.00
3	BKK UEP PKH Graduasi Pengembangan : 120 Orang	360,000,000.00	360,000,000.00	-	100.00
4	BKK UEP PKH Graduasi Penumbuhan : 200 Orang	600,000,000.00	600,000,000.00	-	100.00
5	Jambanisasi : 130 unit	325,000,000.00	325,000,000.00	-	100.00
6	Padat Karya Infrastruktur	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	-	100.00
7	Urusan Keistimewaan	62,620,117,764.00	59,234,197,238.00	3,385,920,526.00	94.59
Jumlah		**69,135,117,764.00**	**65,249,197,238.00**	**3,885,920,526.00**	**94.38**

Tabel 5. 81
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	Tahun 2022			%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/Kurang	
1	BKK Kunjungan Gubernur	1,373,105,000.00	-	1,373,105,000.00	-
2	BKK UEP KUBE Pengembangan : 10 Paket	230,000,000.00	230,000,000.00	-	100.00
3	BKK UEP PKH Graduasi Pengembangan : 106 Orang	318,000,000.00	318,000,000.00	-	100.00
4	BKK UEP PKH Graduasi Penumbuhan : 200 Orang	600,000,000.00	600,000,000.00	-	100.00
5	Jambanisasi : 200 unit	600,000,000.00	600,000,000.00	-	100.00
6	Padat Karya Infrastruktur	3,240,000,000.00	3,240,000,000.00	-	100.00
7	RSUD Saptosari Gunungkidul	27,427,517,771.00	27,427,517,771.00	-	100.00
8	Urusan Keistimewaan	40,424,963,290.00	39,657,285,957.00	767,617,333.00	98.10
Jumlah		**74,213,586,061.00**	**72,072,803,728.00**	**2,140,782,333.00**	**97.12**

Tabel 5. 82
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman

No	Uraian	Tahun 2022			%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/Kurang	
1	BKK Kunjungan Gubernur	598,375,000.00	-	598,375,000.00	-
2	BKK UEP KUBE Pengembangan : 10 Paket	230,000,000.00	230,000,000.00	-	100.00
3	BKK UEP PKH Graduasi Pengembangan : 108 Orang	324,000,000.00	324,000,000.00	-	100.00
4	BKK UEP PKH Graduasi Penumbuhan : 190 Orang	570,000,000.00	570,000,000.00	-	100.00
5	Jambanisasi : 100 unit	400,000,000.00	400,000,000.00	-	100.00
6	Padat Karya Infrastruktur	10,620,000,000.00	10,620,000,000.00	-	100.00
7	Urusan Keistimewaan	107,644,018,095.00	102,444,467,658.44	5,199,550,436.56	95.17
Jumlah		**120,386,393,095.00**	**114,588,467,658.44**	**5,797,925,436.56**	**95.18**

	Tahun 2022	Tahun 2021
B. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa	**Rp100.547.657.107,19**	**Rp48.996.315.124,22**

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa tahun anggaran 2022 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dianggarkan sebesar Rp106.218.686.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.547.657.107,19 atau 94,66%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp51.551.341.982,97 atau sebesar 105,21% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp48.996.315.124,22. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 83
Rincian Bantuan Keuangan ke Desa

No	Uraian	Tahun 2022			%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/Kurang	
1	Arsitektur Gaya Yogya	5,940,000,000.00	5,913,548,163.00	26,451,837.00	99.55
2	Balai Budaya	6,880,800,000.00	6,879,148,614.00	1,651,386.00	99.98
3	Kunjungan Gub /Sleman/GK/KP	6,528,520,000.00	1,431,448,025.00	5,097,071,975.00	21.93
4	BKK Desa Budaya	8,750,000,000.00	8,648,194,646.00	101,805,354.00	98.84
5	Desa Mandiri Pangan	1,500,000,000.00	1,498,951,000.00	1,049,000.00	99.93
6	Desa Mandiri Budaya	19,400,000,000.00	19,258,884,629.00	141,115,371.00	99.27
7	Desa Maritim	4,740,294,000.00	4,543,605,729.00	196,688,271.00	95.85
8	Desa Peneur	4,000,000,000.00	3,985,563,522.00	14,436,478.00	99.64
9	Desa Prima	1,250,000,000.00	1,249,027,410.19	972,589.81	99.92
10	Desa Wisata	7,000,000,000.00	6,994,068,644.00	5.931,356.00	99.99
11	Optimalisasi Tanah Kalurahan	291,072,000.00	291,072,000.00	-	100.00
12	Padat Karya Jogja Istimewa	19,075,000,000.00	19,000,872,765.00	74,127,235.00	99.61
13	Penanda Keistimewaan	18,963,000,000.00	18,953,271,960.00	9,728,040.00	99.95
14	BKK REGULER Desa	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	-	100.00
Jumlah		**106,218,686,000.00**	**100,547,657,107.19**	**5,671,028,892.81**	**94.66**

	Tahun 2022	Tahun 2021
Surplus (Defisit)	**Rp81.259.225.740,74**	**Rp172.926.847.675,04**

Surplus sebesar Rp81.259.225.740,74 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi Belanja dan Transfer tahun anggaran 2022. Surplus tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp91.667.621.934,30 atau 53,01% dibandingkan dengan Surplus Tahun 2021 yaitu sebesar Rp172.926.847.675,04. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 84
Surplus/Defisit

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
I	Pendapatan	5,489,017,061,741.00	5,531,194,851,402.30	100.77	5,703,100,309,342.23
2	Belanja dan Transfer	5,879,828,899,155.00	5,449,935,625,661.56	92.69	5,530,173,461,667.19
3	**Surplus/Defisit**	**(390,811,837,414.00)**	**81,259,225,740.74**	**(20.79)**	**172,926,847,675.04**

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.3 Pembiayaan Netto	**Rp381.012.337.214,50**	**Rp381.560.546.739,46**

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah DIY tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp381.012.337.214,50, yang terdiri atas:

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	**Rp554.687.337.214,50**	**Rp494.060.546.739,46**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp554.687.337.214,50. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp60.626.790.475,04 atau 12,27% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021

yaitu sebesar Rp494.060.546.739,46. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp554.687.337.214,50 berasal dari:

Tabel 5. 85
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
I	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	554.487.394.414,00	554.487.394.414,50	100,00	484.453.213.139,46
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	199.942.800,00	2,00	9.607.333.600,00
JUMLAH		**564.487.394.414,00**	**554.687.337.214,50**	**98,26**	**494.060.546.739,46**

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**Rp554.487.394.414,50**	**Rp484.453.213.139,46**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp554.487.394.414,00 dan realisasi sebesar Rp554.487.394.414,50 atau 100,00%, mengalami kenaikan sebesar Rp70.034.181.275,04 atau 14,46% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp484.453.213.139,46.

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.942.800,00 terdiri dari penerimaan Kembali dana bergulir kepada koperasi terealisasi sebesar Rp85.942.800,00, dan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat (BUKP) dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00, dan realisasi sebesar Rp95.000.000,00 atau 0,95%. Sedangkan penerimaan Kembali dana bergulir dari masyarakat yang di Kelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Program DPM LDPM dan program DPM LUEP) terealisasi sebesar Rp19.000.000,00. Rincian penerimaan Kembali pemberian pinjaman tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 86
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	**Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Koperasi**	**-**	**85.942.800,00**	**-**	**38.336.000,00**
	DISKOP				
	Pasca Gempa 2008	-	-	-	3.000.000,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	-	85.942.800,00	-	35.333.600,00
2	**Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat**	**10.000.000.000,00**	**114.000.000,00**	**1,14**	**9.569.000.000,00**
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat (BUKP)	10.000.000.000,00	95.000.000,00	0,95	9.560.000.000,00
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**-**	**19.000.000,00**	**-**	**9.000.000,00**
	Program DPM LDPM	-	12.000.000,00	-	8.000.000,00
	Program DPM LUEP	-	7.000.000,00	-	1.000.000,00
Jumlah		**10.000.000.000,00**	**199.942.800,00**	**2,00**	**9.607.333.600,00**

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	**Rp173.675.000.000,00**	**Rp112.060.000.000,00**
5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah	**Rp173.675.000.000,00**	**Rp112.060.000.000,00**

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp173.675.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp61.615.000.000,00 atau 54,98% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp112.060.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp173.675.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemda DIY diberikan kepada PT. Bank BPD DIY dalam rangka memenuhi modal dasar yang dimiliki oleh Pemda DIY dan untuk menjaga proporsi kepemilkan saham Pemda DIY sebesar 51% sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Daerah Istimewa Yogyyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

	Tahun 2022	Tahun 2021
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**Rp462.271.562.955,24**	**Rp554.487.394.414,50**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp462.271.562.955,24, mengalami penurunan sebesar Rp92.215.831.459,26 atau 16,63% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun anggarn 2021 yaitu sebesar Rp554.487.394.414,50. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer ditambah dengan pembiayaan netto tahun anggaran 2022, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. 87
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
I	Pendapatan	5,489,017,061,741.00	5,531,194,851,402.30	100.77	5,703,100,309,342.23
2	Belanja dan Transfer	5,879,828,899,155.00	5,449,935,625,661.56	92.69	5,530,173,461,667.19
3	Surplus/Defisit	(390,811,837,414.00)	81,259,225,740.74	(20.79)	172,926,847,675.04
4	Pembiayaan Netto	390,811,837,414.00	381,012,337,214.50	97.49	381,560,546,739.46
5	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	**-**	**462,271,562,955.24**		**554,487,394,414.50**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp462.271.562.955,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 88
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	Jumlah
1	**Kas di Kas Daerah**	**411.828.641.051,77**
	Giro BPD	408.464.588.723,68
	Setoran Pengembalian dana bergulir BUKP (2022)- salah setor RKUD Pemkot	216.004.659,97
	Setoran pengembalian BKK Dais Kab Gk (1 Januari 2023)	60.000,00
	Setoran Pengembalian Belanja (BPKA)	508.100.063,12
	Setoran Pengembalian Belanja (diskanla)	3.131.094,00
	Setoran Pengembalian Belanja (DPKP)	660.000,00
	Setoran Pengembalian Belanja (DPPM)	472.000,00

No	Uraian	Jumlah
	Setoran Pengembalian Belanja (BIRO ADPEM)	23.600.000,00
	Setoran Pengembalian Belanja (DIKPORA)	204.575.076,00
	Setoran Pengembalian Belanja (DISBUD)	59.411.350,00
	Setoran Pengembalian Belanja (DP3AP)	16.060.000,00
	Setoran Pengembalian Belanja (BIRO MENTAL)	438.000,00
	Setoran Pengembalian Belanja (DISNAKERTRANS)	3.100.000,00
	Setoran Pengembalian Belanja (DPU-ESDM)	8.590.000,00
	Setoran Pengembalian Belanja (DISHUB)	2.281.298.079,00
	Setoran Pengembalian Belanja (BIRO PIWP)	1.000.000,00
	Setoran Pengembalian Belanja (SETWAN)	37.033.120,00
	Setoran Pengembalian Belanja (KOMINFO)	518.886,00
2	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**29.060.915,00**
	Bendahara Penerimaan DISDIKPORA	180.000,00
	Bendahara Penerimaan DINAS PERHUBUNGAN (Balai Pengelolaan Parkir)	4.310.000,00
	Bendahara Penerimaan DLHK	17.121.915,00
	Bendahara Penerimaan DINAS KEBUDAYAAN	4.640.000,00
	Bendahara Penerimaan DPAD	2.050.000,00
	Bendahara Penerimaan DINAS PERTANIAN	759.000,00
3	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**395.447.117,00**
	Bendahara Pengeluaran DINAS KEBUDAYAAN	378.329.102,00
	Bendahara Pengeluaran DINAS PARIWISATA	8.825.943,00
	Bendahara Pengeluaran DISDIKPORA	7.723.936,00
	Bendahara Pengeluaran DLHK	568.136,00
4	**Kas di Bendahara BOS 2022**	**2.144.537.546,00**
5	**Kas di BLUD**	**47.873.876.325,47**
	Kas di BLUD RS Ghrasia	14.627.678.890,85
	Kas di BLUDBLPT	2.739.971.946,00
	Kas di BLUD Bapelkes	3.902.003.430,00
	Kas di BLUD Respira	19.269.276.055,00
	Kas di BLUD Balabkes	7.025.358.067,62
	Kas di BLUD SMKN 6 Yogyakarta	217.996.067,00
	Kas di BLUD SMKN 1 Sewon	77.516.412,00
	Kas di BLUD SMKN 3 Wonosari	14.075.457,00
	JUMLAH	**462.271.562.955,24**

Penjelasan:

1. SILPA di BUD tahun 2022 sebesar Rp411.834.583.871,77 terdiri dari Saldo Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY Nomor 001.111.000059 sebesar Rp408.464.588.723,68, setoran dana bergulir dari BUKP sebesar Rp216.004.659,97 karena terjadi salah setor semula masuk ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 20 Januari 2023, dan setoran pengembalian Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten Gunung Kidul Rp60.000,00 dan telah di setorkan ke rekening kas umum daerah pada tanggal 18 Januari 2023. Setoran pengembalian belanja yang berasal dari belanja tahun anggaran 2022 yang disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Maret 2023 (sebelum laporan keuangan diterbitkan) yaitu:

   Setoran kelebihan belanja pada BPKA sebesar Rp508.100.063,12, setoran kelebihan belanja pada Dislautkan sebesar Rp3.131.094,00, setoran kelebihan belanja pada DPKP sebesar Rp660.000,00,

setoran kelebihan belanja pada DPPM sebesar Rp472.000,00, setoran kelebihan belanja pada Setda sebesar Rp41.098.000,00, setoran kelebihan belanja pada Disdikpora sebesar Rp204.575.076,00, setoran kelebihan belanja pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp59.411.350,00, setoran DP3AP sebesar Rp16.060.000,00, setoran kelebihan belanja pada Disnakertrans sebesar Rp3.100.000,00, setoran kelebihan belanja pada DPU-ESDM sebesar Rp8.590.000,00, setoran kelebihan belanja pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.281.298.079,00, setoran kelebihan belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp37.033.120,00, dan setoran kelebihan belanja pada Diskominfo sebesar Rp518.886,00.

2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan belum disetor oleh Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp29.330.915,00 meliputi kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan, pemuda, dan Olahraga sebesar Rp180.000,00, Kas di Bendahara Penerimaan Balai Pengelolaan Perparkiran (Dinas Perhubungan) sebesar Rp4.310.000,00, dan kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp17.121.915,00, kas di bendahara penerimaan Dinas Kebudayaan sebesar Rp4.640.000,00, Kas bendahara penerimaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp2.050.000,00, dan kas bendahara penerimaan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp759.000,00.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp395.447.117,00 merupakan kas yang menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran yang sumber dananya dari SP2D UP/GU yang sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2022 belum disetorkan ke Kas Daerah meliputi kas di bendahara pengeluaran pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp378.329.102,00, kas di bendahara pengeluaran pada Dinas Pariwisata sebesar Rp8.825.943,00, kas di bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.723.936,00, dan kas di bendahara pengeluaran pada Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp568.136,00

4. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.144.537.546,00 merupakan sisa penyaluran BOS yang diterima langsung oleh sekolah SMA/SMK/SLB

5. Kas di BLUD sebesar Rp47.873.876.325,47 merupakan kas yang ada di rekening BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 89
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD

NO	URAIAN	JUMLAH
1	**RS. Jiwa Grhasia**	
	Silpa 31 Desember 2021	10.867.158.782,37
	Pendapatan BLUD Tahun 2022	23.631.733.885,39
	Belanja BLUD Tahun 2022	19.871.213.776,91
	Silpa 31 Desember 2022	**14.627.678.890,85**
2	**Balai Latihan Pendidikan Tekhnik**	
	Silpa 31 Desember 2021	2.764.377.694,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2022	1.822.892.069,00
	Belanja BLUD Tahun 2022	1.847.297.817,00
	Silpa 31 Desember 2022	**2.739.971.946,00**
3	**Balai Pelatihan Kesehatan**	
	Silpa 31 Desember 2021	3.302.668.063,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2022	4.034.582.399,00
	Belanja BLUD Tahun 2022	3.435.247.032,00
	Silpa 31 Desember 2022	**3.902.003.430,00**

NO	URAIAN	JUMLAH
4	**RS. Respira**	
	Silpa 31 Desember 2021	12.198.930.201,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2022	16.631.854.533,00
	Belanja BLUD Tahun 2022	9.561.508.679,00
	Silpa 31 Desember 2022	**19.269.276.055,00**
5	**Balai Laboratorium Kesehatan**	
	Silpa 31 Desember 2021	5.426.496.096,62
	Pendapatan BLUD Tahun 2022	6.539.111.166,00
	Belanja BLUD Tahun 2022	4.940.249.195,00
	Silpa 31 Desember 2022	**7.025.358.067,62**
6	**SMK 6 Yogyakarta**	
	Silpa 31 Desember 2021	189.879.291,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2022	1.108.901.607,00
	Belanja BLUD Tahun 2022	1.080.784.831,00
	Silpa 31 Desember 2022	**217.996.067,00**
7	**SMK 3 Wonosari**	
	Silpa 31 Desember 2021	1.505.552,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2022	86.825.457,00
	Belanja BLUD Tahun 2022	74.255.552,00
	Silpa 31 Desember 2022	**14.075.457,00**
8	**SMK 1 Sewon**	
	Silpa 31 Desember 2021	115.297.264,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2022	478.016.412,00
	Belanja BLUD Tahun 2022	515.797.264,00
	Silpa 31 Desember 2022	**77.516.412,00**
JUMLAH SILPA BLUD		**47.873.876.325,47**

5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.2.1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**Rp554.487.394.414,50**	**Rp484.453.213.139,46**

Saldo Anggaran Lebih awal tahun anggaran 2022 sebesar Rp554.487.394.414,50 mengalami kenaikan sebesar Rp70.034.181.275,04 atau 14,46% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp484.453.213.139,46. Saldo Anggaran Lebih awal merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD tahun anggaran 2022.

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.2.2	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	**Rp462.271.562.955,24**	**Rp554.487.394.414,50**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp462.271.562.955,24 berasal dari:

Tabel 5. 90
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan	5.531.194.851.402,30
2	Belanja dan Transfer	5.449.935.625.661,56
	Surplus (Defisit)	**81.259.225.740,74**
3	Penerimaan Pembiayaan	554.687.337.214,50
4	Pengeluaran Pembiayaan	173.675.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**381.012.337.214,50**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**462.271.562.955,24**

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.2.3	**Sisa Anggaran Lebih Akhir**	**Rp462.271.562.955,24**	**Rp554.487.394.414,50**

Sisa Anggaran Lebih akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp462.271.562.955,24 mengalami penurunan sebesar Rp92.215.831.459,26 atau 16,63% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp554.487.394.414,50. Penurunan Sisa Anggaran Lebih Akhir disebabkan realisasi penerimaan pendapatan tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun anggaran 2021.

5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.3.1	**Aset**	**Rp12.567.154.853.336,40**	**Rp11.999.264.977.104,20**
5.3.1.1	**Aset Lancar**	**Rp601.372.492.223,63**	**Rp705.810.418.358,19**
5.3.1.1.1	**Kas dan Setara Kas**	**Rp481.959.754.208,18**	**Rp574.168.719.904,44**
A.	**Kas di Kas Daerah**	**Rp411.828.641.051,77**	**Rp513.471.984.112,22**

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp411.828.641.051,77 terdiri dari saldo kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 Giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp408.464.588.723,68, setoran dana begulir sebesar Rp216.004.659,97, setoran pengembalian dana bergulir BKK Dana Keistimewaan sebesar Rp60.000,00 dan pengembalian belanja sebesar Rp3.147.987.668,12

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp411.828.641.051,77 dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp513.471.984.112,22 mengalami penurunan sebesar Rp101.643.343.060,45 atau 19,80%.

Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 91
Rincian Kas Di Kas Daerah

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	**Rekening Giro BPD DIY**	**408.464.588.723,68**	**512.096.760.981,29**
	Saldo Giro	408.464.588.723,68	512.096.760.981,29
2.	**Setoran kas di bulan Januari - Maret 2023**	**216.064.659,97**	**1.375.223.130,93**
	Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Kebudayaan	59.411.350,00	16.922.471,00
	Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Kesehatan	-	115.978.418,00

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Setoran pengembalian belanja Bantuan Khusus Keuangan Dais pada BPKA	60.000,00	423.428.950,78
	Setoran dana bergulir BUKP pada BPKA	216.004.659,97	600.000.000,00
	Setoran pengembalian Belanja Tak Terduga pada BPKA	-	28.047.000,00
	Setoran Jasa Giro	-	5.809.492,00
	Setoran kelebihan belanja LS pada DPU	8.590.000,00	140.191.009,15
	Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	204.575.076,00	37.892.715,00
	Setoran kelebihan belanja LS pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	660.000,00	5.297.075,00
	Setoran kelebihan belanja LS pada Badan Kesbangpol	-	1.656.000,00
	Setoran pengembalian belanja pada Dinas Perhubungan	2.281.298.079,00	-
	Setoran pengembalian belanja pada BPKA	508.100.063,12	-
	Setoran pengembalian belanja pada Dinas Perikanan dan Kelautan	3.131.094,00	-
	Setoran pengembalian belanja pada DPPM	472.000,00	-
	Setoran pengembalian belanja pada DP3AP2	16.060.000,00	-
	Setoran pengembalian belanja pada Disnakertrans	3.100.000,00	-
	Setoran pengembalian belanja pada Sekretariat DPRD	37.033.120,00	-
	Setoran pengembalian belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika	518.886,00	-
	Setoran pengembalian belanja pada Biro Mental Setda	438.000,00	-
	Setoran pengembalian belanja pada Biro Administrasi dan Pemerintahan Setda	23.600.000,00	-
	Setoran pengembalian belanja pada Biro PIWP Setda	1.000.000,00	-
	Jumlah	**411.828.641.051,77**	**513.471.984.112,22**

B. Kas di Bendahara Penerimaan Rp29.330.915,00 Rp38.000.970,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.330.915,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.330.915,00 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.000.970,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.670.055,00 atau 22,82%.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 92
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Nama SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	4.580.000,00	2.081.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.121.915,00	919.970,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	180.000,00	-
4	Dinas Kebudayaan	4.640.000,00	-
5	Dinas Pariwisata	-	35.000.000,00
6	Dinas Pertanian	759.000,00	-
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.050.000,00	
	Jumlah	**29.330.915,00**	**38.000.970,00**

C. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp420.712.530,00 Rp293.567.198,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp420.712.530,00 merupakan kelebihan belanja barang jasa yang disetor ke Rekening Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember 2022 dan pajak yang belum disetor.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp420.712.530,00 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp293.567.198,00 mengalami kenaikan sebesar Rp127.145.332,00 atau 43,31%.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 93
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nama OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kebudayaan	378.329.102,00	-	Sisa UP
		25.265.413,00	-	Pajak belum disetor
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	-	98.381.288,00	Sisa UP
3.	Dinas Pariwisata	8.825.943,00	136.245.125,00	Sisa UP
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	568.136,00	367.250,00	Sisa UP
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	1.450.000,00	Sisa UP
6.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	7.723.936,00	53.950.000,00	Sisa UP
7.	Dinas Perhubungan	-	3.173.535,00	Sisa UP
	Jumlah	**420.712.530,00**	**293.567.198,00**	

D. Kas di BLUD Rp47.873.876.325,47 Rp36.196.141.717,28

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.873.876.325,47 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Latihan Pendidikan dan Teknik, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon Bantul, dan SMKN 3 Wonosari. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.873.876.325,47 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.196.141.717,28 mengalami kenaikan sebesar Rp11.677.734.608,19 atau 32,26%.

Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 94
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RS Grhasia	14.627.678.890,85	10.867.158.782,37
2	RS Paru Respira	19.269.276.055,00	12.198.930.201,00
3	Balai Pelayanan Jamkesos	-	1.329.828.773,29
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	3.902.003.430,00	3.302.668.063,00
5.	Balai Laboratorium Kesehatan	7.025.358.067,62	5.426.496.096,62
6.	Balai Latihan Pendidkan Teknik (BLPT)	2.739.971.946,00	2.764.377.694,00
7.	SMKN 6 Yogyakarta	217.996.067,00	189.879.291,00
8.	SMKN 1 Sewon Bantul	77.516.412,00	115.297.264,00
9.	SMKN 3 Wonosari	14.075.457,00	1.505.552,00
	Jumlah	**47.873.876.325,47**	**36.196.141.717,28**

Penjelasan:

a. Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp14.627.678.890,85 ditempatkan pada :
   1. Rekening giro BPD DIY Nomor 041.111.000043 sebesar Rp9.568.891.807,34 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.549.434.063,34, Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp11.725.927,00 dan penerimaan yang diterima bulan Januari 2023 sebesar Rp7.731.817,00.
   2. Rekening giro BTN Nomor 00341-01-30-000027-7 sebesar Rp5.058.787.083,51.

b. Kas di BLUD pada RS Paru Respira sebesar Rp19.269.276.055,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001427 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.245.221.704,00, Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp22.778.903,00 dan penerimaan yang diterima bulan Januari 2023 sebesar Rp1.275.448,00.

c. Kas di BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp3.902.003.430,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.000050 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.900.059.160,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp1.944.270,00.

d. Kas di BLUD pada Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp7.025.358.067,62 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 060.111.000004 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.017.235.198,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp8.122.869,00.

e. Kas di BLUD pada BLPT sebesar Rp2.739.971.946,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001065 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.736.615.412,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp3.356.534,00.

f. Kas di BLUD pada SMKN 6 Yogyakarta sebesar Rp217.996.067,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001803 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp217.911.467,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp84.600,00.

g. Kas di BLUD pada SMKN 1 Sewon Bantul sebesar Rp77.516.412,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 004.111.001764 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.500.414,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp15.998,00.

h. Kas di BLUD pada SMKN 3 Wonosari sebesar Rp14.075.457,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 002.111.001064 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.058.746,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp16.711,00.

E. Kas Dana BOS Rp2.144.537.546,00 Rp4.488.067.667,00

Kas Dana BOS pada tahun 2022 merupakan Sisa Dana BOS yang berada di rekening SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp2.144.537.546,00 terdiri dari Sisa Dana BOS Reguler sebesar Rp2.047.948.086,00, dan Sisa Dana BOS Kinerja sebesar Rp96.589.460,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 95
Sisa Dana BOS Reguler Tahun 2022 di SMA/SMK/SLB Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	PENERIMAAN BOS	REALISASI BELANJA BOS	SISA BOS
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.510.080.000,00	1.510.079.996,00	4,00
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.401.250.643,00	1.401.087.795,00	162.848,00
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	1.173.120.000,00	1.168.013.832,00	5.106.168,00
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.333.800.000,00	1.332.661.462,00	1.138.538,00
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.316.056.447,00	1.312.844.793,00	3.211.654,00

NO	NAMA SEKOLAH	PENERIMAAN BOS	REALISASI BELANJA BOS	SISA BOS
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.341.600.000,00	1.341.120.440,00	479.560,00
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.332.240.000,00	1.332.240.000,00	-
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.346.280.000,00	1.340.001.195,00	6.278.805,00
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	1.173.120.000,00	1.172.923.385,00	196.615,00
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	962.520.000,00	904.514.234,00	58.005.766,00
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.510.080.000,00	1.510.080.000,00	-
12	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	952.990.000,00	946.568.940,00	6.421.060,00
13	SMA Negeri 1 Banguntapan	1.155.520.000,00	1.155.012.891,00	507.109,00
14	SMA Negeri 2 Banguntapan	1.157.090.000,00	1.157.003.622,00	86.378,00
15	SMA Negeri 1 Bantul	1.497.780.000,00	1.497.760.775,00	19.225,00
16	SMA Negeri 2 Bantul	1.353.340.000,00	1.353.335.206,00	4.794,00
17	SMA Negeri 3 Bantul	1.044.580.000,00	1.043.791.128,00	788.872,00
18	SMA Negeri 1 Dlingo	645.269.400,00	645.269.100,00	300,00
19	SMA Negeri 1 Imogiri	926.300.000,00	926.062.870,00	237.130,00
20	SMA Negeri 1 Jetis	1.353.340.000,00	1.352.977.391,00	362.609,00
21	SMA Negeri 1 Kasihan	1.374.192.000,00	1.350.165.114,00	34.886,00
22	SMA Negeri 1 Kretek	626.430.000,00	624.180.000,00	2.250.000,00
23	SMA Negeri 1 Pajangan	845.510.000,00	845.422.641,00	87.359,00
24	SMA Negeri 1 Piyungan	828.642.510,00	827.820.000,00	-
25	SMA Negeri 1 Pleret	825.820.000,00	825.820.000,00	-
26	SMA Negeri 1 Pundong	954.560.000,00	951.851.626,00	2.708.374,00
27	SMA Negeri 1 Sanden	1.007.940.000,00	1.007.940.000,00	-
28	SMA Negeri 1 Sedayu	1.489.930.000,00	1.489.930.000,00	-
29	SMA Negeri 1 Sewon	1.683.040.000,00	1.683.028.592,00	11.408,00
30	SMA Negeri 1 Srandakan	566.386.413,00	563.143.484,00	3.242.929,00
31	SMA Negeri 1 Galur	464.460.000,00	462.372.676,00	547.324,00
32	SMA Negeri 1 Girimulyo	379.790.000,00	379.789.397,00	603,00
33	SMA Negeri 1 Kalibawang	554.200.000,00	528.075.083,00	26.124.917,00
34	SMA Negeri 1 Kokap	270.580.000,00	270.121.313,00	458.687,00
35	SMA Negeri 1 Lendah	1.004.080.000,00	1.003.913.252,00	166.748,00
36	SMA Negeri 1 Pengasih	1.043.554.290,00	1.043.554.290,00	-
37	SMA Negeri 1 Samigaluh	213.530.000,00	213.524.900,00	5.100,00
38	SMA Negeri 1 Sentolo	864.990.625,00	850.156.583,00	434.042,00
39	SMA Negeri 1 Temon	622.074.488,00	620.095.225,00	1.979.263,00
40	SMA Negeri 1 Wates	1.211.072.213,00	1.210.733.526,00	338.687,00
41	SMA Negeri 2 Wates	875.310.000,00	871.141.729,00	4.168.271,00
42	SMA Negeri 1 Karangmojo	1.147.980.000,00	1.145.554.965,00	2.425.035,00
43	SMA Negeri 1 Panggang	721.270.000,00	691.597.359,00	29.672.641,00
44	SMA Negeri 1 Patuk	597.840.000,00	597.829.757,00	10.243,00
45	SMA Negeri 1 Playen	467.460.000,00	467.210.960,00	249.040,00
46	SMA Negeri 2 Playen	1.136.258.600,00	1.135.871.529,00	387.071,00
47	SMA Negeri 1 Rongkop	484.950.000,00	465.408.422,00	19.541.578,00
48	SMA Negeri 1 Semanu	403.860.000,00	386.909.481,00	16.950.519,00
49	SMA Negeri 1 Semin	1.022.370.000,00	1.012.112.593,00	10.257.407,00
50	SMA Negeri 1 Tanjungsari	734.580.000,00	733.654.771,00	925.229,00
51	SMA Negeri 1 Wonosari	1.198.860.000,00	1.115.220.911,00	83.639.089,00
52	SMA Negeri 2 Wonosari	1.197.270.000,00	1.196.949.765,00	320.235,00

NO	NAMA SEKOLAH	PENERIMAAN BOS	REALISASI BELANJA BOS	SISA BOS
53	SMA Negeri 1 Cangkringan	619.955.950,00	619.916.458,00	39.492,00
54	SMA Negeri 1 Depok	967.910.000,00	967.863.340,00	46.660,00
55	SMA Negeri 1 Gamping	640.240.000,00	640.240.000,00	-
56	SMA Negeri 1 Godean	966.400.000,00	966.399.992,00	8,00
57	SMA Negeri 1 Kalasan	1.125.601.000,00	1.124.538.973,00	411.027,00
58	SMA Negeri 1 Minggir	576.024.842,00	573.433.382,00	366.460,00
59	SMA Negeri 1 Mlati	637.220.000,00	637.220.000,00	-
60	SMA Negeri 1 Ngaglik	966.400.000,00	966.392.631,00	7.369,00
61	SMA Negeri 2 Ngaglik	1.105.320.000,00	1.105.267.086,00	52.914,00
62	SMA Negeri 1 Ngemplak	631.180.000,00	625.172.346,00	64.834,00
63	SMA Negeri 1 Pakem	792.750.392,00	792.242.822,00	507.570,00
64	SMA Negeri 1 Prambanan	1.115.890.000,00	1.115.865.244,00	24.756,00
65	SMA Negeri 1 Seyegan	1.405.810.000,00	1.405.810.000,00	-
66	SMA Negeri 1 Sleman	1.126.460.000,00	1.119.226.537,00	7.233.463,00
67	SMA Negeri 2 Sleman	641.750.000,00	641.445.939,00	304.061,00
68	SMA Negeri 1 Tempel	543.902.000,00	541.960.000,00	-
69	SMA Negeri 1 Turi	585.880.000,00	585.875.125,00	4.875,00
70	SMK Negeri 1 Yogyakarta	1.037.070.000,00	1.036.995.611,00	74.389,00
71	SMK Negeri 2 Yogyakarta	4.021.799.000,00	3.800.380.344,00	214.299.656,00
72	SMK Negeri 3 Yogyakarta	3.298.250.000,00	2.836.572.363,00	461.677.637,00
73	SMK Negeri 4 Yogyakarta	3.061.110.000,00	2.954.349.070,00	106.760.930,00
74	SMK Negeri 5 Yogyakarta	2.241.893.500,00	2.234.148.755,00	7.744.745,00
75	SMK Negeri 6 Yogyakarta	2.309.610.000,00	2.289.316.232,00	20.293.768,00
76	SMK Negeri 7 Yogyakarta	1.738.470.000,00	1.738.469.992,00	8,00
77	SMK Negeri 1 Bantul	2.844.010.000,00	2.765.493.732,00	78.516.268,00
78	SMK Negeri 1 Dlingo	623.508.200,00	616.718.234,00	6.789.966,00
79	SMK Negeri 1 Kasihan	1.353.996.050,00	1.316.880.312,00	17.517.738,00
80	SMK Negeri 2 Kasihan	813.290.000,00	809.684.119,00	3.605.881,00
81	SMK Negeri 3 Kasihan	1.875.768.120,00	1.869.096.461,00	2.973.539,00
82	SMK Negeri 1 Pajangan	851.700.000,00	851.523.482,00	176.518,00
83	SMK Negeri 1 Pandak	1.518.019.300,00	1.514.690.000,00	-
84	SMK Negeri 1 Pleret	1.300.930.000,00	1.292.591.244,00	8.338.756,00
85	SMK Negeri 1 Pundong	1.404.750.020,00	1.404.746.019,00	4.001,00
86	SMK Negeri 1 Sanden	542.750.000,00	542.750.000,00	-
87	SMK Negeri 1 Sedayu	2.264.520.000,00	2.213.981.318,00	50.538.682,00
88	SMK Negeri 1 Sewon	3.694.110.000,00	3.624.142.100,00	69.967.900,00
89	SMK Negeri 2 Sewon	1.195.720.000,00	1.169.396.525,00	26.323.475,00
90	SMK Negeri 1 Girimulyo	384.540.000,00	384.540.000,00	-
91	SMK Negeri 1 Kokap	760.571.500,00	757.738.353,00	2.833.147,00
92	SMK Negeri 1 Nanggulan	1.465.323.307,00	1.457.249.923,00	8.073.384,00
93	SMK Negeri 1 Panjatan	1.327.620.000,00	1.325.945.711,00	1.674.289,00
94	SMK Negeri 1 Pengasih	1.870.952.500,00	1.859.187.277,00	7.832.723,00
95	SMK Negeri 2 Pengasih	3.230.919.478,00	3.224.288.436,00	438.042,00
96	SMK Negeri 1 Samigaluh	736.020.000,00	735.990.215,00	29.785,00
97	SMK Negeri 1 Temon	610.740.000,00	603.658.536,00	7.081.464,00
98	SMK Negeri 1 Gedangsari	691.210.000,00	691.059.184,00	150.816,00
99	SMK Negeri 2 Gedangsari	1.259.577.145,00	1.258.197.021,00	1.380.124,00

NO	NAMA SEKOLAH	PENERIMAAN BOS	REALISASI BELANJA BOS	SISA BOS
100	SMK Negeri 1 Girisubo	743.600.000,00	741.309.686,00	2.290.314,00
101	SMK Negeri 1 Ngawen	1.848.860.000,00	1.770.077.500,00	78.782.500,00
102	SMK Negeri 1 Nglipar	1.404.397.509,00	1.397.328.902,00	7.068.607,00
103	SMK Negeri 1 Ponjong	936.260.000,00	936.249.398,00	10.602,00
104	SMK Negeri 1 Purwosari	740.804.655,00	740.762.090,00	42.565,00
105	SMK Negeri 1 Saptosari	1.960.400.000,00	1.960.318.201,00	81.799,00
106	SMK Negeri 1 Tanjungsari	284.615.139,00	274.090.763,00	10.524.376,00
107	SMK Negeri 1 Tepus	699.660.000,00	697.778.753,00	1.881.247,00
108	SMK Negeri 1 Wonosari	2.350.790.000,00	2.350.339.631,00	450.369,00
109	SMK Negeri 2 Wonosari	2.632.469.294,00	2.621.263.093,00	11.206.201,00
110	SMK Negeri 3 Wonosari	2.014.480.000,00	2.014.480.000,00	-
111	SMK Negeri 1 Cangkringan	1.690.500.000,00	1.689.574.249,00	925.751,00
112	SMK Negeri 1 Depok	1.556.870.000,00	1.365.754.763,00	191.115.237,00
113	SMK Negeri 2 Depok	3.770.397.114,00	3.732.799.230,00	34.601.634,00
114	SMK Negeri 1 Godean	1.724.310.000,00	1.721.101.198,00	3.208.802,00
115	SMK Negeri 2 Godean	1.376.550.000,00	1.282.556.797,00	93.993.203,00
116	SMK Negeri 1 Kalasan	1.796.029.732,00	1.789.473.632,00	180.000,00
117	SMK Negeri 1 Seyegan	2.659.720.020,00	2.659.438.348,00	281.672,00
118	SMK Negeri 1 Tempel	1.715.471.000,00	1.660.856.190,00	54.614.810,00
119	SLB N 1 Yogyakarta	341.432.115,00	341.432.115,00	-
120	SLB N 2 Yogyakarta	327.600.000,00	327.584.747,00	15.253,00
121	SLB N Pembina	862.680.000,00	856.209.550,00	6.470.450,00
122	SLB N 1 Bantul	1.098.658.815,00	1.098.606.861,00	51.954,00
123	SLB N 2 Bantul	397.850.000,00	397.691.823,00	158.177,00
124	SLB N 1 Sleman	379.080.000,00	376.196.300,00	2.883.700,00
125	SLB N 1 Gunungkidul	625.300.000,00	587.335.284,00	37.964.716,00
126	SLB N 2 Gunungkidul	251.600.000,00	251.600.000,00	-
127	SLB N 1 Kulon Progo	741.907.865,00	741.626.558,00	281.307,00
	Jumlah	**153.014.883.191,00**	**150.972.877.925,00**	**2.047.948.086,00**

Tabel 5. 96
Sisa Dana BOS Kinerja Tahun 2022 di SMA/SMK/SLB Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	PENERIMAAN BOS	REALISASI BELANJA BOS	SISA BOS
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	60.000.000,00	60.000.000,00	-
2	SMA Negeri 3 Yogyakarta	60.000.000,00	59.999.999,00	1,00
3	SMA Negeri 4 Yogyakarta	155.000.000,00	155.000.000,00	-
4	SMA Negeri 5 Yogyakarta	60.000.000,00	60.000.000,00	-
5	SMA Negeri 6 Yogyakarta	155.000.000,00	142.862.482,00	12.137.518,00
6	SMA Negeri 8 Yogyakarta	60.000.000,00	60.000.000,00	-
7	SMA Negeri 2 Banguntapan	155.000.000,00	154.986.125,00	13.875,00
8	SMA Negeri 1 Bantul	60.000.000,00	60.000.000,00	-
9	SMA Negeri 1 Imogiri	155.000.000,00	154.172.046,00	827.954,00
10	SMA Negeri 1 Kasihan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
11	SMA Negeri 1 Pleret	155.000.000,00	134.087.000,00	20.913.000,00
12	SMA Negeri 1 Pundong	60.000.000,00	60.000.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	PENERIMAAN BOS	REALISASI BELANJA BOS	SISA BOS
13	SMA Negeri 1 Sanden	60.000.000,00	60.000.000,00	-
14	SMA Negeri 1 Karangmojo	95.637.000,00	89.999.195,00	5.637.805,00
15	SMA Negeri 1 Patuk	90.000.000,00	89.998.081,00	1.919,00
16	SMA Negeri 2 Playen	92.938.820,00	88.274.167,00	4.664.653,00
17	SMA Negeri 1 Semin	155.000.000,00	154.990.821,00	9.179,00
18	SMA Negeri 1 Wonosari	90.269.100,00	80.504.362,00	9.764.738,00
19	SMA Negeri 2 Wonosari	99.768.249,00	89.999.304,00	9.768.945,00
20	SMK Negeri 2 Yogyakarta	60.060.950,00	59.930.010,00	130.940,00
21	SMK Negeri 1 Kasihan	60.586.893,00	59.931.120,00	655.773,00
22	SMK Negeri 2 Kasihan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
23	SLB N 1 Bantul	88.099.001,00	59.999.000,00	28.100.001,00
24	SLB N 1 Gunungkidul	60.000.000,00	56.036.841,00	3.963.159,00
25	SLB N 2 Gunungkidul	132.500.000,00	132.500.000,00	-
26	SLB N 1 Kulon Progo	60.000.000,00	60.000.000,00	-
	Jumlah	**2.399.860.013,00**	**2.303.270.553,00**	**96.589.460,00**

F. Kas Lainnya **Rp19.662.925.839,94** **Rp19.680.958.239,94**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.662.925.839,94 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.662.925.839,94 terdiri dari Uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp764.853.540,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.433.032.828,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.465.039.471,18, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 97
Rincian Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2022

BPD DIY CABANG UTAMA

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
1	001221032367	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV AJI PRATAMA	-	1.146,00	1.146,00
2	001221033500	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAKRAWALA G S	-	1.146,00	1.146,00
3	001221032666	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PANCA MANUNGGAL M	-	1.146,00	1.146,00
4	001221031884	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RIMBA SARANA	-	1.146,00	1.146,00
5	001221033839	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUMPU HARAPAN	-	1.146,00	1.146,00
6	001221033804	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARTOYO	-	1.146,00	1.146,00
7	001221032468	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	-	1.146,00	1.146,00
8	001221031886	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	-	1.146,00	1.146,00
9	001221033835	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MAJU MANUNGGAL A	-	1.146,00	1.146,00
10	001221033836	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RUDHI HARSONO	-	1.146,00	1.146,00
11	001221033280	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SISWO HADI SUTRISNO	-	1.146,00	1.146,00
12	001221032467	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANI	-	1.146,00	1.146,00
13	001221033574	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSILA HARI	-	1.146,00	1.146,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
14	001221033350	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ CV PUSANG KEMBAR	-	1.146,00	1.146,00
15	001221033239	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GUNUNG MULIA	-	1.604,00	1.604,00
16	001221033354	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERNAWAN FAUZY	-	1.604,00	1.604,00
17	001221031895	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	-	1.604,00	1.604,00
18	001221031896	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	-	1.604,00	1.604,00
19	001221032877	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARMAN	-	2.292,00	2.292,00
20	001221031745	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P	-	721.165,00	721.165,00
21	001221031849	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	-	570.462,00	570.462,00
22	001221031885	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	-	408.555,00	408.555,00
23	001221031889	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	-	379.379,00	379.379,00
24	001221031890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO MANDIRI S	-	902.656,00	902.656,00
25	001221031963	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA	-	611.190,00	611.190,00
26	001221032191	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA	-	656.059,00	656.059,00
27	001221032357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA	-	711.865,00	711.865,00
28	001221032358	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI	-	259.796,00	259.796,00
29	001221032669	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C	-	45.274,00	45.274,00
30	001221032788	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	-	855.577,00	855.577,00
31	001221032837	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	-	810.402,00	810.402,00
32	001221032886	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	-	835.798,00	835.798,00
33	001221032926	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	-	1.091.659,00	1.091.659,00
34	001221033010	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	-	16.416,00	16.416,00
35	001221033274	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	-	1.071.634,00	1.071.634,00
36	001221033324	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	-	891.681,00	891.681,00
37	001221033328	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	-	19.788,00	19.788,00
38	001221033342	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	-	1.240.969,00	1.240.969,00
39	001221033345	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	-	975.868,00	975.868,00
40	001221033357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO	-	315.473,00	315.473,00
41	001221033384	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA	-	111.005,00	111.005,00
42	001221033559	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	-	419.835,00	419.835,00
43	001221033590	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA	-	199.693,00	199.693,00
44	001221033812	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	-	815.479,00	815.479,00
45	001221033814	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	-	883.071,00	883.071,00
46	001221033840	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	-	929.431,00	929.431,00
47	001221033857	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI	-	311.082,00	311.082,00
48	001221033947	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	-	339.741,00	339.741,00
49	001221033971	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	-	840.316,00	840.316,00
50	001221033982	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	-	878.342,00	878.342,00
51	001221033987	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	-	841.479,00	841.479,00
52	001221034091	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA	-	860.227,00	860.227,00
53	001221034092	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI	-	860.227,00	860.227,00
54	001221034140	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA	-	860.200,00	860.200,00
55	001221034141	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO	-	860.200,00	860.200,00
56	001221034205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	-	994.547,00	994.547,00
57	001221034212	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI	-	865.172,00	865.172,00
58	001221034259	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	-	1.533.667,00	1.533.667,00
59	001221034260	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	-	1.326.158,00	1.326.158,00
60	001221034261	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	-	1.534.570,00	1.534.570,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
61	001221034282	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO	-	841.895,00	841.895,00
62	001221034284	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	-	841.895,00	841.895,00
63	001221034288	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA	-	841.877,00	841.877,00
64	001221034339	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO	-	835.237,00	835.237,00
65	001221034359	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	-	825.717,00	825.717,00
66	001221034365	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO	-	823.592,00	823.592,00
67	001221034380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA	-	828.595,00	828.595,00
68	001221034392	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	-	1.412.860,00	1.412.860,00
69	001221034400	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	-	828.381,00	828.381,00
70	001221034625	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M	-	792.305,00	792.305,00
71	001221034632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	-	792.284,00	792.284,00
72	001221034640	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	-	791.212,00	791.212,00
73	001221034740	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	-	1.271.181,00	1.271.181,00
74	001221034751	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	-	770.706,00	770.706,00
75	001221034758	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	-	770.688,00	770.688,00
76	001221034759	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	-	770.688,00	770.688,00
77	001221034789	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	-	773.636,00	773.636,00
78	001221034804	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	-	1.358.056,00	1.358.056,00
79	001221034927	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	-	757.283,00	757.283,00
80	001221035237	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	-	925.962,00	925.962,00
81	001221035238	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA	-	741.030,00	741.030,00
82	001221035251	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG	-	741.021,00	741.021,00
83	001221035261	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K	-	729.547,00	729.547,00
84	001221035304	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI	-	722.094,00	722.094,00
85	001221035313	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO	-	722.079,00	722.079,00
86	001221035314	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI	-	722.079,00	722.079,00
87	001221035316	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	-	1.320.822,00	1.320.822,00
88	001221035340	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO	-	719.929,00	719.929,00
89	001221035392	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH	-	724.887,00	724.887,00
90	001221035438	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO	-	703.792,00	703.792,00
91	001221035448	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO	-	708.784,00	708.784,00
92	001221035451	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	-	1.293.588,00	1.293.588,00
93	001221035443	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN	-	703.757,00	703.757,00
94	001221035480	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO	-	708.711,00	708.711,00
95	001221035481	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO	-	708.711,00	708.711,00
96	001221035514	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	-	964.724,00	964.724,00
97	001221035515	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P	-	693.018,00	693.018,00
98	001221035533	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN	-	690.909,00	690.909,00
99	001221035604	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI	-	692.649,00	692.649,00
100	001221035673	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI	-	671.518,00	671.518,00
101	001221035685	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W	-	676.566,00	676.566,00
102	001221035740	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	-	824.935,00	824.935,00
103	001221035742	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S	-	664.967,00	664.967,00
104	001221035755	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA	-	658.641,00	658.641,00
105	001221035816	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA	-	644.621,00	644.621,00
106	001221035819	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO	-	642.526,00	642.526,00
107	001221035877	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	-	1.178.633,00	1.178.633,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
108	001221035888	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S	-	644.215,00	644.215,00
109	001221036069	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	-	1.122.838,00	1.122.838,00
110	001221036135	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA	-	599.012,00	599.012,00
111	001221036248	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO	-	577.866,00	577.866,00
112	001221036444	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO	-	764.088,00	764.088,00
113	001221036507	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS AGRAPANA S	-	554.139,00	554.139,00
114	001221036508	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GEO PRIMA PERSADA	-	554.139,00	554.139,00
115	001221036648	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR A	-	555.264,00	555.264,00
116	001221036733	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	-	540.827,00	540.827,00
117	001221036735	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	-	129.396,00	129.396,00
118	001221036756	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GRAHA SEJAHTERA	-	540.774,00	540.774,00
119	001221036260	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR	-	584.374,00	584.374,00
120	001221036899	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRAWALA SEMESTA	-	505.324,00	505.324,00
121	001221036942	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	-	511.774,00	511.774,00
122	001221036951	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WALUYO LESTARI	-	492.925,00	492.925,00
123	001221036952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GAWI MAJU KARSA	-	492.925,00	492.925,00
124	001221036974	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GERBANG MENOREH	-	490.792,00	490.792,00
125	001221036976	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SEDEKAH BUMI P M	-	490.792,00	490.792,00
126	001221036978	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ARSA KAYANA PROGO	-	490.782,00	490.782,00
127	001221036986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY MULYANTO	-	497.343,00	497.343,00
128	001221037310	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	-	794.810,00	794.810,00
129	001221037516	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	-	741.294,00	741.294,00
130	001221037594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA	-	410.343,00	410.343,00
131	001221037660	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA	-	389.414,00	389.414,00
132	001221037701	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DAENDELS INDONESIA	-	395.902,00	395.902,00
133	001221037891	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA MUDA	-	382.479,00	382.479,00
134	001221037920	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BANGUN JAYA	-	364.711,00	364.711,00
135	001221037932	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI PAJANG NUSANTARA	-	362.616,00	362.616,00
136	001221037962	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAUJANA PASIR SEJAHTERA	-	369.127,00	369.127,00
137	001221037982	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INSAN CITA MERDEKA	-	369.107,00	369.107,00
138	001221039564	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ANUGERAH BERKAH MATARAM	-	312.225,00	312.225,00
139	001221039575	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA	-	559.960,00	559.960,00
140	001221039580	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BOEMI BHAKTI PRATAMA	-	310.081,00	310.081,00
141	001221039593	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PONDASI KUAT	-	315.567,00	315.567,00
142	001221039594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKSES KETIBAN MULYO	-	315.567,00	315.567,00
143	001311009064	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. WALUYO LESTARI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
144	001311005975	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MULIA P	500.000,00	-	500.000,00
145	001311005801	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P	3.500.000,00	-	3.500.000,00
146	001311005880	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	3.132.000,00	-	3.132.000,00
147	1311005890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	500.000,00	-	500.000,00
148	001311005915	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RIMBA SARANA	500.000,00	-	500.000,00
149	001311005917	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	700.000,00	-	700.000,00
150	001311005918	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	500.000,00	-	500.000,00
151	001311005919	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	2.550.000,00	-	2.550.000,00
152	001311005920	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	500.000,00	-	500.000,00
153	001311005926	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	700.000,00	-	700.000,00
154	001311005927	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	700.000,00	-	700.000,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
155	001311005934	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HELIZA MANDIRI S	500.000,00	-	500.000,00
156	001311005943	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ DJIDUL	500.000,00	-	500.000,00
157	001311005949	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERI SUWARNO	500.000,00	-	500.000,00
158	001311005952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARDI	550.000,00	-	550.000,00
159	001311005953	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WIDAYAT	500.000,00	-	500.000,00
160	001311005956	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MITRA GRAHA D	500.000,00	-	500.000,00
161	001311005957	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMARYANTA	500.000,00	-	500.000,00
162	001311005961	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TIRTA REJA	594.300,00	-	594.300,00
163	001311005962	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEJAHTERA INDRA P	630.000,00	-	630.000,00
164	001311005965	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UMAR SYAMSUDIN H	550.000,00	-	550.000,00
165	001311005985	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA	500.000,00	-	500.000,00
166	001311005986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUKIT BATU INDAH	500.000,00	-	500.000,00
167	001311005988	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT FIRST LIME I	500.000,00	-	500.000,00
168	001311005998	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	500.000,00	-	500.000,00
169	001311005999	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	500.000,00	-	500.000,00
170	001311006001	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MERPATI JAYA M	500.000,00	-	500.000,00
171	001311006003	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	500.000,00	-	500.000,00
172	001311006007	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UD GUNUNG GEDE	500.000,00	-	500.000,00
173	001311006009	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	500.000,00	-	500.000,00
174	001311006010	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	500.000,00	-	500.000,00
175	001311006012	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INTI CALCIUM I	500.000,00	-	500.000,00
176	001311006139	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA	3.500.000,00	-	3.500.000,00
177	001311006205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA	3.675.000,00	-	3.675.000,00
178	001311006206	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI	2.250.000,00	-	2.250.000,00
179	001311006213	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV AJI PRATAMA	500.000,00	-	500.000,00
180	001311006264	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANI	500.000,00	-	500.000,00
181	001311006265	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	500.000,00	-	500.000,00
182	001311006406	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	650.000,00	-	650.000,00
183	001311006408	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUGIARTO	500.000,00	-	500.000,00
184	001311006428	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PANCA MANUNGGAL M	500.000,00	-	500.000,00
185	001311006440	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C	1.600.000,00	-	1.600.000,00
186	001311006517	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	3.200.000,00	-	3.200.000,00
187	001311006566	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	3.500.000,00	-	3.500.000,00
188	001311006593	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	500.000,00	-	500.000,00
189	001311006594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	500.000,00	-	500.000,00
190	001311006632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARMAN	1.000.000,00	-	1.000.000,00
191	001311006642	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	1.400.000,00	-	1.400.000,00
192	001311006680	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	1.750.000,00	-	1.750.000,00
193	001311006700	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MITRA C	500.000,00	-	500.000,00
194	001311006709	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	650.000,00	-	650.000,00
195	001311006710	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	700.000,00	-	700.000,00
196	001311006827	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K	500.000,00	-	500.000,00
197	001311006858	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GUNUNG MULIA	700.000,00	-	700.000,00
198	001311006859	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K	500.000,00	-	500.000,00
199	001311006862	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMANTO	500.000,00	-	500.000,00
200	001311006863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WALIDI	500.000,00	-	500.000,00
201	001311006899	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUPRAPTO	500.000,00	-	500.000,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
202	001311006904	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	500.000,00	-	500.000,00
203	001311006915	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SISWO HADI SUTRISNO	500.000,00	-	500.000,00
204	001311006942	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO	500.000,00	-	500.000,00
205	001311006964	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	500.000,00	-	500.000,00
206	001311006969	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	700.000,00	-	700.000,00
207	001311006985	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	3.250.000,00	-	3.250.000,00
208	001311006986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	3.500.000,00	-	3.500.000,00
209	001311006994	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	1.500.000,00	-	1.500.000,00
210	001311006995	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	3.500.000,00	-	3.500.000,00
211	001311007006	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ CV PUSANG KEMBAR	500.000,00	-	500.000,00
212	001311007007	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	700.000,00	-	700.000,00
214	001311007010	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERNAWAN FAUZY	700.000,00	-	700.000,00
215	001311007014	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO	2.500.000,00	-	2.500.000,00
216	001311007029	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NGADIMIN	500.000,00	-	500.000,00
217	001311007047	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA	1.750.000,00	-	1.750.000,00
218	001311007056	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KELOMPOK SIDO KOPEN	650.000,00	-	650.000,00
219	001311007071	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TIRTA MULYA S	500.000,00	-	500.000,00
220	001311007072	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MITRA BANGKIT S	500.000,00	-	500.000,00
221	001311007073	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG RATMAKA Y	500.000,00	-	500.000,00
222	001311007094	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAKRAWALA G S	500.000,00	-	500.000,00
223	001311007104	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	2.930.000,00	-	2.930.000,00
224	001311007114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSILA HARI	500.000,00	-	500.000,00
225	001311007126	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA	2.100.000,00	-	2.100.000,00
226	001311007131	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA	650.000,00	-	650.000,00
227	001311007149	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDES LEO PURNAMA	600.000,00	-	600.000,00
228	001311007156	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	3.350.000,00	-	3.350.000,00
229	001311007210	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	650.000,00	-	650.000,00
230	001311007211	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	650.000,00	-	650.000,00
231	001311007229	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARTOYO	500.000,00	-	500.000,00
232	001311007234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	500.000,00	-	500.000,00
233	001311007240	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MAJU MANUNGGAL A	500.000,00	-	500.000,00
234	001311007241	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RUDHI HARSONO	500.000,00	-	500.000,00
235	001311007244	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUMPU HARAPAN	500.000,00	-	500.000,00
236	001311007245	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	500.000,00	-	500.000,00
237	001311007262	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI	2.600.000,00	-	2.600.000,00
238	001311007337	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	2.350.000,00	-	2.350.000,00
239	001311007364	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	924.000,00	-	924.000,00
240	001311007372	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	500.000,00	-	500.000,00
241	001311007379	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	500.000,00	-	500.000,00
242	001311007412	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	4.500.000,00	-	4.500.000,00
243	001311007454	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
244	001311007456	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
245	001311007461	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
246	001311007463	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
247	001311007475	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	5.000.000,00	-	5.000.000,00
248	001311007481	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
249	001311007521	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	5.000.000,00	-	5.000.000,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
250	001311007522	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	5.000.000,00	-	5.000.000,00
251	001311007523	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
252	001311007524	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
253	001311007525	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
254	001311007539	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
255	001311007540	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
256	001311007544	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
257	001311007553	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	5.000.000,00	-	5.000.000,00
258	001311007564	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	4.500.000,00	-	4.500.000,00
259	001311007571	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	4.076.000,00	-	4.076.000,00
260	001311007581	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
261	001311007606	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	5.000.000,00	-	5.000.000,00
262	001311007609	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
263	001311007613	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
264	001311007630	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
265	001311007647	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000,00	-	5.000.000,00
266	001311007661	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
267	001311007719	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
268	001311007743	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
269	001311007748	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M	5.000.000,00	-	5.000.000,00
270	001311007757	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
271	001311007772	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
272	001311007830	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
273	001311007833	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
274	001311007841	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	5.000.000,00	-	5.000.000,00
275	001311007844	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	5.000.000,00	-	5.000.000,00
276	001311007845	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
277	001311007863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
278	001311007875	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
279	001311007952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
280	001311008076	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
281	001311008077	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
282	001311008078	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
283	001311008080	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
284	001311008084	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K	5.000.000,00	-	5.000.000,00
285	001311008103	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
286	001311008112	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
287	001311008113	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
288	001311008114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
289	001311008115	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
290	001311008125	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
291	001311008155	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH	5.000.000,00	-	5.000.000,00
292	001311008191	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
293	001311008199	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN	5.000.000,00	-	5.000.000,00
294	001311008208	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
295	001311008218	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
296	001311008219	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000,00	-	5.000.000,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
297	001311008228	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
298	001311008233	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000,00	-	5.000.000,00
299	001311008234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
300	001311008227	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
301	001311008246	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
302	001311008247	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P	5.000.000,00	-	5.000.000,00
303	001311008254	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN	5.000.000,00	-	5.000.000,00
304	001311008312	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
305	001311008355	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
306	001311008363	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W	5.000.000,00	-	5.000.000,00
307	001311008380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
308	001311008381	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
309	001311008392	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
310	001311008439	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
311	001311008436	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
312	001311008492	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
313	001311008493	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
314	001311008494	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
315	001311008597	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00
316	001311008598	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00
317	001311008667	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
318	001311008501	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
319	001311008671	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
320	001311008715	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
321	001311008726	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
322	001311008727	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR	5.000.000,00	-	5.000.000,00
323	001311008763	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
324	001311008808	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. TUNAS AGRAPANA SENTOSA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
325	001311008809	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GEO PRIMA PERSADA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
326	001311008871	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR ABADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
327	001311008910	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. EMPAT JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
328	001311008913	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. DEWATA SARI PRIMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
329	001311008925	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GRAHA SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
330	001311009018	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. CAKRAWALA SEMESTA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
331	001311009051	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. ADINDA PUTRA PERKASA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
332	001311009065	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GAWI MAJU KARSA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
333	001311009083	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GERBANG MENOREH	5.000.000,00	-	5.000.000,00
334	001311009086	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. SEDEKAH BUMI PUTRA MANDIRI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
335	001311009089	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT ARSA KAYANA PROGO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
336	001311009094	DINAS PUP ESDM DIY QQ EDY MULYANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
337	001311009250	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
338	001311009382	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
339	001311009404	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
340	001311009443	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
341	001311009472	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
342	001311009495	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
343	001221037701	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DAENDELS INDONESIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
344	001311009572	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	5.000.000,00	-	5.000.000,00
345	001311009582	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA MUDA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
346	001311009600	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BANGUN JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
347	001311009611	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI PAJANG NUSANTARA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
348	001311009632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAUJANA PASIR SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
349	001311009640	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INSAN CITA MERDEKA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
350	001311009742	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
351	001311009792	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ANUGERAH BERKAH MATARAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
352	001311009799	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
353	001311009809	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BOEMI BHAKTI PRATAMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
354	001311009812	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
355	001311009824	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PONDASI KUAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
356	001311009826	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKSES KETIBAN MULYO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		TOTAL JAMINAN KESUNGGUHAN	**678.811.300,00**	**86.042.240,00**	**764.853.540,00**

Tabel 5. 98
Rincian Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2022

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
BANK PASAR					
1	4900/XI/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	43.700.000,00	-	43.700.000,00
2	5227/V/D/13/118	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	18.690.000,00	-	18.690.000,00
3	6375/IX/D/14/29	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	51.500.000,00	-	51.500.000,00
4	5754/III/D/14/29	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	150.700.000,00	-	150.700.000,00
5	6195/VIII/D/14/133	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	51.200.000,00	-	51.200.000,00
6	4822/X/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	44.670.000,00	-	44.670.000,00
7	4912/XII/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	50.040.000,00	-	50.040.000,00
8	9832/VII/D/17/135	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	92.000.000,00	-	92.000.000,00
9	650601030579	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	-	28.190.265,00	28.190.265,00
10	650601031380	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	-	27.307.798,00	27.307.798,00
11	650601035425	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	-	27.877.026,00	27.877.026,00
12	650601032864	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	-	169.480.135,00	169.480.135,00
13	650601035097	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	-	29.910.756,00	29.910.756,00
14	650601030367	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	-	31.079.802,00	31.079.802,00
15	650601030602	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	-	41.316.115,00	41.316.115,00
16	650601029861	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	-	31.726.296,00	31.726.296,00
BNI TRIKORA					
1	0710409108	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Desti Pujilestari	92.245.866,00	-	92.245.866,00
2	0711289528	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Bangun Adhi Prasodjo	44.162.694,00	-	44.162.694,00
3	0717680389	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Ghozin Asrori	45.008.703,00	-	45.008.703,00
4	0720074133	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ R KHOIRUDIN	86.914.164,00	-	86.914.164,00
5	0723918871	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TIRTA REJA	47.233.293,00	-	47.233.293,00
6	0725673406	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	96.650.149,00	-	96.650.149,00
7	0733051871	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUKARTIJO	60.346.927,00	-	60.346.927,00
8	0739192045	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA	79.563.879,00	-	79.563.879,00
9	0751120551	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ UD JATI PERKASA	46.699.152,00	-	46.699.152,00
10	0765207450	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA	65.784.701,00	-	65.784.701,00
11	0768376572	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV RIMBA SARANA	15.733.557,00	-	15.733.557,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
12	0775963061	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV GIRI KENCANA	77.988.724,00	-	77.988.724,00
13	0779126960	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT AMERTA GIRI LESTARI	44.622.483,00	-	44.622.483,00
14	0795633595	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RATMI SETYO HADI	192.894.361,00	-	192.894.361,00
15	0798269848	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SENO WATU AJI	186.566.255,00	-	186.566.255,00
16	0799697895	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	51.583.010,00	-	51.583.010,00
17	0802607128	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA	69.637.069,00	-	69.637.069,00
18	0803709162	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MIFTAH FARID	83.190.150,00	-	83.190.150,00
19	0805785619	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BATU MULYO BERJAYA	51.392.018,00	-	51.392.018,00
20	0816170512	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI GENDOL PERKASA	22.450.907,00	-	22.450.907,00
21	0817378837	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA	72.700.869,00	-	72.700.869,00
22	0822179696	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SARANA JAYA MAKMUR	44.049.493,00	-	44.049.493,00
23	0823310417	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN	51.502.311,00	-	51.502.311,00
24	0827790894	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA	56.396.697,00	-	56.396.697,00
25	0828032272	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ IRFAN NUGROHO	149.840.338,00	-	149.840.338,00
26	0835692649	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG	34.811.676,00	-	34.811.676,00
27	0828783138	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA	25.763.008,00	-	25.763.008,00
28	0833766455	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ICHSAN HADI YULIATNO	114.954.624,00	-	114.954.624,00
29	0837781786	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SURYA WATU KENCANA	118.000.388,00	-	118.000.388,00
30	0839212344	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUSENO	250.946.011,00	-	250.946.011,00
31	0841832227	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAYA	335.375.414,00	-	335.375.414,00
32	0858482385	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SYACHIRUL AFIF	75.197.602,00	-	75.197.602,00
33	0860712779	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ERNAWAN FAUZI	47.493.306,00	-	47.493.306,00
34	0860829051	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA	34.799.241,00	-	34.799.241,00
35	0860876147	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA	79.994.508,00	-	79.994.508,00
36	0864276294	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV WATULANWEDHI	25.388.124,00	-	25.388.124,00
37	0867920545	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI	57.654.778,00	-	57.654.778,00
38	0870553351	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ JUMARI	43.241.087,00	-	43.241.087,00
39	0880135309	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TRI ASIH DESTARI	57.545.590,00	-	57.545.590,00
40	0880138593	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ROSLAN	103.625.754,00	-	103.625.754,00
41	0896340548	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	70.182.924,00	-	70.182.924,00
42	0897831863	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ KRT JAYANINGRAT	56.342.501,00	-	56.342.501,00
43	0898052558	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	27.789.813,00	-	27.789.813,00
44	0899114811	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	27.789.813,00	-	27.789.813,00
45	0899556699	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO	75.522.932,00	-	75.522.932,00
46	0912125583	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT MALEKO	134.850.524,00	-	134.850.524,00
47	0916368634	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ HERU ISWADI	60.804.762,00	-	60.804.762,00
48	0919126318	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TUMPU HARAPAN	39.960.499,00	-	39.960.499,00
49	0945838346	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT CITRA MATARAM KONSTRUKSI	68.998.595,00	-	68.998.595,00
50	0948180144	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SUGIH ALAMANUGROHO	98.661.549,00	-	98.661.549,00
51	0949365770	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI	63.624.871,00	-	63.624.871,00
52	0953620883	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ KARYONO	51.824.964,00	-	51.824.964,00
53	0970258820	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA	79.694.393,00	-	79.694.393,00
54	0975971360	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PRAMUDYA AFGANI	53.577.101,00	-	53.577.101,00
55	0976965968	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI	76.676.216,00	-	76.676.216,00
56	0986213177	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DAVID OKTA NUGRAHA	76.973.227,00	-	76.973.227,00
57	1044124213	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MUJIYONO	73.023.147,00	-	73.023.147,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
58	1055756851	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO	21.565.306,00	-	21.565.306,00
59	1101274754	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV CAHAYA	40.812.152,00	-	40.812.152,00
60	1101438534	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA	42.292.389,00	-	42.292.389,00
61	1107392466	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TITO YUNANTO	115.563.965,00	-	115.563.965,00
62	1114206371	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TRIYANDI MULKAN ,SH-MM	55.088.848,00	-	55.088.848,00
63	1136094556	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI OPAK SEJAHTERA	44.766.884,00	-	44.766.884,00
64	1136102503	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BAROKAH SUMBER REZEQI	53.777.774,00	-	53.777.774,00
65	1137096278	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT DEWATA SARI PRIMA	105.960.885,00	-	105.960.885,00
66	1144060446	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KENCANA JAYA	37.394.213,00	-	37.394.213,00
67	1144288281	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT MULTINTES	43.204.951,00	-	43.204.951,00
68	1146336028	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA	32.062.066,00	-	32.062.066,00
69	1146361431	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUJANMO	44.781.776,00	-	44.781.776,00
70	1146369225	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV WATULANWEDHI	21.276.594,00	-	21.276.594,00
71	1146473327	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA	40.471.790,00	-	40.471.790,00
72	1562158595	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KENCANA JAYA	5.200.000,00	-	5.200.000,00
73	1563259615	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SARANA JAYA MAKMUR	10.900.000,00	-	10.900.000,00
74	1567231301	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT NYONYA TRI ASIH	6.600.000,00	-	6.600.000,00
BRI CIK DITIRO					
1	0029-01-015047-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Dedek Handoko	42.329.582,00	-	42.329.582,00
2	0029-01-015202-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Umar Syamsudin	36.889.940,00	-	36.889.940,00
3	0029-01-015305-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)	27.383.134,00	-	27.383.134,00
4	0029-01-015333-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Petrus Joko Legowo	60.865.271,00	-	60.865.271,00
5	0029-01-015443-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Parno	68.086.250,00	-	68.086.250,00
6	0029-01-015445-40-5	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Anindya Mitra Internasional	66.952.454,00	-	66.952.454,00
7	0029-01-015537-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Kali Gendol Perkasa	53.949.358,00	-	53.949.358,00
8	0029-01-015556-40-0	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Harmak Indonesia	303.805.432,00	-	303.805.432,00
9	0029-01-015617-40-0	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Maju Manunggal Abadi	136.029.024,00	-	136.029.024,00
10	0029-01-015653-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	24.029.856,00	-	24.029.856,00
11	0029-01-015708-40-5	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Aris Yulianto	56.763.032,00	-	56.763.032,00
12	0029-01-015720-40-7	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Purwanto	90.629.776,00	-	90.629.776,00
13	0029-01-015742-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Selo Mandiri Sejahtera	49.838.752,00	-	49.838.752,00
14	0029-01-015747-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Dewata Bumi Nusantara	131.621.866,00	-	131.621.866,00
15	0029-01-015757-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Muncul Karya	66.365.684,76	-	66.365.684,76
16	0029-01-015774-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Koperasi Petruk	174.039.564,00	-	174.039.564,00
17	0029-01-015792-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Muhammad Affan	65.320.640,00	-	65.320.640,00
18	0029-01-015802-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Sumanto	47.023.217,00	-	47.023.217,00
19	0029-01-015805-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Tirta Mulya Sarana	100.245.467,00	-	100.245.467,00
20	0029-01-015813-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sahabat Sejahtera Group	118.780.862,00	-	118.780.862,00
21	0029-01-015815-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sari Mulia	127.493.393,00	-	127.493.393,00
22	0029-01-015816-40-2	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sarana Jaya Makmur	123.365.786,00	-	123.365.786,00
23	0029-01-015833-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa	184.269.980,00	-	184.269.980,00
24	0029-01-015837-40-8	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Widya Segara Karya	166.621.395,00	-	166.621.395,00
25	0029-01-015843-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Caldomill Indonesia	90.292.461,00	-	90.292.461,00
26	0029-01-015861-40-7	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Central Stone Perkasa	135.549.136,00	-	135.549.136,00
27	0029-01-015926-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Bumi Mataram	87.481.396,00	-	87.481.396,00
28	0029-01-015928-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Temon Sarana Perkasa	92.000.342,00	-	92.000.342,00
29	0029-01-015977-40-2	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Lestari Karya	122.632.191,00	-	122.632.191,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
30	0029-01-015990-40-0	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Nuri	42.580.677,00	-	42.580.677,00
31	0029-01-015993-40-8	Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Sukamto	38.592.670,00	-	38.592.670,00
32	0029-01-016036-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Citra Mataram Konstruksi	92.641.766,00	-	92.641.766,00
33	0029-01-016130-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Wahyono	49.436.350,00	-	49.436.350,00
34	0029-01-019030-40-6	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SARI MULIA	29.000.000,00	-	29.000.000,00
35	0029-01-014219-40-3	Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Reklamasi	20.362.281,00	-	20.362.281,00
36	0029-01-014222-40-6	Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Jaminan Reklamasi	45.585.334,00	-	45.585.334,00
37	0029-01-014232-40-1	Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Jaminan Reklamasi	44.141.961,00	-	44.141.961,00
38	0029-01-014234-40-3	Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Wilis Indonesia Jaminan Reklamasi	131.682.202,00	-	131.682.202,00
39	0029-01-014242-40-6	Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Hutama Jaminan Reklamasi	154.104.526,00	-	154.104.526,00
40	0029-01-014357-40-5	Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Jaminan Reklamasi	12.411.517,00	-	12.411.517,00
41	0029-01-014411-40-3	Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Jaminan Reklamasi	226.138.576,00	-	226.138.576,00
42	0029-01-014607-40-2	Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Reklamasi	25.562.028,00	-	25.562.028,00
43	0029-01-014649-40-4	Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Jaminan Reklamasi	319.244.976,00	-	319.244.976,00
44	0029-01-014824-40-2	Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Reklamasi	157.979.787,00	-	157.979.787,00
45	0029-01-014944-40-6	Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Reklamasi	83.102.035,00	-	83.102.035,00
46	0029-01-014949-40-6	Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Reklamasi	35.528.465,00	-	35.528.465,00
47	0029-01-014958-40-5	Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Reklamasi	30.368.923,00	-	30.368.923,00
48	0029-01-015043-40-7	Dinas PUP ESDM QQ Nurdiyanto Jaminan Reklamasi	56.559.015,00	-	56.559.015,00
		TOTAL JAMINAN REKLAMASI	**10.046.144.635,76**	**386.888.193,00**	**10.433.032.828,76**

Tabel 5. 99
Rincian Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2022

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
BANK PASAR					
1	13591/III/D/20/135	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT HARMAK INDONESIA	55.400.000,00	-	55.400.000,00
2	9834/VII/D/17/135	DINAS PUP ESDM JAMPASCATAMBANG QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	7.326.000,00	-	7.326.000,00
3	11543/X/D/18/135	DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV BEDJOE OETOMO	66.850.000,00	-	66.850.000,00
4	11544/X/D/18/135	DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV HANDIKA KARYA	358.929.675,00	-	358.929.675,00
BPD WATES					
1	003.211.013076	Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan	-	11.940.809,00	11.940.809,00
2	003.311.001635	Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan	40.100.000,00	-	40.100.000,00
BNI TRIKORA					
1	0710408820	Dinas PUP ESDM Jampas qq Desti Pujilestari	95.128.552,00	-	95.128.552,00
2	0711295270	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT. Bangun Adhi Prasodjo	68.838.472,00	-	68.838.472,00
3	0717678733	Dinas PUP ESDM Jampas qq Ghozin asrori	60.779.021,00	-	60.779.021,00
4	0720073468	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ R KHOIRUDIN	77.704.710,00	-	77.704.710,00
5	0723921135	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TIRTA REJA	56.771.898,00	-	56.771.898,00
6	0725640437	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	46.543.758,00	-	46.543.758,00
7	0733073827	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUKARTIJO	60.002.739,00	-	60.002.739,00
8	0739194814	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV AJI PRATAMA	35.737.762,00	-	35.737.762,00
9	0751122219	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ UD JATI PERKASA	56.129.881,00	-	56.129.881,00
10	0765208307	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA	37.429.218,00	-	37.429.218,00
11	0768378955	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV RIMBA SARANA	63.896.419,00	-	63.896.419,00
12	0775963538	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV GIRI KENCANA	63.726.632,00	-	63.726.632,00
13	0779127294	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AMERTA GIRI LESTARI	175.015.895,00	-	175.015.895,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
14	0795634022	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RATMI SETYO HADI	57.736.313,00	-	57.736.313,00
15	0798267909	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SENO WATU AJI	186.566.255,00	-	186.566.255,00
16	0799698458	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	53.937.883,00	-	53.937.883,00
17	0802606645	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA	49.788.815,00	-	49.788.815,00
18	0803710098	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MIFTAH FARID	40.531.396,00	-	40.531.396,00
19	0805786395	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BATU MULYO BERJAYA	65.387.680,00	-	65.387.680,00
20	0816171469	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI GENDOL PERKASA	170.318.644,00	-	170.318.644,00
21	0817379669	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASMARA SENA	61.614.679,00	-	61.614.679,00
22	0822183080	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SARANA JAYA MAKMUR	45.217.470,00	-	45.217.470,00
23	0823309332	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BINZAMIN	35.929.253,00	-	35.929.253,00
24	0827790293	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA	34.371.940,00	-	34.371.940,00
25	0828031675	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ IRFAN NUGROHO	104.784.420,00	-	104.784.420,00
26	0835691816	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG	34.146.479,00	-	34.146.479,00
27	0828782442	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA	144.000.498,00	-	144.000.498,00
28	0833766068	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ICHSAN HADI YULIATNO	59.188.302,00	-	59.188.302,00
29	0838015732	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SURYA WATU KENCANA	124.580.747,00	-	124.580.747,00
30	0839213585	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUSENO	124.246.148,00	-	124.246.148,00
31	0841833048	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAYA	24.501.205,00	-	24.501.205,00
32	0858482793	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SYACHIRUL AFIF	73.114.869,00	-	73.114.869,00
33	0860713397	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ERNAWAN FAUZI	34.799.241,00	-	34.799.241,00
34	0860830055	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA	86.888.699,00	-	86.888.699,00
35	0860876760	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA	29.984.250,00	-	29.984.250,00
36	0864277695	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI	81.854.841,00	-	81.854.841,00
37	0867922859	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI	64.097.269,00	-	64.097.269,00
38	0870554162	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ JUMARI	51.212.293,00	-	51.212.293,00
39	0880136368	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRI ASIH DESTARI	74.798.348,00	-	74.798.348,00
40	0880139392	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ROSLAN	38.218.126,00	-	38.218.126,00
41	0896340059	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	61.355.573,00	-	61.355.573,00
42	0897832302	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KRT JAYANINGRAT	58.958.015,00	-	58.958.015,00
43	0898048927	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	81.298.855,00	-	81.298.855,00
44	0899115463	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	76.612.728,00	-	76.612.728,00
45	0899557296	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASDIE FITRI NUGROHO	39.232.684,00	-	39.232.684,00
46	0912126111	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT MALEKO	73.565.669,00	-	73.565.669,00
47	0916377069	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ HERU ISWADI	46.980.584,00	-	46.980.584,00
48	0919130324	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TUMPU HARAPAN	86.617.094,00	-	86.617.094,00
49	0945839940	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT CITRA MATARAM KONSTRUKSI	68.031.324,00	-	68.031.324,00
50	0948181477	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SUGIH ALAMANUGROHO	109.627.357,00	-	109.627.357,00
51	0949364663	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI	66.311.736,00	-	66.311.736,00
52	0953621231	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KARYONO	49.893.601,00	-	49.893.601,00
53	0970259255	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV EMPAT LIMA MUDA	22.494.377,00	-	22.494.377,00
54	0975972513	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PRAMUDYA AFGANI	47.695.379,00	-	47.695.379,00
55	0976977724	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI	61.276.805,00	-	61.276.805,00
56	0986213767	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DAVID OKTA NUGRAHA	91.919.488,00	-	91.919.488,00
57	1044125217	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MUJIYONO	40.781.928,00	-	40.781.928,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
58	1055758928	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG SUPROBO	37.685.915,00	-	37.685.915,00
59	1101269063	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV CAHAYA	32.670.864,00	-	32.670.864,00
60	1101433262	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV ADIA BIMALA	14.802.332,00	-	14.802.332,00
61	1107395047	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TITO YUNANTO	82.787.356,00	-	82.787.356,00
62	1114215456	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRIYANDI MULKAN ,SH.MM	52.868.379,00	-	52.868.379,00
63	1136093234	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI OPAK SEJAHTERA	90.804.054,00	-	90.804.054,00
64	1136103903	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BAROKAH SUMBER REZEQI	113.755.228,00	-	113.755.228,00
65	1137097862	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT DEWATA SARI PRIMA	62.144.052,00	-	62.144.052,00
66	1144061621	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KENCANA JAYA	52.351.901,00	-	52.351.901,00
67	1144288860	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT MULTINTES	60.444.887,00	-	60.444.887,00
68	1146337328	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA	43.625.436,00	-	43.625.436,00
69	1146361941	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUJANMO	64.754.872,00	-	64.754.872,00
70	1146379823	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI	45.685.819,00	-	45.685.819,00
71	1146475653	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV EMPAT LIMA MUDA	32.587.677,00	-	32.587.677,00
72	1562159509	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KENCANA JAYA	7.300.000,00	-	7.300.000,00
73	1563261931	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SARANA JAYA MAKMUR	10.900.000,00	-	10.900.000,00
74	1567235770	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT NYONYA TRI ASIH	8.500.000,00	-	8.500.000,00
BRI CIK DITIRO					
1	0029-01-014220-40-4	Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Pasca Tambang	71.913.744,00	-	71.913.744,00
2	0029-01-014221-40-0	Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Pasca Tambang	66.484.667,00	-	66.484.667,00
3	0029-01-014243-40-2	Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Hutama Pasca Tambang	21.784.639,00	-	21.784.639,00
4	0029-01-014393-40-1	Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Pasca Tambang	6.205.762,00	-	6.205.762,00
5	0029-01-014443-40-0	Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Wilis Indonesia Pasca Tambang	45.057.241,00	-	45.057.241,00
6	0029-01-014413-40-5	Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Pasca Tambang	14.892.981,00	-	14.892.981,00
7	0029-01-014471-40-3	Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Pasca Tambang	9.667.479,00	-	9.667.479,00
8	0029-01-014608-40-8	Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Pasca Tambang	119.024.634,00	-	119.024.634,00
9	0029-01-014650-40-5	Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Pasca Tambang	27.592.905,00	-	27.592.905,00
10	0029-01-014823-40-6	Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Pasca Tambang	7.561.998,00	-	7.561.998,00
11	0029-01-014945-40-2	Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Pasca Tambang	81.579.580,00	-	81.579.580,00
12	0029-01-014950-40-7	Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Pasca Tambang	56.729.457,00	-	56.729.457,00
13	0029-01-014959-40-1	Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Pasca Tambang	28.538.030,00	-	28.538.030,00
14	0029-01-015044-40-3	Dinas PUP ESDM QQ Nurdiyanto Jaminan Pasca Tambang	61.820.617,00	-	61.820.617,00
15	0029-01-015046-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq Dedek Handoko	75.691.036,00	-	75.691.036,00
16	0029-01-015201-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq H Umar Syamsudin	104.630.451,00	-	104.630.451,00
17	0029-01-015306-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)	158.400.819,00	-	158.400.819,00
18	0029-01-015332-40-8	Dinas PUP ESDM Jampas qq Petrus Joko Legowo	40.417.597,00	-	40.417.597,00
19	0029-01-015442-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Parno	5.549.383,00	-	5.549.383,00
20	0029-01-015444-40-9	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Anindya Mitra Internasional	8.950.754,00	-	8.950.754,00
21	0029-01-015536-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Kali Gendol Perkasa	109.737.820,00	-	109.737.820,00
22	0029-01-015557-40-6	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Harmak Indonesia	119.407.249,00	-	119.407.249,00
23	0029-01-015618-40-6	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Maju Manunggal Abadi	123.335.860,00	-	123.335.860,00
24	0029-01-015654-40-2	Dinas PUP ESDM JamPas qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	24.988.296,00	-	24.988.296,00
25	0029-01-015600-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Pasir Alam Sejahtera	28.025.386,00	-	28.025.386,00
26	0029-01-015705-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Trikarya	42.993.052,00	-	42.993.052,00
27	0029-01-015707-40-9	Dinas PUP ESDM JamPas qq Aris Yulianto	48.534.407,00	-	48.534.407,00
28	0029-01-015721-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq Purwanto	46.746.011,00	-	46.746.011,00

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	JUMLAH
29	0029-01-015741-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Selo Mandiri Sejahtera	43.197.698,00	-	43.197.698,00
30	0029-01-015748-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Dewata Bumi Nusantara	89.398.403,00	-	89.398.403,00
31	0029-01-015758-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Muncul Karya	16.115.454,18	-	16.115.454,18
32	0029-01-015775-40-2	Dinas PUP ESDM JamPas qq Koperasi Petruk	155.553.067,00	-	155.553.067,00
33	0029-01-015793-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq Muhammad Affan	23.660.858,00	-	23.660.858,00
34	0029-01-015801-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Sumanto	65.689.659,00	-	65.689.659,00
35	0029-01-015804-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Tirta Mulya Sarana	53.638.877,00	-	53.638.877,00
36	0029-01-015812-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sahabat Sejahtera Group	76.107.763,00	-	76.107.763,00
37	0029-01-015814-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sari Mulia	78.968.559,00	-	78.968.559,00
38	0029-01-015817-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sarana Jaya Makmur	77.538.008,00	-	77.538.008,00
39	0029-01-015832-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa	14.333.088,00	-	14.333.088,00
40	0029-01-015838-40-4	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Widya Segara Karya	7.449.766,00	-	7.449.766,00
41	0029-01-015844-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Caldomill Indonesia	7.486.903,00	-	7.486.903,00
42	0029-01-015862-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Central Stone Perkasa	11.302.241,00	-	11.302.241,00
43	0029-01-015930-40-0	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Bumi Mataram	46.637.256,00	-	46.637.256,00
44	0029-01-015929-40-9	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Temon Sarana Perkasa	47.749.795,00	-	47.749.795,00
45	0029-01-015976-40-6	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Lestari Karya	228.936.676,00	-	228.936.676,00
46	0029-01-015991-40-6	Dinas PUP ESDM Jampas qq Nuri	52.388.858,00	-	52.388.858,00
47	0029-01-015992-40-2	Dinas PUP ESDM Jampas qq H Sukamto	46.045.548,00	-	46.045.548,00
48	0029-01-016035-40-7	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Citra Mataram Konstruksi	57.592.811,00	-	57.592.811,00
49	0029-01-016129-40-0	Dinas PUP ESDM Jampas qq Wahyono	52.696.887,00	-	52.696.887,00
50	0029-01-017316-40-8	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Widya Segara Karya	54.731.114,00	-	54.731.114,00
51	0029-01-017317-40-4	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Muncul Karya	44.486.232,00	-	44.486.232,00
52	0029-01-017352-40-4	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AGUNG BARA CEMERLANG	73.194.013,00	-	73.194.013,00
53	0029-01-017398-40-0	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARYA	64.388.609,00	-	64.388.609,00
54	0029-01-019031-40-2	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SARI MULIA	8.400.000,00	-	8.400.000,00
55	0029-01-019049-40-5	DINAS PUP ESDM QQ JAMPAS PT HARMAK INDONESIA	124.700.000,00	-	124.700.000,00
		TOTAL JAMINAN PASCA TAMBANG	**8.453.098.662,18**	**11.940.809,00**	**8.465.039.471,18**

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek Rp0,0 Rp0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3 Piutang Pajak Daerah Rp122.616.000,00 Rp129.631.200,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp122.616.000,00 merupakan Piutang Pajak Daerah pada BPKA terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp87.643.000,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp34.973.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 100
Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	UPTD	Saldo Awal 31/12/2021	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31/12/2022
1	**Piutang PKB**				
	KPPD di Kota Yogyakarta	30.936.500,00	-	1.504.200,00	29.432.300,00
	KPPD di Kab. Bantul	19.887.300,00	-	691.500,00	19.195.800,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	-	-	-	-
	KPPD di Kab. Kulon Progo	5.559.000,00	-		5.559.000,00

No	UPTD	Saldo Awal 31/12/2021	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31/12/2022
	KPPD di Kab. Sleman	33.595.400,00	-	139.500,00	33.455.900,00
	Jumlah	**89.978.200,00**	**-**	**2.335.200,00**	**87.643.000,00**
2	**Piutang BBNKB**				
	KPPD di Kota Yogyakarta	2.055.000,00	-		2.055.000,00
	KPPD di Kab. Bantul	3.507.000,00	-		3.507.000,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	-	-		0,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	-	-		0,00
	KPPD di Kab. Sleman	34.091.000,00	-	4.680.000,00	29.411.000,00
	Jumlah	**39.653.000,00**	**-**	**4.680.000,00**	**34.973.000,00**
	Jumlah Total	**129.631.200,00**	**-**	**7.015.200,00**	**122.616.000,00**

Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5. 101
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	PKB (Rp)	(BBNKB)	Jumlah
0 – 1 Tahun	Lancar	-	-	-
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	-	-	-
2 – 5 Tahun	Diragukan	7.248.000,00	-	7.248.000,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	80.395.000,00	34.973.000,00	115.368.000,00
	Jumlah	**87.643.000,00**	**34.973.000,00**	**122.616.000,00**

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak datang untuk mendaftar ulang dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak daerah. Selain itu terdapat potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan daftar ulang sebesar Rp69.189.787.500 sesuai dengan data pada masing-masing KPPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 102
Data Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Kendaraan (Unit)	Nilai Tagihan (Rp)
1.	KPPD di Kota Yogyakarta	37.984	13.241.551.600
2.	KPPD di Kabupaten Bantul	56.159	16.174.388.500
3.	KPPD di Kabupaten Kulon Progo	17.690	5.055.449.000
4.	KPPD di Kabupaten Gunungkidul	28.801	7.431.964.500
5.	KPPD di Kabupaten Sleman	80.573	27.286.433.900
	Jumlah	**221.207**	**69.189.787.500**

5.3.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah Rp492.709.279,14 Rp452.715.990,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp492.709.279,14 merupakan:

a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet sebesar Rp5.250.000,00.
b. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp487.459.279,14 dalam kondisi lancar.

Tabel 5. 103
Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah

No	SKPD	Saldo Awal 31/12/2021	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31/12/2022
1	**Dinas Pariwisata** Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.250.000,00	-	-	5.250.000,00
2	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	447.465.990,00	487.459.279,14	447.465.990,00	487.459.279,14
	Jumlah	**452.715.990,00**	**487.459.279,14**	**447.465.990,00**	**492.709.279,14**

5.3.1.1.5 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp5.614.298.093,97 Rp8.643.430.509,56

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.614.298.093,97 meliputi Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.050.000,00, Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp212.248.281,55, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp30.478.150,00, Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.225.531.482,00, Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp142.914.000,00, Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp2.998.232.585,00 dan Piutang Bunga - LLPAD sebesar Rp2.843.595,42, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 104
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	SKPD	Saldo Awal 31/12/2021	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31/12/2022
1	**BPKA**				
	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	213.498.281,55	-	1.250.000,00	212.248.281,55
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	33.793.850,00	-	3.315.700,00	30.478.150,00
	Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM)	142.914.000,00	-	-	142.914.000,00
	Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP	124.960.000,00	-	124.960.000,00	-
	Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir	2.233.281.482,00	-	7.750.000,00	2.225.531.482,00
	Piutang Bunga -LLPAD	-	2.843.595,42	-	2.843.595,42
	Jumlah	**2.750.497.613,55**	**2.843.595,42**	**137.275.700,00**	**2.616.065.508,97**
2	**DINKES**				
	RS Ghrasia - Piutang Pendapatan BLUD	1.590.243.600,01	19.112.066.329,00	18.751.255.053,01	1.951.054.876,00
	RS RESPIRA - Piutang Pendapatan BLUD	4.219.973.139,00	772.838.511,00	4.027.714.300,00	965.097.350,00
	Jumlah	**5.810.216.739,01**	**19.884.904.840,00**	**22.778.969.353,01**	**2.916.152.226,00**
3	**DIKPORA**				
	BLPT - Piutang Pendapatan BLUD	82.080.359,00	-	-	82.080.359,00
	Jumlah	**82.080.359,00**	-	**-**	**82.080.359,00**
4	**DISPERINDAG**				
	BPTTG -Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	635.798,00	-	635.798,00	-
	Jumlah	**635.798,00**	**-**	**635.798,00**	**-**
	Total	**8.643.430.509,56**	**19.887.748.435,42**	**22.916.880.851,01**	**5.614.298.093,97**

A. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp212.248.281,55

Saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp212.248.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2022 dengan kondisi macet.

B. Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.050.000,00

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada BPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet.

C. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp30.478.150,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp30.478.150,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada BPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak.

D. Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp142.914.000,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp142.914.000,00 merupakan denda dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, terdiri dari DPM PHP tahun 2012 sebesar Rp31.500.000,00, LDPM sebesar Rp7.500.000,00, DPM LUEP sebesar Rp96.390.000,00 dan DPM (Kelautan) tahun 2013 sebesar Rp7.524.000,00.

E. Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.225.531.482,00

Saldo Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.225.531.482,00 merupakan bunga dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, yang terdiri dari DPM PHP tahun 2012 sebesar Rp9.900.000,00, LDPM sebesar Rp4.125.000,00, DPM LUEP sebesar Rp60.150.000,00, Koperasi sebesar Rp2.140.856.482,00 dan DPM (Kelautan) tahun 2013 sebesar Rp10.500.000,00.

F. Piutang Bunga –LLPAD sebesar Rp 2.843.595,42

Saldo Piutang Bunga –LLPAD sebesar Rp 2.843.595,42 merupakan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD.

G. Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp2.998.232.585,00

Piutang BLUD sebesar Rp2.998.232.585,00 terdiri dari Piutang BLUD RS Ghrasia (Dinas Kesehatan) sebesar Rp1.951.054.876,00, Piutang BLUD RS Respira (Dinas Kesehatan) sebesar Rp965.097.350,00 dan Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp82.080.359,00.

Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp1.951.054.876,00 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp688.387.302,00, Piutang Diklat sebesar Rp55.469.000,00, Piutang Pasien Jamkes sebesar Rp1.204.198.574,00, dan Piutang Lainnya-Sewa sebesar Rp3.000.000,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5. 105

Rincian Mutasi Piutang RS Ghrasia

Uraian	Saldo Awal 31-12-2021	Tambah	Kurang	Saldo Akhir 31-12-2022
Piutang Pasien Umum	670.236.075,00	52.801.227,00	34.650.000,00	688.387.302,00
Piutang Diklat	36.652.000,00	55.469.000,00	36.652.000,00	55.469.000,00
Piutang Jamkes	686.789.071,00	19.000.796.102,00	18.483.386.599,00	1.204.198.574,00
Piutang Oksigen	196.566.454,01	-	196.566.454,01	-
Piutang Lainnya-Sewa	-	3.000.0000,00	-	3.000.000,00
Jumlah	**1.590.243.600,01**	**19.112.066.329,00**	**18.751.255.053,01**	**1.951.054.876,00**

Rincian piutang RS Ghrasia sebesar Rp1.951.054.876,00 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH PASIEN	JUMLAH PIUTANG	PENYISIHAN	KETERANGAN
1	**Piutang Pasien Umun**	2001 - 2022	611	688.387.302,00	673.306.272,00	Macet
					7.540.515,00	Diragukan
				688.387.302,00	**680.846.787,00**	
2	**Piutang Diklat**	2021 - 2022	-	47.936.000,00	239.680,00	Lancar
				3.456.000,00	345.600,00	Kurang Lancar
				4.077.000,00	2.038.500,00	Diragukan
				55.469.000,00	**2.623.780,00**	
3	**Piutang Jamkes, BPJS, Covid 19**					
	Jamkesda Sleman	2009 - 2012	1.316	29.980.976,00	29.980.976,00	Macet
	Jamkesda Bantul	2013	239	81.688,00	81.688,00	Macet
	Jamkesda Gunung Kidul	2013	73	1.158.102,00	1.158.102,00	Macet
	Askessos	2010 - 2013	2.611	220.000,00	220.000,00	Macet
	Jamkessos	2010 - 2021	614	2.978.208,00	2.978.208,00	Macet
	BPJS	2021 - 2022	21.242	1.139.951.600,00	113.995.160,00	Kurang Lancar
	Covid 19	2021 - 2022	110	29.828.000,00	2.982.800,00	Kurang Lancar
				1.204.198.574,00	**151.396.934,00**	
4	**Piutang Lainnya**					
	Piutang Sewa	2022	-	3.000.000,00	300.000,00	Kurang Lancar
	TOTAL			**1.951.054.876,00**	**835.167.501,00**	

Adapun rincian kualitas piutang RS Ghrasia per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Jumlah (Rp)
Lancar	47.936.000,00
Kurang Lancar	1.176.235.600,00
Diragukan	4.077.000,00
Macet	722.806.276,00
Jumlah	**1.951.054.876,00**

Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) dalam kategori macet sebesar Rp82.080.359,00.

Piutang BLUD Rumah Sakit Paru Respira (Dinas Kesehatan) dalam kategori lancar sebesar Rp965.097.350,00.

5.3.1.1.6 Piutang Lainnya Rp1.764.852.705,00 Rp1.635.674.799,30

Saldo Piutang Lain-Lain Pemda DIY per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.764.852.705,00 merupakan cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga tetapi pada tanggal 31 Desember 2022, pihak ketiga tersebut tidak dapat menyediakan persediaan beras secara fisik. Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan BULOG dan TARUMARTANI dalam menyimpan cadangan beras dengan tujuan untuk tujuan strategis. Nilai beras yang dititipkan kepada BULOG dan TARUMARTANI sampai dengan 31 Desember 2022 masing-masing sebanyak 31.875,00 kg dan 249.009,20 kg. Tanggal 31 Desember 2022 dilakukan stock opname dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 5. 106
Rincian Perhitungan Piutang Lainnya

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras (kg)	Total Opname Persediaan (kg)	Selisih Kurang (kg)
1	TARUMARTANI	249.009,20	62.252,30	186.756,90
2	BULOG	31.875,00	31.875,00	-
	Jumlah	**280.884,20**	**94.127,30**	**186.756,90**

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2022, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2022 dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Penilaian Piutang Lain-Lain menggunakan harga pembelian terakhir dikalikan dengan volume kekurangan persediaan, sehingga Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.764.852.705,00 (186.756,90 kg x Rp9.450,00).

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang Pendapatan Rp(3.636.586.056,70) Rp(3.066.973.529,52)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp(3.636.586.056,70) merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(118.992.000,00), Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(7.688.646,40), dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(3.509.907.515,30) dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Penyisihan Piutang Pajak Daerah Rp(118.992.000,00) Rp(120.315.800,00)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada BPKA sebesar Rp(118.992.000,00) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(84.019.000,00) dan Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp(34.973.000,00)

Tabel 5. 107
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang		Total
		PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	
0 – 1 Tahun	Lancar	-	-	-
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	-	-	-
2 – 5 Tahun	Diragukan	3.624.000,00	-	3.624.000,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	80.395.000,00	34.973.000,00	115.368.000,00
Jumlah		**84.019.000,00**	**34.973.000,00**	**118.992.000,00**

B. Penyisihan Piutang Retribusi Rp(7.688.646,40) Rp(7.487.329,95)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp(7.688.646,40) terdiri dari:

Tabel 5. 108
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
1	Dinas Pariwisata	5.250.000,00	Macet	5.250.000,00
2	DLHK	447.465.990,00	Lancar	2.237.329,95
3	Dinas Perhubungan	270.000,00	Lancar	1.350,00
	Total	**492.979.279,14**		**7.688.646,40**

C. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp(3.509.905.410,30) Rp(2.939.170.399,56)

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp(3.509.905.410,30) terdiri dari:

Tabel 5. 109
Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
1	RS Ghrasia	47.936.000,00	Lancar	239.680,00
		1.176.235.600,00	Kurang Lancar	117.623.560,00
		19.158.030,00	Diragukan	9.579.015,00
		707.725.246,00	Macet	707.725.246,00
	Jumlah	**1.951.054.876,00**		**835.167.501,00**
2	RESPIRA	965.097.350,00	Lancar	4.825.486,75
	Jumlah	**965.097.350,00**		**4.825.486,75**
3	BLPT	82.080.359,00	Macet	82.080.359,00
	Jumlah	**82.080.359,00**		**82.080.359,00**
4	BPKA			
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	212.248.281,55	Macet	212.248.281,55
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	Macet	2.050.000,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.967.200,00	Diragukan	1.483.600,00
		27.510.950,00	Macet	27.510.950,00
	Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM)	142.914.000,00	Macet	142.914.000,00
	Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir	26.562.500,00	Kurang Lancar	2.656.250,00
		2.198.968.982,00	Diragukan	2.198.968.982,00
	Piutang Bunga -LLPAD	2.843.595,42		-
	Jumlah	**2.616.065.508,97**		**2.587.832.063,55**
	Total	**5.614.298.093,97**		**3.509.905.410,30**

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka Rp898.368.283,28 Rp918.852.261,84

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp898.368.283,28 terdiri dari Beban Dibayar Dimuka pembayaran asuransi sebesar Rp687.145.680,66 dan pembayaran sewa sebesar Rp211.222.602,62 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp687.145.680,66 merupakan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.241.624.621,00 dikurangi dengan Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp554.478.940,34 dengan uraian sebagai berikut :

a. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp618.897.806,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2023. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp276.384.499,67 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp342.513.306,33 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 20 Juli 2023.

b. Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp622.726.815,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2023. Premi Asuransi Kendaraan Dinas tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 telah diakui menjadi

Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp278.094.440,67 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp344.632.374,33 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 20 Juli 2023.

Tabel 5. 110
Rincian Beban Dibayar Dimuka (Asuransi)

No	Nama Asuransi	Periode Pertanggungan	Total Pr emi	Periode Beban Jasa Dibayar Dimuka	Beban Jasa dibayar dimuka (Rp)
1	PT Asuransi Sinar Mas	21/07/2022 s/d 20/07/2023	618.897.806,00	01-01-2023 s/d 20-07-2023	342.513.306,33
2	PT Asuransi Sinar Mas	21/07/2022 s/d 20/07/2023	622.726.815,00	01-01-2023 s/d 20-07-2023	344.632.374,33
	Jumlah (Rp)		**1.241.624.621,00**		**687.145.680,66**

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp211.222.602,71 merupakan pembayaran sewa yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp19.572.602,74, Dinas Kesehatan sebesar Rp69.358.333,33, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp12.833.333,33 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp109.458.333,21 dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset

Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp19.572.602,74 merupakan beban dibayar dimuka untuk sewa ruang Pemdes untuk SAMSAT Desa pada KPPD Kulon Progo sebesar Rp986.301,37 dan KPPD Bantul sebesar Rp18.586.301,37, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 111
Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka

Pihak Yang Disewa	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Beban Sewa Dibayar Dimuka	Nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka (Rp)
Pemerintah Desa Palihan Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo	01/04/2022 s.d 31/03/2023	4.000.000,00	01/01/2023 s.d. 31/03/2023	986.301,37
Pemerintah Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kab. Bantul	01/12/2022 s/d 30/11/2023	16.000.000,00	01/01/2023 s/d 30/11/2023	14.641.095,89
Pemerintah Desa Sidomulyo	01/04/2022 s/d 31/03/2023	16.000.000,00	01/01/2023 s/d 31/03/2023	3.945.205,48
	Jumlah	**36.000.000,00**		**19.572.602,74**

2. Dinas Kesehatan

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp69.358.333,33 terdiri dari :

a. Pembayaran sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.000.000,00, untuk jangka waktu 5 tahun mulai 1 Januari 2021 - 31 Desember 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.000.000,00.
b. Pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground pada RS Ghrasia sebesar Rp93.500.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 20 Agustus 2018 - 20 Agustus 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52.983.333,33.

c. Pembayaran sewa tanah warga Palbapang pada RS Respira sebesar Rp33.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun mulai 1 Februari 2021 - 31 Januari 2023. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.375.000,00.

3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp12.833.333,33 merupakan pembayaran sewa tanah kas desa Pemdes Kemadang Kecamatan Tanjungsari pada SMKN 1 Tanjungsari (Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul) sebesar Rp55.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 30 April 2015 – 30 April 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.833.333,33.

4. Dinas Perhubungan

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Perhubungan sebesar Rp109.458.333,21 merupakan pembayaran sewa tanah lapangan parkir telukan Maguwoharjo (Balai Pengelolaan Terminal dan Perpakiran) sebesar Rp185.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 9 Desember 2018 – 9 Desember 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp109.458.333,21.

5.3.1.1.9 Persediaan Rp114.156.211.815,76 Rp122.928.367.222,57

Saldo Persediaan sebesar Rp114.156.211.815,76 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 30 OPD dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 112
Rincian Persediaan pada OPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	37.700.662.114,64	41.883.045.796,07
2	Dinas Kesehatan	50.726.375.075,38	48.449.713.850,85
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	14.839.400,00	25.427.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	2.856.246.910,89	9.286.501.612,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	18.717.166,29	13.838.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.842.392.693,84	6.333.779.873,25
7	Dinas Sosial	1.219.893.982,55	1.591.490.540,50
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	57.723.750,00	32.967.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.335.115.158,45	1.142.323.945,00
10	Dinas Perhubungan	640.617.943,00	792.924.725,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.208.471,00	76.543.628,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	299.078.366,75	29.674.000,00
13	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	4.984.000,00	22.626.950,00
14	Dinas Kebudayaan	2.465.126.594,58	1.879.433.999,60
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	136.132.246,59	138.761.313,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.301.683.776,66	1.080.069.848,38
17	Dinas Pariwisata	106.680.824,00	106.214.760,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.662.830.694,35	3.773.017.770,12
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.679.487.337,00	1.089.882.614,00
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	625.447.274,64	519.116.992,80
21	Sekretariat Daerah	544.358.906,43	536.971.976,00
22	Sekretariat DPRD	155.106.369,00	276.085.893,00
23	Badan Perencanaan Daerah	300.792.930,00	469.152.970,00

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.864.751.715,41	2.744.006.447,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	87.946.398,00	73.198.898,00
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan	15.761.800,00	43.380.500,00
27	Badan Penghubung Daerah	148.946.568,31	251.124.818,00
28	Inspektorat	76.177.203,00	94.062.125,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.698.545,00	56.873.377,00
30	Paniradya Kaistimewan	169.427.600,00	116.156.000,00
	Jumlah	**114.156.211.815,76**	**122.928.367.222,57**

Persediaan berdasarkan Rincian Obyek adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 113
Rincian Obyek Persediaan

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)
	Barang Pakai Habis		
1	Bahan	46.524.893.613,78	55.221.415.603,59
2	Suku Cadang	1.603.161.171,00	1.374.909.576,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	36.185.554.904,37	40.722.154.556,61
4	Obat-Obatan	20.411.151.998,49	10.329.296.723,20
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	4.526.835.885,12	10.368.975.423,72
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.651.055.534,00	3.542.889.315,00
7	Natura dan Pakan	450.683.085,00	695.332.206,45
8	Persediaan Dalam Proses	775.423.625,00	621.972.448,00
	Barang Tak Pakai Habis		
1	Komponen	29.999,00	51.421.370,00
2	Pipa	27.422.000,00	-
	Barang Bekas Dipakai		
1	Komponen Bekas dan Pipa Bekas		-
	Jumlah	**114.156.211.815,76**	**122.928.367.222,57**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp114.156.211.815,76 termasuk antara lain :

Saldo persediaan untuk strategis (cadangan pangan beras) Persediaan Untuk Strategis berupa persediaan cadangan pangan berupa beras sebesar Rp889.502.985,00 yang merupakan persediaan yang dititipkan kepada pihak ketiga sebanyak 94.127,30 kg dengan rincian dititipkan pada Gudang Tarumartani sebanyak 62.252,30 kg dan Gudang Bulog Yogyakarta sebanyak 31.875,00 kg.

Hasil stock opname persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 persediaan fisik yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 114
Rincian Persediaan Cadangan Pangan Beras

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras (kg)	Total Opname Persediaan (kg)	Selisih Kurang (kg)
1	TARUMARTANI	249.009,20	62.252,30	186.756,90
2	BULOG	31.875,00	31.875,00	-
	Jumlah	**280.884,20**	**94.127,30**	**186.756,90**

Sesuai dengan perjanjian antara Kepala DPKP dengan PT Taru Martani, atas penitipan cadangan beras pada Gudang PT Taru Martani, PT Taru Martani mempunyai kewajiban menyediakan

persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname persediaan dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

Perhitungan rincian nilai persediaan cadangan pangan beras per 31 Desember 2022 sebesar Rp889.502.985,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 115
Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras

No	Pihak Ketiga	Total Opname Persediaan (kg)	Harga Pembelian Terakhir (Rp)	Nilai Persediaan Beras (Rp)
1.	TARU MARTANI	62.252,30	9.450,00	588.284.235,00
2.	BULOG	31.875,00	9.450,00	301.218.750,00
	Jumlah	**94.127,30**		**889.502.985,00**

Nilai persediaan Cadangan Beras dicatat dengan menggunakan harga pembelian terakhir sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

Saldo persediaan obat yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp12.572.960.953,95, terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.561.835.513,95, dan pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp11.125.440,00. Persediaan obat tersebut telah diusulkan penghapusan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 116
Rincian Persediaan Obat Kedaluwarsa

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
DINAS KESEHATAN				
1	Efavirenz 600 mg	231.330	6.630,00	1.533.717.900,00
2	Lamivudine 150 mg	553.860	1.560,00	864.021.600,00
3	DBS Collection Kit	340	19.650,05	6.681.017,00
4	Reagen Zielh Nelson	10	242.000,00	2.420.000,00
5	FDC kategori I	1.205	415.469,00	500.640.145,00
6	Cartridge	1.150	224.254,00	257.892.100,00
7	Cartridge	2.500	156.800,00	392.000.000,00
8	Cartridge	150	138.623,00	20.793.450,00
9	Cartridge	950	224.254,00	213.041.300,00
10	Isoniazid 300 mg	1.764	305,00	538.020,00
11	FDC kategori II	19	1.384.983,00	26.314.677,00
12	FDC Kategori Anak	12	248.120,00	2.977.440,00
13	oseltamivir 75 mg	7.580	12.969,00	98.305.020,00
14	Reagen Anti HCV	750	13.252,00	9.939.000,00
15	Vacuntainer Plain	17.925	1.815,00	32.533.875,00
16	Vacuntainer EDTA	9.350	1.815,00	16.970.250,00
17	RDT Antibodi Covid 19 (Indec)	20.000	108.300,00	2.166.000.000,00
18	Zinc Disposible 20 mg	61.030	451,23	27.538.566,90

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
19	Zinc Disposible 20 mg	11.380	524,00	5.963.120,00
20	Isoniazid 100 mg	20.000	231,00	4.620.000,00
21	Hydroxychloroquine	8.000	3.875,00	31.000.000,00
22	Infus Glukosa 10 %	60	8.003,00	480.180,00
23	Dexamethasone inj 5mg/ml	20	1.097,00	21.940,00
24	Dexamethasone inj 5mg/ml	100	1.518,00	151.800,00
25	Antihemoroid	20	3.167,00	63.340,00
26	Antihemoroid	20	3.045,00	60.900,00
27	RDT Antibodi Covid Maccura	1.160	113.000,00	131.080.000,00
28	Stimuno Forte	1.800	1.815,00	3.267.000,00
29	Stimuno Sirup Anggur 60 ml	97	19.690,00	1.909.930,00
30	Benzatin Pencillin 2.4 IU	500	14.500,00	7.250.000,00
31	Amlodipin 5 mg	6.100	70,00	427.000,00
32	Metilprednisolone 4 mg	1.400	143,00	200.200,00
33	Prednisone	7.300	114,00	832.200,00
34	Povidone Iodine 300mL (onemed)	62	18.000,00	1.116.000,00
35	Remdesivir Injeksi 100 mg	50	936.580,00	46.829.000,00
36	Vitamin C Injeksi 200 mg	400	10.192,00	4.076.800,00
37	Vitamin C Injeksi 200 mg	975	10.192,00	9.937.200,00
38	Cartridge HCV Viral Load	30	406.400,00	12.192.000,00
39	RDT Leptospirosis	400	20.100,00	8.040.000,00
40	RDT Leptospirosis	540	48.600,00	26.244.000,00
41	Reagen Antigen Covid 19 Wondfo	28.580	80.357,76	2.296.624.780,80
42	Reagen Antigen Covid 19 Wondfo	15.380	80.358,00	1.235.906.040,00
43	Metilergometrin 0,2 mg /ml	30.100	2.959,00	89.065.900,00
44	Oxytocin injeksi	18.000	1.199,00	21.582.000,00
45	Metronidazole Infus	48	8.110,00	389.280,00
46	Calcium Glukonas Injeksi	2.664	10.351,00	27.575.064,00
47	Calcium gluconas injeksi	624	18.000,00	11.232.000,00
48	Gentamicyn injeksi	8.565	3.509,00	30.054.585,00
49	Gentamicyn injeksi	25	3.504,00	87.600,00
50	MgSO4 40 %	5.358	3.796,00	20.338.968,00
51	Hansaplast Roll	200	25.404,00	5.080.800,00
52	Cotrimoxazole 480 mg	81.100	125,00	10.137.500,00
53	Mineral Mix	320	3.116,00	997.120,00
54	Mineral Mix	10.760	2.727,00	29.342.520,00
55	Mineral Mix	200	2.920,00	584.000,00
56	Povidone Iodine 30 ml	5	2.900,00	14.500,00
57	Pulmicort 0,25 mg	235	9.725,00	2.285.375,00
58	Flixotide (Nebules 0,5mg/ 2mL)	53	14.929,00	791.237,00
59	My Jelly	48	44.010,00	2.112.480,00
60	Nitral Glyceryl Trinitrate 500mg	960	1.400,00	1.344.000,00
61	Sulfadiazine	424	20.699,00	8.776.376,00
62	Tes Asam Urat	4	90.000,00	360.000,00
63	Tes Gula Darah	4	90.000,00	360.000,00

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
64	Tes Kolesterol	4	183.000,00	732.000,00
65	Vaksin Rabies	11	165.000,00	1.815.000,00
66	Glimepirid 1 mg	1.500	265,00	397.500,00
67	Natrium Diklofenak	13.800	134,00	1.849.200,00
68	Pembalut Elastis 7,5 X 4.5	286	17.515,00	5.009.290,00
69	Pembalut Elastis 15 x 4,5 cm	5	29.819,00	149.095,00
70	Pembalut Elastis 10 x 4,5 cm	2	21.406,00	42.812,00
71	PAD Elektronik HR 501	15	18.431.350,00	276.470.250,00
72	Antifungi Doen Kombinasi Salep	3.827	4.323,00	16.544.121,00
73	Salbutamol 2 mg	9.600	84,00	806.400,00
74	Salbutamol 4 mg	10.000	87,00	870.000,00
75	Salep 2-4	251	2.527,00	634.277,00
76	Artesunate injeksi 60 mg	163	38.999,00	6.356.837,00
77	Bufacetin	560	3.090,00	1.730.400,00
78	Tablet Tambah Darah	4.228.610	350,00	1.480.013.500,00
79	Betamethasone 0,1%	1.000	1.380,00	1.380.000,00
80	Betamethasone 0,1%	2.400	1.349,00	3.237.600,00
81	Betamethasone 0,1%	1.000	1.218,00	1.218.000,00
82	Betamethasone 0,1%	750	1.349,00	1.011.750,00
83	Bedak Salicyl 2 %	70	1.025,00	71.750,00
84	BEDAK SALICYL 50 GR	195	3.000,00	585.000,00
85	Asam Mefenamat 500 mg	9.600	56,00	537.600,00
86	Asam Mefenamat 500 mg	42.700	58,00	2.476.600,00
87	Erytrhomycin Sirup Kering 60mL (Phyto Kemo Agung Farma)	200	6.462,00	1.292.400,00
88	Kanamycin	190	35.631,00	6.769.890,00
89	Kanamycin	140	32.667,00	4.573.380,00
90	FDC Kombipak Kategori I	363	317.018,00	115.077.534,00
91	Ethyl Chloride	52	143.750,00	7.475.000,00
92	DHP	342	2.134,00	729.828,00
93	DHP	1.530	2.000,00	3.060.000,00
94	Ciprofloxacin 500 mg	10.000	240,00	2.400.000,00
95	Ciprofloxacin 500 mg	1.200	500,00	600.000,00
96	Ciprofloxacin 500 mg	900	500,00	450.000,00
97	Vitamin B1 50 mg	9.800	82,00	803.600,00
98	Acyclovir 400 mg	8.200	380,00	3.116.000,00
99	BIOPLACENTON TUBE	149	20.300,00	3.024.700,00
100	BIOPLACENTON TUBE	36	17.050,00	613.800,00
101	Glibenclamide 5 mg	58.000	90,00	5.220.000,00
102	Atropine 0,25mg/mL(pt.Ethica)	222	1.595,00	354.090,00
103	Atropine 0,25mg/mL(pt.Ethica)	145	1.540,00	223.300,00
104	Phytomenadione 10 mg	5.000	710,00	3.550.000,00
105	Vitamin B6 10 mg	9.000	123,00	1.107.000,00
106	Ephineprin injeksi 1 mg/ ml	388	1.515,00	587.820,00
107	Ephineprin injeksi 1 mg/ ml	347	1.749,00	606.903,00

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
108	Ephineprin injeksi 1 mg/ ml	52	1.408,00	73.216,00
109	Cotrimoxazole 960 mg	23.000	319,00	7.337.000,00
110	Counterpain	150	30.500,00	4.575.000,00
111	Counterpain	8	22.600,00	180.800,00
112	Digoxin 0.25 mg	500	97,00	48.500,00
113	Domperidon 10 mg	200	800,00	160.000,00
114	Domperidon 10 mg	10.500	118,00	1.239.000,00
115	Allopurinol 100 mg	9.900	86,00	851.400,00
116	Allopurinol 100 mg	100	1.000,00	100.000,00
117	Erytrhomycin Sirup Kering 60mL (Phyto Kemo Agung Farma)	170	6.150,00	1.045.500,00
118	Fooly Catheter uk 18	160	8.000,00	1.280.000,00
119	Furosemid 40 mg	5.000	82,00	410.000,00
120	Furosemid/ Furosemide inj 10mg/ml (i.v./i.m)	300	1.333,00	399.900,00
121	Garam Oralit	104.200	264,00	27.508.800,00
122	Glibenclamide 5 mg	58.000	90,00	5.220.000,00
123	Griseofulvin 125 mg	14.400	219,00	3.153.600,00
124	Infus Glukosa 5%	40	6.900,00	276.000,00
125	Haloperidol 5 mg	1.200	96,00	115.200,00
126	HCT 25 mg	21.600	150,00	3.240.000,00
127	Ketoconazole	200	2.569,00	513.800,00
128	Kapas Berlemak 500 g	30	34.000,00	1.020.000,00
129	Kapas berlemak hidrofil 250 g	100	24.000,00	2.400.000,00
130	Kloramfenikol SM 1%	1.536	1.810,00	2.780.160,00
131	Cotrimoxazole Supensi 60 ml	1.000	2.120,00	2.120.000,00
132	Cotrimoxazole Supensi 60 ml	1.730	2.052,00	3.549.960,00
133	Amoxicillin dry sirup 125 mg	22	2.445,00	53.790,00
134	AMOXCILLIN TABLET 500 MG	83.500	190,00	15.865.000,00
135	AMOXICILLIN TABLET 500 MG	5.000	190,00	950.000,00
136	Metoclopramide Hcl 10 mg	10.000	95,00	950.000,00
137	MgSO4 40 %	840	3.650,00	3.066.000,00
138	MgSO4 40 %	75	3.500,00	262.500,00
139	MgSO4 40 %	522	3.796,00	1.981.512,00
140	Nifedipin 10 mg	79.100	100,00	7.910.000,00
141	Rivanol 300mL (onemed)	87	3.000,00	261.000,00
142	Infus Nacl 0,9 %	60	6.080,00	364.800,00
143	Pirantel Pamoat	500	298,00	149.000,00
144	Pembalut Elastis 2,5 X 4.5	59	12.076,00	712.484,00
145	IV Catheter 22 G	105	8.355,00	877.275,00
146	IV Catheter 24 G	390	3.795,00	1.480.050,00
147	IV Catheter 24 G	190	8.355,00	1.587.450,00
148	IV Catheter 20 G	28	8.355,00	233.940,00
149	Nystatin 500.000 IU	4.900	677,27	3.318.623,00
150	Nystatin 100.000 IU	200	523,00	104.600,00

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
151	MDT MB Dewasa	84	31.570,00	2.651.880,00
152	MDT PB Dewasa	18	12.569,00	226.242,00
153	MDT MB Anak	24	20.554,00	493.296,00
154	MDT MB Anak	12	28.354,00	340.248,00
155	MDT PB Anak	6	13.300,00	79.800,00
156	Diazepam Injeksi 5 m/ml	5.400	1.735,00	9.369.000,00
157	Albendazol Suspensi	800	3.849,00	3.079.200,00
158	Ekstrak Belladone	1.000	100,00	100.000,00
159	THP	30.000	88,00	2.640.000,00
160	Carbamazepine	10.000	270,00	2.700.000,00
161	Pyrimethamine 25 mg	2.500	1.314,50	3.286.250,00
162	Aminophyline injeksi 24 mg/L 10 ml	270	2.998,00	809.460,00
163	Reagen Antigen Covid 19 Panbio	25	83.222,17	2.080.554,25
164	VTM CD Rich	2.020	95.000,00	191.900.000,00
165	Multivitamin CB Zinck	6.240	585,00	3.650.400,00
			Total (A)	**12.561.835.513,95**
BALAI PELATIHAN KESEHATAN				
1	Dextrose 10 Infus	15	7.030,00	105.450,00
2	Salep Kulit	20	15.915,00	318.300,00
3	Ambroxol 30 mg tablet	20	12.225,00	244.500,00
4	Amlodipin	12	9.900,00	118.800,00
5	Antasida DOEN tabet kunyah	15	7.500,00	112.500,00
6	Asam traneksamat 500 mg tablet	2	148.040,00	296.080,00
7	Betadine Antiseptic Solution 1 Liter	10	37.109,00	371.090,00
8	Calcium Glukonas Injeksi	1	360.000,00	360.000,00
9	Cetirizin syr 5mg/ 5ml	10	9.050,00	90.500,00
10	Doxycyclin 100 mg kapsul	3	27.000,00	81.000,00
11	Ethyl Chloride	4	174.240,00	696.960,00
12	Garam Oralit Serbuk 200 cc	1	28.500,00	28.500,00
13	Griseofulvin tablet 125 mg	1	21.900,00	21.900,00
14	Ketokonazole 200 mg tablet	2	15.000,00	30.000,00
15	Loperamide 2 mg tablet	5	72.600,00	363.000,00
16	Loratadine tablet	2	3.850,00	7.700,00
17	Metilergometrin Injeksi	2	275.000,00	550.000,00
18	Paracetamol 500 mg tablet	20	8.700,00	174.000,00
19	Paracetamol sirup 120 mg/5ml	70	1.438,00	100.660,00
20	Propanolol 10 mg	1	6.500,00	6.500,00
21	Ringer laktat Infus 500 ml	15	5.200,00	78.000,00
22	Tablet tambah darah	100	68.560,00	6.856.000,00
23	Vitamin B 12 tablet	2	57.000,00	114.000,00
Total (B)				**11.125.440,00**
Total Keseluruhan (A + B)				**12.572.960.953,95**

Selain obat kedaluwarsa tersebut di atas, terdapat obat kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan yang belum diusulkan penghapusan sebesar Rp4.111.314.047,35 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	Tenofovir + Emtricitabie 300/200 mg	186.300	4.630,00	862.569.000,00
2	Guedel Airway 90mm	28	12.574,00	352.072,00
3	Guedel Airway 100mm	26	12.574,00	326.924,00
4	Guedel Airway 110mm	28	12.574,00	352.072,00
5	Uniflex 10 cm x 4.5 m	12	210.406,00	2.524.872,00
6	Aximed	500	110,00	55.000,00
7	Plastik nassal Swab	924	2.359.091,00	2.179.800.084,00
8	FDC kategori II	27	1.384.983,00	37.394.541,00
9	Tianamp HI DNA/RNA kit	267	2.545.454,55	679.636.364,85
10	Lightcycler 480 Multiwell Plate 96	1	4.200.000,00	4.200.000,00
11	Lightcycler 480 Multiwell Plate 96	2	4.200.000,00	8.400.000,00
12	Ampicillin Injeksi	630	8.237,00	5.189.310,00
13	Ampicillin Injeksi	300	8.237,00	2.471.100,00
14	LC multiplex RNA Virus roche	13.600	21.500,00	292.400.000,00
15	Spuit 3 ml	455	1.138,00	517.790,00
16	masker bedah	7.000	4.500,00	31.500.000,00
17	Zinc 20 mg	6.750	410,21	2.768.917,50
18	Spuit 5 ml	535	1.600,00	856.000,00
	TOTAL			**4.111.314.047,35**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Rp1.907.266.742.811,55 Rp1.701.482.917.570,65

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.907.266.742.811,55 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp4.522.554.473,60 Rp5.054.340.970,10

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen tahun 2022 sebesar Rp4.522.554.473,60 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sebesar Rp9.277.844.764,00, dikurangi pelunasan sebesar Rp199.942.800,00 dan dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.555.347.490,40.

Rincian saldo awal, mutasi dan saldo akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 117
Mutasi Dana Bergulir

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Perguliran	Nilai Awal Digulirkan (Rp)	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi 2022(Rp)		Saldo 31/12/2022 (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2022		Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2022	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		%	Rp		
1	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**										
-	DPM PHP Tahun Anggaran 2011	2011	2.390.000.000,00	185.000.000,00	-	-	185.000.000,00	100%	185.000.000,00	-	Suku Bunga 3%, Jangka Waktu 1 Tahun
-	DPM PHP Tahun Anggaran 2012	2012	3.400.000.000,00	241.000.000,00	-	-	241.000.000,00	100%	241.000.000,00	-	
-	LDPM	2013	10.870.000.000,00	136.500.000,00	-	12.000.000,00	124.500.000,00	100%	124.500.000,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun
-	DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas Pertanian Serah terima per Oktober 2011)	2011	3.569.417.900,00	1.412.650.000,00	-	7.000.000,00	1.405.650.000,00	100%	1.405.650.000,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun
	Jumlah			**1.975.150.000,00**	**-**	**19.000.000,00**	**1.956.150.000,00**		**1.956.150.000,00**	**-**	
2	**Dinas Koperasi dan UKM**										
-	Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	92.422.098,00	-	-	92.422.098,00	100%	92.422.098,00	-	Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006	2006	2.492.500.000,00	567.715.775,00	-	-	567.715.775,00	100%	567.715.775,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 10 Tahun

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Perguliran	Nilai Awal Digulirkan (Rp)	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi 2022(Rp)		Saldo 31/12/2022 (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2022		Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2022	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		%	Rp		
-	Ketahanan Pangan 2007	2007	1.100.000.000,00	64.950.000,00	-	-	64.950.000,00	100%	64.950.000,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Prospek Mandiri 2007	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Setelah Gempa) 2007	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	-	-	50.800.000,00	100%	50.800.000,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Prospek Mandiri 2008	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	100%	80.000.000,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Koperasi Karyawan 2008	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	2008	630.000.000,00	165.734.227,00	-	-	165.734.227,00	100%	165.734.227,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur 2009	2009	200.000.000,00	55.615.598,00	-	-	55.615.598,00	100%	55.615.598,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Program Perkuatan Permodalan bagi KJKS/UJKS Kop 2010	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010	2010	3.000.000.000,00	166.057.582,00	-	-	166.057.582,00	100%	166.057.582,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Perguliran	Nilai Awal Digulirkan (Rp)	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi 2022(Rp)		Saldo 31/12/2022 (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2022		Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2022	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		%	Rp		
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2011	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00	-	-	239.912.400,00	100%	239.912.400,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011	2011	2.500.000.000,00	400.736.502,00	-	-	400.736.502,00	100%	400.736.502,00	-	Suku Bunga 1 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	-	-	184.909.300,00	100%	184.909.300,00	-	Suku Bunga 1 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013	2013	4.200.000.000,00	86.560.178,00	-	-	86.560.178,00	100%	86.560.178,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	2016	3.500.000.000,00	38.652.204,00	-	8.332.600,00	30.319.604,00	10%	3.031.960,40	27.287.643,60	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	169.807.300,00	-	10.943.800,00	158.863.500,00	10%	15.886.350,00	142.977.150,00	Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	135.321.600,00	-	66.666.400,00	68.655.200,00	10%	6.865.520,00	61.789.680,000	Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Jumlah			**2.729.194.764,00**	-	**85.942.800,000**	**2.643.251.964,00**		**2.411.197.490,40**	**232.054.473,60**	
3	**BUKP**								-		**-**
-	Tahun 2019	2019	10.000.000.000,00	440.000.000,00		95.000.000,00	345.000.000,00	10%	34.500.000,00	310.500.000,00	
-	Tahun 2020	2020	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00		-	4.000.000.000,00	0,5%	20.000.000,00	3.980.000.000,00	
	Jumlah			**4.440.000.000,00**	**-**	**95.000.000,00**	**4.345.000.000,00**		**54.500.000,00**	**4.290.500.000,00**	

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Perguliran	Nilai Awal Digulirkan (Rp)	Saldo 31/12/2021 (Rp)	Mutasi 2022(Rp)		Saldo 31/12/2022 (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2022		Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2022	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		%	Rp		
4	**Dinas Kelautan dan Perikanan**										**-**
-	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	-	-	133.500.000,00	100%	133.500.000,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun
	Jumlah			**133.500.000,00**	**-**	**-**	**133.500.000,00**		**133.500.000,00**	**-**	
	JUMLAH			**9.277.844.764,00**	**-**	**199.942.800,00**	**9.077.901.964,00**		**4.555.347.490,40**	**4.522.554.473,60**	

Mutasi kurang sebesar Rp199.942.800,00 merupakan pelunasan pokok dana bergulir, terdiri dari pelunasan pokok bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp19.000.000,00, Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp85.942.800,000, dan BUKP sebesar Rp95.000.000,00.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Investasi Jangka Panjang Nonpermanen sebesar Rp4.522.554.473,60 merupakan Dana Bergulir yang diberikan kepada Koperasi sebesar Rp4.732.901.964,00 dengan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.500.847.490,40 dan kepada masyarakat sebesar Rp4.345.000.000,00 dengan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp54.500.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

Uraian Dana Bergulir	Nilai Perolehan	Klasifikasi		Dana Bergulir Diragukan Tertagih	Nilai Buku
Dana bergulir kepada Koperasi	-	Lancar	0,5%	-	-
	257.838.304,00	Kurang lancar	10%	25.783.830,40	232.054.473,60
	-	Diragukan	50%	-	-
	4.475.063.660,00	Macet	100%	4.475.063.660,00	-
Jumlah	**4.732.901.964,00**			**4.500.847.490,40**	**232.054.473,60**
Dana bergulir kepada Masyarakat	4.000.000.000,00	Lancar	0.5%	20.000.000,00	3.980.000.000,00
	345.000.000,00	Kurang lancar	10%	34.500.000,00	310.500.000,00
Jumlah	**4.345.000.000,00**			**54.500.000,00**	**4.290.500.000,00**
Total	**9.077.901.964,00**			**4.555.347.490,40**	**4.522.554.473,60**

Pengelompokan Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.077.901.964,00 berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 118
Kelompok Umur Dana Bergulir

No	Kelompok	Nilai (Rp)
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	4.000.000.000,00
2	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	602.838.304,00
3	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	-
4	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	4.475.063.660,00
	Jumlah	**9.077.901.964,00**

Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.555.347.490,40 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp4.522.554.473,60.

Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56.1 Tahun 2012, antara lain diatur sebagai berikut:

a. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
b. OPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦤꦶꦠꦃꦢꦸꦤꦂꦢꦸꦤꦂꦢꦼꦂꦲꦶꦱ꧀ꦠꦶꦮꦲꦶꦱ꧀ꦠꦶꦮꦲꦶꦱ꧀ꦠꦶꦮ

Tabel 5. 119
Perhitungan Penyertaan Modal

No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2021	Perhitungan Penyertaan Modal 2021				Mutasi Tahun Anggaran 2022			Penyertaan Modal per 31 Desember 2022
			% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2021 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD 2021 Bagian Pemda DIY	Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2021	% Saham Pemda	Ekuitas BUMD Thn 2022 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY	
		1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 - 1	6	7	8 = 5 x 6	
	METODE EKUITAS									
	Berdasarkan LK BUMD TA 2022 Audited									
1	PT. Bank BPD DIY	1.363.625.534.841,29	51,00%	2.668.660.000.000,00	1.361.016.600.000,00	(2.608.934.841,29)	51,00%	3.207.624.960.017,00	1.635.888.729.608,67	1.635.888.729.608,67
	JUMLAH	**1.363.625.534.841,29**		**2.668.660.000.000,00**	**1.361.016.600.000,00**	**(2.608.934.841,29)**		**3.207.624.960.017,00**	**1.635.888.729.608,67**	**1.635.888.729.608,67**

No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2021	Perhitungan Penyertaan Modal 2021				Mutasi Tahun Anggaran 2022					Penyertaan Modal per 31 Desember 2022
			% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2021 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD 2021 Bagian Pemda DIY	Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2021	Tambahan Modal Disetor Tahun 2022	% Saham Pemda	Deviden Tahun 2021 yang Disetor ke BUD Tahun 2022	Laba/Rugi BUMD Tahun 2022	Laba/Rugi BUMD Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	
2	PT. Anindya Mitra Internasional	42.591.181.725,84	99,95%	40.579.444.105,00	40.559.560.177,39	(2.031.621.548,45)	-	99,95%	1.229.058.069,00	1.879.030.712,22	1.878.109.987,17	41.208.612.095,56
3	PT. Tarumartani	70.839.143.609,51	100,00%	69.094.542.919,00	69.091.779.137,28	(1.747.364.472,23)	-	100,00%	5.439.572.184,00	10.247.107.313,84	10.246.697.429,55	73.898.904.382,83
4	BUKP	51.498.021.008,07	83,14%	55.962.092.591,00	46.526.883.780,16	(4.971.137.227,91)	-	83,14%	5.630.738.202,58	1.716.043.104,56	1.426.718.237,13	42.322.863.814,71
5	PDAB Tirtatama DIY	166.684.695.415,84	100,00%	166.783.676.233,98	166.783.676.233,98	98.980.818,14	-	100,00%	-	(10.797.733.578,89)	(10.797.733.578,89)	155.985.942.655,09
	METODE HARGA PEROLEHAN											
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	1.190.000.000,00	0,22%		1.190.000.000,00			0,22%	179.079.443,00			1.190.000.000,00
	JUMLAH	**332.803.041.759,26**		**332.419.755.848,98**	**324.151.899.328,81**	**(8.651.142.430,45)**			**12.478.447.898,58**	**3.044.447.551,73**	**2.753.792.074,96**	**314.606.322.948,19**
	TOTAL	**1.696.428.576.600,55**										**1.950.495.052.556,86**

Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.635.888.729.608,67. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2022 berdasarkan LK BPD 2022 Audited, adalah sebagai berikut:

Ekuitas BPD per 31-12-2022	Rp	3.207.624.960.017,00
Ekuitas Bagian Pemda DIY		51,00%
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022	**Rp**	**1.635.888.729.608,67**

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Yogyakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.208.612.095,56. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2021 Audited		Rp	**42.591.181.725,84**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2021 Audited		Rp	(2.031.621.548,45)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2021		**Rp**	**40.559.560.177,39**
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2021 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2022		Rp	(1.229.058.069,00)
Laba Tahun 2022	Rp1.879.030.712,22		
Laba Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	99,951%	Rp	1.878.109.987,17
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022		Rp	**41.208.612.095,56**

c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah TARU MARTANI Yogyakarta sebesar Rp73.898.904.382,83. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2021 Audited		Rp	**70.839.143.609,51**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2021 Audited		Rp	(1.747.364.472,22)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2021		Rp	69.091.779.137,28
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2021 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2022		Rp	(5.439.572.184,00)
Laba Tahun 2022	Rp 10.247.107.313,84		
Laba Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	99,996%	Rp	10.246.697.429,54
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022		**Rp**	**73.898.904.382,83**

d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp46.849.824.621,76. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2021 Audited		Rp	**51.498.021.008,07**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2021 Audited		Rp	(4.971.137.227,91)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2021		Rp	46.526.883.780,16
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2021 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2022		Rp	(5.630.738.202,58)
Laba Tahun 2022	Rp7.161.028.439,00		
Laba Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	83,140%	Rp	5.953.679.044,18
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022		**Rp**	**46.849.824.621,76**

e. Penyertaan Modal pada Perumda Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp155.985.942.655,09. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2021 Audited		Rp	**166.684.695.415,84**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2021 Audited		Rp	98.980.818,14
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2021		Rp	166.783.676.233,98
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2021 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2022		Rp	0,00
Laba Tahun 2022	Rp(10.797.733.578,		
Laba Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	100,00%	Rp	(10.797.733.578,89)
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022		**Rp**	**155.985.942.655,09**

f. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.190.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap **Rp9.684.673.147.643,02** **Rp9.336.577.545.704,50**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.684.673.147.643,02 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp14.291.254.292.361,80 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.606.581.144.718,74, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah **Rp4.721.409.087.045,00** **Rp4.574.164.906.208,00**

Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.721.409.087.045,00 diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5. 120
Rincian Obyek Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung TempatTinggal	44.470.147.150,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	265.719.959.367,00
3	Tanah untuk Bangunan Industri	342.760.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.209.874.049.639,00
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	61.279.245.000,00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	27.238.178.200,00
7	Tanah Persil Lainnya	46.131.584.000,00
8	Tanah Basah	5.298.702.000,00
9	Tanah Kering	2.206.734.560,00
10	Tanah Perkebunan	3.322.000.000,00
11	Tanah Pertanian	47.637.590.000,00
12	Tanah Lapangan Olahraga	32.516.450.000,00
13	Tanah Lapangan Parkir	134.279.052.045,00
14	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	3.174.610.000,00
15	Tanah Lapangan Terbang	7.420.190.375,00
16	Tanah untuk Jalan	2.517.985.138.294,00
17	Tanah untuk Bangunan Air	2.139.603.212,00
18	Tanah untuk Bangunan Instalasi	17.974.278.650,00
19	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	186.033.783.179,00
20	Tanah untuk Makam	123.483.000,00
21	Tanah Kampung	106.241.548.374,00
	Jumlah	**4.721.409.087.045,00**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 121
Rincian Tanah pada OPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	351.894.297.782,00	351.397.558.020,00
2	Dinas Kesehatan	9.249.665.001,00	9.944.264.763,00
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	92.597.306.855,00	92.597.306.855,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	2.601.898.152.218,00	2.508.380.933.301,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
7	Dinas Sosial	18.705.829.406,00	18.705.829.406,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.646.810.000,00	254.810.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	42.819.470.972,00	41.093.470.972,00
10	Dinas Perhubungan	59.158.648.920,00	59.158.648.920,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	87.468.915.851,00	29.785.030.851,00
13	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	-	-
14	Dinas Kebudayaan	367.983.941.784,00	380.752.324.864,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.756.000.000,00	1.756.000.000,00

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	43.345.213.774,00	43.345.213.774,00
17	Dinas Pariwisata	63.635.490.540,00	3.434.065.500,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	126.780.807.899,00	126.780.807.899,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.608.532.000,00	6.194.362.000,00
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.551.800.680,00	4.551.800.680,00
21	Sekretariat Daerah	175.261.009.010,00	175.261.009.010,00
22	Sekretariat DPRD	-	-
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	623.892.994.353,00	691.358.769.393,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.669.200.000,00	4.669.200.000,00
27	Badan Penghubung Daerah	12.984.000.000,00	12.984.000.000,00
28	Inspektorat	1.217.500.000,00	1.217.500.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	133.500.000,00	1.392.000.000,00
30	Paniradya Kaistimewan	-	-
	Jumlah	**4.721.409.087.045,00**	**4.574.164.906.208,00**

5.3.1.3.2 Peralatan Mesin Rp 1.929.213.923.912,56 Rp1.512.711.423.026,27

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.929.213.923.912,56 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 122
Rincian Obyek Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Besar	110.452.579.731,95
2	Alat Angkutan	225.775.113.633,02
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	117.934.138.642,67
4	Alat Pertanian	15.936.379.781,92
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	461.587.795.826,45
6	Alat Studio, , Komunikasi, dan Pemancar	150.102.164.419,99
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	70.184.956.664,94
8	Alat Laboratorium	253.893.069.607,42
9	Alat Persenjataan	8.981.013.087,52
10	Komputer	393.796.536.644,27
11	Alat Eksplorasi	478.954.890,00
12	Alat Pengeboran	54.939.990,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	266.894.000,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	10.705.000,00
15	Alat Keselamatan Kerja	6.775.157.468,98
16	Alat Peraga	222.807.502,00
17	Peralatan Proses/Produksi	3.968.709.322,48
18	Rambu-rambu	104.527.241.901,04
19	Peralatan Olahraga	4.264.765.797,91
	Jumlah	**1.929.213.923.912,56**

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 123
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada OPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	708.068.746.952,08	595.619.834.971,91
2	Dinas Kesehatan	145.990.135.155,98	134.916.237.896,78
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	64.736.616.702,36	64.798.248.582,36
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	12.831.251.972,36	13.900.884.218,01
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.682.483.844,99	4.326.858.241,99
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.577.389.548,00	11.222.163.238,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46.304.247.577,67	63.421.824.483,48
8	Dinas Sosial	30.096.043.362,06	28.319.319.398,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.256.245.326,98	34.072.211.952,98
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	7.475.549.852,00	6.933.505.662,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	63.986.398.647,92	63.643.943.389,98
12	Dinas Perhubungan	137.552.391.616,53	130.734.797.081,79
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	82.292.161.160,02	82.533.349.644,77
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	19.374.326.152,00	14.512.657.797,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.554.954.742,53	4.676.407.574,91
16	Dinas Kebudayaan	85.761.313.673,76	82.951.095.791,76
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	62.632.623.132,71	59.450.052.141,90
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.108.442.937,94	18.686.662.837,94
19	Dinas Pariwisata	6.953.226.951,01	6.969.839.192,01
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	44.663.727.735,83	40.461.400.350,83
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	47.649.197.997,00	16.155.683.232,00
22	Sekretariat Daerah	56.020.877.070,54	54.548.482.763,55
23	Badan Penghubung Daerah	7.202.463.023,00	7.224.893.007,00
24	Sekretariat DPRD	24.958.174.329,09	24.846.028.189,09
25	Inspektorat	11.610.051.779,28	9.680.893.491,42
26	Paniradya Kaistimewan	9.167.539.991,96	7.145.017.360,96
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.669.000.172,96	11.586.064.112,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	137.711.134.229,40	91.823.504.813,40
29	Badan Kepegawaian Daerah	13.682.874.588,00	14.840.964.909,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.644.333.686,60	9.709.445.165,00
	Jumlah	**1.929.213.923.912,56**	**1.709.712.271.491,82**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp3.044.972.042.952,72 Rp2.911.445.504.376,58

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.044.972.042.952,72 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 124
Rincian Obyek Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung	3.015.808.766.521,06
2	Monumen	19.788.427.670,98
3	Bangunan Menara	721.228.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.653.620.760,68
	Jumlah	**3.044.972.042.952,72**

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 125
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.079.415.984.334,91	987.522.463.829,27
2	Dinas Kesehatan	139.918.796.578,54	121.886.628.443,76
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	40.385.951.037,00	62.964.649.511,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	6.162.497.158,05	8.716.901.094,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	806.115.000,00	3.020.022.593,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.921.252.231,00	5.341.379.204,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.308.799.350,00	9.759.586.333,00
8	Dinas Sosial	109.000.697.502,00	97.464.049.920,82
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.914.399.414,00	35.914.399.414,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	23.852.053.813,00	20.832.031.220,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	49.320.708.281,00	44.735.296.999,94
12	Dinas Perhubungan	67.178.734.274,91	42.588.585.976,07
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.065.621.281,00	5.065.621.281,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	87.236.676.174,30	86.891.040.205,30
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.891.396.033,00	2.551.253.200,00
16	Dinas Kebudayaan	112.348.361.273,00	113.691.107.510,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	137.825.958.679,00	137.751.662.357,81
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	67.206.286.552,52	65.433.848.267,52
19	Dinas Pariwisata	69.103.633.751,00	61.870.633.751,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	107.307.602.515,48	107.273.089.365,48
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.383.387.813,00	20.149.036.175,00
22	Sekretariat Daerah	43.123.423.998,61	48.776.082.863,61
23	Badan Penghubung Daerah	8.513.825.162,00	6.370.571.262,00
24	Sekretariat DPRD	575.830.294.533,00	575.221.451.533,00
25	Inspektorat	24.568.170.807,00	24.568.170.807,00
26	Paniradya Kaistimewan	6.530.435.706,00	34.000.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.989.171.200,00	4.989.171.200,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	169.983.905.984,00	173.098.787.975,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	7.294.871.816,00	12.788.150.063,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	24.583.030.699,40	24.175.832.021,00
	Jumlah	**3.044.972.042.952,72**	**2.911.445.504.376,58**

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp4.202.608.268.082,35 Rp3.899.141.256.584,91

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.202.608.268.082,35 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 126
Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	3.364.079.410.216,08
2	Bangunan Air	551.552.708.446,18
3	Instalasi	178.676.783.026,85
4	Jaringan	108.299.366.393,24
	Jumlah	**4.202.608.268.082,35**

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 127
Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-20212 (Rp)	Nilai Per 31-12-20201 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	24.633.522.760,49	21.618.319.593,82
2	Dinas Kesehatan	7.314.122.699,34	5.287.031.332,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	3.841.409.136.893,50	3.549.451.310.567,51
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.770.257.849,47	51.184.561.616,57
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.600.000,00	95.375.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	429.834.000,00	218.887.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.638.348.700,00	6.638.348.700,00
8	Dinas Sosial	2.258.005.395,94	1.715.679.679,50
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.858.320.200,00	1.858.320.200,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	91.775.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.906.990.055,00	28.807.722.865,00
12	Dinas Perhubungan	9.805.699.189,00	9.965.556.986,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.536.168.189,00	19.255.716.512,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	418.510.764,00	418.510.764,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	172.868.000,00	172.868.000,00
16	Dinas Kebudayaan	7.423.372.443,00	7.423.372.443,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.044.573.591,00	6.367.600.591,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	128.175.009.367,04	127.383.815.383,04
19	Dinas Pariwisata	12.581.738.400,00	12.360.738.400,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.858.689.420,00	7.624.857.062,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.452.968.800,00	6.452.968.800,00
22	Sekretariat Daerah	23.151.350.621,47	23.151.350.621,47
23	Badan Penghubung Daerah	80.600.000,00	80.600.000,00
24	Sekretariat DPRD	522.131.759,00	522.131.759,00
25	Inspektorat	3.534.355.475,00	2.859.909.475,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.567.500,00	36.567.500,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	53.391.984.618,10	5.855.767.351,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	546.436.413,00	772.038.404,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.561.329.979,00	1.561.329.979,00
	Jumlah	**4.202.608.268.082,35**	**3.899.141.256.584,91**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp224.852.289.228,13 Rp369.190.427.280,26

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp224.852.289.228,13 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 128
Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	140.712.043.971,72
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	30.633.925.001,23
3	Hewan	1.680.779.899,98
4	Biota Perairan	2.415.000,00
5	Tanaman	1.698.500.951,20
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	50.124.624.404,00
	Jumlah	**224.852.289.228,13**

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 129
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada OPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	137.745.506.103,93	137.084.154.408,06
2	Dinas Kesehatan	444.675.506,00	432.748.256,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	39.481.866.449,00	181.151.348.591,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.400.664.465,00	1.400.664.465,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.612.000,00	24.612.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.659.900,00	16.659.900,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	419.145.000,00	419.145.000,00
8	Dinas Sosial	635.210.807,00	579.686.587,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.369.050,00	41.369.050,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	40.170.400,00	40.170.400,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.125.467.987,00	1.140.467.987,00
12	Dinas Perhubungan	4.260.000,00	4.260.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	864.327.389,00	864.327.389,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.788.537.400,00	3.788.537.400,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	14.407.700,00	14.407.700,00
16	Dinas Kebudayaan	6.155.428.899,00	5.639.862.900,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.072.781.278,00	12.502.086.976,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	204.476.500,00	392.770.500,00
19	Dinas Pariwisata	44.635.000,01	44.635.000,01
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.801.176.680,18	2.065.209.670,18
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98.642.450,00	4.455.999.950,00
22	Sekretariat Daerah	11.811.308.006,00	11.803.385.006,00
23	Badan Penghubung Daerah	1.135.141.763,00	3.278.395.650,00
24	Sekretariat DPRD	828.740.552,01	828.740.552,01
25	Inspektorat	37.427.461,00	37.427.461,00
26	Paniradya Kaistimewan	223.891.200,00	21.555.200,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83.983.840,00	83.983.840,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	508.360.692,00	234.400.692,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	126.786.300,00	126.786.300,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	672.628.450,00	672.628.450,00
	Jumlah	**224.852.289.228,13**	**369.190.427.280,26**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp224.852.289.228,13 termasuk didalamnya Aset Tetap Renovasi sebesar Rp52.267.878.304,00, yang terdiri dari aset tetap yang digunakan OPD tetapi milik OPD lain di lingkungan Pemda DIY sebesar Rp1.185.914.578,00 dan aset tetap yang digunakan oleh OPD tetapi milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp51.081.963.726,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 130
Rincian Data Aset Tetap Renovasi

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	32.891.794.024,00	Gedung Kantor di Maguwo Sleman Yogyakarta gedung milik APBN	55.754.115,00
			Ruang Rapat Balai PSDA	4.689.336,00
			Gedung Kantor di Sidomulyo, Sleman, Yogyakarta Gedung Milik Negara	7.906.995,00
			Garasi Balai PSDA	14.980.854,00
			Jalan Ngalang - Nguwot - Gading	23.544.922.024,00
			Jembatan Pentung Ruas Jalan Siluk-Kretek	1.308.985.500,00
			Jembatan Bancang	6.061.355.700,00
			Jembatan Buyutan	1.893.199.500,00
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.400.664.465,00	Kawasan Wisata Kiskendo milik Kabupaten Kulon Progo TA 2016	315.683.910,00
			Ruas Jalan Bendo-Beku TA 2018 milik Kabupaten Kulon Progo	1.084.980.555,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	167.284.500,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Kabupaten Kulon Progo	
4	Sekretariat Daerah (Biro Umum	11.037.854.627,00	Bangunan Gedung milik Kraton Yogyakarta	
5	Badan Penghubung Daerah	2.143.253.900,00	Bangunan Gedung milik SETNEG	
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	826.567.388,00	Media center ruang wartawan milik Biro Umum	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	339.677.000,00	SLB BINA SIWI	
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.460.782.400,00	Pasar/Pertokoan Galery di YIA	
	Jumlah	**52.267.878.304,00**		

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp160.673.428.332,00 Rp65.514.973.384,40

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp160.673.428.332,00 terdapat dalam beberapa OPD berikut ini:

Tabel 5. 131
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	495.681.724,00	1.352.908.232,40
2	Dinas Kesehatan	290.785.000,00	458.299.250,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	29.175.369.116,00	39.451.011.690,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.710.696.700,00	11.212.875.900,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	153.367.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	79.753.500,00	-
7	Dinas Sosial	366.905.500,00	337.655.500,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	179.014.600,00	179.014.600,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.766.000.600,00	3.009.968.600,00
10	Dinas Perhubungan	1.323.261.500,00	1.173.802.450,00
11	Dinas Kebudayaan	4.670.975.211,00	1.495.029.592,00

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	809.566.605,00	809.566.605,00
13	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	9.700.000,00	9.700.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	676.973.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	110.236.954.500,00	86.433.000,00
16	Dinas Pariwisata	-	15.700.000,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.369.625,00	63.369.625,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	119.339.000,00	2.160.852.840,00
19	Sekretariat Daerah	126.767.860,00	81.912.600,00
20	Sekretariat DPRD	1.022.754.000,00	
21	Badan Penghubung Daerah	-	45.000.000,00
22	Inspektorat	88.900.000,00	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	6.466.855.900,00	1.545.502.700,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	929.113.200,00	929.113.200,00
25	Badan Pendidikan dan Pelatihan	266.917.000,00	266.917.000,00
	Jumlah	**168.198.681.141,00**	**65.514.973.384,40**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp168.198.681.141,00 termasuk di dalamnya berupa DED sebesar Rp160.673.428.332,00 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.525.252.809,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 132
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

No	Nama OPD	DED	KDP
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	495.681.724,00	-
2	Dinas Kesehatan	290.785.000,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	29.077.824.116,00	97.545.000,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.710.696.700,00	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	79.753.500,00	-
6	Dinas Sosial	366.905.500,00	-
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	179.014.600,00	-
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.766.000.600,00	-
9	Dinas Perhubungan	1.323.261.500,00	-
10	Dinas Kebudayaan	1.997.899.402,00	2.673.075.809,00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	809.566.605,00	
12	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	9.700.000,00	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	110.150.521.500,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.369.625,00	-
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	119.339.000,00	-
18	Sekretariat Daerah	126.767.860,00	-
19	Sekretariat DPRD	1.022.754.000,00	
20	Inspektorat	88.900.000,00	
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.712.223.900,00	4.754.632.000,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	929.113.200,00	-
23	Badan Pendidikan dan Pelatihan	266.917.000,00	-
	Jumlah	**160.673.428.332,00**	**7.525.252.809,00**

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

1. **Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga**

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp273.215.000,00 merupakan Rehabilitasi Ruang Tourism Library (Bock Grand) pada SMKN 6 Yogyakarta.

2. **Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM**

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp97.545.000,00 merupakan pembangunan SPAM Regional pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah Dan Air Minum Perkotaan.

3. **Dinas Kebudayaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp2.673.075.809,00 merupakan Pembangunan Joglo Panembahan.

4. **Dinas Kelautan dan Perikanan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp110.150.521.500,00 merupakan hasil pekerjaan pembangunan PPI Pantai Gesing yang belum selesai sampai dengan berakhirnya tahun anggaran namun sudah terealisasi pembayarannya 100%.

5. **Badan Pengelola Keuangan dan Aset**

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp4.754.632.000,00 merupakan pembangunan gedung yang masih berupa talud.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Rp(4.606.581.144.718,74) Rp(4.192.591.793.621,47)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(4.606.581.144.718,74) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 133
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.328.954.818.036,60)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.054.216.572.355,30)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(2.219.583.382.349,44)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.826.371.977,40)
	Jumlah	**(4.606.581.144.718,74)**

5.3.1.4 Dana Cadangan Rp0,00 Rp0,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.5 Aset Lainnya Rp326.091.606.439,30 Rp255.394.095.470,85

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp326.091.606.439,30 meliputi Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset Lainnya.

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp203.584.401.185,00 Rp139.193.552.185,00

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp203.584.401.185,00 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 134
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

No	Nama OPD	Sewa	Kerjasama Pemanfaatan	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)	349.847.300,00	532.733.106,00	882.580.406,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	-	2.248.483.752,00
3	Dinas Perhubungan	2.117.900.000,00	-	2.117.900.000,00
4	Dinas Sosial	2.950.084,00	-	2.950.084,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.893.035.007,00	-	8.893.035.007,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	186.527.877.398,00	-	186.527.877.398,00
7	Badan Penghubung Daerah	2.911.574.538,00	-	2.911.574.538,00
	Jumlah	**203.051.668.079,00**	**532.733.106,00**	**203.584.401.185,00**

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa dan kerjasama pemanfaatan, bangun guna dengan uraian sebagai berikut:

Sewa sebesar Rp203.051.668.079,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa per 31 Desember 2022 sebesar Rp203.051.668.079,00 merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa pada beberapa OPD sebagai berikut :

Tabel 5. 135
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)	349.847.300,00	Tanah	Talenta Body Repair dan PT. Naragita
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	- Bangunan Mess Kaliurang Gedung Wisma Kaliurang	Masyarakat umum
3	Dinas Perhubungan	2.117.900.000,00	Tanah lahan parkir Bandara Adi Sucipto	PT. Angkasa Pura
4	Dinas Sosial	2.950.084,00	- Tanah dan bangunan, Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32, Yogyakarta	BUKP Gondokusuman
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.893.035.007,00	- Bangunan Rusunawa Ledok Code - Bangunan Pesanggrahan Balai Istirahat Karyawan (BIK) dan Balai Istirahat Pegawai (BIP) - Rumah Dinas Randubelang	Masyarakat umum Pegawai dan masyarakat umum
7	Badan Penghubung Daerah	2.911.574.537,93	-GriyaJogja, Jl. Diponegoro No.52 Menteng, Jakarta -Wisma Jogja, Jl. Pedati No.116 Jakarta Timur	Masyarakat umum Masyarakat umum
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	186.527.877.398,00	Tanah dan Bangunan	
	Jumlah	**203.051.668.079,00**		

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada BPKA sebagai berikut:

Tabel 5. 136
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga BPKA

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sewa Tanah	379.750.000,00	Penyerahan ke Pengelola Barang
Sewa Tanah	36.191.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Bangunan Rumah (RTT)
Sewa Tanah	125.500.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
Sewa Tanah	125.500.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** tanah Perumahan
Sewa Tanah	150.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
Sewa Tanah	14.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
Sewa Tanah	150.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
Sewa Tanah	192.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
Sewa Tanah	525.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
Sewa Tanah	40.200.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
Sewa Tanah	1.472.393,00	Disewakan/Dipinjamkan**
Sewa Tanah	940.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah perkotaan
Sewa Tanah	1.724.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** tanah perkotaan
Sewa Tanah	475.500.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** tanah kantor
Sewa Tanah	6.711.300,00	Disewakan/Dipinjamkan ** tempat parkir
Sewa Tanah	1.386.325.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Parkir
Sewa Tanah	1.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah untuk Bangunan Rumah Negara
Sewa Tanah	101.700.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Bangunan Rumah Dinas
Sewa Tanah	332.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Lapangan Parkir
Sewa Tanah	3.115.200.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Lapangan Parkir
Sewa Tanah	1.500.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Bangunan Kantor Pem
Sewa Tanah	918.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** tanah kantor
Sewa Tanah	7.943.936,00	Disewakan/dipinjamkan **
Sewa Tanah	2.251.200.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Rumah Dinas
Sewa Tanah	70.800.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** tanah Bangunan Kantor Pemerintah
Sewa Tanah	161.600.000,00	Tanah Banguanan pemerintah
Sewa Tanah	3.266.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Negara
Sewa Tanah	487.755.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Base camp
Sewa Tanah	1.274.000.000,00	Disewakan/dipinjamkan **
Sewa Tanah	33.714.182,00	Disewakan/Dipinjamkan **
Sewa Tanah	45.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** tanah kantor
Sewa Tanah	325.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
Sewa Tanah	449.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah bangunan Rumah dinas
Sewa Tanah	234.840.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	6.151.340.000,00	Disewakan/Dipinjamkan**
Sewa Tanah	342.475.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	1.364.800.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	52.020.000,00	Tanah Perumahan Rumah DInas

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sewa Tanah	334.500.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah untuk Rumah Dinas
Sewa Tanah	264.860.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	4.654.320.000,00	Disewakan/Dipinjamkan**
Sewa Tanah	345.565.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	3.628.742.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Perumahan, Perkantoran dan Kios
Sewa Tanah	258.300.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	266.090.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	9.240.000,00	Tanah Rumah Dinas
Sewa Tanah	619.400.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Sekolah
Sewa Tanah	111.200.000,00	Tanah Kantor Kejuron
Sewa Tanah	2.316.100.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Sekolah
Sewa Tanah	192.713.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	1.115.200.000,00	Disewakan/Dipinjamkan **
Sewa Tanah	311.600.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	2.450.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
Sewa Tanah	156.045.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	38.786.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	138.334.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	60.844.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	240.960.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	183.443.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	92.185.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	123.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	48.307.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	21.424.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	279.542.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	49.131.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	243.286.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	82.915.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	475.378.040,00	Disewakan/Dipinjamkan **
Sewa Tanah	101.455.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	94.245.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	132.355.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	164.984.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	2.107.500.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Sekolah
Sewa Tanah	66.744.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	130.707.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	65.817.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	56.498.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	85.116.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	703.840.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	89.600.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Bangunan Pertokoan
Sewa Tanah	109.120.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sewa Tanah	38.950.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	41.200.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	69.372.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	109.224.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	87.241.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	39.114.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	71.012.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	184.782.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	49.955.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	65.682.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	51.886.250,00	Dari RESPIRA
Sewa Tanah	505.827.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Bangunan Pertokoan
Sewa Tanah	451.526.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Bangunan Bengkel
Sewa Tanah	65.190.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	208.369.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	51.500.000,00	Disewakan/Dipinjamkan **
Sewa Tanah	810.020.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Bangunan Bengkel
Sewa Tanah	471.417.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Bangunan Pertokoan
Sewa Tanah	1.941.380.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Bangunan Kantor
Sewa Tanah	51.113.750,00	Dari RESPIRA
Sewa Tanah	31.209.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	31.209.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	58.813.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	15.744.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	9.600.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	2.100.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan **
Sewa Tanah	15.662.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	111.446.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	15.662.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	31.415.000,00	Disewakan/Dipinjamkan** Tanah Pertanian
Sewa Tanah	161.106.846,00	Disewakan/Dipinjamkan **
Sewa Tanah	1.517.952.000,00	Disewakan/Dipinjamkan **
Sewa Tanah	6.774.000.000,00	Disewakan/Dipinjamkan **
Sewa Tanah	15.000.000,00	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
Sewa Tanah	662.100.400,00	-
Sewa Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	Mall Malioboro Lt2
Sewa Peralatan dan Mesin	45.700.000,00	Mall Malioboro Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	300.200.000,00	Mall Malioboro Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	Mall Malioboro LG
Sewa Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	Mall Malioboro Lt1
Sewa Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	Mall Malioboro roof top
Sewa Peralatan dan Mesin	3.900.000,00	Mall Malioboro Basement

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	Mall Malioboro roof top
Sewa Peralatan dan Mesin	458.000.000,00	Mall Malioboro LG,Lt 1,Lt 2,
Sewa Peralatan dan Mesin	114.200.000,00	Mall Malioboro Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	783.400.000,00	Mall Malioboro Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	1.419.000.000,00	Mall Malioboro UG, Lt 1, Lt 2, Lt 3
Sewa Peralatan dan Mesin	2.600.000,00	Mall Malioboro Lt 1
Sewa Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	Mall Malioboro roof top
Sewa Peralatan dan Mesin	23.700.000,00	Mall Malioboro roof top
Sewa Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pantry 4
Sewa Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pantry 3
Sewa Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Toilet Lobby
Sewa Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pantry 5
Sewa Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pantry 6
Sewa Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pantry 2
Sewa Peralatan dan Mesin	15.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Angsa Tour & Travel
Sewa Peralatan dan Mesin	13.790.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Telp. Operator Room
Sewa Peralatan dan Mesin	510.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO STAFF CANTEEN
Sewa Peralatan dan Mesin	31.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Gas Room
Sewa Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Kitchen
Sewa Peralatan dan Mesin	15.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Bar Area
Sewa Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Panel room di setiap lantai
Sewa Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	4.300.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO All hotel areas
Sewa Peralatan dan Mesin	3.300.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pump Room 1st Floor
Sewa Peralatan dan Mesin	4.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pump Room
Sewa Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Boiler Room (Semi Basement)
Sewa Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	2.390.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO WESTERN COOKING
Sewa Peralatan dan Mesin	85.800.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Roof
Sewa Peralatan dan Mesin	66.800.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Boiler Room (Semi Basement)
Sewa Peralatan dan Mesin	167.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Roof
Sewa Peralatan dan Mesin	36.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Roof
Sewa Peralatan dan Mesin	33.700.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	1.780.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO EASTERN COOKING
Sewa Peralatan dan Mesin	6.580.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO EASTERN COOKING
Sewa Peralatan dan Mesin	1.370.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO ROOMSERVICE AREA
Sewa Peralatan dan Mesin	34.300.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	33.700.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pantry 7
Sewa Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pantry 8
Sewa Peralatan dan Mesin	10.320.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO DISHWASHING AREA

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sewa Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Boiler Room (Semi Basement)
Sewa Peralatan dan Mesin	2.240.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PREPARATION AREA
Sewa Peralatan dan Mesin	2.730.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO BEVERAGE AREA
Sewa Peralatan dan Mesin	990.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PASTRY
Sewa Peralatan dan Mesin	680.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO WESTERN COOKING
Sewa Peralatan dan Mesin	2.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Lift
Sewa Peralatan dan Mesin	31.200.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pump Room 1st Floor
Sewa Peralatan dan Mesin	600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Housekeeping
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO REST ROOM LOB.
Sewa Peralatan dan Mesin	30.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Boiler Room (Semi Basement)
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO TOP OF GAS ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PASTRY
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO NEAR SMOK. AREA
Sewa Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO KITCHEN
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO TOP STR. CASE
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO NEAR LIFT ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO FRONT.TIME KPR.
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO TOP OF GAS ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO NEAR SMOK. AREA
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO FRONT.TIME KPR.
Sewa Peralatan dan Mesin	4.210.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO COLD KITCHEN
Sewa Peralatan dan Mesin	6.740.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PREPARATION AREA
Sewa Peralatan dan Mesin	54.260.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO RECEIVING AREA (Cold Storage)
Sewa Peralatan dan Mesin	2.310.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PASTRY
Sewa Peralatan dan Mesin	9.110.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO ROOMSERVICE AREA
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO TOP ROOF
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO LINEN ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	1.250.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PREPARATION AREA
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO NEAR SMOK. AREA
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO NEAR CHILLER
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO DRIVER'S TOILET
Sewa Peralatan dan Mesin	900.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Housekeeping
Sewa Peralatan dan Mesin	246.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Roof
Sewa Peralatan dan Mesin	2.180.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PASTRY
Sewa Peralatan dan Mesin	5.200.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Room
Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pump Room
Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Pump Room
Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	670.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO EASTERN COOKING
Sewa Peralatan dan Mesin	2.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Room
Sewa Peralatan dan Mesin	2.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Room
Sewa Peralatan dan Mesin	2.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Room

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sewa Peralatan dan Mesin	7.800.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Room
Sewa Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Room
Sewa Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Room
Sewa Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Room
Sewa Peralatan dan Mesin	14.100.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Roof
Sewa Peralatan dan Mesin	246.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Roof
Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PREPARATION AREA
Sewa Peralatan dan Mesin	830.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO COLD KITCHEN
Sewa Peralatan dan Mesin	47.800.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Panel room di setiap lantai
Sewa Peralatan dan Mesin	3.470.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO BAR COUNTER (Bar Lounge)
Sewa Peralatan dan Mesin	2.650.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO EASTERN COOKING
Sewa Peralatan dan Mesin	2.640.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO WESTERN COOKING
Sewa Peralatan dan Mesin	43.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO BAR COUNTER (Bar Lounge)
Sewa Peralatan dan Mesin	13.100.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Housekeeping
Sewa Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Housekeeping
Sewa Peralatan dan Mesin	22.200.000,00	Mall Malioboro Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	890.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Telp. Operator Room
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Resa 2
Sewa Peralatan dan Mesin	2.780.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Supono / fom@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	2.780.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Agung G / ar@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	860.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Chandra / afom@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	1.140.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Vivin / Account Payable
Sewa Peralatan dan Mesin	860.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Sugeng / Cost Controller
Sewa Peralatan dan Mesin	1.530.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Jihan / account@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	2.040.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Atin / purchasing@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	2.530.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Adi P / fc@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO web corner
Sewa Peralatan dan Mesin	2.270.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Resa 1 / reservation@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	2.270.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Eka W / sales@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	2.040.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PABX Interface
Sewa Peralatan dan Mesin	2.270.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Prita / admin@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Operator
Sewa Peralatan dan Mesin	2.210.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO HR 01 / pm@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	2.210.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO HR 02 - Nana
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Andy / sales1@ibisyogya.com

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO La Table / POS
Sewa Peralatan dan Mesin	860.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Eka Chef / ec@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	860.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Poernomo / sales3@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Security / cs@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	2.040.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Diella / General Cashier
Sewa Peralatan dan Mesin	2.040.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO EDP
Sewa Peralatan dan Mesin	2.270.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Martin / sales4@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Accor Corner / Kantin
Sewa Peralatan dan Mesin	2.630.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Sales Manager (Laptop)
Sewa Peralatan dan Mesin	4.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Boiler Room (Semi Basement)
Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Front of Pump Room (BII)
Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Midle section (Basement II)
Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO West section (Basement II)
Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Grease Trap (Basement II)
Sewa Peralatan dan Mesin	3.110.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO TV Info
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Reception 1
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO HKM / hkm@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Receiving / Store
Sewa Peralatan dan Mesin	2.040.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO CCTV 1
Sewa Peralatan dan Mesin	2.040.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO CCTV 2
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO ENG / ce@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	710.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Reception 3
Sewa Peralatan dan Mesin	2.040.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO AFBM / afbm@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	860.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Order Taker / HK
Sewa Peralatan dan Mesin	6.240.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Server HP Room
Sewa Peralatan dan Mesin	7.280.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO DELUXE ROOM (6 Unit)
Sewa Peralatan dan Mesin	124.250.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO STANDARD ROOM (142 Unit)
Sewa Peralatan dan Mesin	6.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Roof
Sewa Peralatan dan Mesin	860.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Agung BT / fbm@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R Security
Sewa Peralatan dan Mesin	6.320.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PASTRY
Sewa Peralatan dan Mesin	24.400.000,00	Mall Malioboro roof top
Sewa Peralatan dan Mesin	900.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. PABX
Sewa Peralatan dan Mesin	43.600.000,00	Mall Malioboro Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	326.380.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO HOTEL ROOM

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sewa Peralatan dan Mesin	510.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Accounting Purchasing
Sewa Peralatan dan Mesin	540.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Order Laker
Sewa Peralatan dan Mesin	510.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Accounting (AP)
Sewa Peralatan dan Mesin	1.020.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Operator
Sewa Peralatan dan Mesin	510.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Accounting AR
Sewa Peralatan dan Mesin	510.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Receiving
Sewa Peralatan dan Mesin	600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO AHKM
Sewa Peralatan dan Mesin	600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO As FOM
Sewa Peralatan dan Mesin	850.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Book Keeper
Sewa Peralatan dan Mesin	1.720.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Marketing
Sewa Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Personalia
Sewa Peralatan dan Mesin	950.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Personel
Sewa Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Cost Control
Sewa Peralatan dan Mesin	600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Admin
Sewa Peralatan dan Mesin	950.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Resepsion 1
Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	Mall Malioboro roof top
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Admin
Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Reservasi
Sewa Peralatan dan Mesin	1.060.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Restaurant
Sewa Peralatan dan Mesin	1.060.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Kokila Bar
Sewa Peralatan dan Mesin	830.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO AFBM / afbm@ibisyogya.com
Sewa Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Acct 2
Sewa Peralatan dan Mesin	1.650.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO PR Office
Sewa Peralatan dan Mesin	770.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Generalk Cashier
Sewa Peralatan dan Mesin	770.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Operator
Sewa Peralatan dan Mesin	1.110.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Accounting Purchasing
Sewa Peralatan dan Mesin	1.110.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO FC
Sewa Peralatan dan Mesin	1.110.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Reservasi
Sewa Peralatan dan Mesin	1.110.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Security (CCTV)
Sewa Peralatan dan Mesin	1.110.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Personel
Sewa Peralatan dan Mesin	770.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Book Keeper
Sewa Peralatan dan Mesin	770.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Cost Control
Sewa Peralatan dan Mesin	770.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Operator
Sewa Peralatan dan Mesin	530.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Personel
Sewa Peralatan dan Mesin	42.900.000,00	Mall Malioboro Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Operator
Sewa Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. HK Office
Sewa Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Server
Sewa Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Engineering
Sewa Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. General Store
Sewa Peralatan dan Mesin	126.700.000,00	Mall Malioboro Basement
Sewa Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Linen
Sewa Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Pastry 1
Sewa Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Staff Canteen 1

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sewa Peralatan dan Mesin	5.740.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO DELUXE ROOM (6 Unit)
Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Laundry Room
Sewa Peralatan dan Mesin	15.300.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Housekeeping
Sewa Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO DELUXE ROOM (6 Unit)
Sewa Peralatan dan Mesin	99.400.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO STANDARD ROOM (142 Unit)
Sewa Peralatan dan Mesin	135.820.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO STANDARD ROOM (142 Unit)
Sewa Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Laundry Room
Sewa Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Engineering Room
Sewa Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Laundry Room
Sewa Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Security Office
Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Training
Sewa Peralatan dan Mesin	92.040.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO STANDARD ROOM (142 Unit)
Sewa Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Housekeeping
Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Acct 1
Sewa Peralatan dan Mesin	2.300.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO R. Acct 3
Sewa Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Housekeeping
Sewa Peralatan dan Mesin	3.890.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO DELUXE ROOM (6 Unit)
Sewa Peralatan dan Mesin	20.300.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO Operator Room
Sewa Peralatan dan Mesin	598.500.000,00	Mall Malioboro roof top
Sewa Peralatan dan Mesin	2.700.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO BAR
Sewa Peralatan dan Mesin	530.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO MEETING ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	24.100.000,00	Mall Malioboro roof top
Sewa Peralatan dan Mesin	4.370.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO BAR
Sewa Peralatan dan Mesin	4.570.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO MEETING ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	1.340.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO BAR
Sewa Peralatan dan Mesin	2.110.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO OPERATOR ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	10.140.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO MEETING ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	2.130.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO OPERATOR ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	1.060.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO OPERATOR ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	2.740.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO OPERATOR ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	4.570.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO MEETING ROOM
Sewa Peralatan dan Mesin	828.500.000,00	Mall Malioboro LT 3
Sewa Peralatan dan Mesin	17.600.000,00	HOTEL IBIS MALIOBORO BAR
Sewa Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	Mall Malioboro Basment
Sewa Gedung dan Bangunan	597.790.000,00	Disewakan ** Gedung Perumahan
Sewa Gedung dan Bangunan	52.966.126,00	Disewakan ** Gedung Perumahan
Sewa Gedung dan Bangunan	36.191.000,00	Disewakan ** Bangunan Rumah Tempat Tinggal (RTT), Dinas Sosial BA Nomor 030/3030/I tanggal 14/7/2011
Sewa Gedung dan Bangunan	90.039.179,00	Disewakan ** Gedung Perumahan
Sewa Gedung dan Bangunan	102.535.755,00	Gedung Perkantoran disewa BPD DIY
Sewa Gedung dan Bangunan	431.752.706,00	Rumah Dinas

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sewa Gedung dan Bangunan	33.979.600,00	Disewakan ** Kamar mandi, dapur, ruangan, ruangan
Sewa Gedung dan Bangunan	56.965.800,00	Disewakan ** Gudang, Kepsek, Belajar& Adm
Sewa Gedung dan Bangunan	54.967.000,00	Disewakan ** Kamar mandi, Office, TK Kecil
Sewa Gedung dan Bangunan	29.982.000,00	Disewakan ** Kamar penjaga sekolah, KM/WC Gudang
Sewa Gedung dan Bangunan	85.948.400,00	Disewakan ** Kantor, Kantor Ruang Kelas Musik
Sewa Gedung dan Bangunan	27.542.400,00	Disewakan ** Ruang Perpustakaan
Sewa Gedung dan Bangunan	35.978.400,00	Disewakan ** Ruang Tunggu
Sewa Gedung dan Bangunan	18.988.600,00	Disewakan ** Ruang UKS, Bayi, Balok
Sewa Gedung dan Bangunan	63.961.600,00	Disewakan ** TK Kecil Ruang Kelas
Sewa Gedung dan Bangunan	23.191.729.000,00	Bangunan Malioboro Mall
Sewa Gedung dan Bangunan	32.619.600.000,00	
Sewa Gedung dan Bangunan	97.375.274,00	Disewakan ** eks Rumah Dinas dipinjam pakai BAWASLU
Sewa Gedung dan Bangunan	136.400.000,00	Disewakan ** Rumah Dinas III
Sewa Gedung dan Bangunan	202.390.876,00	Disewakan ** Rumah Dinas V
Sewa Gedung dan Bangunan	136.400.000,00	Disewakan ** Rumah Dinas I
Sewa Gedung dan Bangunan	136.400.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Rumah Dinas II
Sewa Gedung dan Bangunan	1.033.385.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Bangunan gedung
Sewa Gedung dan Bangunan	19.500.000,00	Disewakan ** Eks Rumah Negara Gol II Tipe C
Sewa Gedung dan Bangunan	175.733.000,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Gedung sekolah AM Sangaji
Sewa Gedung dan Bangunan	112.338.334,00	Eks Parsenibud
Sewa Gedung dan Bangunan	64.276.578,00	Gedung Rumah Dinas
Sewa Gedung dan Bangunan	158.875.200,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Rumah Dinas
Sewa Gedung dan Bangunan	63.363.855,00	Disewakan ** Gedung Rumah Dinas
Sewa Gedung dan Bangunan	23.344.578,00	Disewakan ** Gedung Rumah Dinas, Dinas Pariwisata BA 593/07217
Sewa Gedung dan Bangunan	840.913.920,00	Disewakan/Dipinjamkan ** Gedung Kantor
Sewa Gedung dan Bangunan	54.390.342.600,00	Gedung JEC
Sewa Gedung dan Bangunan	401.822.641,00	Penyerahan ke Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III ke Pengelola Barang
Sewa Gedung dan Bangunan	21.283.517,00	Disewa untuk foto copy
Sewa Gedung dan Bangunan	19.145.790,00	Disewakan/dipinjamkan **
Sewa Gedung dan Bangunan	39.440.000,00	Tempat Foto copy dan Kantin
Sewa Gedung dan Bangunan	38.356.880,00	Disewakan untuk usaha Foto copy dan kantin
Sewa Gedung dan Bangunan	194.276.692,00	
JUMLAH	**186.527.877.398,00**	

Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp532.733.106,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp532.733.106,00 merupakan Kerjasama Pemanfaatan aset pada BLPT-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud Rp88.419.445.129,00 Rp87.896.425.719,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah goodwill, lisensi dan franchise, hak cipta, hak paten, software, kajian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan, dan Aset Tidak Berwujud lainnya.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp88.419.445.129,00 merupakan Hak Cipta dan Aset Tidak Berwujud Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 137
Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Lisensi dan Franchise	35.000.000,00
2	Hak Cipta	136.849.000,00
3	Software	3.265.298.202,00
4	Kajian	5.415.917.705,00
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	75.887.696.222,00
6	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	3.678.684.000,00
	Jumlah	**88.419.445.129,00**

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 138
Aset Tidak Berwujud per OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.751.411.918,00	6.451.326.918,00
2	Dinas Kesehatan	2.617.036.755,00	2.519.938.255,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	17.448.429.735,00	17.448.429.735,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	162.090.000,00	162.090.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.075.000,00	149.075.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	38.950.000,00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	394.500.000,00	433.450.000,00
8	Dinas Sosial	225.815.150,00	136.166.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	477.624.200,00	283.130.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	662.762.750,00	662.762.750,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.996.135.250,00	3.996.135.250,00
12	Dinas Perhubungan	2.170.092.308,00	2.153.442.308,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.901.650.000,00	7.481.852.000,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	693.994.000,00	693.994.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.471.469.540,00	2.471.469.540,00
16	Dinas Kebudayaan	12.512.189.925,00	11.492.705.925,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.438.256.962,00	5.962.556.462,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	446.186.500,00	446.186.500,00
19	Dinas Pariwisata	2.017.301.050,00	2.017.301.050,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.206.325.780,00	1.206.325.780,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	411.793.500,00	411.793.500,00
22	Sekretariat Daerah	3.260.180.670,00	2.738.962.910,00
23	Badan Penghubung Daerah	-	-

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
24	Sekretariat DPRD	1.120.433.245,00	1.120.433.245,00
25	Inspektorat	544.565.200,00	544.565.200,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.339.114.325,00	9.339.114.325,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	6.562.169.116,00	6.173.326.816,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	775.416.500,00	775.416.500,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	624.475.750,00	624.475.750,00
	Jumlah	**88.419.445.129,00**	**87.896.425.719,00**

Tabel 5. 139
Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD

No	Nama OPD	Lisensi dan Franchise (Rp)	Hak Cipta (Rp)	Software (Rp)	Kajian (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	35.000.000,00	-	320.406.867,00		6.396.005.051,00	
2	Dinas Kesehatan		-	145.098.500,00	2.471.938.255,00		
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM					17.448.429.735,00	
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		-	162.090.000,00			
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		-	-		149.075.000,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja		-			38.950.000,00	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		-	20.000.000,00		374.500.000,00	
8	Dinas Sosial		-	89.649.150,00		136.166.000,00	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		-	194.494.200,00		283.130.000,00	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		-	-	463.043.750,00	199.719.000,00	
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		-	-	-	3.996.135.250,00	
12	Dinas Perhubungan		-	16.650.000,00		2.153.442.308,00	
13	Dinas Komunikasi dan Informatika		-	-		6.901.650.000,00	
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		-	71.500.000,00		622.494.000,00	
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal		-	-	-	2.471.469.540,00	
16	Dinas Kebudayaan		5.000.000,00			11.387.875.925,00	1.119.314.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		-			1.878.886.962,00	2.559.370.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan		-	982.000,00		445.204.500,00	
19	Dinas Pariwisata		-	204.605.000,00	1.812.696.050,00		
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		-			1.206.325.780,00	
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		-			411.793.500,00	
22	Sekretariat Daerah	-	131.849.000,00	449.788.740,00		2.678.542.930,00	
23	Badan Penghubung Daerah		-				
24	Sekretariat DPRD		-	412.405.245,00	519.036.200,00	188.991.800,00	
25	Inspektorat		-	544.565.200,00			
26	Paniradya Kaistimewan		-				
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		-			9.339.114.325,00	
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		-	233.406.000,00		6.328.763.116,00	
29	Badan Kepegawaian Daerah		-	-		775.416.500,00	

No	Nama OPD	Lisensi dan Franchise (Rp)	Hak Cipta (Rp)	Software (Rp)	Kajian (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan		-	399.657.300,00	149.203.450,00	75.615.000,00	
	Jumlah	**35.000.000,00**	**136.849.000,00**	**3.265.298.202,00**	**5.415.917.705,00**	**75.887.696.222,00**	**3.678.684.000,00**

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain Rp74.078.468.794,16 Rp58.999.066.685,37

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 140
Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per OPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.122.496.979,89	6.830.873.710,76
2	Dinas Kesehatan	701.478.185,87	420.807.805,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	46.555.541.130,08	40.442.771.689,80
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	781.752.000,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	155.800.785,24	1.833.785,24
6	Satuan Polisi Pamong Praja	297.165.039,00	158.241.258,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
8	Dinas Sosial	121.002.107,50	100.627.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.319.968,66	4.620.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	608.463.165,52	264.557.165,52
12	Dinas Perhubungan	463.483.855,00	220.340.800,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.434.444.487,44	-
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	123.107.000,00	123.107.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	-	-
16	Dinas Kebudayaan	948.020.198,71	56.656.494,67
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.532.911.953,00	3.529.928.603,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	372.582.333,52	6.237.351.803,82
19	Dinas Pariwisata	15.700.000,00	-
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	912.634.510,58	474.648.232,80
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	221.660.211,00	-
22	Sekretariat Daerah	50.103.750,00	16.575.000,00
23	Badan Penghubung Daerah	45.000.000,00	-
24	Sekretariat DPRD	3.583.987,60	-
25	Inspektorat	1.092.000,00	-
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.186.250,00	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	142.378.336,76	116.126.336,76
29	Badan Kepegawaian Daerah	11.867.074.693,76	-
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	975.000,00	-
	Jumlah	**74.078.468.794,16**	**58.999.066.685,37**

Di dalam aset lain-lain sebesar Rp74.078.468.794,16 terdapat Aset Lainnya sebesar Rp11.724.696.357,00 yang merupakan dana DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF yang dibatasi penggunaannya berdasarkan Surat Edaran Nomor. 900.1.14.1/7481/Keuda perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas TDF.

5.3.1.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp(39.990.708.668,86) Rp(30.694.949.118,52)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp(39.990.708.668,86) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp(39.845.830.505,30) dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp(144.878.163,56) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 141
Akumulasi Penyusutan Dari Kemitraan Pihak Ketiga

No	Nama OPD	Sewa		Kerjasama Pemanfaatan		Total Akumulasi Penyusutan
		Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai	Akumulasi Penyusutan	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)	349.847.300,00	-	532.733.106,00	144.878.163,56	144.878.163,56
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	697.668.301,44			697.668.301,44
3	Dinas Perhubungan	2.117.900.000,00	6.570.000,00			6.570.000,00
4	Dinas Sosial	2.950.084,00				0,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.893.035.007,00	2.811.574.275,08			2.811.574.275,08
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	186.527.877.398,00	35.172.195.005,22			35.172.195.005,22
7	Badan Penghubung Daerah	2.911.574.538,00	1.157.822.923,56			1.157.822.923,56
	Jumlah	**203.051.668.079,00**	**39.845.830.505,30**	**532.733.106,00**	**144.878.163,56**	**39.990.708.668,86**

5.3.2 Kewajiban Rp39.139.904.502,89 Rp48.687.380.760,56

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.139.904.502,89 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp39.139.904.502,89 Rp48.687.380.760,56

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.139.904.502,89 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp19.688.191.252,94, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp8.374.299.969,32, Utang Belanja sebesar Rp3.435.322.748,63 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp7.642.090.532,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak KeTiga (PFK) Rp19.688.191.252,94 Rp19.681.325.489,94

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.688.191.252,94 terdiri dari Utang Jaminan sebesar Rp19.662.925.839,94 pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM serta pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.265.413,00.

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.662.925.839,94 merupakan Utang Jaminan yang terdiri dari Jaminan Kesungguhan sebesar Rp764.853.540,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.433.032.828,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.465.039.471,18.

Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka Rp8.374.299.969,32 Rp1.636.017.146,47

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.374.299.969,32 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2022 belum dikonsumsi/dimanfaatkan.
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.374.299.969,32 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka untuk Retribusi Daerah sebesar Rp7.667.364.928,23 dan Pendapatan Diterima Dimuka untuk Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp706.935.041,10 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 142
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	362.185.600,00	12.185.600,00
2	Dinas Pariwisata	373.084.645,10	9.189.041,10
3	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	212.500.000,00	29.638.921,53
4	Dinas Kesehatan	17.500.000,00	17.666.666,67
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	7.409.029.724,22	1.567.336.917,17
	Jumlah	**8.374.299.969,32**	**1.636.017.146,47**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan (Balai Parkir) merupakan penerimaan pembayaran sewa lahan parkir Bandara Adi Sucipto dari PT. Angkasa Pura dan sewa lahan parkir Abu Bakar Ali (Pendapatan Retribusi Daerah) namun sampai dengan per 31 Desember 2022 belum menjadi hak Dinas Perhubungan sebesar Rp362.185.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 143
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan

Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka
Sewa Lahan parkir ABA			
01-01-2023 s.d 31-12-2023	350.000.000,00	01-01-2023 s.d 31-12-2023	350.000.000,00
Sewa Lahan Bandara Adi Sucipto			
02-05-2022 s.d 01-05-2023	36.556.800,00	01-01-2023 s.d 01-05-2023	12.185.600,00
Jumlah	**386.556.800,00**		**362.185.600,00**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp373.084.645,10 merupakan penerimaan sewa sebagian bangunan pada TIC Jl. Malioboro dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat (Pendapatan Retribusi) dan sewa Hotel Mutiara 2 namun sampai dengan per 31 Desember 2022 belum menjadi hak Dinas Pariwisata DIY dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 144
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Pariwisata

Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka
Sewa TIC Jl. Malioboro			
01-06-2020 s.d 31-05-2023	19.500.000,00	01-01-2023 s.d 31-05-2023	2.689.041,10
Sewa Hotel Mutiara 2			
20-02-2022 s.d 19-02-2025	180.000.000,00	01-01-2023 s.d 19 -02-2025	128.241.758,00
08-10-2022 s.d 07-10-2025	180.000.000,00	01-01-2023 s.d 07-10-2025	166.153.846,00
01-01-2022 s.d 31-12-2023	152.000.000,00	01-01-2023 s.d 31-12-2023	76.000.000,00
Jumlah	**531.500.000,00**		**373.084.645,10**

Pendapatan Diterima Dimuka pada pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) sebesar Rp212.500.000,00 merupakan Sewa basement untuk server/penguat sinyal (Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah), namun sampai dengan per 31 Desember 2022 belum menjadi hak Biro Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 145
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Biro Umum Setda DIY

Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka
10-11-2022 s.d 09-11-2025	225.000.000,00	01-01-2023 s.d 09-11-2023	212.500.000,00
Jumlah	**225.000.000,00**		**212.500.000,00**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kesehatan (RS Ghrasia) sebesar Rp17.500.000,00 merupakan penerimaan sewa Pemanfaatan Aset Gedung Layanan dan Penunjang (Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 146
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Kesehatan

Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka
25-10-2022 s.d 25-10-2023	24.000.000,00	01-01-2023 s.d 25-10-2023	17.500.000,00
Jumlah	**24.000.000,00**		**17.500.000,00**

Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA sebesar Rp7.409.029.724,22 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah pada BPKA dari pihak ketiga (Pendapatan Retribusi Daerah), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 147
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode	Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
					Periode	Nilai (Rp)
BPKA INDUK						
1	Tanah dan Bangunan	PT Formula Land	01/09/2022 s/d 31/08/2023	116.000.000,00	01/01/2023 sd 31/08/2023	77.227.397,26
					Jumlah	**77.227.397,26**
2	Bangunan	BPD DIY	01/07/2022 s/d 30/06/2027	990.000.000,00	01/01/2023 sd 30/06/2023	98.186.301,37
			01/07/2022 s/d 30/06/2023	198.000.000,00		
			01/07/2023 s/d 30/06/2024	198.000.000,00		198.000.000,00
			01/07/2024 s/d 30/06/2025	198.000.000,00		198.000.000,00
			01/07/2025 s/d 30/06/2026	198.000.000,00		198.000.000,00
			01/07/2026 s/d 30/06/2027	198.000.000,00		198.000.000,00
					Jumlah	**890.186.301,37**
3	Tanah	PT. Selo Adi Karto	01/04/2022 s/d 31/03/2024	233.400.000,00	01/01/2023 sd 31/03/2023	28.775.342,47
			01/04/2022 s/d 31/03/2023	116.700.000,00		116.700.000,00
			01/04/2023 s/d 31/03/2024	116.700.000,00		
					Jumlah	**145.475.342,47**
4		Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	23/10/2022 s/d 22/10/2023	67.704.000,00	01/01/2023 sd 22/10/2023	54.719.671,23
					Jumlah	**54.719.671,23**
5	Tanah dan Bangunan	Suprihanto, B.Sc	01/04/2022 s/d 31/03/2023	191.250.000,00	01/01/2023 sd 31/03/2023	47.157.534,25
					Jumlah	**47.157.534,25**
6	Tanah dan Bangunan	BUKP Gondokusuman	01/09/2019 s/d 31/08/2022	60.000.000,00	01/01/2023 sd 28/02/2023	1.852.804,34
			01/09/2019 s/d 31/08/2020	20.000.000,00		
			01/09/2020 s/d 31/08/2021	20.000.000,00		
			01/09/2021 s/d 31/08/2022	20.000.000,00		
			01/09/2022 s/d 28/02/2023	Addendum Perjanjian		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode	Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
					Periode	Nilai (Rp)
				(keringanan sewa berupa Penambahan jangka waktu)		
					Jumlah	**1.852.804,34**
7		Yayasan Perguruan Dharma Pala Sleman	20/11/2021 s/d 19/11/2026	45.200.000,00	01/01/2023 sd 19/11/2023	7.999.780,82
			20/11/2021 s/d 19/11/2022	9.040.000,00		9.040.000,00
			20/11/2022 s/d 19/11/2023	9.040.000,00		9.040.000,00
			20/11/2023 s/d 19/11/2024	9.040.000,00		9.040.000,00
			20/11/2024 s/d 19/11/2025	9.040.000,00		
			20/11/2025 s/d 19/11/2026	9.040.000,00		
					Jumlah	**35.119.780,82**
8	Tanah	Pemkab Bantul	28/03/2022 s/d 27/03/2023	16.000.000,00	01/01/2023 sd 27/03/2023	3.769.863,01
					Jumlah	**3.769.863,01**
9	Tanah	dr. Soedarman	03/09/2018 s/d 02/09/2023	175.000.000,00	01/01/2023 sd 02/09/2023	23.493.150,68
			03/09/2018 s/d 02/09/2019	35.000.000,00		
			03/09/2019 s/d 02/09/2020	35.000.000,00		
			03/09/2020 s/d 02/09/2021	35.000.000,00		
			03/09/2021 s/d 02/09/2022	35.000.000,00		
			03/09/2022 s/d 02/09/2023	35.000.000,00		
					Jumlah	**23.493.150,68**
10	Tanah	KPN Sumber Rejeki Kulon Progo	21/02/2021 s/d 20/02/2023	12.400.000,00	01/01/2023 sd 20/02/2023	866.301,37
			21/02/2021 s/d 20/02/2022	6.200.000,00		
			21/02/2022 s/d 20/02/2023	6.200.000,00		
					Jumlah	**866.301,37**
11	Tanah	Tirto Manunggal	01/08/2019 s/d 31/07/2024	20.000.000,00	01/01/2023 sd 31/07/2023	2.323.287,67
			01/08/2019 s/d 31/07/2020	4.000.000,00		4.000.000,00
			01/08/2020 s/d 31/07/2021	4.000.000,00		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode	Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
					Periode	Nilai (Rp)
			01/08/2021 s/d 31/07/2022	4.000.000,00		
			01/08/2022 s/d 31/07/2023	4.000.000,00		
			01/08/2023 s/d 31/07/2024	4.000.000,00		
					Jumlah	**6.323.287,67**
12		Pemerintah Kalurahan Widodomartani	01/09/2021 s/d 31/08/2026	24.000.000,00	01/01/2023 sd 31/08/2023	3.195.616,44
			01/09/2021 s/d 31/08/2022	4.800.000,00		4.800.000,00
			01/09/2022 s/d 31/08/2023	4.800.000,00		4.800.000,00
			01/09/2023 s/d 31/08/2024	4.800.000,00		4.800.000,00
			01/09/2024 s/d 31/08/2025	4.800.000,00		
			01/09/2025 s/d 31/08/2026	4.800.000,00		
					Jumlah	**17.595.616,44**
13	Tanah	PT. Daya Armada Nusantara	25/03/2022 s/d 24/03/2027	143.500.000,00	01/01/2023 sd 24/03/2023	6.526.301,37
			25/03/2022 s/d 24/03/2023	28.700.000,00		28.700.000,00
			25/03/2023 s/d 24/03/2024	28.700.000,00		28.700.000,00
			25/03/2024 s/d 24/03/2025	28.700.000,00		28.700.000,00
			25/03/2025 s/d 24/03/2026	28.700.000,00		28.700.000,00
			25/03/2026 s/d 24/03/2027	28.700.000,00		
					Jumlah	**121.326.301,37**
14	Tanah	Tien Setiantoro	01/09/2022 s/d 31/08/2023	10.500.000,00	01/01/2023 sd 31/08/2023	6.990.410,96
					Jumlah	**6.990.410,96**
15	Tanah	Aris Purnomo	01/09/2022 s/d 31/08/2025	6.300.000,00	01/01/2023 sd 31/08/2023	1.398.082,19
			01/09/2022 s/d 31/08/2023	2.100.000,00		2.100.000,00
			01/09/2023 s/d 31/08/2024	2.100.000,00		2.100.000,00
			01/09/2024 s/d 31/08/2025	2.100.000,00		
					Jumlah	**5.598.082,19**
16	Tanah	Sumartiningsih	01/09/2022 s/d 31/08/2025	12.600.000,00	01/01/2023 sd 31/08/2023	2.796.164,38

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode	Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
					Periode	Nilai (Rp)
			01/09/2022 s/d 31/08/2023	4.200.000,00		4.200.000,00
			01/09/2023 s/d 31/08/2024	4.200.000,00		4.200.000,00
			01/09/2024 s/d 31/08/2025	4.200.000,00		
					Jumlah	**11.196.164,38**
17	Tanah	Roos Ani	01/09/2022 s/d 31/08/2025	8.190.000,00	01/01/2023 sd 31/08/2023	1.817.506,85
			01/09/2022 s/d 31/08/2023	2.730.000,00		2.730.000,00
			01/09/2023 s/d 31/08/2024	2.730.000,00		2.730.000,00
			01/09/2024 s/d 31/08/2025	2.730.000,00		
					Jumlah	**7.277.506,85**
18	Tanah	Suka Astuti	01/09/2022 s/d 31/08/2023	3.150.000,00	01/01/2023 sd 31/08/2023	2.097.123,29
					Jumlah	**2.097.123,29**
19	Sebagian Tanah dan Bangunan	Badan Anti Korupsi	01/12/2022 s/d 30/11/2023	11.500.000,00	01/01/2023 sd 30/11/2023	10.523.287,67
					Jumlah	**10.523.287,67**
20	Sebagian Tanah dan Bangunan	PT. Avo Innovation Technology	01/05/2021 s/d 30/04/2023	29.600.000,00	01/01/2023 sd 30/04/2023	4.865.753,42
			01/05/2021 s/d 30/04/2022	14.800.000,00		
			01/05/2022 s/d 30/04/2023	14.800.000,00		
					Jumlah	**4.865.753,42**
21	Sebagian Tanah dan Bangunan	Ir. Bambang Priambodo	01/01/2022 s/d 31/12/2023	72.000.000,00	01/01/2023 sd 31/12/2023	36.000.000,00
			01/01/2022 s/d 31/12/2022	36.000.000,00		
			01/01/2023 s/d 31/12/2023	36.000.000,00		
					Jumlah	**36.000.000,00**
22	Tanah	YB Pratomo	01/02/2022 s/d 31/01/2027	115.000.000,00	01/01/2023 sd 31/01/2023	1.953.424,66
			01/02/2022 s/d 31/01/2023	23.000.000,00		23.000.000,00
			01/02/2023 s/d 31/01/2024	23.000.000,00		23.000.000,00
			01/02/2024 s/d 31/01/2025	23.000.000,00		23.000.000,00
			01/02/2025 s/d 31/01/2026	23.000.000,00		23.000.000,00

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode	Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
					Periode	Nilai (Rp)
			01/02/2026 s/d 31/01/2027	23.000.000,00		
					Jumlah	**93.953.424,66**
23	Tanah dan Bangunan(Rumah Daerah)	Aswin Kumala Darma Saputra	31/01/2022 s/d 30/01/2023	19.500.000,00	01/01/2023 sd 30/01/2023	1.602.739,73
					Jumlah	**1.602.739,73**
24	Tanah	Muhyudi Prabowo	01/01/2021 s/d 31/12/2023	4.500.000,00	01/01/2023 sd 31/12/2023	1.500.000,00
			01/01/2021 s/d 31/12/2021	1.500.000,00		
			01/01/2022 s/d 31/12/2022	1.500.000,00		
			01/01/2023 s/d 31/12/2023	1.500.000,00		
					Jumlah	**Rp1.500.000,00**
25	Tanah	Widodo Mulyo	01/10/2022 s/d 30/09/2025	4.800.000,00	01/01/2023 sd 30/09/2023	1.196.712,33
			01/10/2022 s/d 30/09/2023	1.600.000,00		1.600.000,00
			01/10/2023 s/d 30/09/2024	1.600.000,00		1.600.000,00
			01/10/2024 s/d 30/09/2025	1.600.000,00		
					Jumlah	**4.396.712,33**
26	Tanah dan Bangunan	Early Childhood Care and) Development Resource Center(ECCD-RC	01/04/2021 s/d 31/03/2026	126.000.000,00	01/01/2023 sd 31/03/2023	6.213.698,63
			01/04/2021 s/d 31/03/2022	25.200.000,00		25.200.000,00
			01/04/2022 s/d 31/03/2023	25.200.000,00		25.200.000,00
			01/04/2023 s/d 31/03/2024	25.200.000,00		25.200.000,00
			01/04/2024 s/d 31/03/2025	25.200.000,00		
			01/04/2025 s/d 31/03/2026	25.200.000,00		
					Jumlah	**81.813.698,63**
27	Tanah dan Bangunan(Rumah Daerah)	CV. Plainthing Group	08/04/2021 s/d 07/04/2023	43.600.000,00	01/01/2023 sd 07/04/2023	5.793.424,66
			08/04/2021 s/d 07/04/2022	21.800.000,00		
			08/04/2022 s/d 07/04/2023	21.800.000,00		
					Jumlah	**5.793.424,66**

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode	Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
					Periode	Nilai (Rp)
28	Tanah dan Bangunan	Lembaga Konsumen Yogyakarta	01/06/2021 s/d 31/05/2024	12.000.000,00	01/01/2023 sd 31/05/2023	1.654.794,52
			01/06/2021 s/d 31/05/2022	4.000.000,00		4.000.000,00
			01/06/2022 s/d 31/05/2023	4.000.000,00		
			01/06/2023 s/d 31/05/2024	4.000.000,00		
					Jumlah	**5.654.794,52**
29	Tanah dan Bangunan	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2Desaku)	01/02/2021 s/d 31/01/2023	16.500.000,00	01/01/2023 sd 31/01/23	700.684,93
			01/02/2021 s/d 31/01/2022	8.250.000,00		
			01/02/2022 s/d 31/01/2023	8.250.000,00		
					Jumlah	**700.684,93**
30	Tanah	Abung Hidaya	01/10/2022 s/d 30/09/2027	39.500.000,00	01/01/2023 sd 30/09/2023	5.908.767,12
			01/10/2022 s/d 30/09/2023	7.900.000,00		Rp7.900.000,00
			01/10/2023 s/d 30/09/2024	7.900.000,00		Rp7.900.000,00
			01/10/2024 s/d 30/09/2025	7.900.000,00		Rp7.900.000,00
			01/10/2025 s/d 30/09/2026	7.900.000,00		Rp7.900.000,00
			01/10/2026 s/d 30/09/2027	7.900.000,00		
					Jumlah	**37.508.767,12**
31	Tanah	Uep Sumiarsih	01/10/2022 s/d 30/09/2023	3.550.000,00	01/01/2023 sd 30/09/2023	2.655.205,48
					Jumlah	**2.655.205,48**
32	Tanah	Juu	01/10/2022 s/d 30/09/2023	5.225.000,00	01/01/2023 sd 30/09/2023	3.908.013,70
					Jumlah	**3.908.013,70**
33	Tanah	Zuljasrifon	01/10/2021 s/d 30/09/2026	22.500.000,00	01/01/2023 sd 30/09/2023	3.365.753,42
			01/10/2021 s/d 30/09/2022	4.500.000,00		4.500.000,00
			01/10/2022 s/d 30/09/2023	4.500.000,00		4.500.000,00
			01/10/2023 s/d 30/09/2024	4.500.000,00		4.500.000,00
			01/10/2024 s/d 30/09/2025	4.500.000,00		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode	Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
					Periode	Nilai (Rp)
			01/10/2025 s/d 30/09/2026	4.500.000,00		
					Jumlah	**16.865.753,42**
34	Tanah dan Bangunan	Beberapa penyewa	05/07/2022 s/d 04/07/2023	240.853.816,00	01/01/2023 sd 04/07/2023	122.076.591,67
					Jumlah	**122.076.591,67**
36	Tanah dan Bangunan	PT. Setia Mataram Tritunggal	13/09/2022 s/d 12/09/2023	7.650.000.000,00	01/01/2023 sd 12/09/2023	5.344.520.547,95
					Jumlah	**5.344.520.547,95**
37	Tanah dan Bangunan	Pemerintah Kalurahan Sumberagung	01/03/2022 s/d 28/02/2027	31.725.000,00	01/01/2023 sd 28/02/2023	
			01/03/2022 s/d 28/02/2023	6.345.000,00		1.025.630,14
			01/03/2023 s/d 28/02/2024	6.345.000,00		6.345.000,00
			01/03/2024 s/d 28/02/2025	6.345.000,00		6.345.000,00
			01/03/2025 s/d 28/02/2026	6.345.000,00		6.345.000,00
			01/03/2026 s/d 28/02/2027	6.345.000,00		6.345.000,00
					Jumlah	**26.405.630,14**
38	Tanah dan	Ajie Mardana ST	01/08/2022 s/d 31/01/2023	780.000,00	01/01/2023 sd 31/01/2023	66.246,58
					Jumlah	**66.246,58**
39	Tanah dan	Umi Hartini	01/10/2022 s/d 31/03/2023	816.000,00	01/01/2023 sd 31/03/2023	201.205,48
					Jumlah	**201.205,48**
40	Tanah dan	Ny. Djaenab Murniati	01/12/2022 s/d 31/03/2023	2.513.600,00	01/01/2023 sd 31/03/2023	619.791,78
					Jumlah	**619.791,78**
41	Tanah dan	Arum Iswandari	01/11/2022 s/d 31/01/2023	630.000,00	01/01/2023 sd 31/01/2023	53.506,85
					Jumlah	**53.506,85**
42	Tanah dan	Sigit Arianta Wibowo	01/09/2021 s/d 31/08/2023	2.858.400,00	01/01/2023 sd 31/08/2023	951.494,79
			01/09/2021 s/d 31/08/2022	1.429.200,00		
			01/09/2022 s/d 31/08/2023	1.429.200,00		
					Jumlah	**951.494,79**

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode	Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
					Periode	Nilai (Rp)
43	Tanah dan Bangunan	Dra. Sulistyaningsih	01/03/2022 s/d 28/02/2023	3.396.000,00	01/01/2023 sd 28/02/2023	548.942,47
					Jumlah	**548.942,47**
44	Tanah dan Bangunan	Gutik Lestarna SPT	01/12/2022 s/d 31/01/2023	499.000,00	01/01/2023 sd 31/01/2023	42.380,82
					Jumlah	**42.380,82**
45	Tanah dan Bangunan	Hasan Khoiri AMD	01/12/2022 s/d 28/02/2023	775.800,00	01/01/2023 sd 28/02/2023	125.403,29
					Jumlah	**125.403,29**
					TOTAL BPKA	**7.261.626.642,04**
KPPD KULON PROGO						
1	Bangunan	PT BRI (PERSERO) Cabang Wates (ATM)	01/08/2021 s.d 31/07/2022	3.000.000,00	01/01/2022 sd.31/07/2022	1.742.465,75
		PT BNI (PERSERO) Cabang UGM (ATM)	01/08/2021 s.d 31/07/2024 01/08/2021 s.d 31/07/2022 01/08/2021 s.d 31/07/2023 01/08/2021 s.d 31/07/2024	9.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	01/01/2022 sd 31/07/2024	 1.742.465,75 3.000.000,00
		Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy)	01/08/2021 s.d 31/07/2022	4.500.000,00	01/01/2022 sd 31/07/2022	2.700.821,92
		CV Pandean Baru Motor (Saptono Budi Raharjo)	01/08/2021 s.d 31/07/2022	4.000.000,00	01/01/2022 sd 31/07/2022	2.323.287,67
		Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir)	01/08/2021 s.d 31/07/2022	16.000.000,00	01/01/2022 sd 31/07/2022	9.438.356,16
		Painem (Kantin)	01/08/2021 s.d 31/07/2022	4.500.000,00	01/01/2022 sd 31/07/2022	2.700.821,92
		PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD)	01/01/2022 s.d 31/12/2026 01/01/2022 s.d 31/12/2022 01/01/2023 s.d 31/12/2023 01/01/2024 s.d 31/12/2024 01/01/2025 s.d 31/12/2025 01/01/2026 s.d 31/12/2026	60.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00	01/01/2022sd 31/12/2026	 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
		PT. BANK BPD DIY Cabang	01/01/2022 s.d 31/12/2026	15.000.000,00	01/01/2022 sd 31/07/2022	
		Wates (ATM BPD)	01/01/2022 s.d 31/12/2022	3.000.000,00		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode	Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
					Periode	Nilai (Rp)
			01/01/2023 s.d 31/12/2023	3.000.000,00		3.000.000,00
			01/01/2024 s.d 31/12/2024	3.000.000,00		3.000.000,00
			01/01/2025 s.d 31/12/2025	3.000.000,00		3.000.000,00
			01/01/2026 s.d 31/12/2026	3.000.000,00		3.000.000,00
					JUMLAH	**83.648.219,18**
KPPD SLEMAN						
1	Bangunan	PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (Kantor Kas)	01/01/2019 s.d 31/12/2023	95.000.000,00	01/01/2022 sd.31/12/2023	
			01/01/2019 s.d 31/12/2019	19.000.000,00		
			01/01/2020 s.d 31/12/2020	19.000.000,00		
			01/01/2021 s.d 31/12/2021	19.000.000,00		
			01/01/2022 s.d 31/12/2022	19.000.000,00		
			01/01/2023 s.d 31/12/2023	19.000.000,00		19.000.000,00
		PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (ATM)	01/04/2019 s.d 31/03/2024	81.775.000,00	01/01/2022 sd 31/03/2024	
			01/04/2019 s.d 31/03/2020	16.355.000,00		
			01/04/2020 s.d 31/03/2021	16.355.000,00		
			01/04/2021 s.d 31/03/2022	16.355.000,00		
			01/04/2022 s.d 31/03/2023	16.355.000,00		4.032.739,73
			01/04/2023 s.d 31/03/2024	16.355.000,00		16.355.000,00
					JUMLAH	**39.387.739,73**
KPPD BANTUL						
1	Bangunan	Bank BNI Cabang Yogyakarta	16/10/2020 s.d 15/10/2023	9.000.000,00	01/01/2022 sd.15/10/2023	2.367.123,29
		Pimpinan BRI Cabang Bantul				8.000.000,00
		Pimpinan PT Bank BPD DIY Cabang Bantul				14.000.000,00
					JUMLAH	**24.367.123,29**
					TOTAL KPPD	**147.403.082,19**
					TOTAL BPKA + KPPD	**7.409.029.724,23**

5.3.2.1.3 Utang Belanja Rp3.435.322.748,63 Rp2.661.564.418,15

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.435.322.748,63 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2022 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp444.592.670,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.881.594.673,63 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp109.135.405,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 148
Rincian Utang Belanja per OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2022 (Rp)	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	808.673.699,00	711.838.587,00
2	Dinas Kesehatan	640.330.235,63	328.932.929,15
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	211.996.323,00	197.791.655,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	12.900.619,00	9.767.552,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.701.391,00	7.784.456,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.731.113,00	11.925.818,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.447.488,00	33.371.414,00
8	Dinas Sosial	78.801.840,00	75.376.718,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	52.987.143,00	46.959.606,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	27.923.366,00	16.907.943,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.634.609,00	55.451.035,00
12	Dinas Perhubungan	44.534.731,00	41.441.258,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.762.680,00	19.558.473,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	107.070.203,00	21.163.295,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	6.766.747,00	7.497.539,00
16	Dinas Kebudayaan	173.385.020,00	135.905.633,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	158.932.606,00	132.730.838,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	106.216.880,00	71.000.430,00
19	Dinas Pariwisata	37.739.295,00	29.445.635,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	92.892.721,00	70.019.192,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57.391.316,00	47.576.528,00
22	Sekretariat Daerah	243.520.939,00	181.216.997,00
23	Badan Penghubung Daerah	20.712.579,00	19.594.475,00
24	Sekretariat DPRD	78.050.184,00	65.210.371,00
25	Inspektorat	19.058.816,00	7.584.575,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	428.031,00	493.219,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	202.338.436,00	240.883.904,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	34.189.805,00	35.525.813,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	59.203.933,00	38.608.530,00
	Jumlah	**3.435.322.748,63**	**2.661.564.418,15**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.435.322.748,63 dirinci menurut jenis utang belanja sebagai berikut :

Tabel 5. 149
Rincian Utang Belanja Menurut Jenis Utang Belanja

No	Nama OPD	Utang Blj Pegawai	Utang Blj Barang Jasa	Utang Blj Modal	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	820.800,00	698.717.494,00	109.135.405,00	808.673.699,00
2	Dinas Kesehatan	417.273.037,00	223.057.198,63		640.330.235,63
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM		211.996.323,00		211.996.323,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		12.900.619,00		12.900.619,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		12.701.391,00		12.701.391,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja		11.731.113,00		11.731.113,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	37.447.488,00		37.447.488,00
8	Dinas Sosial		78.801.840,00		78.801.840,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		52.987.143,00		52.987.143,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		27.923.366,00		27.923.366,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		75.634.609,00		75.634.609,00
12	Dinas Perhubungan		44.534.731,00		44.534.731,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika		21.762.680,00		21.762.680,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		107.070.203,00		107.070.203,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal		6.766.747,00		6.766.747,00
16	Dinas Kebudayaan		173.385.020,00		173.385.020,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		158.932.606,00		158.932.606,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan		106.216.880,00		106.216.880,00
19	Dinas Pariwisata		37.739.295,00		37.739.295,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		92.892.721,00		92.892.721,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		57.391.316,00		57.391.316,00
22	Sekretariat Daerah	3.711.512,00	239.809.427,00		243.520.939,00
23	Badan Penghubung Daerah		20.712.579,00		20.712.579,00
24	Sekretariat DPRD	560.000,00	77.490.184,00		78.050.184,00
25	Inspektorat		19.058.816,00		19.058.816,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		428.031,00		428.031,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		202.338.436,00		202.338.436,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	-	34.189.805,00		34.189.805,00
29	Badan Pendidikan dan Pelatihan	22.227.321,00	36.976.612,00		59.203.933,00
	Jumlah	**444.592.670,00**	**2.881.594.673,63**	**109.135.405,00**	**3.435.322.748,63**

Saldo utang Belanja Barang Jasa sebesar Rp2.881.594.673,63 terdiri dari Utang Telepon sebesar Rp46.163.070,00, Utang Air sebesar Rp108.618.161,00, Utang Listrik sebesar Rp2.677.298.030,00, Utang Internet sebesar Rp29.662.320,00, Utang Pengelolaan Sampah sebesar Rp1.247.790,00 dan Utang Bahan Pakai Habis sebesar Rp18.605.302,63 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama OPD	Utang Telepon	Utang Air	Utang Listrik	Utang Internet	Utang Pengelolaan Sampah	Utang Bahan Pakai Habis	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	11.534.877,00	18.582.820,00	664.588.247,00	4.011.550,00			698.717.494,00
2	Dinas Kesehatan	2.825.580,00	12.872.664,00	188.330.903,00	422.749,00	-	18.605.302,63	223.057.198,63
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	7.252.588,00	1.407.400,00	202.046.235,00	1.290.100,00	-	-	211.996.323,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	160.724,00	54.000,00	12.685.895,00	-	-	-	12.900.619,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	103.071,00	-	12.598.320,00	-	-	-	12.701.391,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	111.587,00	-	10.142.499,00	1.477.027,00	-	-	11.731.113,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	487.754,00	67.500,00	36.892.234,00	-	-	-	37.447.488,00
8	Dinas Sosial	5.826.243,00	7.561.340,00	64.809.257,00	605.000,00	-	-	78.801.840,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.633.863,00	231.700,00	51.121.580,00	-	-	-	52.987.143,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.077.302,00	3.653.400,00	23.192.664,00	-	-	-	27.923.366,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	854.885,00	4.254.292,00	70.525.432,00	-	-	-	75.634.609,00
12	Dinas Perhubungan	395.975,00	365.500,00	43.773.256,00		-	-	44.534.731,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	302.620,00	-	21.460.060,00	-	-	-	21.762.680,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	161.802,00	23.552.975,00	82.396.386,00	-	959.040,00	-	107.070.203,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	308.087,00	-	6.458.660,00	-	-	-	6.766.747,00
16	Dinas Kebudayaan	611.214,00	141.000,00	172.632.806,00	-	-	-	173.385.020,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.579.700,00	54.500,00	156.298.406,00	-	-	-	158.932.606,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	312.206,00	3.696.500,00	102.208.174,00		-	-	106.216.880,00
19	Dinas Pariwisata	309.610,00	895.000,00	36.534.685,00				37.739.295,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.086.758,00	5.099.400,00	86.426.563,00	280.000,00			92.892.721,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	392.357,00	-	56.998.959,00	-	-	-	57.391.316,00
22	Sekretariat Daerah	3.266.377,00	-	236.543.050,00	-	-	-	239.809.427,00
23	Badan Penghubung Daerah	1.047.864,00	-	19.664.715,00	-	-	-	20.712.579,00
24	Sekretariat DPRD	335.191,00	16.063.500,00	61.091.493,00	-	-	-	77.490.184,00
25	Inspektorat	206.571,00	54.500,00	18.797.745,00	-	-	-	19.058.816,00
26	Badan Perencanaan	428.031,00	-	-	-	-	-	428.031,00

No	Nama OPD	Utang Telepon	Utang Air	Utang Listrik	Utang Internet	Utang Pengelolaan Sampah	Utang Bahan Pakai Habis	Jumlah
	Pembangunan Daerah							
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.609.584,00	4.483.670,00	176.800.338,00	19.156.094,00	288.750,00	-	202.338.436,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	850.164,00	5.406.500,00	27.933.141,00	-	-	-	34.189.805,00
29	Badan Pendidikan dan Pelatihan	90.485,00	120.000,00	34.346.327,00	2.419.800,00	-	-	36.976.612,00
	Jumlah	**46.163.070,00**	**108.618.161,00**	**2.677.298.030,00**	**29.662.320,00**	**1.247.790,00**	**18.605.302,63**	**2.881.594.673,63**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp7.642.090.532,00 Rp24.708.473.706,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.642.090.532,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Utang tersebut timbul sebagai konsekuensi adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 150
Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Uraian	Kabupaten Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta	Total
BBN-KB	571.545.700,00	195.594.300,00	311.806.800,00	913.156.500,00	445.304.900,00	2.437.408.200,00
PAP	3.604.580,00	284.570,00	284.570,00	284.570,00	284.570,00	4.742.860,00
PBB-KB	-	-	-	-	-	-
PKB	1.169.942.100,00	637.236.072,00	605.957.100,00	1.818.476.900,00	968.327.300,00	5.199.939.472,00
Pajak Rokok	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**1.745.092.380,00**	**833.114.942,00**	**918.048.470,00**	**2.731.917.970,00**	**1.413.916.770,00**	**7.642.090.532,00**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.3 Ekuitas Rp12.528.014.950.938,50 Rp11.950.577.596.343,60

Saldo Ekuitas Pemda DIY sebesar Rp12.528.014.950.938,50 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.528.014.950.938,50 mengalami kenaikan sebesar Rp577.437.354.594,91 atau 4,83% dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp11.950.577.596.343,60.

5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan - LO Rp5.722.773.134.337,18 Rp6.634.418.364.309,50

Pendapatan - LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.722.773.134.337,18. Pendapatan LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp911.645.229.972,32) atau sebesar (13,74%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan - LO Pemda DIY meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 151
Rincian Pendapatan - LO

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.332.734.555.478,38	1.944.825.045.843,16	387.909.509.635,22	19,95
PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.269.446.186.331,00	3.794.855.660.531,00	(525.409.474.200,00)	(13,85)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	120.592.392.527,80	894.737.657.935,34	(774.145.265.407,54)	(86,52)
Jumlah	**5.722.773.134.337,18**	**6.634.418.364.309,50**	**(911.645.229.972,32)**	**(13,74)**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Rp2.332.734.555.478,38 Rp1.944.825.045.843,16

Pendapatan Asli Daerah - LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.280.456.730.452,42. Pendapatan Asli Daerah - LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp387.909.509.635,22 atau sebesar 19,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah - LO Pemda DIY meliputi : Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 151
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Pajak Daerah-LO	1.951.260.431.032,85	1.688.402.302.123,00	262.858.128.909,85	15,57
Retribusi Daerah-LO	26.860.499.284,11	23.658.209.445,55	3.202.289.838,56	13,54
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	199.891.066.543,92	153.233.086.264,59	46.657.980.279,33	30,45
Lain-lain PAD yang Sah-LO	154.722.558.617,50	79.531.448.010,02	75.191.110.607,48	94,54
Jumlah	**2.332.734.555.478,38**	**1.944.825.045.843,16**	**387.909.509.635,22**	**19,95**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO Rp1.951.260.431.032,85 Rp1.688.402.302.123,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.951.260.431.032,85. Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp262.858.128.909,85 atau sebesar 15,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemda DIY Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Pajak Daerah pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 152
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	953.419.792.200,00	874.699.341.950,00	78.720.450.250,00	9,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	404.963.726.500,00	362.968.212.400,00	41.995.514.100,00	11,57
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)- LO	302.161.948.065,85	232.244.843.244,00	69.917.104.821,85	30,10
4	Pajak Air Permukaan - LO	1.123.483.976,00	1.301.742.775,00	(178.258.799,00)	(13,69)
5	Pajak Rokok - LO	289.591.480.291,00	217.188.161.754,00	72.403.318.537,00	33,34
	Jumlah	**1.951.260.431.032,85**	**1.688.402.302.123,00**	**262.858.128.909,85**	**15,57**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Rp26.860.499.284,11 Rp23.658.209.445,55

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp26.860.499.284,11. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3.202.289.838,56 atau sebesar 13,54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemda DIY terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Retribusi pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 153
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	13.561.076.297,14	13.368.773.111,00	192.303.186,14	1,44
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	13.279.662.986,97	10.074.811.334,55	3.204.851.652,42	31,81
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	19.760.000,00	214.625.000,00	(194.865.000,00)	(90,79)
	Jumlah	**26.860.499.284,11**	**23.658.209.445,55**	**3.202.289.838,56**	**13,54**

Tabel 5. 154
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO (Sub Rinci)

No.	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	**Retribusi Jasa Umum**	**13.561.076.297,14**	**13.368.773.111,00**	**192.303.186,14**	**1,44**
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	116.301.000,00	25.713.000,00	90.588.000,00	352,30
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.037.796.297,14	6.217.588.111,00	820.208.186,14	13,19
	- Retribusi Pengolahan Limbah Cair	874.466.000,00	866.984.000,00	7.482.000,00	0,86
	- Retribusi Pelayanan Pendidikan	5.532.513.000,00	6.258.488.000,00	(725.975.000,00)	(11,60)
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**13.279.662.986,97**	**10.074.811.334,55**	**3.204.851.652,42**	**31,81**
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.113.751.936,97	5.740.670.935,55	2.373.081.001,42	41,34
	- Retribusi Terminal	424.172.000,00	670.109.000,00	(245.937.000,00)	(36,70)
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.537.358.000,00	681.189.000,00	856.169.000,00	125,69
	- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	572.105.000,00	340.880.000,00	231.225.000,00	67,83
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	120.232.350,00	98.709.200,00	21.523.150,00	21,80
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	957.759.500,00	74.130.500,00	883.629.000,00	1.191,99
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.554.284.200,00	2.469.122.699,00	(914.838.499,00)	(37,05)
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**19.760.000,00**	**214.625.000,00**	**(194.865.000,00)**	**(90,79)**
	- Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	16.860.000,00	27.260.000,00	(10.400.000,00)	(38,15)
	- Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.900.000,00	525.000,00	2.375.000,00	452,38
	- Retribusi Perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing (IMTA)	-	186.840.000,00	(186.840.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**26.860.499.284,11**	**23.658.209.445,55**	**3.202.289.838,56**	**13,54**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Rp199.891.066.543,92 Rp153.233.086.264,59

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp199.891.066.543,92. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar (Rp46.657.980.279,33) atau 30,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Pemda DIY Tahun 2022 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp199.711.987.100,91 (Metode Ekuitas) yang menambah Investasi Permanen yang diterima secara kas sebesar Rp 179.079.443,00 (Metode Perolehan) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 155
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)	10.246.697.429,54	13.598.386.504,01	(3.351.689.074,47)	(24,65)
PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)	196.958.195.025,96	137.367.021.955,23	59.591.173.070,73	43,38
PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	1.878.109.987,17	3.627.808.155,54	(1.749.698.168,37)	(48,23)
Perumda Air Bersih Tirtatama DIY (Metode Ekuitas)	(10.797.733.578,89)	(10.783.559.581,16)	(14.173.997,73)	(0,13)
PT. Asuransi Bangun Askrida (Metode Harga Perolehan)	179.079.443,00	110.733.653,00	68.345.790,00	61,72
Badan Usaha Kredit Pedesaan (Metode Ekuitas)	1.426.718.237,13	9.312.695.577,96	(7.885.977.340,83)	(84,68)
Jumlah	**199.891.066.543,92**	**153.233.086.264,59**	**46.657.980.279,33**	**30,45**

Penjelasan rincian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. **PT. Taru Martani**

   Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 99,996%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2022 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp 10.247.107.313,84 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,996% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp 10.246.697.429,54 (99,996% x Rp 10.247.107.313,84). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp 10.246.697.429,54.

2. **PT. BPD DIY**

   Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 51,000%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2022 PT.BPD DIY mencatat laba sebesar Rp391.943.267.733,18 dan presentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51,00% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp 199.891.066.543,92 (51,00% x Rp391.943.267.733,18). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp199.891.066.543,92

3. **PT. Anindya Mitra Internasional**

   Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 99,951%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2022 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp 1.879.030.712,22 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,951% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp 1.878.109.987,17 (99,951% x Rp1.879.030.712,22). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp1.878.109.987,17.

4. **Perumda Air Bersih Tirtatama DIY**

   Kepemilikan saham Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 100,00%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2022 Perumda Air Bersih Tirtatama mencatat kerugian sebesar (Rp10.797.733.578,89) dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 100,00% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas kerugian sebesar (Rp 10.797.733.578,89) (100,00% x Rp10.797.733.578,89). Hak atas kerugian tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan mengurangi nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar (Rp10.797.733.578,89).

5. **PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)**

   Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT Asuransi Bangun Askrida (PT ABA) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.190.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,223%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2022, Pemda DIY telah menerima Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PT Asuransi Bangun Askrida (PT ABA) sebesar Rp179.079.443,00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT ABA) Tahun 2022.

6. **Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)**

   Kepemilikan saham Pemda DIY pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 83,140%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2022 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) mencatat laba sebesar Rp1.716.043.104,56 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,140% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp1.426.718.237,13 (83,140% x Rp1.716.043.104,56). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp1.426.718.237,13.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO **Rp154.722.558.617,50** **Rp79.531.448.010,02**

Saldo Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp154.722.558.617,50 termasuk di dalamnya Pendapatan berupa Remunerasi dari Kementerian Keuangan yang ditransfer non tunai ke rekening TDF namun belum ditarik atau ditransfer ke RKUD sebesar Rp2.843.595,42. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp75.191.110.607,48 atau sebesar 94,54%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO Pemda DIY terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 156

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

No.	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	563.725.749,06	316.792.650,00	246.933.099,06	77,95
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.133.003.566,50	6.596.459.518,06	5.536.544.048,44	83,93
3	Jasa Giro	10.360.056.324,00	20.126.803.195,96	(9.766.746.871,96)	(48,53)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	715.648.235,01	(715.648.235,01)	(100,00)
5	Pendapatan Bunga	14.752.843.587,42	3.214.611.877,48	11.538.231.709,94	358,93
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	8.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	128,57
7	Pendapatan Denda atas KeterlambatanPelaksanaan Pekerjaan	310.727.434,00	760.577.134,00	(449.849.700,00)	(59,15)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	64.064.743.400	0,00	64.064.743.400,00	0,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	38.245.553,00	40.179.743,70	(1.934.190,70)	(4,81)
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	61.721.413,00	103.297.987,00	(41.576.574,00)	(40,25)
11	Pendapatan dari Pengembalian	861.803.128,47	3.321.753.943,25	(2.459.950.814,78)	(74,06)
12	Pendapatan dari BLUD	51.538.834.462,05	44.281.619.725,56	7.257.214.736,49	16,39
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	28.854.000,00	50.204.000,00	(21.350.000,00)	(42,53)
	Jumlah	**154.722.558.617,50**	**79.531.448.010,02**	**75.191.110.607,48**	**94,54**

Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran bernomor SE 900.1.14.1/7481/Keuda Perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas TDF maka Penyaluran Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF diakui dengan kriteria "Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga Lain-Lain PAD yang Sah (L0). Saldo Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp154.722.558.617,50 termasuk di dalamnya Pendapatan berupa Remunerasi dari Kemenkeu yang ditransfer non tunai ke rekening TDF namun belum ditarik atau ditransfer ke RKUD sebesar Rp2.843.595,42

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO Rp3.269.446.186.331,00 Rp3.794.855.660.531,00

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.268.574.892.841,00 termasuk di dalamnya TDF-DTU DBH/DAU dari Kementerian Keuangan yang ditransfer non tunai namun belum ditarik atau ditransfer ke RKUD sebesar Rp11.724.696.357,00. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2022 Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp537.134.170.557,00) atau (14,15%) meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO. Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Rp3.268.574.892.841,00 Rp3.794.050.615.221,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.268.574.892.841,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp537.200.418.737,00) atau sebesar (Rp14,16%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemda DIY meliputi Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) - LO,Dana Alokasi Umum (DAU)- LO, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Keistimewaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 157

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No.	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dana Perimbangan	1.944.975.239.358,00	2.436.884.453.142,00	(491.909.213.784,00)	(20,19)
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	119.420.776.248,00	132.615.520.738,00	(13.194.744.490,00)	(9,95)
	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.218.923.700.185,00	1.224.852.487.000,00	(5.928.786.815,00)	(0,48)
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	137.529.856.469,00	135.901.240.001,00	1.628.616.468,00	1,20
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	469.100.906.456,00	943.515.205.403,00	(474.414.298.947,00)	(50,28)
2	Dana Insentif Daerah (DID)	64.312.676.000,00	77.593.507.000,00	(13.280.831.000,00)	(17,12)
	DID	64.312.676.000,00	77.593.507.000,00	(13.280.831.000,00)	(17,12)

Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran bernomor SE 900.1.14.1/7481/Keuda Perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas TDF maka Penyaluran Pokok DBH/DAU diakui dengan kriteria "Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer – Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO)". Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.268.574.892.841,00 termasuk di dalamnya TDF-DTU DBH/DAU dari Kemenkeu yang ditransfer non tunai namun belum ditarik atau ditransfer ke RKUD sebesar Rp11.724.696.357,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp871.293.490,00 Rp805.045.310,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp871.293.490,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemda DIY Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp66.248.180,00 atau sebesar 8,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemda DIY merupakan Bantuan Keuangan yang berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020, Nomor 12/PK/Bt/2020, Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp871.293.490,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp99.707.090,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp133.034.510,00 (100%), dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp638.551.890,00 (100%).

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Rp120.592.392.527,80 Rp894.737.657.935,34

Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp120.592.392.527,80 termasuk di dalamnya :

1. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp2.307.930.671,3 merupakan penambahan persediaan dari hasil produksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Pendapatan Hibah--Sumbangan Pihak ke 3 sebesar Rp188.099.351,77 yang merupakan penyisihan piutang dari pelunasan piutang.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp774.145.265.407,54) atau sebesar (86,52%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lain-lain

Pendapatan Yang Sah - LO Pemda DIY merupakan Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp118.034.942.769,08 dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan - LO sebesar Rp2.557.449.758,72 . Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp118.034.942.769,08 terdiri dari Hibah Uang pada BPKA sebesar Rp7.484.595.000,00 (berasal dari Dealer Otomotif, Main Dealer, dan PT. Jasa Raharja), Hibah Barang yang berada di OPD sebesar Rp108.054.317.746,01 , Pengakuan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO karena sebelumnya penyisihan piutang dari pelunasan piutang dikurangkan dari ekuitas sebesar Rp188.099.351,77 , dan Pengakuan Lain-Lain Pendapatan yang sah-LO karena penambahan persediaan dari hasil produksi sebesar Rp2.307.930.671,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 158
Rincian Pendapatan Hibah – LO

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	45.468.823.365,00	21.492.721.465,90	23.976.101.899,10	111,55
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kesehatan	9.375.426.425,78	37.654.475.015,00	(28.279.048.589,22)	(75,10)
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	166.717.375,00	0,00	166.717.375,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.714.835.593,00	5.565.951.341,00	(1.851.115.748,00)	(33,26)
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Sosial	0,00	21.551.000,00	(21.551.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	390.500.000,00	0,00	390.500.000,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	356.712.923,68	0,00	356.712.923,68	0,00
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Koperasi	12.751.777,34	0,00	12.751.777,34	0,00
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	21.900.000,00	16.868.500,00	5.031.500,00	29,83
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kebudayaan	19,00	0,00	19,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	106.755.906,17	168.395.000,00	(61.639.093,83)	(36,60)
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kelautan dan Perikanan	1.265.209.850,00	1.567.334.942,87	(302.125.092,87)	(19,28)
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.294.376.918,62	519.737.750,00	774.639.168,62	149,04
Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	599.129.516,49	0,00	599.129.516,49	0,00
Pendapatan Hibah-LO pada Badan Penghubung Daerah	13,00	0,00	13,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset	55.234.623.086,00	827.409.903.990,80	(772.175.280.904,80)	(93,32)
Pendapatan Hibah-LO pada Badan Kepegawaian Daerah	0,00	131.925.000,00	(131.925.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah-LO pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	27.180.000,00	8.850.000,00	18.330.000,00	207,12
Jumlah	**118.034.942.769,08**	**894.557.714.005,57**	**(776.522.771.236,49)**	**(86,81)**

Pendapatan Hibah-LO pada OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp45.468.823.365,00 merupakan hibah barang dari Pemerintah Pusat sebesar Rp36.422.228.092,00 ; hibah barang dari Pemerintah Daerah sebesar Rp486.722.187,00 ; hibah barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp7.757.063.700,00 dan hibah barang dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp802.809.386,00
2. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.375.426.425,78 merupakan hibah barang dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) sebesar Rp9.183.998.403,00 dan hibah barang dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri (BPD DIY) sebesar Rp15.000.000,00 serta pengakuan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah karena sebelumnya penyisihan piutang dari pelunasan piutang dikurangkan dari ekuitas sebesar Rp176.428.022,78.
3. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp166.717.375,00 merupakan hibah barang dari Pemerintah Pusat
4. Pendapatan Hibah-LO pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.714.835.593,00 merupakan hibah barang dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar

Rp2.460.160.593,00 dan hibah barang dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp1.254.675.000,00

5. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp390.500.000,00 merupakan hibah barang dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
6. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp356.712.923,68 merupakan Pengakuan Lain-Lain Pendapatan yang sah-LO karena penambahan persediaan dari hasil produksi
7. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp12.751.777,34 merupakan pengakuan pendapatan hibah tahun 2022 yang sebelumnya langsung dicatat sebagai penambah ekuitas
8. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal sebesar Rp21.900.000,00 merupakan hibah barang (hadiah) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
9. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp19,00 merupakan hibah barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
10. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp106.755.906,17 merupakan hibah barang dari Pemerintah Pusat (Perpustakaan Nasional)
11. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.265.209.850,00 merupakan Pengakuan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO karena penambahan persediaan dari hasil produksi
12. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.294.209.850,00 merupakan hibah barang dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) sebesar Rp454.128.521,00 dan hibah barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp313.727.500,00 serta Pengakuan Lain-Lain Pendapatan yang sah-LO karena penambahan persediaan dari hasil produksi sebesar Rp526.520.897,62
13. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp599.129.516,49 merupakan hibah barang dari Pemerintah Pusat sebesar Rp439.639.337,50 serta pencatatan penambahan persediaan dari hasil produksi sebesar Rp159.487.000,00 dan pengakuan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah karena sebelumnya penyisihan piutang dari pelunasan piutang dikurangkan dari ekuitas sebesar Rp3.178,99
14. Pendapatan Hibah-LO pada Badan Penghubung Daerah sebesar Rp13,00 merupakan hibah barang dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
15. Pendapatan Hibah-LO pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp55.234.623.086,00 merupakan hibah uang sebesar Rp Rp7.484.595.000,00 (berasal dari Dealer Otomotif, Main Dealer, dan PT. Jasa Raharja) dan hibah barang sebesar Rp47.738.359.936,00 dengan rincian sebagai berikut :
    a) Kementerian Perhubungan sebesar Rp42.150.000.000,00
    b) Bawaslu sebesar Rp117.527.936,00
    c) Kemendikbud sebesar Rp4.754.632.000,00
    d) BPD DIY sebesar Rp687.200.000,00
    e) OJK DIY sebesar Rp29.000.000,00

    Serta pengakuan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah karena sebelumnya penyisihan piutang dari pelunasan piutang dikurangkan dari ekuitas sebesar Rp11.668.150, 00 (penyisihan piutang Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.250.000,00 dan penyisihan piutang pajak dan piutang denda pajak sebesar Rp10.418.150,00)

16. Pendapatan Hibah-LO pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp27.180.000,00 merupakan hibah barang dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri (BPD DIY) sebesar Rp13.780.000,00 dan hibah barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp13.400.000,00

Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp118.034.942.769,08 termasuk di dalamnya :

1) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp2.307.930.671,3 merupakan penambahan persediaan dari hasil produksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

2) Pendapatan Hibah--Sumbangan Pihak ke 3 sebesar Rp188.099.351,77 yang merupakan penyisihan piutang dari pelunasan piutang

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan - LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.557.449.758,72. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan - LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.377.505.828,95 atau (1.321,25%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan - LO Pemda DIY adalah Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan - LO Pemda DIY Tahun 2022 sebesar Rp2.557.449.758,72 merupakan setoran Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah dilikuidasi. Tim Likuidasi Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Daeran Istimewa Yogyakarta Nomor 125/TIM/2022. Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dibubarkan dengan akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH Nomor 5 tanggal 19 Desember 2022.

5.4.2 Beban Rp5.193.713.774.883,91 Rp5.620.469.990.939,02

Beban Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.193.713.774.883,91. Beban Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp426.756.216.055,11) atau sebesar (7,59%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beban Pemda DIY merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 159
Rincian Beban – LO

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	BEBAN OPERASI	3.465.297.152.804,65	3.671.840.505.769,57	(206.543.352.964,92)	(5,63)
2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	446.575.548.558,75	663.192.788.105,81	(216.617.239.547,06)	(32,66)
3	BEBAN TRANSFER	1.276.265.566.587,51	1.249.746.537.055,51	26.519.029.532,00	2,12
4	BEBAN TIDAK TERDUGA	5.575.506.933,00	35.690.160.008,13	(30.114.653.075,13)	(84,38)
	Jumlah	**5.193.713.774.883,91**	**5.620.469.990.939,02**	**(426.756.216.055,11)**	**(7,59)**

5.4.2.1 Beban Operasi Rp3.465.297.152.804,65 Rp3.671.840.505.769,57

Beban Operasi Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.465.297.152.804,65. Beban Operasi Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (206.543.352.964,92) atau (5,63 %). Beban Operasi Pemda DIY terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial dan Beban Penyisihan Piutang.

Tabel 5. 160
Rincian Beban Operasi– LO

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Pegawai	1.605.095.748.839,64	1.561.452.979.212,00	43.642.769.627,64	2,80
2	Beban Barang dan Jasa	1.297.006.891.161,83	1.112.088.458.698,66	184.918.432.463,17	16,63
3	Beban Bunga	-	-	-	-
4	Beban Subsidi	70.269.681.385,00	73.315.381.521,00	(3.045.700.136,00)	(4,15)
5	Beban Hibah	460.115.452.812,73	903.175.916.736,15	(443.060.463.923,42)	(49,06)
6	Beban Bantuan Sosial	31.594.863.030,00	21.527.425.033,00	10.067.437.997,00	46,77
7	Beban Penyisihan Piutang	1.214.515.575,45	280.344.568,76	934.171.006,69	333,22
	Jumlah	**3.465.297.152.804,65**	**3.671.840.505.769,57**	**(206.543.352.964,92)**	**(5,63)**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai Rp1.605.095.748.839,64 Rp1.561.452.979.212,00

Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2022 sebesar Rp1.605.095.748.839,64. Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp43.642.769.627,64 (2,80%). Beban Pegawai Pemda DIY merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 5. 161
Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	824.107.099.804,00	864.714.120.073,00	(40.607.020.269,00)	(4,70)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	439.569.990.220,00	349.449.335.761,00	90.120.654.459,00	25,79
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	283.021.784.964,00	304.329.564.523,00	(21.307.779.559,00)	(7,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	39.669.080.939,00	39.604.033.739,00	65.047.200,00	0,16
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	235.925.116,00	235.925.116,00	0,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.159.125.000,00	3.120.000.000,00	39.125.000,00	1,25
7	Beban Pegawai BLUD	15.332.742.796,64	0,00	15.332.742.796,64	-
	Jumlah	**1.605.095.748.839,64**	**1.561.452.979.212,00**	**43.642.769.627,64**	**2,80**

rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 162
Rincian Beban Pegawai per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	884.405.186.827,00	858.712.815.101,00	25.692.371.726,00	2,99
2	Dinas Kesehatan	105.063.610.590,64	93.101.997.501,00	11.961.613.089,64	12,85
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	39.497.735.306,00	35.315.548.685,00	4.182.186.621,00	11,84
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.905.472.431,00	7.572.057.321,00	1.333.415.110,00	17,61
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.691.570.380,00	5.846.568.458,00	845.001.922,00	14,45
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.415.434.386,00	11.806.701.380,00	1.608.733.006,00	13,63
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.796.930.608,00	7.876.699.336,00	1.920.231.272,00	24,38
8	Dinas Sosial	39.900.047.351,00	35.638.179.721,00	4.261.867.630,00	11,96
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.266.310.213,00	24.178.743.500,00	3.087.566.713,00	12,77
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	7.735.603.330,00	6.110.195.450,00	1.625.407.880,00	26,60
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41.075.417.872,00	36.295.054.538,00	4.780.363.334,00	13,17
12	Dinas Perhubungan	13.829.201.673,00	12.609.010.248,00	1.220.191.425,00	9,68
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.490.907.003,00	7.906.838.314,00	584.068.689,00	7,39
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.992.975.314,00	5.998.259.589,00	994.715.725,00	16,58
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	7.897.736.572,00	7.071.087.287,00	826.649.285,00	11,69
16	Dinas Kebudayaan	22.785.375.662,00	18.956.786.076,00	3.828.589.586,00	20,20
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.279.182.211,00	13.876.416.549,00	1.402.765.662,00	10,11
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.151.729.375,00	14.761.164.290,00	2.390.565.085,00	16,19
19	Dinas Pariwisata	8.526.175.295,00	7.352.161.330,00	1.174.013.965,00	15,97
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	47.233.659.808,00	43.098.461.504,00	4.135.198.304,00	9,59
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.385.671.179,00	13.809.925.115,00	1.575.746.064,00	11,41
22	Sekretariat Daerah	62.594.173.910,00	54.899.185.405,00	7.694.988.505,00	14,02
23	Badan Penghubung Daerah	5.249.026.113,00	4.636.128.152,00	612.897.961,00	13,22

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp1.297.006.891.161,83 Rp1.112.088.458.698,66

Saldo Beban Barang Jasa sebesar Rp1.297.006.891.161,83 termasuk di dalamnya Beban Pemeliharaan untuk penghapusan Aset Tetap sebesar Rp20.967.499.696,19, defisit penjualan Aset Tetap sebesar Rp6.665.597.223,66 dan mengeluarkan extracom yang diperoleh tahun 2022 dari belanja modal sebesar Rp1.925.126.605,32. Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp184.918.432.463,17 atau 15,22%. Beban Barang dan Jasa Pemda DIY merupakan merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2022 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 per obyek beban adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 163

Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Barang	363.166.216.217,91	351.269.446.030,49	11.896.770.187,42	3,39
2	Beban Jasa	628.723.022.565,70	544.704.571.279,20	84.018.451.286,50	15,42
3	Beban Pemeliharaan	128.632.802.870,22	113.410.519.067,97	15.222.283.802,25	13,42
4	Beban Perjalanan Dinas	98.127.603.257,00	59.421.062.621,00	38.706.540.636,00	65,14
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.012.078.551,00	43.282.859.700,00	19.729.218.851,00	45,58
6	Beban Barang dan Jasa BOS	46.243.987,00	0,00	46.243.987,00	-
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	15.298.923.713,00	0,00	15.298.923.713,00	-
	Jumlah	**1.297.006.891.161,83**	**1.112.088.458.698,66**	**184.918.432.463,17**	**16,63**

Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.297.006.891.161,83 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 164

Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	336.625.417.585,94	256.791.424.920,70	79.833.992.665,24	31,09
2	Dinas Kesehatan	97.149.688.557,22	175.225.206.934,59	(78.075.518.377,37)	(44,56)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	82.132.379.714,21	62.617.807.901,00	19.514.571.813,21	31,16
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	15.750.394.871,00	13.533.230.272,00	2.217.164.599,00	16,38
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.153.390.539,00	7.624.464.770,00	3.528.925.769,00	46,28
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.641.475.594,71	16.594.493.214,00	46.982.380,71	0,28
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.131.193.155,36	28.012.045.615,87	(12.880.852.460,51)	(45,98)
8	Dinas Sosial	52.181.719.509,13	42.645.709.910,04	9.536.009.599,09	22,36
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.792.102.497,16	21.659.965.059,25	132.137.437,91	0,61
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	8.616.087.893,20	7.718.568.959,00	897.518.934,20	11,63
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36.362.172.630,33	22.552.566.272,00	13.809.606.358,33	61,23
12	Dinas Perhubungan	20.883.773.233,32	18.439.186.733,79	2.444.586.499,53	13,26
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.801.423.253,00	19.033.593.290,00	767.829.963,00	4,03
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	48.557.089.756,25	33.224.568.884,00	15.332.520.872,25	46,15
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	4.132.322.067,00	3.840.283.991,60	292.038.075,40	7,60
16	Dinas Kebudayaan	148.193.490.713,97	103.438.937.711,40	44.754.553.002,57	43,27
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	25.290.960.602,41	16.112.038.132,00	9.178.922.470,41	56,97
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.327.365.855,12	22.398.326.524,28	1.929.039.330,84	8,61
19	Dinas Pariwisata	29.152.420.387,00	20.234.009.242,00	8.918.411.145,00	44,08
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	46.517.496.141,49	35.762.356.477,78	10.755.139.663,71	30,07
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.787.537.166,00	25.641.392.499,00	1.146.144.667,00	4,47
22	Sekretariat Daerah	47.721.698.094,57	35.723.311.882,00	11.998.386.212,57	33,59
23	Badan Penghubung Daerah	5.966.703.349,69	3.762.687.211,00	2.204.016.138,69	58,58
24	Sekretariat DPRD	61.277.749.228,00	45.585.309.344,50	15.692.439.883,50	34,42
25	Inspektorat	8.731.940.812,00	6.808.800.603,75	1.923.140.208,25	28,24
26	Paniradya Kaistimewan	17.692.005.040,00	13.239.141.935,00	4.452.863.105,00	33,63
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.393.540.918,00	6.480.302.101,00	2.913.238.817,00	44,96
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	31.236.940.352,49	28.866.361.684,11	2.370.578.668,38	8,21
29	Badan Kepegawaian Daerah	14.455.115.209,00	12.183.813.073,00	2.271.302.136,00	18,64
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	13.351.296.435,26	6.338.553.550,00	7.012.742.885,26	110,64
	Jumlah	**1.297.006.891.161,83**	**1.112.088.458.698,66**	**184.918.432.463,17**	**16,63**

Saldo Beban Barang Jasa sebesar Rp1.297.006.891.161,83 termasuk di dalamnya Beban Pemeliharaan untuk penghapusan Aset Tetap sebesar Rp20.967.499.696,19, defisit penjualan Aset Tetap sebesar Rp6.665.597.223,66 dan mengeluarkan extracom yang diperoleh tahun 2022 dari belanja modal sebesar Rp1.925.126.605,32

5.4.2.1.3 Beban Subsidi Rp70.269.681.385,00 Rp73.315.381.521,00

Beban Subsidi Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp70.269.681.385,00. Beban Subsidi Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp3.045.700.136,00) atau sebesar (4,15%). Beban Subsidi Pemda DIY Tahun 2022 merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional. PT. Anindya Mitra Internasional merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melalui Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service* Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja, PT. Anindya Mitra Internasional berhak atas subsidi, pendapatan, dan mengusulkan tarif layanan angkutan.

5.4.2.1.4 Beban Hibah Rp460.115.452.812,73 Rp903.175.916.736,15

Beban Hibah Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp460.115.452.812,73. Beban Hibah Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp443.060.463.923,42) atau sebesar (49,06%)

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban Hibah Pemda DIY merupakan beban hibah yang diberikan dalam bentuk uang dan barang. Beban Hibah Pemda DIY terdiri dari Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp357.720.347.294,73 ; Beban Hibah Dana BOS sebesar Rp99.914.567.518,00 dan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp2.480.538.000,00.

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial Rp31.594.863.030,00 Rp21.527.425.033,00

Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp31.594.863.030,00. Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.067.437.997,00 atau sebesar 46,77% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban Bantuan Sosial Pemda DIY terdiri dari Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu sebesar Rp28.008.463.030,00 ; Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp3.586.400.000,00.

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang Rp.1.214.515.575,45 Rp280.344.568,76

Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp.1.214.515.575,45 terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp5.689.295,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset ; Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp201.316,45 yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp199.966,45 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp1.350,00 serta Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp1.208.624.964,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Saldo Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp1.214.515.575,45 termasuk di dalamnya Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang yang merupakan penghapusan Piutang Denda sebesar Rp124.335.200,00

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp446.575.548.558,75 Rp663.192.788.105,81

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp446.575.548.558,75. Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp216.617.239.547,06) atau (32,66%) dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY merupakan Beban Penyusutan sebesar Rp446.575.548.558,75 dan Amortisasi Rp0,00. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 165
Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	184.128.808.061,94	181.338.054.568,89	2.790.753.493,05	1,54
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.073.011.432,04	199.953.028.858,25	(144.880.017.426,21)	(72,46)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	197.254.797.024,49	279.635.404.696,70	(82.380.607.672,21)	(29,46)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	828.499.820,80	868.298.993,13	(39.799.172,33)	(4,58)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	9.290.432.219,48	1.398.000.988,84	7.892.431.230,64	564,55
	Jumlah	**446.575.548.558,75**	**663.192.788.105,81**	**(216.617.239.547,06)**	**(32,66)**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp446.575.548.558,75 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 166
Rincian Beban Penyusutan per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	108.374.829.782,95	182.312.175.524,63	(73.937.345.741,68)	(40,56)
2	Dinas Kesehatan	12.464.691.577,30	16.766.461.999,75	(4.301.770.422,45)	(25,66)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	188.131.311.525,09	264.703.440.739,38	(76.572.129.214,29)	(28,93)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.897.593.378,20	4.812.167.873,47	(914.574.495,27)	(19,01)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	162.245.283,36	576.205.191,81	(413.959.908,45)	(71,84)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.047.795.131,47	944.362.544,39	103.432.587,08	10,95
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.738.372.976,10	15.267.964.356,00	(8.529.591.379,90)	(55,87)
8	Dinas Sosial	3.734.351.801,42	5.099.830.394,62	(1.365.478.593,20)	(26,77)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.899.136.205,80	8.331.230.482,76	(5.432.094.276,96)	(65,20)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.106.551.445,34	1.235.426.312,22	(128.874.866,88)	(10,43)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.338.469.750,53	13.207.737.862,75	(6.869.268.112,22)	(52,01)
12	Dinas Perhubungan	7.692.794.682,76	11.108.169.461,73	(3.415.374.778,97)	(30,75)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.675.300.888,49	14.278.646.783,68	(1.603.345.895,19)	(11,23)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.480.288.357,40	6.559.187.047,28	(2.078.898.689,88)	(31,69)
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	419.602.599,25	788.146.564,60	(368.543.965,35)	(46,76)
16	Dinas Kebudayaan	11.737.520.417,11	16.094.324.578,54	(4.356.804.161,43)	(27,07)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.428.509.126,77	6.718.219.249,07	1.710.289.877,70	25,46
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.786.350.715,02	10.565.290.601,87	(4.778.939.886,85)	(45,23)
19	Dinas Pariwisata	3.337.862.272,71	4.091.160.352,17	(753.298.079,46)	(18,41)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.902.298.287,63	10.496.955.757,93	(5.594.657.470,30)	(53,30)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.723.620.182,63	1.427.864.015,15	2.295.756.167,48	160,78
22	Sekretariat Daerah	5.542.200.743,01	8.467.993.062,94	(2.925.792.319,93)	(34,55)
23	Badan Penghubung Daerah	669.939.652,20	771.464.684,05	(101.525.031,85)	(13,16)
24	Sekretariat DPRD	10.330.658.614,95	28.417.787.151,57	(18.087.128.536,62)	(63,65)
25	Inspektorat	2.146.123.681,35	908.308.231,32	1.237.815.450,03	136,28
26	Paniradya Kaistimewan	1.393.314.360,43	699.014.713,68	694.299.646,75	99,33
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	454.460.892,59	3.598.039.211,75	(3.143.578.319,16)	(87,37)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	25.962.643.911,44	21.435.219.688,51	4.527.424.222,93	21,12
29	Badan Kepegawaian Daerah	936.052.450,63	1.520.639.796,49	(584.587.345,86)	(38,44)
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.060.657.864,82	1.989.353.871,70	(928.696.006,88)	(46,68)
	Jumlah	**446.575.548.558,75**	**663.192.788.105,81**	**(216.617.239.547,06)**	**(32,66)**

5.4.2.3 Beban Transfer Rp1.276.265.566.587,51 Rp1.249.746.537.055,51

Beban Transfer Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.276.265.566.587,51. terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 167
Rincian Beban Transfer

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil	821.949.914.868,00	716.105.738.931,00	105.844.175.937,00	14,78
	- Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	821.949.914.868,00	716.105.738.931,00	105.844.175.937,00	14,78
2	Beban Bantuan Keuangan	454.315.651.719,51	533.640.798.124,51	(79.325.146.405,00)	(14,86)
	- Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	353.767.994.612,32	484.644.483.000,29	(130.876.488.387,97)	(27,00)
	- Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	100.547.657.107,19	48.996.315.124,22	51.551.341.982,97	105,21
	Jumlah	**1.276.265.566.587,51**	**1.249.746.537.055,51**	**26.519.029.532,00**	**2,12**

5.4.2.4 Beban Tak Terduga Rp5.575.506.933,00 Rp35.690.160.008,13

Beban Tak Terduga Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.575.506.933,00. Beban Tak Terduga Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp30.114.653.075,13 atau (84,38%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban Tak Terduga Pemda DIY Tahun 2022 merupakan beban penanganan pandemi Covid-19 baik yang berasal dari APBD melalui Belanja Tidak Terduga maupun sumber lain di luar Pemda DIY. Selama tahun 2022, vaksinasi tetap digencarkan sehingga perlahan pandemi Covid-19 sudah mulai melandai dan diakhiri dengan pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh Presiden RI pada tanggal 30 Desember 2022. Selain itu, Beban Tak terduga juga untuk menangani Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi.

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO Rp529.059.359.453,27 Rp1.013.948.373.370,48

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp529.059.359.453,27. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp484.889.013.917,21) atau (47,82%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO Pemda DIY berasal dari Pendapatan - LO sebesar Rp5.722.773.134.337,18 dikurangi dengan Beban sebesar Rp5.193.713.774.883,91.

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO Rp868.972.829,25 Rp5.721.901.972,37

Surplus Non Operasional - LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp868.972.829,25. Surplus Non Operasional - LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp4.852.929.143,12) atau (84,81%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus Non Operasional - LO Pemda DIY merupakan Surplus Non Operasional sebesar Rp7.597.727.670,31 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp6.728.754.841,06. Surplus Non Operasional berasal dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO.

Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp7.597.727.670,31 merupakan Surplus Non Operasional - LO yang berasal dari:

1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp619.920.633,94 merupakan surplus dari penjualan Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:
   a) Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada SMA, SMK, dan Balai Dkmen di Lingkungan Pemda DIY dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 466.666.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 220.335.430,88 sehingga menghasilkan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 246.330.569,12;
   b) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada BPRSW Dinas Sosial DIY dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 35.199.999,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 20.466.629,18 sehingga menghasilkan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 14.733.369,82;
   c) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Instalasi Permanen dan Bangunan Rumah Sakit Jiwa pada RS Jiwa Grhasia dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 32.500.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 13.327.805,00 sehingga menghasilkan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 19.172.195,00;
   d) Penjualan BMD berupa Hewan Ternak Sapi sebanyak 4 ekor dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 82.775.500,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 72.800.000,00 sehingga menghasilkan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 9.975.500,00 ;

e) Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 329.709.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 0,00 sehingga menghasilkan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 329.709.000,00.

2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6.853.165.270,17 merupakan selisih perhitungan yang berasal dari biaya pengelolaan minyak kayu putih dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp3.696.866.729,83 dengan penjualan minyak kayu putih (dengan harga lelang Rp. 262.700,00 per liter) sebesar Rp. 10.550.032.000,00.

3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp124.641.766,20 merupakan selisih perhitungan persediaan cadangan beras karena dinilai dengan harga terbaru (dari harga lama Rp8.979,00 menjadi Rp9.450,00 per kg).

Defisit Non Operasional - LO Rp6.728.754.841,06 berasal dari:

1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp5.758.844.097,66 yang merupakan
   a) Penjualan BMD berupa Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran, dan Barang Persediaan Berbahan Kertas) dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 70.713.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 4.531.029.933,66 sehingga terdapat Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp 4.460.316.933,66 ;
   b) Penjualan BMD berupa Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya di Jl. Panembahan No. 20, Kraton, Yogyakarta dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 127.777.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 594.700.000,00 sehingga terdapat Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp 466.923.000,00 ;
   c) Penjualan BMD berupa Hewan Ternak Domba sebanyak 11 ekor dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 12.750.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 48.630.190,00 sehingga terdapat Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp 35.880.190,00 ;
   d) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen pada SMAN 1 Dlingo dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 12.100.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 91.669.779,00 sehingga terdapat Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp 79.569.779,00 ;
   e) Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 683.413.126,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 1.399.567.321,00 sehingga terdapat Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp 716.154.195,00.
2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp955.553.743,40 merupakan selisih perhitungan harga pokok produksi (HPP) yaitu : HPP Susu sebesar Rp646.881.861,73 ; HPP Semen Beku sebesar RpRp731.140.757,74 ; HPP Tanaman Hortikultura sebesar Rp204.591.486,24 dan HPP Tanaman Pangan sebesar Rp446.307.137,69 dengan harga jual sebesar Rp 1.073.367.500,00
3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp14.357.000,00 merupakan selisih perhitungan harga pokok produksi (HPP) Alat Tepat Guna sebesar Rp50.857.000,00 dengan dengan harga jual sebesar Rp36.500.000,00.

Surplus/Defisit - LO	**Rp529.928.332.282,52**	**Rp1.019.670.275.342,85**

Surplus/Defisit - LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp529.928.332.282,52. Surplus/Defisit - LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp489.741.943.060,33) atau (48,03%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus/Defisit - LO Pemda DIY Tahun 2022 merupakan selisih antara Surplus/Defisit LO dari Operasi (Pendapatan-LO dengan Beban-LO) sebesar Rp529.059.359.453,27 dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp868.972.829,25.

5.5 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 Ekuitas Awal Rp11.950.577.596.343,60 Rp11.290.686.277.272,30

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 adalah sebesar Rp11.950.577.596.343,60 mengalami kenaikan sebesar Rp659.891.319.071,29 atau 5,84% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun sebelumnya. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp11.950.577.596.343,60 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 168
Rincian Ekuitas Awal

No.	URAIAN	EKUITAS AWAL 2022	EKUITAS AWAL 2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.572.851.238.933,13	1.595.485.611.039,40	(22.634.372.106,27)	(1,42)
2	Dinas Kesehatan	227.919.159.708,96	180.741.797.301,30	47.177.362.407,66	26,10
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.487.038.581.348,15	3.360.334.349.499,27	1.126.704.231.848,88	33,53
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	154.046.232.590,88	597.256.552.669,91	(443.210.320.079,03)	(74,21)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.893.959.166,88	4.276.280.381,40	(382.321.214,52)	(8,94)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.258.216.538,64	5.221.303.531,05	3.036.913.007,59	58,16
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.267.292.888,88	106.468.913.907,02	(55.201.621.018,14)	(51,85)
8	Dinas Sosial	95.184.358.519,19	94.366.147.531,27	818.210.987,92	0,87
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	43.369.791.969,17	50.044.410.478,35	(6.674.618.509,18)	(13,34)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	21.223.101.389,75	22.216.722.040,97	(993.620.651,22)	(4,47)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	118.496.564.189,58	112.790.126.033,24	5.706.438.156,34	5,06
12	Dinas Perhubungan	117.763.213.855,54	155.838.261.770,05	(38.075.047.914,51)	(24,43)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	59.623.944.817,48	66.930.398.599,16	(7.306.453.781,68)	(10,92)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	120.176.079.212,29	18.610.301.293,91	101.565.777.918,38	545,75
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	4.880.159.387,15	5.321.630.544,81	(441.471.157,66)	(8,30)
16	Dinas Kebudayaan	527.125.987.399,19	561.883.339.098,36	(34.757.351.699,17)	(6,19)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	168.857.658.406,39	152.579.754.438,83	16.277.903.967,56	10,67
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	205.038.134.122,97	176.040.136.346,68	28.997.997.776,29	16,47
19	Dinas Pariwisata	73.555.632.177,50	54.237.375.689,92	19.318.256.487,58	35,62
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	235.192.679.129,25	245.156.947.220,35	(9.964.268.091,10)	(4,06)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.671.042.952,77	34.142.299.991,88	528.742.960,89	1,55
22	Sekretariat Daerah	249.516.729.093,85	226.299.666.053,55	23.217.063.040,30	10,26
23	Badan Penghubung Daerah	25.102.642.372,88	26.017.628.880,84	(914.986.507,96)	(3,52)

No.	URAIAN	EKUITAS AWAL 2022	EKUITAS AWAL 2021	Kenaikan/Penurunan	%
24	Sekretariat DPRD	100.293.412.954,05	128.535.734.457,27	(28.242.321.503,22)	(21,97)
25	Inspektorat	34.563.043.114,13	17.602.119.235,66	16.960.923.878,47	96,36
26	Paniradya Kaistimewan	4.171.996.915,36	2.726.254.570,04	1.445.742.345,32	53,03
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.933.194.766,93	15.354.676.673,68	(3.421.481.906,75)	(22,28)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	3.156.556.769.719,74	3.235.468.657.069,03	(78.911.887.349,29)	(2,44)
29	Badan Kepegawaian Daerah	12.740.917.879,66	12.550.846.117,15	190.071.762,51	1,51
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	25.265.860.823,30	26.188.034.808,00	(922.173.984,70)	(3,52)
	Jumlah	**11.950.577.596.343,60**	**11.290.686.277.272,30**	**659.891.319.071,29**	**5,84**

5.5.2 Surplus/Defisit – LO **Rp529.928.332.282,52** **Rp1.019.670.275.342,85**

Surplus/Defisit LO Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp529.928.332.282,52. Surplus/Defisit LO Pemda DIY Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp489.741.943.060,33) atau (48,03%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus/Defisit LO Pemda DIY merupakan Surplus/Defisit LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 169
Rincian Surplus/(Defisit)-LO per OPD

No.	URAIAN	SURPLUS / DEFISIT LO
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(1.434.188.239.189,89)
2	Dinas Kesehatan	(158.353.180.162,33)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	(418.780.337.318,30)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	(28.553.460.680,20)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(20.637.744.202,36)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(31.075.851.112,18)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(38.249.672.837,46)
8	Dinas Sosial	(103.021.805.271,55)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(53.384.168.134,96)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	(18.303.742.668,54)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(67.320.637.599,05)
12	Dinas Perhubungan	(110.615.505.524,08)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(42.411.586.382,49)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(58.362.262.918,31)
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	(12.407.521.238,25)
16	Dinas Kebudayaan	(346.796.912.974,08)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(48.700.094.710,01)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	(44.885.545.070,14)
19	Dinas Pariwisata	(40.852.152.632,71)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(97.221.712.544,70)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(45.073.398.199,14)
22	Sekretariat Daerah	(151.562.015.326,05)
23	Badan Penghubung Daerah	(11.442.209.101,89)
24	Sekretariat DPRD	(121.114.489.647,95)
25	Inspektorat	(25.438.509.451,35)
26	Paniradya Kaistimewan	(25.553.009.616,43)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(26.720.796.146,59)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4.159.867.712.583,22
29	Badan Kepegawaian Daerah	(29.371.073.643,63)
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	(19.541.745.996,08)
	Jumlah	**529.928.332.282,52**

5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar **Rp47.509.022.312,35** **(Rp359.778.956.271,55)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp47.509.022.312,35. Adapun rincian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 170
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Nilai Persediaan	53.880.935,95
2	Koreksi Nilai Investasi Permanen	(11.260.077.271,79)
3	Koreksi Aset Tetap	(667.874.345,71)
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.046.484.833,10)
5	Koreksi Aset Lain-lain	(114.048.000,00)
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	63.520.599.000,00
7	Lain-lain	23.026.827,00
8	Reklas dari Ekstrakomtabel	23.026.827,00
	Jumlah	**47.509.022.312,35**

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp53.880.935,95 berasal dari :
  - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp78.200.000,00
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp72.283.300,00
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar (Rp154.109.164,05)
  - Dinas Perhubungan sebesar Rp1.500.000,00
  - Sekretariat Daerah sebesar Rp47.083.300,00
- Koreksi Nilai Investasi Permanen sebesar (Rp11.260.077.271,79) berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY merupakan koreksi nilai penyertaan modal karena ekuitas bagian Pemerintah Daerah berdasarkan LK BUMD Audited Tahun 2021
- Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp667.874.345,71) merupakan koreksi pencatatan aset tetap.
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp4.046.484.833,10) merupakan koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.
- Koreksi Aset Lain-Lain sebesar (Rp11.048.000,00) merupakan nilai buku dari bangunan Gedung SMK 2 Depok yang telah dihapus dengan Kep.Gub. 41/SEKDA/VII/2020 yang masih tercatat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp63.520.599.000,00 merupakan penilaian kembali gedung yang disewakan.
- Lain-Lain sebesar Rp23.026.827,00 merupakan Reklasifikasi dari ekstrakomtabel

Tabel 5. 171
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per OPD

No.	URAIAN	DAMPAK KUMULATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	362.206.185,47
2	Dinas Kesehatan	(150.392.239,46)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	(24.547.436.030,66)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	(37.208.927.548,23)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.778.933.564,09)

No.	URAIAN	DAMPAK KUMULATIF (Rp)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	262.541.100,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(16.260.754.683,08)
8	Dinas Sosial	16.429.830,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(0,12)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	3.253.563.224,77
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.734.774.999,93
12	Dinas Perhubungan	20.820.798.049,15
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(282.705.500,00)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(14.320.429,68)
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	9.260.768,55
16	Dinas Kebudayaan	(16.852.775.800,84)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.613.124,87
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.145.861.416,07)
19	Dinas Pariwisata	67.407.385.040,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.718.814.719,52
22	Sekretariat Daerah	(4.889.125.524,15)
23	Badan Penghubung Daerah	-
24	Sekretariat DPRD	-
25	Inspektorat	21.685.755,61
26	Paniradya Kaistimewan	5.937.049.324,56
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(0,01)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	24.377.193.005,29
29	Badan Kepegawaian Daerah	(297.060.078,97)
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	(0,01)
	Jumlah	**47.509.022.312,35**

Ekuitas Akhir **Rp12.528.014.950.938,50** **Rp11.950.577.596.343,60**

Saldo Ekuitas Akhir Pemda DIY Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.528.014.950.938,50. Saldo Ekuitas Akhir Pemda DIY Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp577.437.354.594,90 atau (4,83%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5. 172

Rincian Ekuitas Akhir per OPD

No.	URAIAN	EKUITAS AKHIR 2022 (Rp)	EKUITAS AKHIR 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.663.147.344.422,71	1.572.851.238.933,13	90.296.105.489,58
2	Dinas Kesehatan	260.664.368.697,88	227.919.159.708,96	32.745.208.988,92
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.509.119.901.744,19	4.487.038.581.348,15	22.081.320.396,04
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	113.763.032.577,45	154.046.232.590,88	(40.283.200.013,43)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.315.640.282,43	3.893.959.166,88	(2.578.318.884,45)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.964.835.365,46	8.258.216.538,64	1.706.618.826,82
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.405.488.989,34	51.267.292.888,88	(23.861.803.899,54)
8	Dinas Sosial	106.614.847.079,64	95.184.358.519,19	11.430.488.560,45
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46.685.203.518,09	43.369.791.969,17	3.315.411.548,92

No.	URAIAN	EKUITAS AKHIR 2022 (Rp)	EKUITAS AKHIR 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	23.774.975.041,18	21.223.101.389,75	2.551.873.651,43
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	122.243.655.298,29	118.496.564.189,58	3.747.091.108,71
12	Dinas Perhubungan	138.855.618.354,51	117.763.213.855,54	21.092.404.498,97
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.664.596.586,99	59.623.944.817,48	(7.959.348.230,49)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	178.772.508.985,30	120.176.079.212,29	58.596.429.773,01
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.530.036.984,45	4.880.159.387,15	649.877.597,30
16	Dinas Kebudayaan	512.722.579.505,22	527.125.987.399,19	(14.403.407.893,97)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	165.417.704.779,25	168.857.658.406,39	(3.439.953.627,14)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	303.903.559.427,76	205.038.134.122,97	98.865.425.304,79
19	Dinas Pariwisata	137.306.530.561,79	73.555.632.177,50	63.750.898.384,29
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	234.871.665.457,55	235.192.679.129,25	(321.013.671,70)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	71.181.511.033,15	34.671.042.952,77	36.510.468.080,38
22	Sekretariat Daerah	241.625.248.118,65	249.516.729.093,85	(7.891.480.975,20)
23	Badan Penghubung Daerah	24.416.356.395,99	25.102.642.372,88	(686.285.976,89)
24	Sekretariat DPRD	92.553.032.001,10	100.293.412.954,05	(7.740.380.952,95)
25	Inspektorat	35.953.947.775,39	34.563.043.114,13	1.390.904.661,26
26	Paniradya Kaistimewan	11.318.688.110,49	4.171.996.915,36	7.146.691.195,13
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.156.297.920,33	11.933.194.766,93	223.103.153,40
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	3.387.355.288.460,40	3.156.556.769.719,74	230.798.518.740,66
29	Badan Kepegawaian Daerah	12.002.758.858,06	12.740.917.879,66	(738.159.021,60)
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	25.707.728.605,47	25.265.860.823,30	441.867.782,17
	Jumlah	**12.528.014.950.938,50**	**11.950.577.596.343,60**	**577.437.354.594,88**

5.6 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah peneriman kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya, Hibah dan Penerimaan Lainnya, dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil Pajak dalam Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.6.1.1 Arus Masuk Kas	**Rp5.529.104.451.893,30**	**Rp5.701.700.729.906,23**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.529.104.451.893,30 berasal dari:

Tabel 5. 169
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.951.267.446.232,85	1.688.443.843.923,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	38.249.563.473,00	38.512.949.895,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	108.239.513.315,87	96.338.516.913,54
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163.584.394.138,86	76.228.184.713,92
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	107.596.134.697,00	132.461.145.334,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	99.945.194,00	154.375.404,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.218.923.700.185,00	1.224.852.487.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	606.630.762.925,00	1.079.416.445.404,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.259.286.977.483,00	1.279.572.655.079,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	64.312.676.000,00	77.593.507.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	871.293.490,00	805.045.310,00
13	Penerimaan Hibah	7.484.595.000,00	7.141.630.000,00
14	Penerimaan Dana Darurat	-	-
15	Penerimaan Lainnya	2.557.449.758,72	179.943.929,77
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	**5.529.104.451.893,30**	**5.701.700.729.906,23**

5.6.1.2 Arus Keluar Kas **Rp4.745.053.576.594,82** **Rp4.875.333.732.919,80**

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.745.053.576.594,82 dipergunakan untuk:

Tabel 5. 170
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.604.664.380.912,64	1.561.540.552.725,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.265.180.025.505,94	1.039.417.892.655,29
3	Pembayaran Bunga	-	-
4	Pembayaran Subsidi	70.269.681.385,00	73.315.381.521,00
5	Pembayaran Hibah	474.277.634.446,73	878.407.044.213,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	31.594.863.030,00	22.577.159.813,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	454.315.651.719,51	533.640.798.124,51
8	Pembayaran Tidak Terduga	5.735.041.553,00	53.316.587.701,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	839.016.298.042,00	713.118.316.167,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	**4.745.053.576.594,82**	**4.875.333.732.919,80**

5.6.1.3 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi **Rp784.050.875.298,48** **Rp826.366.996.986,43**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp784.050.875.298,48 berasal dari:

Tabel 5. 171
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	5.529.104.451.893,30	5.701.700.729.906,23
2	Arus Keluar Kas	(4.745.053.576.594,82)	(4.875.333.732.919,80)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	**784.050.875.298,48**	**826.366.996.986,43**

5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah peneriman kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.2.1 Arus Kas Masuk Rp2.290.342.309,00 Rp11.006.913.036,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.290.342.309,00 dirinci sebagai berikut

Tabel 5. 172
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2	Penjualan atas Tanah	-	-
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.150.079.126,00	136.200.000,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	207.576.999,00	330.534.999,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
6	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	317.338.135,00	154.940.400,00
7	Penjualan atas Aset Lainnya	415.405.249,00	777.904.037,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	199.942.800,00	9.607.333.600,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**2.290.342.309,00**	**11.006.913.036,00**

Penjelasan:

1. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.150.079.126,00 merupakan penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp466.666.000,00 dan Alat Angkutan sebesar Rp683.413.126,00.
2. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp207.576.999,00 merupakan penjualan bahan-bahan bekas bangunan.
3. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp317.338.135,00 merupakan penjualan Hewan sebesar Rp213.514.000,00, dan Tanaman sebesar Rp103.824.135,00.
4. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Lainnya sebesar Rp415.405.249,00 merupakan penjualan Aset Lain-lain.
5. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen sebesar Rp199.942.800,00 merupakan penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi dan masyarakat dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 173
Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi**	
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	- Fasilitas Pemberdayaan Koperasi	85.942.800,00
	Jumlah	**85.942.800,00**
2	**Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat**	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	- DPM LDPM	12.000.000,00
	- DPM LUEP	7.000.000,00
	BUKP	95.000.000,00
	Jumlah	**114.000.000,00**
	Total	**199.942.800,00**

5.6.2.2 Arus Keluar Kas Rp878.557.049.066,74 Rp767.339.728.747,39

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp878.557.049.066,74 dipergunakan untuk:

Tabel 5. 174
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2	Perolehan atas Tanah	152.171.680.772,00	185.263.842.550,00
3	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	174.540.050.841,74	153.066.731.565,00
4	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	210.446.091.623,00	66.855.285.344,54
5	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	153.970.963.843,00	214.309.752.467,85
6	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	13.753.261.987,00	35.344.116.820,00
7	Perolehan atas Aset Lainnya	-	-
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	173.675.000.000,00	112.500.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	**878.557.049.066,74**	**767.339.728.747,39**

Arus Kas Keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp173.675.000.000,00 merupakan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank BPD DIY.

5.6.2.3 Arus Keluar Kas Bersih-Aktivitas Investasi Rp(876.266.706.757,74) Rp(756.332.815.711,39)

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(876.266.706.757,74) berasal dari:

Tabel 5. 175
Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	2.290.342.309,00	11.006.913.036,00

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2	Arus Keluar Kas	(878.557.049.066,74)	(767.339.728.747,39)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	**(876.266.706.757,74)**	**(756.332.815.711,39)**

5.6.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah peneriman kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.3.1 Arus Masuk Kas **Rp0,00** **Rp0,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00.

5.6.3.2 Arus Keluar Kas **Rp0,00** **Rp0,00**

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

5.6.3.3 Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan **Rp0,00** **Rp0,00**

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

5.6.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.4.1 Arus Masuk Kas **Rp5.601.538.174.068,00** **Rp890.366.702.470,62**

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.601.538.174.068,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 176
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	210.124.272.662,00	205.414.319.183,62
2	Pengembalian UP/GU/TU	58.770.908.282,23	32.602.763.836,00
3	Pengesahan SPJ UP/GU/TU	5.332.247.486.006,77	652.114.993.038,00
4	Sisa Uang Persediaan	395.507.117,00	234.626.413,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**5.601.538.174.068,00**	**890.366.702.470,62**

Arus Masuk Kas yang berasal dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp210.124.272.662,00 terdiri dari:

Tabel 5. 177
Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	49.159.047.136,00
2	PPh Pasal 21	59.595.102.443,00
3	Taperum	-
4	PPn	83.220.080.365,00
5	PPh Pasal 22	3.372.992.153,00
6	PPh Pasal 23	4.386.455.406,00
7	PPh Pasal 4 (2)	10.321.416.502,00
8	Pajak Lainnya	69.178.657,00
	Jumlah	**210.124.272.662,00**

Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp58.770.908.282,23, Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp5.332.247.486.006,77, dan Sisa Uang Persediaan sebesar Rp395.507.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 178
Rincian Perhitungan Sisa Kas

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian UP/TU/GU	Sisa uang persediaan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.282.326.033.628,00	1.275.746.442.303,00	6.571.867.389,00	7.723.936,00
2	Dinas Kesehatan	193.763.741.132,00	192.584.610.164,00	1.179.130.968,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	467.760.454.889,00	467.062.295.933,00	698.158.956,00	-
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	25.884.950.329,00	25.479.188.215,00	405.762.114,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.346.595.681,00	20.838.358.882,00	508.236.799,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	32.703.792.497,00	32.548.782.839,00	155.009.658,00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.811.184.068,00	24.921.956.599,00	889.227.469,00	-
8	Dinas Sosial	115.632.184.821,00	114.920.064.002,00	712.120.819,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.114.746.434,00	58.707.731.684,00	407.014.750,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	17.942.667.637,00	17.618.113.095,20	324.554.541,80	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90.259.702.816,00	89.747.845.786,83	511.288.893,17	568.136,00
12	Dinas Perhubungan	115.964.297.194,00	115.577.531.387,90	386.765.806,10	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.824.601.255,00	34.737.762.538,00	86.838.717,00	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	119.156.703.473,00	118.628.351.853,00	528.351.620,00	-
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	13.098.307.626,00	13.068.850.067,00	29.457.559,00	-
16	Dinas Kebudayaan	353.039.987.972,00	350.629.728.128,95	2.031.930.741,05	378.329.102,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	45.805.233.594,00	45.533.279.282,00	271.954.312,00	-
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	148.280.399.279,00	148.015.313.910,00	265.085.369,00	-
19	Dinas Pariwisata	38.630.765.112,00	37.886.286.085,00	735.653.084,00	8.825.943,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	99.573.759.823,00	98.944.713.222,00	629.046.601,00	-
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	52.461.940.213,00	52.140.845.170,00	321.095.043,00	-
22	Sekretariat Daerah	151.431.424.647,00	148.903.597.875,00	2.527.826.772,00	-

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian UP/TU/GU	Sisa uang persediaan
23	Paniradya Kaistimewan	27.102.838.323,00	26.762.651.487,00	340.186.836,00	-
24	Badan Penghubung Daerah	11.394.273.945,00	11.199.383.125,00	194.890.820,00	-
25	Sekretariat DPRD	123.995.610.783,00	113.411.141.815,00	10.584.468.968,00	-
26	Inspektorat	26.978.723.180,00	26.807.728.357,00	170.994.823,00	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.553.774.045,00	26.943.899.300,00	609.874.745,00	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.614.119.180.078,00	1.588.270.231.421,63	25.848.888.656,37	60.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	30.045.294.314,00	29.582.124.701,00	463.169.613,00	-
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	25.410.732.618,00	25.028.676.778,26	382.055.839,74	-
	JUMLAH	**5.391.413.901.406,00**	**5.332.247.486.006,77**	**58.770.908.282,23**	**395.507.117,00**

5.6.4.2 Arus Keluar Kas Rp5.601.538.174.068,00 Rp890.366.702.470,62

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.601.538.174.068,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 179
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	210.124.272.662,00	205.414.319.183,62
2	Penerbitan SP2D UP/GU/TU	5.391.413.901.406,00	684.952.383.287,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**5.601.538.174.068,00**	**890.366.702.470,62**

5.6.4.3 Arus Kas Bersih Rp0,00 Rp0,00

Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 180
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	5.601.538.174.068,00	890.366.702.470,62
2	Arus Kas Keluar	(5.601.538.174.068,00)	(890.366.702.470,62)
	Jumlah Arus Kas Bersih	**-**	**-**

5.6.5 Kenaikan Penurunan Kas Rp(92.215.831.459,26) Rp70.034.181.275,04

Penurunan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(92.215.831.459,26) berasal dari:

Tabel 5. 181
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	784.050.875.298,48	826.366.996.986,43
2	Aktivitas Investasi	(876.276.485.270,74)	(756.332.815.711,39)
3	Aktivitas Pendanaan	-	-
4	Aktivitas Transitoris	-	-
	Jumlah	**(92.215.831.459,26)**	**70.034.181.275,04**

5.6.6 Saldo Akhir Kas Rp462.271.562.955,24 Rp554.487.394.414,50

Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp462.271.562.955,24 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp554.487.394.414,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 182
Rincian Kas Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kas di BUD	411.828.641.051,77	513.471.984.112,22
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	395.447.117,00	293.199.948,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	29.060.915,00	38.000.970,00
4	Kas di BLUD	47.873.876.325,47	36.196.141.717,28
5	Kas Dana BOS	2.144.537.546,00	4.488.067.667,00
	Jumlah Sisa Kas (SiLPA)	**462.271.562.955,24**	**554.487.394.414,50**
1	Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak	25.265.413,00	367.250,00
2	Kas Lainnya - Jaminan Tambang	19.662.925.839,94	19.680.458.239,94
	Jumlah Kas (Neraca)	**481.959.754.208,24**	**574.168.719.904,44**

Penjelasan:

Kas di BUD (Kasda) sebesar Rp411.828.641.051,77 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 dengan saldo sebesar Rp408.464.588.723,68, setoran pengembalian dana bergulir BUKP sebesar Rp216.004.659,97, pengembalian BKK Dais Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp60.000 dan setoran pengembalian belanja pada beberapa OPD sebesar Rp3.147.987.668,12 dengan rincian sebagai berikut :

Setoran kas di bulan Januari – Maret 2023	Nilai (Rp)
- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Kebudayaan	59.411.350,00
- Setoran pengembalian belanja Bantuan Khusus Keuangan Dais pada BPKA	60.000,00
- Setoran dana bergulir BUKP pada BPKA	216.004.659,97
- Setoran pengembalian belanja pada DPU	8.590.000,00
- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	204.575.076,00
- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	660.000,00
- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Perhubungan	2.281.298.079,00
- Setoran pengembalian belanja pada BPKA	508.100.063,12
- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Perikanan dan Kelautan	3.131.094,00
- Setoran pengembalian belanja pada DPPM	472.000,00
- Setoran pengembalian belanja pada DP3AP2	16.060.000,00
- Setoran pengembalian belanja pada Disnakertrans	3.100.000,00
- Setoran pengembalian belanja pada Sekretariat DPRD	37.033.120,00
- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika	518.886,00
- Setoran pengembalian belanja pada Biro Mental Setda	438.000,00
- Setoran pengembalian belanja pada Biro Administrasi dan Pemerintahan Setda	23.600.000,00
- Setoran pengembalian belanja pada Biro PIWP Setda	1.000.000,00
	3.364.052.328,09

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp29.330.915,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah terdapat pada :

1. Dinas Perhubungan sebesar Rp4.580.000,00.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp17.121.915,00.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp759.000,00.
4. Dinas Kebudayaa sebesar Rp4.640.000,00.
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp2.050.000,00.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp180.000,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp395.447.117,00 merupakan kelebihan Belanja Barang Jasa yang disetor ke rekening Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp568.136,00
2. Dinas Pariwisata sebesar Rp8.825.943,00
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp7.723.936,00
4. Dinas Kebudayaan sebesar Rp378.329.102,00

Selain Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp395.447.117,00 tersebut di atas, terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan berupa pajak belum disetor sebesar Rp25.265.413,00.

Kas di BLUD sebesar Rp47.873.876.325,47 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Latihan Pendidikan dan Teknik, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon, dan SMKN 3 Wonosari dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 183
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**RS Grhasia, Dinas Kesehatan** Saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.608.221.146,85 Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp11.725.927,00 dan pendapatan yang disetor bulan Januari 2023 sebesar Rp7.731.817,00.	14.627.678.890,85
2	**RS Paru Respira, Dinas Kesehatan** Saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.245.221.704,00 Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp22.778.903,00 dan pendapatan yang disetor bulan Januari 2023 sebesar Rp1.275.448,00	19.269.276.055,00
3.	**Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kesehatan** Saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.900.059.160,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp1.944.270,00	3.902.003.430,00
5.	**Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan** Saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.017.235.198,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp8.122.869,00	7.025.358.067,62
6.	**BLPT, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga** Saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.736.615.412,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp3.356.534,00	2.739.971.946,00
7.	**SMKN 6 Yogyakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga** Saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp217.911.467,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp84.600,00	217.996.067,00
8.	**SMKN 1 Sewon, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga** Saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.500.414,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp15.998,00	77.516.412,00
9.	**SMKN 3 Wonosari, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**	14.075.457,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.058.746,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2022 sebesar Rp16.711,00A	
	Jumlah	**47.873.876.325,47**

Kas Dana BOS sebesar Rp2.144.537.546,00 merupakan sisa dana BOS di rekening sekolah yang terdiri dari sisa BOS Reguler sebesar Rp2.047.948.086,00 dan sisa BOS Kinerja sebesar Rp96.589.460,00.

Kas Lainnya sebesar Rp19.662.925.839,94 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM, terdiri dari Uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp764.853.540,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.433.032.828,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.465.039.471,18.

BAB 6
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Pelaksanaan Dana Keistimewaan

Pelaksanaan Dana Keistimewaan dialokasikan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Pengalokasian dan penyalurannya Dana Keistimewaan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Melalui Peraturan Gubernur Nomor Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan, dengan maksud sebagai haluan dan pedoman pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan pokok program keistimewaan sesuai dengan tujuan keistimewaan, sedangkan tujuannya adalah memberikan Haluan dan pedoman bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan keistimewaan yang disepakati Bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku

pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Arah kebijakan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 adalah:

1) meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
2) memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana; serta
3) mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

6.2 Informasi Non Keuangan Lainnya

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Serta ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui 5 (lima) bentuk pemanfaatan, yakni : (1). Sewa, (2) Pinjam Pakai, (3) Kerjasa Sama Pemanfaatan, (4). Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan (5). Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Pemerintah Daerah Daearah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) bentuk pemanfaatan barang milik daerah, yakni sewa, pinjam pakai dan bangun guna serah. Selain menjadi obyek pemanfaatan, barang milik daerah juga dioptimalkan melalui mekanisme retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan pemanfaatan BMD melalui mekanisme pemanfaatan sejenis Bangun Serah Guna terhadap BMD Pemerintah Daerah DIY Di Jalan Malioboro 52-28 Yogyakarta. Pemerintah Daerah DIY melaksanakan Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53, beserta seluruh Adendumnya Antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Yogya Indah Sejahtera Dalam Pembangunan dan Pengelolaan “Malioboro Hotel” di Jalan Malioboro 52-28 Yogyakarta dengan Jangka waktu selama 30 Tahun yaitu dari 12 September 1992 s.d. 12 September 2022.

Pada Tahun 2022 sebagai tahun terakhir pelaksanaan perjanjian tersebut, Pemerintah Daerah DIY memperoleh hasil dari pembayaran kontribusi tetap sebesar Rp. 833.000.000,00.

Selanjutnya di tahun 2022, pada 12 September dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53, beserta seluruh Adendumnya Antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Yogya Indah Sejahtera Dalam Pembangunan dan Pengelolaan “Malioboro Hotel” di Jalan Malioboro 52-28 Yogyakarta.

Sesuai Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53, beserta seluruh Adendumnya maka Setelah jangka waktu kerja sama habis maka seluruh tanah HGB dan bangunan Malioboro Hotel beserta fasilitasnya menjadi milik Pemda Prop. DIY.

Pada Tanggal 12 September 2022 dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Hasil Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Yogya Indah Sejahtera Dalam Pembangunan dan Pengelolaan 'Malioboro Hotel' di Jalan Malioboro Yogyakarta oleh Gubernur DIY selaku wakil Pemerintah Daerah DIY dan Direktur Utama PT. Yogya Indah Sejahtera (Liang Margaret) dengan total nilai mencapai Rp 64.341.109.000,00.

Sejak tangga 13 September 2022, barang milik daerah milik Pemerintah DIY berupa hotel dan mall di Jalan Malioboro 52-58 Yogyakarta dilakukan sewa oleh PT. SETIA MATARAM TRITUNGGAL dengan nilai sewa Rp. 7.650.000.000,00 untuk jangka waktu sewa 13 September 2022 sampai dengan 12 September 2023.

b. Tindak lanjut atas pemanfaatan aset bermasalah

Berdasarkan Surat KPK RI Nomor B/7163/KSP.00/10-16/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Percepatan Pembenahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Para Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, KPK mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya KPK dalam memerankan fungsi trigger mechanism adalah mendorong pembenahan pengelolaan BMD di seluruh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah DIY diminta untuk melakukan percepatan pembenahan pengelolaan BMD dengan mengirimkan data Aset Tanah Bermasalah kepada KPK. Dalam menindaklanjuti surat dari KPK tersebut Pemda DIY telah mengirimkan secara berkala perkembangan Data Aset Tanah bermasalah ke Korwil V KPK . Berdasarkan permintaan data tindak lanjut perkembangan konflik aset tanah bermasalah dan dalam skema Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK melalui Monitoring Centre for Prefention (MCP) Tahun 2022 dapat kami sajikan perkembangan penyelesaian permasalahan Aset Tanah Bermasalah Pemda DIY sebagai berikut:

PERKEMBANGAN KONFLIK ASET DENGAN SWASTA/PERORANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Nama Aset	Nama Pihak Swasta/Perorangan	Permasalahan	Progress
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan 5.104 m^2 Rp1.000.000,00	Warga RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta	Perolehan tanah berasal dari P3D Kanwil Kesehatan, diatas Tanah tersebut terdapat rumah dinas yang dahulu dihuni oleh bapak Sudirman dan di sekitarnya terdapat banyak pemukiman warga. Mayoritas yang menguasai tanah eks. Prambusia adalah orang mantan pegawai Kanwil Kementerian Kesehatan eks prambusia. Saat ini ada beberapa yang sudah berpindah ke perumahan ngipik namun mereka juga masih memanfaatkan dan menguasai tanah di eks prambusia tersebut untuk	Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan ketua RW 01 dan RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan. Ada sekitar 23 rumah dan 29 kepala keluarga dan kurang lebih 87 orang penduduk yang berada dilingkungan tersebut. Telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Sudah dilakukan proses penilaian oleh appraisal untuk nantinya dilakukan pemanfaatan sewa tanah. Dengan Adanya Covid -19 maka action pelaksanaannya tertunda karena belum berani mengadakan rapat tatap muka dengan warga secara langsung. Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan ketua RW 01 dan RT 04 Dipowinatan,

No.	Nama Aset	Nama Pihak Swasta/Perorangan	Permasalahan	Progress
			disewakan sebagai kos-kosan atau kontrakan.	Keparakan, Mergangsan. Ada sekitar 23 rumah dan 29 kepala keluarga dan kurang lebih 87 orang penduduk yang berada dilingkungan tersebut. Telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta; sudah dilakukan proses penilaian oleh appraisal untuk nantinya dilakukan pemanfaatan sewa tanah. Pada Tanggal 4 Maret 2021, BPKA telah mengundang kepala RW, kepala RT, perwakilan warga (3 Orang) dalam rangka sosialisasi pemanfaatan tanah. Hasilnya adalah waraga mengaku menempati untuk hunian diatas tanah Pemda DIY sesuai sertifikat nomor SHP 00026/keparakan tangal 6 juni 2008 yang terletak di Dipowinatan Yogyakarta. Pihak penghuni bersedia menyewa asalkan tarif sewa terjangkau, tidak digusur oleh Pemda DIY. Pihak Kepala RW akan mengadakan pertemuan dengan warga dan akan mengumpulkan SPPT PBB untuk mengetahui keluasan tanah yang digunakan masing-masing. Pada tanggal 12 April 2021 telah berkoordinasi dengan hasil bahwa warga masyarakat RT 04 mengaku bahwa tanah yang ditinggali adalah milik PEmda DIY dan pada intinya setuju apabila harus menyewa namun dengan tarif yang tidak memberatkan warga. 'Terkait dengan ukuran tanah yang dihuni, warga menyepakati akan menggunakan keluasan sesuai dengan yang tertera dalam SPPT PBB, Adapun fotocopy SPPT PBB dan data warga yang menghuni akan disiapkan oleh Ketua RW 01, Ketua RT 04, dan perwakilan warga yang nantinya akan disampaikan kepada PEMDA DIY. Telah dilakukan beberapa kali pertemuan, yang terakhir pada tanggal 18 Juni 2021 pertemuan dengan Ketua RW. 01 dan Perwakilan warga RT. 04 untuk membahas mengenai harga sewa dan draf perjanjian pemanfaatan tanah di Dipowinatan. Setelah pertemuan tersebut, Ketua RW.01 dan perwakilan RT. 04 akan menyampaikan kepada warga RT. 04 untuk menjaring aspirasi khususnya mengenai draft perjanjian pemanfaatan. Setelah adanya aspirasi warga, Ketua RW. 01 dan perwakilan warga RT. 04 akan menyampaikan kepada Pemda DIY. Pada tanggal 25 Juni 2021 telah dilakukan rapat koordinasi dengan Biro Hukum dan Inspektorat DIY untuk membahas draft perjanjian pemanfaatan dengan hasil penambahan/perubahan pada beberapa ayatnya. Dari hasil rapat koordinasi dengan Kejaksaan DIY pada tanggal 6 juli 2021, setelah PPKM Darurat level 4 selesai agar BPKA DIY segera melaksanakan sosialisasi dengan warga Dipowinatan terkait dengan besaran tarif sewa dan isi Perjanjian Sewa.

No.	Nama Aset	Nama Pihak Swasta/Perorangan	Permasalahan	Progress
				Pemerintah Daerah DIY tetap secara kontinyu melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga, meskipun pada pertemuan terakhir yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2022 belum tercapai adanya kesepakatan. Bahwa warga menginginkan diberikan jaminan kepastian secara tertulis yang dituangkan dalam perjanjian untuk dapat memanfaatkan lahan tersebut secara menerus tanpa dibatasi jangka waktu.

BAB 7
PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 30 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran di Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan ini disusun pertama kali berdasarkan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan yang telah dilaksanakan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dibangun oleh Kementrian Dalam Negeri, sedangkan dalam penyajian aset tetap dan persediaan di neraca sumber datanya berasal dari Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X